Kasih Purwantini, S.Kom , M.Si

# Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital:

## Konsep, Standar, Teknologi, dan Keberlanjutan



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



Kasih Purwantini, S.Kom , M.Si

# Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital:

## Konsep, Standar, Teknologi, dan Keberlanjutan

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-67-3 (PDF)
9 786347 695673

**Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital:**
**Konsep, Standar, Teknologi, dan Keberlanjutan**

**Penulis :**
Kasih Purwantini, S.Kom , M.Si

**ISBN : 978-634-7695-67-3 (PDF)**

**Editor :**
Vivi Kumalasari Subroto, S.E, M.Si. Ak.

**Penyunting :**
Siti Kholifah, S.E, M.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :**
Irdha Yunianto, S.Ds., M.Kom

**Penebit** :
Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

**Redaksi :**
Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

**Distributor Tunggal :**
**Universitas STEKOM**
Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul ***Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital*** dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi akuntansi, serta pembaca yang ingin memahami perkembangan akuntansi keuangan di tengah transformasi digital.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam lingkungan bisnis, termasuk dalam proses pencatatan, pengolahan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi, *Enterprise Resource Planning* (ERP), otomatisasi proses bisnis, komputasi awan (*cloud computing*), serta analisis data telah mendorong praktik akuntansi untuk berkembang dari kegiatan administratif yang berorientasi pada pencatatan transaksi menjadi bagian strategis dalam penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut, pemahaman terhadap akuntansi keuangan tidak lagi cukup hanya didasarkan pada prosedur pencatatan, tetapi juga perlu mencakup landasan konseptual, kepatuhan terhadap standar, penguasaan teknologi, serta kemampuan menjaga kualitas dan keandalan informasi keuangan.

Buku *Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital* hadir untuk memberikan pemahaman yang terstruktur mengenai konsep dasar, prinsip, standar, proses, dan praktik akuntansi keuangan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi bisnis kontemporer. Materi dalam buku ini disusun secara bertahap agar pembaca dapat memahami keterkaitan antara landasan teoretis akuntansi, penerapan standar, pemrosesan transaksi, penyajian laporan keuangan, serta pengelolaan kas dan pengendalian internal.

Buku ini terdiri atas enam bab utama. Bab 1, Hakikat dan Perkembangan Akuntansi Keuangan, membahas definisi dan tujuan akuntansi keuangan, perjalanan sejarahnya dari metode pencatatan konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital, perubahan lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan dinamis, serta peran dan tantangan profesi akuntan pada abad ke-21. Pembahasan ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis memengaruhi perkembangan praktik akuntansi.

Bab 2, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, menguraikan dasar pemikiran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, asumsi dasar akuntansi, prinsip pengakuan dan pengukuran, materialitas, asumsi kelangsungan usaha (*going concern*), serta basis akrual. Bab ini membantu pembaca memahami alasan konseptual di balik penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan pentingnya menghasilkan informasi keuangan yang relevan serta merepresentasikan kondisi ekonomi secara tepat.

Bab 3, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan Internasional, membahas kerangka Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), serta penerapan standar

bagi usaha mikro, kecil, dan menengah maupun entitas privat. Bab ini juga mengulas tantangan kultural, teknis, dan infrastruktur dalam implementasi IFRS. Melalui pembahasan tersebut, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya standar akuntansi dalam mendukung konsistensi, keterbandingan, dan kredibilitas pelaporan keuangan.

Bab 4, Siklus Akuntansi dari Pencatatan hingga Pelaporan Berbasis ERP, mengkaji perubahan proses akuntansi dari pendekatan tradisional menuju sistem yang terintegrasi secara digital. Pembahasan mencakup dokumen sumber digital dan validasi data, otomatisasi jurnal dan pemindahbukuan ke buku besar, pengendalian validitas neraca saldo, serta proses penutupan buku. Bab ini menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pemrosesan transaksi, tetapi tetap memerlukan prosedur validasi, pengawasan, dan pengendalian yang memadai.

Bab 5, Laporan Keuangan Utama dan Pengungkapan (*Disclosures*), menjelaskan fungsi pelaporan keuangan sebagai media komunikasi ekonomi, struktur dan penyajian laporan keuangan, peran catatan atas laporan keuangan dalam mendukung transparansi, pengungkapan wajib dan sukarela, serta perlakuan terhadap peristiwa setelah periode pelaporan. Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh angka yang disajikan, tetapi juga oleh kejelasan penjelasan, kecukupan pengungkapan, dan relevansi informasi bagi para pengguna.

Bab 6, Kas dan Pengendalian Internal, menempatkan kas sebagai unsur penting dalam pengelolaan likuiditas perusahaan dan membahas rekonsiliasi bank sebagai mekanisme untuk menyelaraskan serta menjelaskan perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank. Bab ini selanjutnya menguraikan implementasi kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam pengendalian internal kontemporer. Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan kas yang cermat, pengawasan transaksi, pengendalian akses, serta evaluasi efektivitas pengendalian untuk mendukung keandalan informasi keuangan dan mengurangi risiko penyimpangan.

Secara keseluruhan, keenam bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang saling melengkapi, mulai dari fondasi konseptual hingga penerapan akuntansi keuangan dalam lingkungan digital. Penyajian materi diharapkan dapat membantu pembaca melihat akuntansi bukan semata-mata sebagai proses pencatatan transaksi, melainkan sebagai sistem informasi yang mendukung akuntabilitas, transparansi, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, penguasaan akuntansi keuangan modern perlu disertai kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, pemahaman terhadap standar yang berlaku, serta komitmen terhadap etika dan profesionalisme.

Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu akuntansi dan teknologi digital berlangsung secara dinamis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pembelajaran yang terus diperkaya melalui kajian ilmiah, pengalaman praktis, pembaruan standar, dan perkembangan teknologi terbaru. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan buku ini pada masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku *Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital* dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran akuntansi keuangan, serta menjadi referensi yang berguna bagi praktisi dan pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan serta pelaporan keuangan. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan profesionalisme pembaca dalam menghadapi tantangan akuntansi di era digital.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya untuk kemajuan bersama.

*Selamat dan Semangat Membaca….*

Semarang, Oktober 2026
Penulis

Kasih Purwantini, S.Kom, M.Si

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**DAFTAR ISI** ..... **v**
**BAB 1 HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN** ..... **1**
1.1 Definisi Akuntansi Keuangan: Redefinisi Di Era Informasi ..... 1
1.2 Tujuan Akuntansi Keuangan Sebagai Penyediaan Nilai Strategis ..... 8
1.3 Sejarah Perkembangan Akuntansi: Dari Catatan Dinding Hingga *Cloud* ..... 18
1.4 Hiperkonektivitas Dan Volatilitas Lingkungan Bisnis Modern ..... 33
1.5 Peran Akuntan Dalam Era Digital ..... 41
1.6 Tantangan Profesi Akuntan Abad Ke-21 ..... 51
**BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN** ..... **59**
2.1 Kerangka Konseptual Konstitusi Keuangan ..... 59
2.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan ..... 65
2.3 Pilar Aksioma Pelaporan Dasar Akuntansi ..... 75
2.4 Prinsip Pengakuan Dan Pengukuran ..... 80
2.5 Materialitas Batasan Ambang Pengungkapan ..... 90
2.6 *Going Concern* Sebagai Asumsi Kelangsungan Hidup Abadi ..... 99
2.7 Basis Akrual Dan Substansi Ekonomi Di Atas Arus Kas ..... 110
**BAB 3 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA DAN INTERNASIONAL** ..... **122**
3.1 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ..... 122
3.2 Psak Terbaru: Respons Dinamis Terhadap Kompleksitas Bisnis Modern ..... 131
3.3 IFRS Dan Harmonisasi Global ..... 142
3.4 Sak EMKM Sebagai Katalisator Akuntabilitas Sektor Usaha Mikro ..... 153
3.5 Sak Entitas Privat Sebagai Solusi Tengah Korporasi Tertutup ..... 165
3.6 Hambatan Kultural, Teknis, Dan Infrastruktur Implementasi IFRS ..... 182
**BAB 4 SIKLUS AKUNTANSI DARI PENCATATAN HINGGA PELAPORAN BERBASIS ERP** ..... **191**
4.1 Siklus Akuntansi Tradisional Vs Modern ..... 191
4.2 Dokumen Sumber Digital Dan Validasi Data ..... 195
4.3 Otomatisasi Jurnal Dan Posting Buku Besar ..... 205
4.4 Pengendalian Validitas Data Neraca Saldo ..... 216
4.5 Proses Penutupan Buku (*Closing Process*) ..... 225
**BAB 5 LAPORAN KEUANGAN UTAMA DAN PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURES*)** ..... **238**
5.1 Pelaporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi Ekonomi ..... 238
5.2 Arsitektur Laporan Keuangan Dan Perkembangan Penyajian Kontemporer ..... 249
5.3 Anatomi Catatan Atas Laporan Keuangan Dan Transparansi Akuntansi ..... 259
5.4 Mandatory Dan Voluntary Disclosure ..... 267
5.5 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan ..... 277
**BAB 6 KAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL** ..... **285**
6.1 Perspektif Ekonomi Atas Likuiditas ..... 285
6.2 Sinkronisasi Dualitas Catatan Dalam Rekonsiliasi Bank ..... 293
6.3 Implementasi Kerangka Coso Kontemporer ..... 302
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **315**

# BAB 1
# HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN

## 1.1 DEFINISI AKUNTANSI KEUANGAN: REDEFINISI DI ERA INFORMASI

Akuntansi keuangan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang berfokus pada proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi ekonomi suatu entitas ke dalam laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam memahami kondisi perusahaan dan mengambil keputusan ekonomi.

Dalam praktik konvensional, akuntansi keuangan sering dipahami sebagai kegiatan pencatatan transaksi yang menghasilkan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Akan tetapi, pemahaman tersebut belum sepenuhnya menggambarkan ruang lingkup akuntansi keuangan modern. Perkembangan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, dan kebutuhan pengguna terhadap informasi yang semakin cepat telah memperluas cara data keuangan dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disajikan.

Akuntansi keuangan modern tidak hanya berorientasi pada pencatatan transaksi yang telah terjadi, tetapi juga menekankan penyediaan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, teknologi digital berperan sebagai sarana yang memungkinkan proses pengolahan informasi keuangan berlangsung secara lebih terintegrasi.

Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Kerangka konseptual ini juga menjadi landasan dalam memahami karakteristik informasi keuangan yang berguna.

Dengan demikian, akuntansi keuangan perlu dipahami sebagai suatu sistem informasi yang menghubungkan aktivitas ekonomi perusahaan dengan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Sistem ini tidak sekadar menghasilkan angka-angka keuangan, tetapi juga menyajikan gambaran terstruktur mengenai bagaimana sumber daya perusahaan diperoleh, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

**Akuntansi Keuangan sebagai Sistem Informasi**

Dalam organisasi modern, akuntansi keuangan berfungsi sebagai sistem informasi yang mengubah data transaksi menjadi informasi yang bermakna bagi pengguna. Transaksi penjualan, pembelian persediaan, pembayaran gaji, penerimaan pinjaman, pembelian aset, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya menghasilkan data yang perlu dicatat serta diproses secara sistematis.

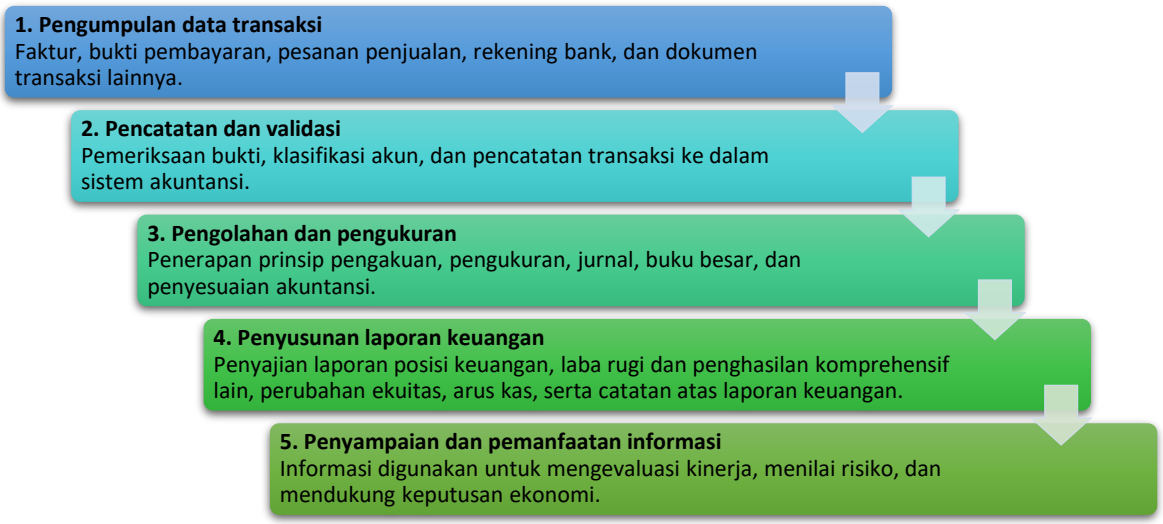


**Gambar 1.1.** Siklus pengolahan informasi dalam akuntansi keuangan.

**Karakteristik Informasi Akuntansi Keuangan**

Informasi keuangan yang baik harus memenuhi karakteristik yang menjadikannya berguna bagi pengambil keputusan. Dalam kerangka konseptual IFRS, dua karakteristik fundamental informasi keuangan yang berguna adalah relevansi dan representasi tepat (*faithful representation*). Karakteristik tersebut dilengkapi oleh karakteristik peningkat berupa keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman.

1. Relevansi (*Relevance*)
   Informasi dikatakan relevan apabila mampu membuat perbedaan dalam keputusan pengguna. Informasi mengenai penurunan penjualan, misalnya, dapat membantu investor menilai prospek perusahaan dan membantu manajemen mengevaluasi strategi pemasaran. Informasi memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya.
2. Representasi tepat (*Faithful Representation*)
   Informasi harus menggambarkan substansi ekonomi yang hendak disajikan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan dalam proses penyusunannya. Representasi tepat tidak selalu berarti setiap angka bebas dari estimasi, karena beberapa pos keuangan memang membutuhkan penilaian dan perkiraan yang wajar.
3. Keterbandingan (*Comparability*)
   Informasi memungkinkan pengguna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perusahaan atau antara periode pelaporan. Penggunaan kebijakan akuntansi yang konsisten, disertai pengungkapan yang memadai, membantu proses perbandingan tersebut.
4. Keterverifikasian (*Verifiability*)
   Informasi dapat diuji oleh pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan independen untuk melihat apakah hasil pengukuran atau penyajiannya didukung oleh bukti yang memadai. Jejak audit digital, dokumen sumber, dan rekonsiliasi membantu proses verifikasi.

5. Ketepatwaktuan (*Timeliness*)
   Informasi harus tersedia cukup dini agar dapat digunakan ketika keputusan dibuat. Sistem yang terintegrasi dapat mempercepat penutupan buku dan penyediaan laporan, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan ketelitian.
6. Keterpahaman (*Understandability*)
   Informasi harus disajikan secara jelas, terstruktur, dan ringkas tanpa menghilangkan informasi material. Tabel, grafik, penjelasan kebijakan akuntansi, dan catatan atas laporan keuangan dapat membantu pengguna memahami isi laporan.

Dalam era digital, teknologi membantu meningkatkan pemenuhan karakteristik tersebut melalui validasi otomatis, pemrosesan data yang terintegrasi, penyediaan laporan lebih cepat, dan penyajian informasi dalam berbagai bentuk. Meskipun demikian, teknologi bukan jaminan otomatis atas kualitas informasi. Data yang tidak akurat, algoritma yang keliru, atau pengendalian yang lemah tetap dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan.

**Redefinisi Akuntansi Keuangan di Era Informasi**

Istilah redefinisi dalam subbab ini tidak berarti bahwa tujuan fundamental akuntansi keuangan telah berubah sepenuhnya. Yang mengalami perubahan terutama adalah cara informasi dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan disampaikan, serta kemampuan pengguna untuk memanfaatkan informasi tersebut.

Dalam model konvensional, transaksi umumnya diproses melalui dokumen fisik, pencatatan jurnal, buku besar, dan penyusunan laporan secara periodik. Proses ini dapat berjalan dengan baik apabila prosedur dan pengendaliannya memadai, tetapi sering membutuhkan waktu ketika volume transaksi meningkat atau data berasal dari banyak unit kerja.

Di era informasi, proses tersebut semakin banyak didukung oleh aplikasi akuntansi, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (Enterprise Resource Planning/ERP), komputasi awan, analitik data, dan AI. Teknologi tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk mempercepat pemrosesan transaksi dan memperoleh informasi yang lebih terintegrasi.

Nurrahma, Fadilah, dan Aji (2026) mengidentifikasi AI, blockchain, big data, dan komputasi awan sebagai tema penting dalam perkembangan akuntansi digital. Kajian tersebut menunjukkan bahwa teknologi berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan keuangan. Namun, manfaat yang dihasilkan tetap perlu dinilai berdasarkan konteks penggunaan dan kualitas penerapannya.

**Tabel 1.1** Perubahan Pendekatan Konvensional dan Digital

| Dimensi | Pendekatan konvensional | Pendekatan digital |
|---|---|---|
| **Sumber data** | Banyak menggunakan dokumen fisik dan input manual | Dokumen elektronik, integrasi aplikasi, dan sumber data digital |
| **Pencatatan** | Banyak tahapan dilakukan secara manual | Sebagian pencatatan dapat diotomatisasi |
| **Pengolahan** | Bertumpu pada jurnal, buku besar, dan proses periodik | Dapat terintegrasi melalui sistem informasi akuntansi dan ERP |

| | | |
|---|---|---|
| **Waktu penyajian** | Umumnya berfokus pada periode pelaporan | Berpotensi lebih cepat dan mendekati waktu nyata |
| **Analisis** | Banyak menggunakan laporan historis dan analisis manual | Dapat dilengkapi analitik data dan model prediktif |
| **Penyimpanan** | Arsip fisik dan penyimpanan lokal | Basis data elektronik dan penyimpanan awan |
| **Pengendalian** | Dokumen, otorisasi, rekonsiliasi, dan pemeriksaan manual | Kontrol akses, validasi otomatis, log aktivitas, serta pemeriksaan manual |
| **Peran akuntan** | Pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan | Tetap mencakup fungsi tersebut, ditambah analisis, interpretasi, pengendalian sistem, dan komunikasi informasi |

Sumber: sintesis konseptual berdasarkan IFRS Foundation serta Hastharita et al. (2026) dan Nurrahma et al. (2026).

Perbandingan tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh perusahaan telah meninggalkan pendekatan konvensional. Banyak organisasi masih menggunakan kombinasi prosedur manual dan digital. Tingkat digitalisasi dipengaruhi oleh ukuran organisasi, jenis usaha, biaya implementasi, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kebutuhan pengendalian. Oleh karena itu, redefinisi akuntansi keuangan lebih tepat dipahami sebagai perluasan kapabilitas akuntansi melalui teknologi, dengan tetap mempertahankan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pertanggungjawaban yang berlaku.

**Peran Teknologi Digital dalam Akuntansi Keuangan Modern**

Transformasi digital dalam akuntansi keuangan didukung oleh beberapa teknologi yang memiliki fungsi berbeda. Pemahaman terhadap teknologi tersebut penting bagi mahasiswa S1 Akuntansi karena penggunaannya tidak hanya berkaitan dengan pengoperasian perangkat lunak, tetapi juga memengaruhi pengendalian internal, kualitas informasi, dan proses pengambilan keputusan.

1. Komputasi Awan (*Cloud Computing*)

   Komputasi awan memungkinkan aplikasi dan data akuntansi diakses melalui jaringan internet sesuai hak akses pengguna. Teknologi ini mendukung kolaborasi antardivisi, akses data dari lokasi berbeda, serta pengelolaan kapasitas penyimpanan yang lebih fleksibel.

   Sebagai contoh, perusahaan dengan beberapa cabang dapat menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud agar transaksi dari setiap cabang masuk ke basis data terintegrasi. Kantor pusat kemudian dapat memantau penjualan, biaya, piutang, dan posisi kas tanpa harus menunggu seluruh dokumen fisik dikirimkan.

   Namun, implementasinya memerlukan pengaturan hak akses, pencadangan data, pengamanan informasi, dan pengelolaan ketergantungan pada penyedia layanan.

2. Analitik Data (*Big Data Analytics*)

Analitik data digunakan untuk mengolah kumpulan data dalam jumlah besar guna mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang tidak selalu terlihat melalui pemeriksaan laporan secara manual.

Dalam akuntansi keuangan, analitik dapat membantu mengidentifikasi transaksi tidak biasa, menganalisis perubahan biaya, mengevaluasi pola pembayaran pelanggan, dan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan pencatatan.

Sebagai contoh, perusahaan dapat menganalisis data piutang selama beberapa tahun untuk mengetahui kelompok pelanggan yang cenderung terlambat membayar. Hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam pengelolaan piutang dan evaluasi risiko kredit.

3. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

   AI memungkinkan sistem menjalankan tugas tertentu yang membutuhkan pengenalan pola, klasifikasi, pemrosesan bahasa, atau pembuatan prediksi berdasarkan data.

   Dalam kegiatan akuntansi, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu membaca faktur, mengelompokkan transaksi, mendeteksi anomali, serta menghasilkan ringkasan informasi keuangan. Meskipun demikian, hasil AI tidak boleh langsung dianggap benar. Akuntan perlu memeriksa sumber data, kesesuaian perlakuan akuntansi, kemungkinan bias, dan kewajaran hasil. Keputusan yang memerlukan pertimbangan profesional tetap membutuhkan pengawasan manusia.

4. Otomatisasi Proses Robotik (*Robotic Process Automation/RPA*)

   RPA menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan rangkaian tugas berulang berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam akuntansi, RPA dapat membantu memindahkan data antaraplikasi, mencocokkan dokumen, melakukan rekonsiliasi awal, dan menyusun laporan rutin.

   Otomatisasi dapat mengurangi pekerjaan berulang, tetapi hanya efektif apabila proses telah terdefinisi dengan baik. Perubahan format dokumen, data yang tidak lengkap, atau aturan yang salah dapat menyebabkan kesalahan sistematis jika tidak terdeteksi.

5. Blockchain dan Buku Besar Terdistribusi

   Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital terdistribusi yang menyimpan catatan transaksi dalam struktur blok yang saling terhubung. Dalam kondisi penerapan tertentu, teknologi ini dapat mendukung keterlacakan transaksi dan memudahkan verifikasi catatan antarpartisipan.

   Dalam akuntansi, blockchain dapat dipertimbangkan untuk pencatatan transaksi antarorganisasi, pelacakan aset, dan proses verifikasi. Akan tetapi, blockchain tidak otomatis menjamin bahwa data yang dimasukkan benar. Pengendalian atas sumber data, hak akses, tata kelola, dan kesesuaian dengan standar akuntansi tetap diperlukan.

Kajian Hastharita et al. (2026) menghubungkan integrasi komputasi awan, analitik data, dan AI dengan pelaporan real-time, deteksi kecurangan, audit berkelanjutan, serta dukungan keputusan. Sementara itu, kajian Nurrahma et al. (2026) mengidentifikasi sejumlah teknologi digital yang semakin banyak dibahas dalam penelitian akuntansi. Kedua kajian tersebut dapat

menjadi landasan untuk menjelaskan bahwa transformasi digital berlangsung melalui kombinasi teknologi, bukan melalui satu perangkat yang berdiri sendiri.

**Perubahan Orientasi dari Pencatatan menuju Penyediaan Informasi Bernilai**

Salah satu perubahan penting dalam akuntansi keuangan modern adalah meningkatnya kemampuan akuntan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Pencatatan transaksi tetap menjadi fondasi, tetapi data yang telah tercatat juga dapat digunakan untuk menjelaskan kinerja, mengidentifikasi risiko, dan membantu manajemen memahami kondisi ekonomi perusahaan.

*Perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui tiga orientasi berikut.*

Pertama, orientasi pencatatan. Fokus utama adalah memastikan transaksi dicatat secara sistematis, didukung bukti yang memadai, dan diklasifikasikan ke dalam akun yang sesuai. Tahap ini merupakan dasar bagi seluruh proses akuntansi berikutnya.

Kedua, orientasi pelaporan dan kepatuhan. Data yang telah diproses digunakan untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, ketepatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kelengkapan informasi menjadi perhatian utama.

Ketiga, orientasi analisis dan dukungan keputusan. Informasi yang tersedia dianalisis untuk membantu pengguna memahami tren pendapatan, struktur biaya, arus kas, likuiditas, profitabilitas, serta risiko keuangan. Analisis tersebut dapat dilengkapi dengan teknologi digital untuk mengolah data secara lebih cepat dan mendalam.

Ketiga orientasi ini tidak saling menggantikan. Pencatatan yang benar diperlukan agar laporan dapat diandalkan, sedangkan pelaporan yang baik menyediakan dasar bagi analisis. Teknologi digital memperkuat hubungan antara ketiganya dengan mempercepat pemrosesan data dan memperluas kemampuan analitis.

Sebagai ilustrasi, perusahaan yang hanya menyajikan laporan penjualan bulanan dapat mengetahui total pendapatan yang telah diperoleh. Apabila data tersebut terintegrasi dengan informasi produk, wilayah, pelanggan, dan waktu transaksi, perusahaan dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui perubahan pola penjualan. Informasi tambahan tersebut dapat mendukung evaluasi strategi bisnis, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar.

Penting pula dibedakan antara pelaporan keuangan bertujuan umum dan informasi manajemen internal. Pelaporan keuangan bertujuan umum terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal, seperti investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Sebaliknya, laporan manajemen dapat dirancang lebih spesifik untuk kebutuhan operasional, penganggaran, perencanaan, dan pengendalian internal. Keduanya dapat memanfaatkan sumber data dan teknologi yang sama, tetapi tujuan serta bentuk informasinya tidak selalu identik.

**Contoh Penerapan Akuntansi Keuangan Modern pada Perusahaan Dagang**

Untuk memahami penerapan konsep di atas, perhatikan ilustrasi perusahaan dagang berikut.

PT Digital Niaga merupakan perusahaan yang menjual perangkat elektronik melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Perusahaan menerima pesanan melalui beberapa saluran penjualan, melakukan pembayaran kepada pemasok, mengelola persediaan di gudang, serta memberikan fasilitas pembayaran kredit kepada pelanggan tertentu.

Dalam sistem konvensional yang belum terintegrasi, bagian penjualan dapat mencatat transaksi melalui aplikasi tersendiri, bagian gudang menggunakan catatan persediaan yang berbeda, dan bagian akuntansi memasukkan kembali data tersebut ke dalam perangkat lunak akuntansi. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan rekonsiliasi dan berpotensi menimbulkan perbedaan data.

Dalam pendekatan digital, perusahaan dapat mengintegrasikan aplikasi penjualan, persediaan, pembayaran, dan akuntansi melalui ERP atau sistem informasi lain yang sesuai. Ketika transaksi penjualan terjadi, sistem dapat meneruskan data yang relevan ke bagian persediaan dan akuntansi berdasarkan konfigurasi serta aturan yang ditetapkan.

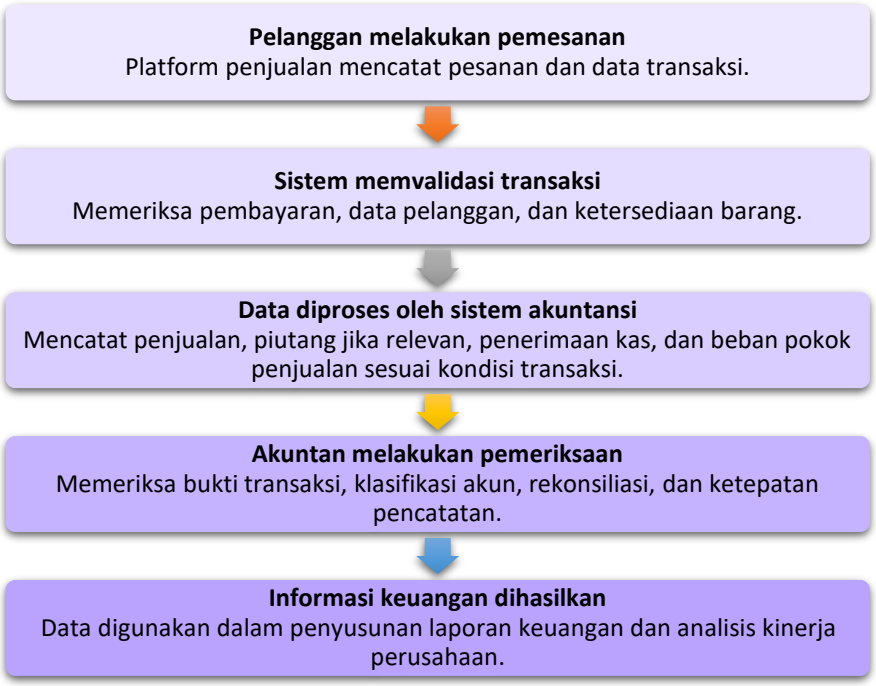


**Gambar 1.2** Ilustrasi integrasi transaksi penjualan dengan sistem akuntansi digital.

### Implikasi Transformasi Digital terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Transformasi digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas informasi keuangan. Dampaknya perlu dipahami secara seimbang agar mahasiswa tidak menganggap teknologi sebagai solusi otomatis bagi seluruh persoalan akuntansi.

**Tabel 1.2** Implikasi Transformasi Informasi keuangan

| Aspek | Potensi manfaat | Risiko yang perlu dikendalikan |
|---|---|---|
| **Akurasi** | Validasi otomatis dan pengurangan input berulang | Kesalahan konfigurasi atau data awal yang salah |

| | | |
|---|---|---|
| **Ketepatwaktuan** | Pemrosesan transaksi dan penyajian laporan lebih cepat | Laporan cepat tetapi belum direkonsiliasi |
| **Transparansi** | Jejak aktivitas dan dokumentasi elektronik | Perubahan data tanpa otorisasi atau pengawasan yang memadai |
| **Analisis** | Identifikasi tren dan anomali melalui analitik | Kesimpulan yang keliru akibat model atau data yang tidak sesuai |
| **Aksesibilitas** | Kolaborasi melalui sistem terintegrasi dan cloud | Kebocoran data dan penyalahgunaan hak akses |
| **Efisiensi** | Pengurangan pekerjaan berulang | Ketergantungan berlebihan pada sistem dan penyedia teknologi |

Salah satu implikasi pentingnya adalah kebutuhan terhadap tata kelola data yang baik. Perusahaan harus menentukan siapa yang berhak memasukkan, mengubah, menyetujui, dan melihat data keuangan. Selain itu, perusahaan memerlukan pencadangan data, pengujian sistem, prosedur pemulihan, dokumentasi perubahan, dan pemeriksaan berkala.

Dalam penggunaan AI, perhatian tambahan diperlukan terhadap keterjelasan hasil, kualitas data pelatihan, kerahasiaan informasi, dan kemungkinan keluaran yang tidak akurat. AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat bantu untuk memperkuat pekerjaan akuntan, bukan sebagai pengganti otomatis atas pertanggungjawaban profesional. Hastharita et al. (2026) menekankan bahwa teknologi digital dapat mendukung analisis, pelaporan, deteksi kecurangan, dan audit berkelanjutan. Akan tetapi, manfaat tersebut perlu dibaca sebagai potensi yang bergantung pada desain dan implementasi sistem, bukan sebagai jaminan bahwa semua penerapan teknologi akan menghasilkan laporan yang lebih berkualitas.

## 1.2 TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN SEBAGAI PENYEDIAAN NILAI STRATEGIS

Akuntansi keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam menyediakan informasi ekonomi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Dalam praktik bisnis modern, informasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan historis mengenai transaksi yang telah terjadi, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, menilai risiko, memahami kemampuan menghasilkan arus kas, serta mempertimbangkan prospek ekonomi suatu entitas.

Tujuan akuntansi keuangan berkaitan erat dengan tujuan pelaporan keuangan. Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Keputusan tersebut dapat mencakup pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan utang, pemberian atau penyelesaian pinjaman, serta penggunaan hak sebagai pemegang saham.

Berdasarkan konsep tersebut, tujuan akuntansi keuangan tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan yang memenuhi ketentuan formal. Akuntansi keuangan juga

berperan dalam menyediakan informasi yang membantu pengguna memahami kondisi ekonomi perusahaan secara lebih objektif dan sistematis.

Dalam konteks era digital, tujuan tersebut semakin berkaitan dengan kemampuan organisasi mengelola data dalam jumlah besar, mengintegrasikan berbagai sumber informasi, dan menyediakan laporan secara lebih cepat. Teknologi seperti cloud computing, big data analytics, dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dapat mendukung pengolahan informasi tersebut. Namun, penggunaan teknologi tetap harus diarahkan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya, bukan sekadar mempercepat proses pelaporan.

Dengan demikian, nilai strategis akuntansi keuangan terletak pada kemampuannya menyediakan informasi yang berguna untuk memahami kinerja, menilai risiko, mengevaluasi kondisi keuangan, dan mendukung keputusan ekonomi. Nilai strategis tersebut muncul ketika informasi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang tepat, disajikan secara jelas, dan digunakan sesuai kebutuhan pengambilan keputusan.

**Perbedaan Tujuan Akuntansi Keuangan Konvensional dan Modern**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan menghasilkan dan menggunakan informasi keuangan. Perubahan ini tidak berarti bahwa tujuan dasar pelaporan keuangan telah digantikan oleh tujuan baru. Sebaliknya, teknologi memperluas kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya.

Dalam pendekatan konvensional, kegiatan akuntansi keuangan banyak berfokus pada pencatatan transaksi, penyusunan laporan periodik, dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya perusahaan. Dalam pendekatan modern, seluruh kegiatan tersebut tetap diperlukan, tetapi didukung oleh sistem digital yang memungkinkan data diolah lebih cepat dan diintegrasikan dengan informasi dari berbagai bagian organisasi.

| Aspek | Pendekatan konvensional | Pendekatan modern di era digital |
|---|---|---|
| Fokus utama | Pencatatan dan pelaporan transaksi | Pencatatan, pelaporan, integrasi data, dan analisis informasi |
| Waktu penyajian | Umumnya berdasarkan periode pelaporan | Berpotensi lebih cepat melalui pemrosesan digital |
| Sumber informasi | Dokumen transaksi dan catatan akuntansi | Dokumen digital, sistem akuntansi, ERP, dan sumber data terintegrasi |
| Analisis | Banyak bertumpu pada laporan historis | Dapat dilengkapi analitik data dan pemodelan prediktif |
| Dukungan keputusan | Menjelaskan kondisi dan kinerja keuangan | Menyediakan dasar yang lebih luas untuk evaluasi kondisi dan risiko |
| Pengendalian | Dokumen, otorisasi, rekonsiliasi, dan pemeriksaan | Pengendalian konvensional yang dilengkapi kontrol akses, log digital, dan validasi otomatis |

*Sumber:* sintesis konseptual berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan IFRS dan kajian transformasi digital sistem informasi akuntansi oleh Hastharita et al. (2026).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi keuangan modern memiliki potensi untuk mempercepat ketersediaan informasi dan memperluas analisis. Meskipun demikian, informasi yang tersedia lebih cepat tidak selalu lebih baik. Kualitas informasi tetap

bergantung pada kelengkapan data, ketepatan pengukuran, kesesuaian standar akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal.

Sebagai contoh, laporan penjualan yang dihasilkan secara otomatis setiap jam dapat membantu perusahaan memantau aktivitas bisnis. Akan tetapi, laporan tersebut belum tentu dapat langsung digunakan sebagai laporan keuangan formal apabila transaksi belum direkonsiliasi, pengembalian barang belum diperhitungkan, atau pengakuan pendapatan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Oleh karena itu, tujuan akuntansi keuangan modern perlu dipahami sebagai penguatan fungsi informasi dan pertanggungjawaban melalui pemanfaatan teknologi, bukan sebagai penggantian prinsip akuntansi dengan otomatisasi.

**Tujuan Utama Akuntansi Keuangan**

Tujuan akuntansi keuangan dapat dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang saling berkaitan. Setiap aspek membantu pengguna memperoleh pemahaman mengenai kondisi perusahaan, kinerja operasional, kemampuan memenuhi kewajiban, dan prospek arus kas.

- **Menyediakan Informasi Mengenai Posisi Keuangan**

  Tujuan pertama adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Informasi ini umumnya disajikan melalui laporan posisi keuangan atau neraca yang mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas.

  Aset menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan, liabilitas menunjukkan kewajiban perusahaan, sedangkan ekuitas menunjukkan kepentingan residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas.

  Informasi mengenai posisi keuangan membantu pengguna memahami struktur sumber daya perusahaan dan bagaimana sumber daya tersebut didanai. Investor dapat menggunakannya untuk menilai struktur modal dan komposisi aset, sedangkan kreditor dapat mempertimbangkannya dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

  Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki aset sebesar Rp5 miliar dan liabilitas sebesar Rp2 miliar memiliki ekuitas sebesar Rp3 miliar. Informasi tersebut memberikan gambaran awal mengenai struktur keuangan perusahaan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Penilaian lebih lanjut membutuhkan informasi mengenai likuiditas aset, jatuh tempo kewajiban, profitabilitas, dan arus kas.

  Dalam sistem akuntansi digital, informasi posisi keuangan dapat disusun melalui integrasi data kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, dan modal. Namun, perusahaan tetap harus memastikan bahwa saldo setiap akun telah diverifikasi dan penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan.

- **Menyediakan Informasi Mengenai Kinerja Keuangan**

  Tujuan kedua adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini terutama disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kinerja keuangan dapat dianalisis melalui pendapatan, beban, laba atau rugi, serta komponen penghasilan komprehensif lain yang relevan. Informasi tersebut membantu pengguna memahami bagaimana aktivitas ekonomi perusahaan menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.

Sebagai ilustrasi, perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan belum tentu mengalami peningkatan laba. Apabila kenaikan penjualan diikuti peningkatan harga pokok penjualan, biaya distribusi, atau beban operasional yang lebih besar, laba perusahaan justru dapat menurun.

Akuntansi keuangan membantu menjelaskan hubungan tersebut melalui klasifikasi dan penyajian pendapatan serta beban secara sistematis. Dengan demikian, pengguna tidak hanya mengetahui besarnya penjualan, tetapi juga dapat mengevaluasi hasil ekonomi dari kegiatan perusahaan.

Dalam era digital, data pendapatan dan beban dapat diintegrasikan dengan informasi produk, cabang, atau saluran penjualan untuk mendukung analisis internal yang lebih terperinci. Analisis tersebut dapat membantu manajemen mengidentifikasi perubahan biaya dan mengevaluasi kinerja bisnis. Meskipun demikian, laporan analitis internal harus dibedakan dari laporan keuangan bertujuan umum yang disusun berdasarkan standar akuntansi.

- **Menyediakan Informasi Mengenai Arus Kas**

  Tujuan ketiga adalah membantu pengguna memahami bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas. Informasi arus kas sangat penting karena laba akuntansi tidak selalu sama dengan kas yang tersedia.

  Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ketiga kelompok tersebut membantu pengguna memahami sumber penerimaan dan penggunaan kas perusahaan.

  - Aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan utama penghasil pendapatan dan aktivitas lain yang tidak termasuk investasi atau pendanaan.
  - Aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas serta pinjaman perusahaan.

  Perusahaan dapat mencatat laba, tetapi mengalami kesulitan membayar kewajiban jika sebagian besar penjualannya dilakukan secara kredit dan pelanggan belum melunasi tagihan. Sebaliknya, penerimaan pinjaman dapat meningkatkan kas, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba dari kegiatan operasional.

  Oleh sebab itu, informasi arus kas melengkapi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam sistem digital, integrasi data rekening bank, penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, dan transaksi pembiayaan dapat membantu proses pemantauan serta rekonsiliasi kas.

- **Mendukung Penilaian Kemampuan Menghasilkan Arus Kas Masa Depan**

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai kondisi dan kinerja ekonomi yang telah terjadi, tetapi informasi tersebut juga dapat membantu pengguna memperkirakan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas pada masa mendatang.

Investor, pemberi pinjaman, dan kreditor membutuhkan informasi untuk menilai kemungkinan pengembalian investasi atau pelunasan kewajiban. Mereka dapat menggunakan informasi mengenai pendapatan, struktur biaya, aset, utang, serta arus kas historis sebagai salah satu dasar analisis.

Penting untuk dipahami bahwa laporan keuangan historis tidak menjamin hasil pada masa mendatang. Perubahan permintaan, persaingan, suku bunga, kondisi ekonomi, dan kebijakan perusahaan dapat memengaruhi arus kas yang akan dihasilkan.

Teknologi analitik dan AI dapat membantu mengolah data historis untuk membentuk skenario atau perkiraan. Namun, hasil model tetap dipengaruhi oleh kualitas data, asumsi, dan kondisi yang digunakan. Prediksi harus dipahami sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai kepastian hasil ekonomi.

- **Menyediakan Informasi untuk Menilai Pengelolaan Sumber Daya**

  Akuntansi keuangan juga mendukung evaluasi atas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen. Pemilik dan investor tidak selalu terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional sehingga membutuhkan laporan untuk menilai bagaimana manajemen menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

  Informasi mengenai investasi aset, penggunaan pinjaman, pengelolaan persediaan, biaya operasional, dan hasil usaha dapat membantu pengguna mengevaluasi keputusan manajemen.

  Sebagai contoh, peningkatan investasi pada aset tetap dapat dinilai dengan mempertimbangkan tujuan investasi, kontribusinya terhadap kapasitas produksi, serta dampaknya terhadap biaya dan arus kas. Informasi akuntansi memberikan dasar untuk menilai dampak keuangan investasi tersebut, meskipun penilaian menyeluruh juga memerlukan informasi operasional dan nonkeuangan.

  Dalam konteks ini, akuntansi keuangan berhubungan erat dengan akuntabilitas. Laporan keuangan menyediakan bukti terstruktur mengenai kondisi ekonomi dan hasil pengelolaan perusahaan sehingga pengguna dapat mengevaluasi pertanggungjawaban manajemen.

- **Mendukung Transparansi dan Pertanggungjawaban**

  Tujuan berikutnya adalah mendukung transparansi melalui penyajian informasi yang relevan, lengkap, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Transparansi membantu mengurangi ketidakpastian pengguna mengenai kondisi perusahaan, sedangkan pertanggungjawaban memungkinkan pengguna mengevaluasi pengelolaan sumber daya.

  Transparansi bukan berarti seluruh informasi internal perusahaan harus dipublikasikan. Perusahaan tetap perlu menjaga kerahasiaan data pribadi, informasi komersial yang dilindungi, dan data lain sesuai ketentuan. Yang perlu disajikan adalah informasi yang

diwajibkan atau relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan dan pengungkapan berdasarkan standar yang berlaku.

Teknologi digital dapat mendukung transparansi melalui dokumentasi elektronik, jejak audit, rekonsiliasi otomatis, dan proses pelaporan yang terintegrasi. Namun, manfaat tersebut bergantung pada tata kelola data dan pengendalian sistem yang memadai.

Secara keseluruhan, keenam tujuan tersebut saling melengkapi. Posisi keuangan menunjukkan sumber daya dan kewajiban perusahaan, laporan kinerja menjelaskan hasil aktivitas ekonomi, laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas, sedangkan keseluruhan informasi membantu pengguna menilai prospek dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.

**Pengguna Informasi Akuntansi Keuangan dan Kebutuhannya**

Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kerangka konseptual IFRS menempatkan investor yang ada maupun calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya sebagai pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum. Pihak-pihak lain juga dapat memanfaatkan laporan tersebut, meskipun kebutuhan mereka tidak selalu menjadi fokus utama penyusunan laporan.

| Pengguna | Kebutuhan informasi | Contoh pemanfaatan |
|---|---|---|
| Investor dan calon investor | Profitabilitas, risiko, posisi keuangan, dan prospek arus kas | Mempertimbangkan keputusan investasi |
| Pemberi pinjaman dan kreditor | Likuiditas, struktur utang, arus kas, dan kemampuan membayar | Mengevaluasi risiko pemberian pinjaman |
| Manajemen | Kinerja keuangan, biaya, sumber daya, dan kewajiban | Mengevaluasi hasil usaha dan menyusun rencana |
| Karyawan dan organisasi pekerja | Stabilitas usaha serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban terkait karyawan | Memahami kondisi dan keberlanjutan usaha |
| Pemasok | Kemampuan pelanggan membayar kewajiban | Menentukan syarat kredit perdagangan |
| Regulator dan otoritas terkait | Informasi sesuai ketentuan pelaporan yang berlaku | Menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan |
| Masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya | Informasi tertentu mengenai kondisi dan dampak aktivitas perusahaan | Memahami kegiatan perusahaan dalam lingkup informasi yang tersedia |

Tabel tersebut menggambarkan bahwa satu laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk tujuan yang berbeda. Investor mungkin lebih memperhatikan profitabilitas dan prospek arus kas, sedangkan kreditor lebih menekankan kemampuan pembayaran kewajiban dan risiko kredit.

Walaupun kebutuhan pengguna berbeda, laporan keuangan bertujuan umum tidak dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan informasi khusus secara terpisah. Laporan tersebut menyediakan informasi keuangan umum yang dapat digunakan bersama dengan sumber informasi lain.

Perbedaan kebutuhan ini juga menjelaskan pentingnya penyajian informasi yang konsisten dan dapat dibandingkan. Tanpa dasar pelaporan yang memadai, pengguna akan

mengalami kesulitan membandingkan kinerja antarperiode atau antara perusahaan yang berbeda.

**Nilai Strategis Informasi Akuntansi Keuangan**

Istilah nilai strategis dalam subbab ini merujuk pada manfaat informasi keuangan dalam membantu pengguna memahami keadaan perusahaan, menilai alternatif tindakan, mengidentifikasi risiko, dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Nilai tersebut bukan berarti bahwa laporan keuangan secara langsung menentukan keberhasilan perusahaan, melainkan menyediakan salah satu landasan penting bagi pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, informasi keuangan dapat memberikan nilai strategis melalui beberapa cara.

- **Mengurangi Ketidakpastian dalam Pengambilan Keputusan**

  Keputusan bisnis sering dibuat dalam kondisi ketika informasi yang tersedia belum lengkap dan hasil tindakan belum dapat dipastikan. Informasi akuntansi membantu mengurangi sebagian ketidakpastian tersebut dengan menyajikan data mengenai kondisi keuangan, kinerja, kewajiban, dan arus kas perusahaan.

  Sebagai contoh, investor yang mempertimbangkan investasi pada suatu perusahaan dapat mempelajari tren pendapatan, laba, utang, dan arus kas selama beberapa periode. Informasi tersebut tidak menjamin hasil investasi, tetapi membantu investor menyusun penilaian berdasarkan kondisi ekonomi yang dilaporkan.

  Dalam era digital, pengumpulan dan pengolahan data yang lebih cepat dapat membantu pengguna memperoleh informasi yang lebih mutakhir. Namun, pengambilan keputusan tetap harus mempertimbangkan risiko, asumsi, dan keterbatasan informasi yang tersedia.

- **Mendukung Evaluasi Kinerja dan Efisiensi**

  Informasi keuangan membantu perusahaan mengevaluasi hasil kegiatan operasional dengan membandingkan pendapatan, biaya, aset, dan arus kas. Analisis rasio keuangan, analisis tren, serta perbandingan antarperiode dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

  Misalnya, peningkatan pendapatan yang disertai penurunan margin laba dapat menjadi indikasi bahwa biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen menelaah harga jual, biaya bahan baku, biaya distribusi, atau komposisi produk.

  Teknologi analitik dapat memperluas evaluasi tersebut dengan menggabungkan data keuangan dan operasional. Meski demikian, hasil analisis perlu ditafsirkan sesuai konteks bisnis dan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti sebab-akibat.

- **Mendukung Pengelolaan Risiko Keuangan**

  Informasi akuntansi dapat membantu mengidentifikasi sejumlah risiko keuangan, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pembiayaan, dan risiko yang timbul dari perubahan struktur biaya.

Sebagai contoh, perusahaan dengan proporsi piutang yang tinggi perlu memantau umur piutang dan pola pembayaran pelanggan. Data tersebut dapat digunakan untuk menilai kebutuhan pengendalian kredit dan memperkirakan kebutuhan kas.

Dalam sistem digital, perusahaan dapat menerapkan peringatan otomatis apabila piutang melewati batas waktu tertentu atau saldo kewajiban mendekati ambang yang telah ditentukan. Peringatan tersebut merupakan alat bantu pemantauan dan tetap memerlukan penilaian manusia untuk menentukan tindakan yang sesuai.

- **Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi**

  Informasi keuangan membantu menghubungkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya laporan yang disusun secara sistematis, pengguna dapat mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

  Dalam organisasi yang memiliki banyak cabang, sistem akuntansi terintegrasi dapat membantu mengonsolidasikan informasi keuangan dari berbagai unit. Hal ini mempermudah proses rekonsiliasi dan evaluasi, sepanjang data antarunit telah menggunakan dasar pencatatan dan kebijakan akuntansi yang sesuai.

  Akuntabilitas yang baik juga membutuhkan pengendalian internal, pembagian tanggung jawab, pemeriksaan, dan pengungkapan yang memadai. Teknologi dapat mendukung proses tersebut, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.

- **Mendukung Perencanaan dan Pengembangan Bisnis**

  Laporan keuangan historis dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran, mengevaluasi kebutuhan pendanaan, dan menilai kelayakan rencana bisnis. Data mengenai pendapatan, biaya, aset, dan arus kas membantu perusahaan memahami sumber daya yang tersedia dan konsekuensi keuangan dari berbagai alternatif tindakan.

  Sebagai contoh, perusahaan yang berencana membuka cabang baru dapat menggunakan data historis penjualan, biaya operasional, kebutuhan modal kerja, dan arus kas sebagai masukan dalam menyusun proyeksi. Hasil proyeksi kemudian perlu dibandingkan dengan berbagai skenario, termasuk skenario penjualan lebih rendah atau biaya lebih tinggi.

  Perlu dibedakan bahwa proyeksi anggaran dan perencanaan internal bukan pengganti laporan keuangan historis. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi: laporan keuangan menggambarkan kondisi ekonomi berdasarkan transaksi dan peristiwa yang relevan, sedangkan proyeksi membantu mengevaluasi kemungkinan kondisi pada masa mendatang.

**Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Nilai Informasi Keuangan**

Transformasi digital membuka peluang untuk meningkatkan nilai informasi akuntansi melalui integrasi data, otomatisasi, analisis, dan penyajian informasi. Hastharita et al. (2026) membahas integrasi cloud computing, big data analytics, dan AI dalam sistem informasi akuntansi, sedangkan Nurrahma et al. (2026) meninjau perkembangan berbagai teknologi

digital dalam akuntansi. Kedua kajian tersebut relevan untuk menjelaskan bagaimana teknologi memperluas kemampuan pengolahan informasi keuangan.

Berikut adalah beberapa bentuk pemanfaatannya.

1. *Cloud accounting:* Sistem akuntansi berbasis cloud memungkinkan data keuangan diakses oleh pengguna yang berwenang dari berbagai lokasi. Teknologi ini mendukung kolaborasi, integrasi data, dan penyediaan informasi yang lebih cepat. Keberhasilannya bergantung pada keamanan sistem, kualitas koneksi, kebijakan akses, dan pengelolaan penyedia layanan.
2. *Big data analytics:* Analitik data memungkinkan perusahaan mengidentifikasi tren dan pola melalui pengolahan data transaksi dalam jumlah besar. Hasil analisis dapat membantu mengevaluasi biaya, pendapatan, piutang, dan risiko, tetapi kesimpulan tetap harus mempertimbangkan kualitas serta relevansi data.
3. *Artificial Intelligence:* AI dapat membantu mengklasifikasikan transaksi, membaca dokumen, mendeteksi anomali, dan mendukung penyusunan ringkasan analitis. Hasil AI perlu diperiksa untuk memastikan ketepatan klasifikasi, perlakuan akuntansi, dan dasar kesimpulannya.
4. *Enterprise Resource Planning (ERP):* ERP mengintegrasikan berbagai fungsi perusahaan, seperti penjualan, persediaan, pembelian, dan keuangan. Integrasi tersebut membantu mengurangi pencatatan berulang dan mempermudah konsolidasi data, selama konfigurasi sistem serta prosedur pengendalian telah dirancang dengan baik.

Penting untuk dipahami bahwa teknologi digital tidak mengubah tujuan fundamental pelaporan keuangan. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Kualitas laporan tetap memerlukan penerapan standar yang tepat, pengendalian internal, dokumentasi, serta pertimbangan profesional.

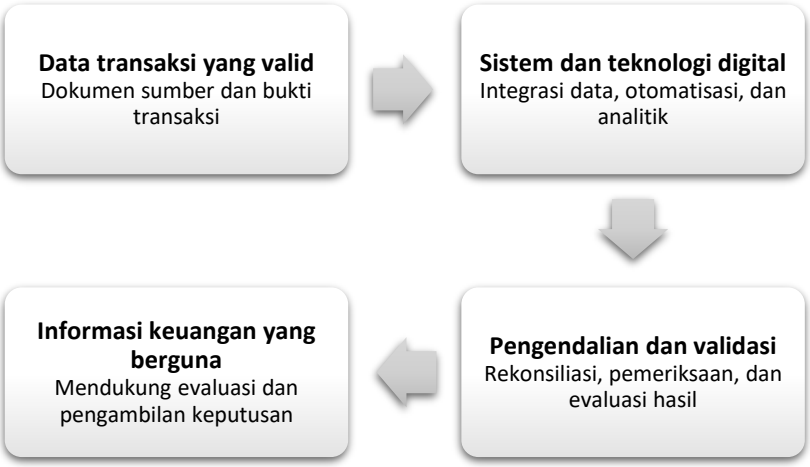


**Gambar 1.3.** Hubungan teknologi digital dan penyediaan informasi keuangan. Sumber: sintesis konseptual untuk buku ajar.

Alur tersebut menegaskan bahwa manfaat teknologi bergantung pada kualitas data dan pengendalian. Apabila data awal salah atau proses validasi tidak memadai, sistem digital justru dapat mempercepat penyebaran kesalahan ke dalam laporan keuangan.

**Contoh Kasus: Pemanfaatan Informasi Akuntansi untuk Keputusan Strategis**

Untuk memahami hubungan antara tujuan akuntansi keuangan dan nilai strategisnya, perhatikan ilustrasi berikut.

PT Sinar Elektronik merupakan perusahaan dagang yang menjual peralatan elektronik melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Pada akhir tahun, perusahaan memperoleh ringkasan data keuangan sebagai berikut.




Berdasarkan data tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa analisis awal.

*Pertama, evaluasi profitabilitas*. Selisih pendapatan dan beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp900 juta. Setelah dikurangi beban operasional Rp600 juta, tersisa Rp300 juta sebelum memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya serta pajak. Nilai ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi struktur biaya dan hasil kegiatan usaha.

*Kedua, evaluasi pengelolaan piutang.* Piutang usaha sebesar Rp450 juta perlu dianalisis berdasarkan umur piutang, syarat kredit, dan pola pembayaran pelanggan. Saldo tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya masalah, tetapi perlu dibandingkan dengan pendapatan kredit, periode sebelumnya, dan estimasi kerugian kredit yang relevan.

*Ketiga, evaluasi kebutuhan kas.* Perusahaan perlu membandingkan laba dengan arus kas operasi. Jika sebagian penjualan belum diterima dalam bentuk kas, perusahaan mungkin membutuhkan pengelolaan modal kerja yang lebih cermat untuk memenuhi pembayaran kepada pemasok dan kewajiban lainnya.

*Keempat, evaluasi strategi bisnis.* Manajemen dapat menggunakan informasi keuangan bersama data penjualan per produk, wilayah, dan saluran distribusi untuk mengevaluasi kegiatan usaha. Hasil analisis tersebut dapat membantu manajemen mempertimbangkan penyesuaian persediaan, kebijakan kredit, biaya distribusi, atau strategi pemasaran.

Apabila perusahaan menggunakan sistem akuntansi digital, data tersebut dapat diperoleh melalui integrasi transaksi penjualan, persediaan, pembayaran, dan pembukuan. Sistem juga

dapat membantu menghasilkan laporan secara lebih cepat. Namun, manajemen tetap harus memastikan bahwa laporan telah direkonsiliasi dan disusun berdasarkan perlakuan akuntansi yang tepat sebelum digunakan sebagai dasar keputusan penting.

Kasus ini menunjukkan bahwa nilai strategis akuntansi keuangan tidak hanya terletak pada tersedianya laporan, tetapi juga pada kemampuan pengguna memahami makna informasi, mengenali keterbatasannya, dan menghubungkannya dengan persoalan bisnis yang relevan.

**Keterbatasan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan**

Meskipun informasi akuntansi keuangan memiliki peran penting, pengguna perlu memahami bahwa laporan keuangan tidak menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk setiap keputusan.

- Pertama, laporan keuangan terutama menyajikan informasi keuangan mengenai kondisi dan kinerja entitas. Informasi seperti kepuasan pelanggan, kualitas kepemimpinan, kompetensi karyawan, perubahan teknologi, dan kondisi persaingan mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam angka-angka laporan keuangan.
- Kedua, penyusunan laporan keuangan dapat melibatkan estimasi dan pertimbangan profesional, misalnya dalam penentuan penyisihan kerugian kredit, penurunan nilai aset, dan estimasi umur manfaat aset tetap. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami asumsi serta kebijakan akuntansi yang digunakan.
- Ketiga, informasi keuangan historis tidak menjamin kinerja masa mendatang. Perusahaan yang mencatatkan laba pada tahun sebelumnya masih dapat mengalami kerugian ketika menghadapi perubahan pasar, kenaikan biaya, atau gangguan operasional.
- Keempat, penggunaan teknologi digital menghadirkan risiko tambahan, seperti kesalahan konfigurasi, manipulasi data, kebocoran informasi, gangguan sistem, dan ketergantungan pada hasil otomatisasi. Risiko tersebut perlu dikelola melalui pengendalian internal, keamanan informasi, dan pemeriksaan yang memadai.

Dengan demikian, informasi akuntansi keuangan sebaiknya digunakan bersama informasi relevan lainnya. Keputusan yang baik memerlukan pemahaman terhadap tujuan keputusan, kualitas data, konteks bisnis, serta ketidakpastian yang mungkin memengaruhi hasilnya.

## 1.3 SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI: DARI CATATAN DINDING HINGGA *CLOUD*

Perkembangan akuntansi merupakan bagian penting dari sejarah peradaban manusia. Sejak manusia mulai melakukan kegiatan perdagangan, mengelola persediaan, mengumpulkan hasil pertanian, dan mempertukarkan barang, muncul kebutuhan untuk mencatat jumlah sumber daya, transaksi, utang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk pencatatan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sistem akuntansi yang lebih terstruktur.

Pada awal perkembangannya, pencatatan ekonomi dilakukan menggunakan media sederhana, seperti tanah liat, batu, papirus, perkamen, dan lembaran kertas. Seiring berkembangnya kegiatan perdagangan, organisasi usaha, dan sistem keuangan, praktik pencatatan tersebut mengalami perubahan, baik dalam metode, bentuk laporan, maupun

tujuan penggunaannya. Akuntansi kemudian berkembang dari kegiatan pencatatan transaksi menjadi sistem informasi yang digunakan untuk menilai kinerja, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi.

Memasuki era komputerisasi, proses akuntansi mulai memanfaatkan perangkat elektronik untuk mengolah data transaksi dalam jumlah besar. Perkembangan jaringan komputer, internet, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (*Enterprise Resource Planning/ERP*), komputasi awan (*cloud computing*), dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) semakin memperluas kemampuan sistem akuntansi dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan. Perkembangan tersebut juga mencerminkan perubahan kebutuhan informasi, kompleksitas transaksi, tata kelola perusahaan, standar pelaporan, serta kompetensi yang diperlukan oleh profesi akuntan.

**Awal Mula Akuntansi dalam Peradaban Kuno**

Praktik pencatatan ekonomi telah dikenal jauh sebelum munculnya sistem akuntansi modern. Peradaban kuno membutuhkan catatan untuk mengelola hasil pertanian, persediaan bahan pangan, pembayaran upeti, perdagangan, dan berbagai bentuk kewajiban ekonomi.



**Gambar 1.4** Pencatatan Akuntansi Kuno

**A. Peradaban Mesopotamia**

Mesopotamia merupakan salah satu kawasan yang memiliki bukti awal penggunaan tulisan untuk mencatat aktivitas ekonomi. Dalam masyarakat yang berkembang di

kawasan antara Sungai Tigris dan Eufrat, pencatatan digunakan untuk mengelola hasil pertanian, ternak, barang dagangan, pembayaran, dan distribusi persediaan.

Catatan ekonomi dibuat menggunakan tablet tanah liat dengan tulisan paku (cuneiform). Tablet tersebut dapat memuat informasi mengenai kuantitas barang, penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban tertentu. Praktik ini memperlihatkan bahwa pencatatan ekonomi berkaitan erat dengan kebutuhan administrasi dan pengendalian sumber daya.

Meskipun pencatatan tersebut belum sama dengan sistem akuntansi keuangan modern, praktiknya menunjukkan prinsip mendasar yang tetap relevan, yaitu kebutuhan untuk mendokumentasikan transaksi dan menyediakan bukti mengenai pergerakan sumber daya.

**B. Peradaban Mesir Kuno**

Di Mesir Kuno, pencatatan administratif digunakan untuk mengelola hasil pertanian, persediaan kerajaan, pengumpulan pajak, tenaga kerja, serta distribusi barang. Para juru tulis memainkan peranan penting dalam mendokumentasikan aktivitas ekonomi dan administrasi pemerintahan.

Penggunaan papirus dan sistem pencatatan yang terorganisasi memungkinkan informasi disimpan dan digunakan kembali untuk kebutuhan administrasi. Pencatatan tersebut membantu pengelola mengetahui jumlah sumber daya yang diterima, digunakan, atau masih tersedia.

Praktik tersebut memperlihatkan pentingnya dokumentasi dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan sumber daya berskala besar.

**C. Peradaban Yunani dan Romawi**

Dalam peradaban Yunani dan Romawi, pencatatan ekonomi digunakan untuk mengelola perdagangan, kekayaan rumah tangga, pajak, dan administrasi publik. Perkembangan kegiatan ekonomi serta organisasi pemerintahan meningkatkan kebutuhan terhadap informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban.

Meskipun praktik pencatatan pada masa tersebut berbeda-beda dan belum memiliki kerangka standar seperti akuntansi saat ini, pengalaman historisnya menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi ekonomi berkembang seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas manusia.

Dari berbagai peradaban tersebut, terdapat tiga pelajaran mendasar bagi perkembangan akuntansi:

1. Dokumentasi transaksi: aktivitas ekonomi membutuhkan bukti yang dapat ditelusuri.
2. Pengendalian sumber daya: catatan membantu membandingkan penerimaan, penggunaan, dan sisa sumber daya.
3. Pertanggungjawaban: informasi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dikelola oleh pihak yang menerima tanggung jawab.

Ketiga prinsip tersebut tetap menjadi bagian penting dalam akuntansi modern, meskipun media pencatatan telah berubah dari tablet tanah liat menjadi basis data digital.

**Perkembangan Sistem Pencatatan dan Lahirnya Pembukuan Berpasangan**

Perkembangan perdagangan di Eropa pada Abad Pertengahan, terutama di kota-kota perdagangan Italia, meningkatkan kebutuhan terhadap metode pencatatan yang lebih sistematis. Pedagang tidak lagi hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran secara sederhana, tetapi juga harus mengelola modal, persediaan, piutang, utang, dan hasil usaha. Dalam konteks tersebut, sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) berkembang menjadi salah satu tonggak penting sejarah akuntansi.

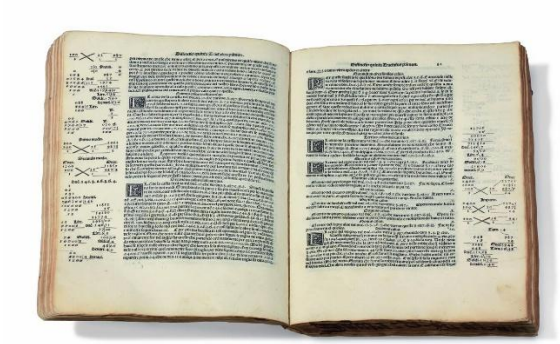

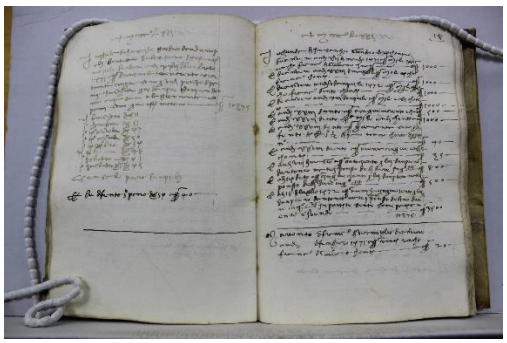

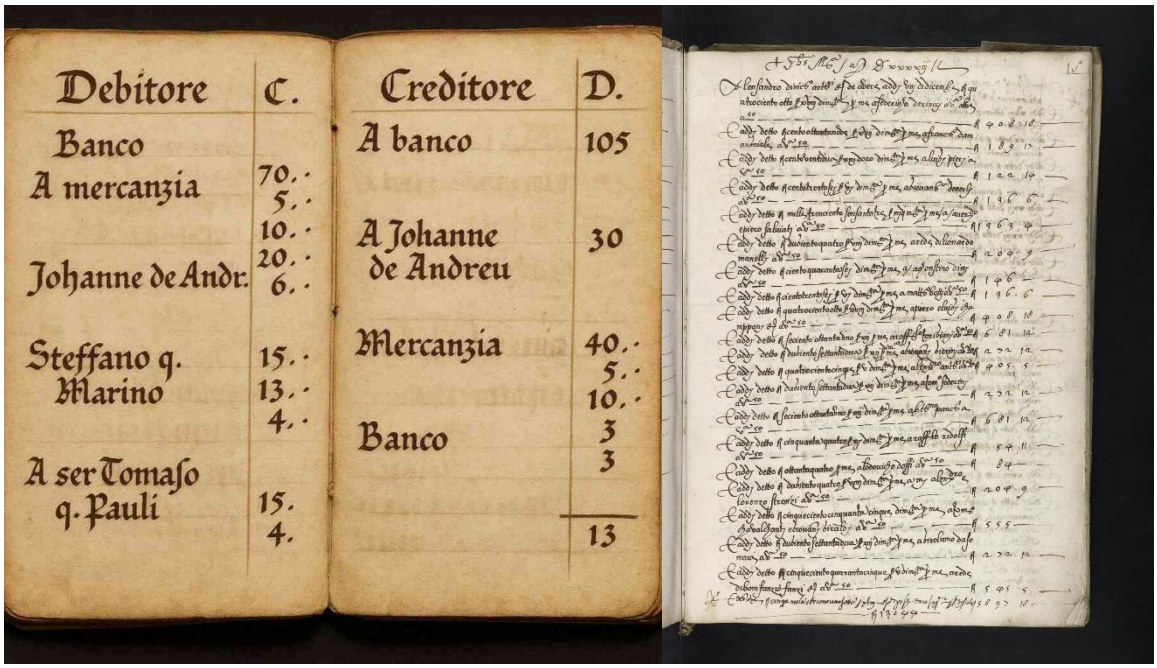


- **Pengertian Pembukuan Berpasangan**
  Pembukuan berpasangan merupakan sistem pencatatan transaksi yang menggunakan prinsip bahwa setiap transaksi memengaruhi setidaknya dua akun dengan jumlah debit dan kredit yang seimbang.
  Prinsip tersebut berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi:

$$Aset = Liabilitas + Ekuitas$$

Sebagai contoh, ketika perusahaan memperoleh pinjaman bank sebesar Rp50.000.000, kas perusahaan bertambah sebesar Rp50.000.000 dan liabilitas pinjaman juga bertambah sebesar Rp50.000.000.

| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas | Rp 50.000.000 | — |
| Utang bank | — | Rp 50.000.000 |

Pencatatan ini menunjukkan bahwa transaksi tidak hanya dilihat dari penerimaan kas, tetapi juga dari sumber pembiayaan yang menimbulkan kewajiban perusahaan.
Sistem pembukuan berpasangan membantu menjaga keseimbangan pencatatan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menyusun informasi keuangan secara lebih terstruktur. Akan tetapi, keseimbangan debit dan kredit tidak menjamin bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Kesalahan klasifikasi, transaksi yang tidak dicatat, atau pencatatan fiktif tetap dapat terjadi.

- **Peran Luca Pacioli dalam Sejarah Akuntansi**
  Pada 1494, matematikawan dan biarawan Italia Luca Pacioli menerbitkan karya Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Salah satu bagian karya tersebut menjelaskan metode pembukuan yang digunakan oleh para pedagang Venesia, termasuk penggunaan pencatatan berpasangan.
  Pacioli sering disebut sebagai tokoh penting dalam sejarah akuntansi karena mendokumentasikan dan menyebarluaskan metode pembukuan tersebut melalui karya cetaknya. Namun, ia bukan penemu tunggal pembukuan berpasangan. Praktik serupa telah berkembang di kalangan pedagang sebelum penerbitan bukunya.
  Publikasi tersebut menjadi tonggak penting dalam penyebaran pengetahuan akuntansi karena memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai cara mencatat transaksi, menyusun buku, dan mengelola akun.
- **Mengapa Pembukuan Berpasangan Penting?**
  Pembukuan berpasangan menjadi fondasi penting bagi akuntansi modern karena beberapa alasan.
  - Menjaga konsistensi pencatatan. Setiap transaksi dicatat berdasarkan hubungan antara akun yang terpengaruh.
  - Mendukung pemeriksaan. Ketidakseimbangan debit dan kredit dapat menjadi petunjuk adanya kesalahan pencatatan.
  - Membantu penyusunan laporan keuangan. Informasi transaksi dapat dikumpulkan dalam akun yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan.
  - Mendukung pertanggungjawaban. Perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dapat ditelusuri melalui catatan transaksi.

Prinsip pembukuan berpasangan tetap digunakan dalam perangkat lunak akuntansi modern. Perbedaannya terletak pada cara pencatatan dilakukan: sistem digital dapat membentuk jurnal dan memperbarui buku besar secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah divalidasi dan konfigurasi akun yang sesuai.

Dengan demikian, digitalisasi tidak menghilangkan fondasi pembukuan berpasangan. Teknologi justru memanfaatkan prinsip tersebut untuk mengolah transaksi dalam skala yang lebih besar dan dengan kecepatan yang lebih tinggi.

**Perkembangan Akuntansi pada Masa Revolusi Industri**

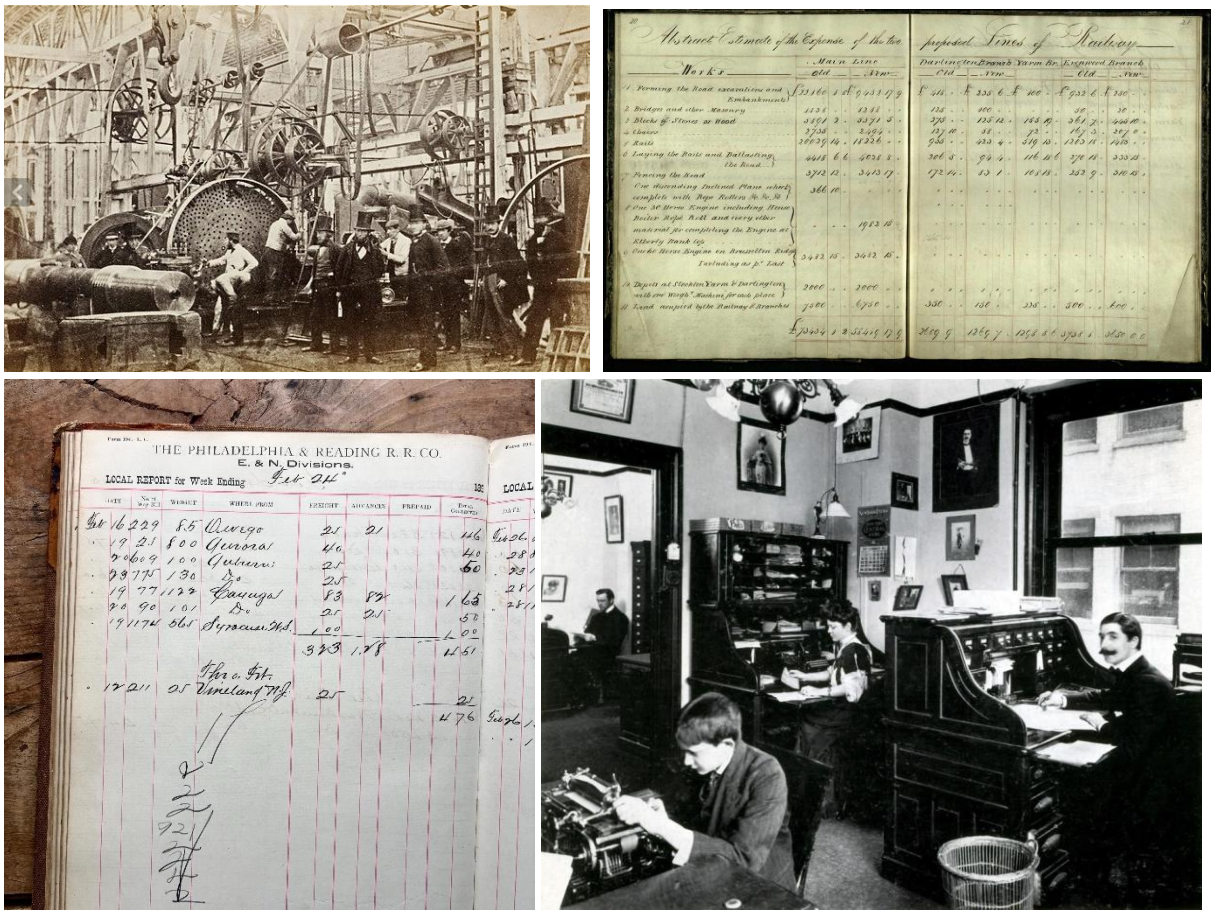


**Gambar 1.5** Perkembangan Pencatatan keuangan di masa Revolusi Industri

Revolusi Industri yang berkembang sejak abad ke-18 membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi, pola produksi, dan organisasi bisnis. Kegiatan ekonomi yang sebelumnya banyak dilakukan dalam skala rumah tangga dan usaha kecil berkembang menjadi produksi berskala besar melalui pabrik, mesin, dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Perubahan tersebut menciptakan kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang mampu menangani transaksi lebih banyak dan lebih kompleks. Perusahaan perlu mengetahui biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya penggunaan mesin, biaya produksi, harga pokok produk, serta hasil penjualan. Akuntansi pun berkembang bukan hanya untuk mencatat transaksi perdagangan, tetapi juga untuk mengukur kinerja kegiatan produksi.

- **Perkembangan Akuntansi Biaya**

Meningkatnya kegiatan manufaktur mendorong perkembangan akuntansi biaya (cost accounting). Perusahaan membutuhkan metode untuk menentukan biaya yang berkaitan dengan proses produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.

Informasi biaya membantu perusahaan menentukan harga jual, mengevaluasi efisiensi produksi, serta menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi.

Sebagai ilustrasi, sebuah pabrik menghasilkan 1.000 unit produk dengan biaya produksi total Rp100.000.000. Berdasarkan data tersebut, biaya produksi rata-rata adalah Rp100.000 per unit. Informasi ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai biaya produksi dan menetapkan kebijakan harga, dengan tetap mempertimbangkan biaya lainnya serta kondisi pasar.

- **Perkembangan Perusahaan Berskala Besar**

  Pertumbuhan industri juga mendorong munculnya perusahaan dengan kebutuhan modal besar, jaringan usaha luas, dan struktur organisasi yang kompleks. Perusahaan kereta api, pertambangan, manufaktur, serta perusahaan perdagangan berskala besar memerlukan sistem pelaporan yang dapat membantu pemilik dan pengelola memantau kegiatan usaha.

  Ketika kepemilikan perusahaan semakin terpisah dari pengelolaan sehari-hari, kebutuhan terhadap laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban juga meningkat. Pemilik modal memerlukan informasi mengenai hasil usaha, aset, kewajiban, dan penggunaan dana yang dikelola manajemen.

- **Perkembangan Audit dan Pengendalian**

  Semakin kompleksnya organisasi bisnis meningkatkan kebutuhan terhadap pemeriksaan catatan keuangan. Audit berkembang sebagai mekanisme untuk menilai apakah informasi keuangan telah disusun berdasarkan bukti yang memadai dan disajikan sesuai kerangka pelaporan yang berlaku.

  Akuntansi dan audit memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Akuntansi menghasilkan catatan serta laporan keuangan, sedangkan audit memberikan pemeriksaan independen atas laporan tersebut sesuai ruang lingkup dan standar audit yang berlaku.

  Perkembangan pada masa Revolusi Industri menunjukkan bahwa perubahan skala bisnis mendorong perubahan kebutuhan akuntansi. Semakin besar volume transaksi dan semakin kompleks organisasi, semakin penting pula sistem pencatatan, pengukuran biaya, pengendalian internal, dan pelaporan yang terstruktur.

**Perkembangan Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Memasuki abad ke-20, perkembangan pasar modal, perusahaan multinasional, dan transaksi lintas negara meningkatkan kebutuhan terhadap informasi keuangan yang dapat dipahami dan dibandingkan oleh berbagai pengguna. Apabila setiap perusahaan menggunakan metode pelaporan yang sangat berbeda tanpa penjelasan memadai, investor dan kreditor akan kesulitan membandingkan kondisi keuangan antarperusahaan. Kondisi

tersebut mendorong perkembangan standar akuntansi dan kerangka konseptual pelaporan keuangan.

- **Standardisasi Praktik Akuntansi**

  Standar akuntansi memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi diakui, diukur, disajikan, serta diungkapkan dalam laporan keuangan.

  Standardisasi tidak berarti bahwa seluruh perusahaan harus memiliki angka keuangan yang sama. Standar menyediakan dasar yang konsisten agar transaksi sejenis diperlakukan secara sesuai dan informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan secara lebih bermakna.

  Dalam praktik internasional, International Accounting Standards Board (IASB) mengembangkan International Financial Reporting Standards (IFRS). Di Indonesia, standar akuntansi keuangan dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), dengan mempertimbangkan kerangka standar yang berlaku di Indonesia.

- **Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan**

  Kerangka konseptual membantu menjelaskan tujuan pelaporan keuangan, karakteristik informasi yang berguna, serta konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

  Salah satu perubahan penting dalam pemikiran akuntansi modern adalah penekanan pada kegunaan informasi bagi pengambilan keputusan. Informasi tidak hanya dipandang sebagai kumpulan catatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya mengevaluasi keputusan penyediaan sumber daya kepada perusahaan.

  Artikel Lajoie dan Gendron (2026), yang tercantum dalam daftar referensi awal, membahas perkembangan historis pemikiran tentang kegunaan informasi akuntansi dalam riset ekonomi keuangan. Kajian seperti ini dapat membantu menjelaskan bagaimana perhatian terhadap kegunaan informasi berkembang dalam penelitian akuntansi.

- **Perkembangan Pelaporan Keuangan di Indonesia**

  Di Indonesia, penerapan standar akuntansi keuangan merupakan bagian penting dari perkembangan profesi dan praktik pelaporan keuangan. Perubahan standar mengikuti perkembangan transaksi bisnis, kebutuhan pengguna laporan, serta perubahan lingkungan ekonomi.

  Perusahaan perlu memahami standar yang berlaku sesuai karakteristik entitas dan ketentuan yang relevan. Oleh sebab itu, pembelajaran sejarah akuntansi perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia, bukan hanya sejarah praktik pembukuan di Eropa.

  Perkembangan standardisasi memperlihatkan bahwa akuntansi tidak berdiri sendiri sebagai teknik pencatatan. Akuntansi juga dipengaruhi oleh kebutuhan informasi masyarakat, struktur ekonomi, perkembangan pasar modal, serta tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban.

**Era Komputerisasi: Transformasi dari Pencatatan Manual ke Sistem Elektronik**

Perkembangan komputer pada abad ke-20 membawa perubahan besar terhadap cara data akuntansi diproses. Sebelum komputer digunakan secara luas, banyak pekerjaan akuntansi dilakukan melalui dokumen fisik, jurnal, buku besar, kalkulator, dan mesin pembukuan.

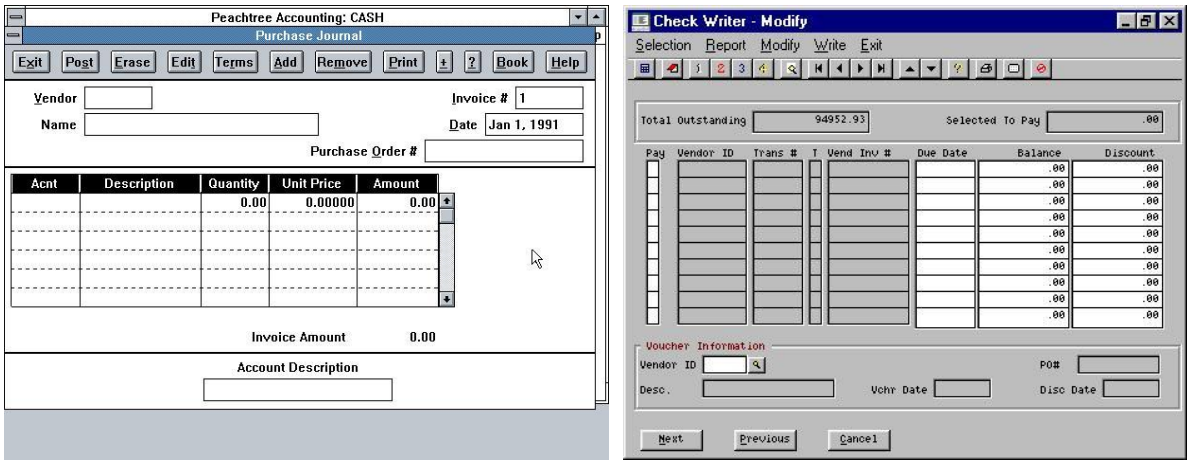


**Gambar 1.6** Pencatatan Akuntansi Keuangan Awal Abad 20

Ketika komputer mulai dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis, sebagian proses pengolahan data dapat dialihkan ke sistem elektronik. Perubahan ini terutama terlihat dalam pencatatan transaksi berulang, perhitungan, pemrosesan penggajian, pengelolaan persediaan, dan penyusunan laporan periodik.

- **Pemrosesan Data Elektronik**

  Sistem pemrosesan data elektronik memungkinkan organisasi menyimpan dan mengolah data transaksi menggunakan komputer. Transaksi yang sebelumnya memerlukan banyak pekerjaan manual dapat diproses melalui program yang telah dikonfigurasi.

  Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan sistem untuk menghitung total penjualan, memperbarui saldo piutang, mencatat penerimaan kas, dan menghasilkan ringkasan transaksi. Otomatisasi tersebut membantu mempercepat pekerjaan dan mengurangi sebagian kesalahan perhitungan manual.

  Namun, komputer hanya memproses data berdasarkan instruksi dan konfigurasi yang diberikan. Apabila data masukan tidak benar atau aturan akuntansi diterapkan secara keliru, hasil pemrosesan juga dapat salah.

- **Spreadsheet dan Perangkat Lunak Akuntansi**

  Perkembangan komputer personal dan spreadsheet memperluas akses organisasi terhadap pengolahan data keuangan. Aplikasi spreadsheet memungkinkan akuntan melakukan perhitungan, menyusun tabel, membuat grafik, dan menganalisis data dengan lebih fleksibel.

  Selanjutnya, perangkat lunak akuntansi khusus menyediakan fungsi yang lebih terstruktur untuk mencatat transaksi, mengelola akun, melakukan rekonsiliasi, serta menyusun laporan keuangan.

Perkembangan tersebut mengubah keterampilan yang dibutuhkan akuntan. Selain memahami prinsip akuntansi, akuntan semakin memerlukan kemampuan menggunakan perangkat lunak, mengelola data, dan memeriksa hasil pemrosesan elektronik.

- **Integrasi Sistem Informasi**

  Seiring berkembangnya kebutuhan organisasi, perusahaan mulai mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam sistem informasi yang lebih luas. Sistem ERP, misalnya, dapat menghubungkan transaksi penjualan, pembelian, persediaan, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan.

  Integrasi memungkinkan transaksi pada satu bagian organisasi memengaruhi data bagian lain sesuai konfigurasi sistem. Ketika penjualan terjadi, sistem dapat memperbarui persediaan dan menghasilkan data yang diperlukan untuk pencatatan akuntansi.

  Dibandingkan dengan sistem yang terpisah, integrasi berpotensi mengurangi duplikasi input dan mempercepat konsolidasi informasi. Namun, integrasi juga meningkatkan kebutuhan terhadap pengelolaan hak akses, pemisahan tugas, pengujian sistem, dan pemantauan perubahan data.

  Era komputerisasi menjadi tahap penting karena mengubah akuntansi dari proses yang sangat bergantung pada pencatatan manual menjadi proses pengolahan informasi yang semakin didukung oleh sistem elektronik.

**Era Internet dan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi**

Perkembangan internet memperluas kemampuan sistem akuntansi untuk menghubungkan pengguna, data, dan aplikasi dari berbagai lokasi. Jika komputerisasi pada tahap awal terutama berfokus pada pemrosesan data dalam satu perangkat atau jaringan internal, perkembangan internet memungkinkan pertukaran informasi secara lebih luas. Perusahaan mulai memanfaatkan aplikasi berbasis jaringan untuk mengirim faktur elektronik, menerima pembayaran digital, memantau transaksi, dan bertukar informasi dengan pelanggan maupun pemasok.

- **Digitalisasi Dokumen Transaksi**

  Digitalisasi dokumen mengubah dokumen yang sebelumnya dikelola dalam bentuk fisik menjadi dokumen elektronik. Faktur, bukti pembayaran, pesanan pembelian, dan dokumen pendukung lainnya dapat disimpan serta ditelusuri melalui sistem digital.

  Manfaatnya antara lain mempercepat pencarian dokumen, mempermudah pengarsipan, dan mendukung pemeriksaan transaksi. Akan tetapi, dokumen elektronik tetap harus dikelola dengan prosedur yang memastikan keaslian, kelengkapan, keamanan, dan keterlacakan.

- **Integrasi Transaksi secara Elektronik**

  Internet memungkinkan perusahaan menerima transaksi dari berbagai saluran, seperti toko daring, aplikasi seluler, layanan pembayaran elektronik, dan platform perdagangan elektronik.

Transaksi tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem akuntansi sehingga data penjualan, penerimaan kas, piutang, dan persediaan dapat diproses secara lebih efisien.

Sebagai contoh, transaksi penjualan melalui perdagangan elektronik dapat menghasilkan data pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Sistem akuntansi kemudian menggunakan data yang relevan untuk mencatat transaksi berdasarkan waktu pengakuan dan ketentuan akuntansi yang berlaku.

Integrasi tersebut tidak berarti bahwa setiap pesanan otomatis dapat diakui sebagai pendapatan. Akuntan tetap harus mempertimbangkan substansi transaksi dan kriteria pengakuan pendapatan yang relevan.

- **Pelaporan yang Lebih Cepat**

  Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data dari berbagai unit. Laporan internal dapat diperbarui lebih sering sehingga manajemen memiliki informasi yang lebih mutakhir.

  Namun, perlu dibedakan antara informasi operasional yang diperbarui setiap saat dan laporan keuangan formal. Laporan keuangan formal tetap memerlukan proses penyesuaian, rekonsiliasi, evaluasi estimasi, dan pemeriksaan kelengkapan sebelum diterbitkan.

  Perkembangan internet memperlihatkan bahwa kecepatan pertukaran informasi menjadi bagian penting dari transformasi akuntansi. Teknologi memperpendek jarak antara transaksi dan tersedianya data, tetapi kualitas informasi tetap memerlukan prosedur akuntansi dan pengendalian yang memadai.

**Era Cloud Accounting: Akuntansi Berbasis Komputasi Awan**



Komputasi awan (cloud computing) merupakan model penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan, yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi, penyimpanan, dan layanan sesuai kebutuhan. Dalam akuntansi, teknologi ini memungkinkan penggunaan perangkat lunak serta pengelolaan data keuangan melalui layanan berbasis awan.

Perkembangan cloud accounting mengubah cara perusahaan mengakses dan mengelola aplikasi akuntansi. Perusahaan tidak selalu perlu memasang seluruh perangkat lunak dan mengelola infrastruktur server secara mandiri, karena sebagian fungsi dapat disediakan oleh penyedia layanan.

- **Karakteristik Cloud Accounting**

  Cloud accounting umumnya memiliki karakteristik berikut.

  1. Akses melalui jaringan. Pengguna yang berwenang dapat mengakses aplikasi dari lokasi berbeda sesuai hak akses dan ketersediaan jaringan.
  2. Data terpusat atau terintegrasi. Data dari beberapa bagian perusahaan dapat dikelola dalam lingkungan sistem yang sama.

3. Pembaruan sistem oleh penyedia layanan. Dalam banyak layanan, pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur dilakukan oleh penyedia sesuai model layanan yang digunakan.
4. Fleksibilitas kapasitas. Kapasitas layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan penyedia.
5. Kolaborasi. Akuntan, manajemen, dan pihak lain yang berwenang dapat bekerja menggunakan sumber informasi yang sama.

Karakteristik tersebut dapat mendukung efisiensi dan koordinasi. Namun, cloud accounting tidak selalu menjadi pilihan yang sesuai bagi setiap organisasi. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya, konektivitas, keamanan, kepatuhan, kebutuhan integrasi, dan ketergantungan kepada penyedia layanan.

- **Perubahan dalam Proses Kerja Akuntan**

  Cloud accounting memungkinkan sebagian pekerjaan akuntansi dilakukan tanpa bergantung pada satu komputer atau lokasi kantor tertentu. Akuntan dapat memeriksa transaksi, melakukan rekonsiliasi, dan menyiapkan laporan dengan memanfaatkan data yang tersedia melalui sistem.

  Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki cabang di beberapa kota dapat mengintegrasikan transaksi masing-masing cabang ke dalam sistem keuangan bersama. Kantor pusat dapat mengakses informasi yang telah masuk dan melakukan konsolidasi sesuai prosedur yang berlaku.

  Walaupun demikian, akses bersama harus diatur berdasarkan tanggung jawab pekerjaan. Pegawai yang hanya bertugas memasukkan transaksi, misalnya, tidak selalu perlu memperoleh kewenangan untuk menyetujui pembayaran atau mengubah konfigurasi sistem.

- **Risiko dan Pengendalian Cloud Accounting**

  Penggunaan layanan berbasis awan menimbulkan sejumlah risiko yang perlu dikelola, antara lain:

  - akses tidak sah terhadap informasi keuangan;
  - kehilangan atau kerusakan data;
  - gangguan layanan dan konektivitas;
  - ketergantungan pada penyedia layanan;
  - kesulitan memindahkan data ketika perusahaan mengganti sistem;
  - ketidakpatuhan terhadap ketentuan penyimpanan dan pengelolaan data yang relevan.

  Pengendalian dapat mencakup autentikasi yang kuat, pembatasan hak akses, pencadangan data, pemantauan log aktivitas, pengujian pemulihan, serta evaluasi kontrak dan pengamanan yang disediakan penyedia layanan.

  Kajian Hastharita et al. (2026) mengenai integrasi komputasi awan, big data analytics, dan AI pada sistem informasi akuntansi relevan untuk menjelaskan peluang serta perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Namun, manfaat dan risiko cloud

accounting perlu dinilai sesuai konteks organisasi, bukan diasumsikan sama pada setiap perusahaan.

**Era Big Data, Artificial Intelligence, dan Otomatisasi Akuntansi**

Perkembangan teknologi digital tidak berhenti pada penyimpanan data di awan. Organisasi kini dapat memanfaatkan analitik data, AI, dan otomatisasi untuk memperluas kemampuan pengolahan informasi keuangan.

Teknologi tersebut membawa perubahan dalam jenis pekerjaan yang dapat diotomatisasi, cara risiko diidentifikasi, dan cara informasi dianalisis. Meskipun demikian, teknologi tidak menggantikan kebutuhan terhadap prinsip akuntansi, pengendalian internal, dan pertimbangan profesional.

- **Big Data Analytics dalam Akuntansi**

  Big data analytics mengacu pada penggunaan metode analisis untuk mengolah data dalam jumlah besar, beragam, atau dihasilkan dengan cepat. Dalam akuntansi, analitik data dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi, perubahan biaya, keterlambatan pembayaran, dan transaksi yang menyimpang dari pola umum.

  Sebagai contoh, perusahaan dengan ribuan transaksi pembelian dapat menganalisis nilai transaksi, waktu pembayaran, pemasok, dan pola persetujuan. Analisis tersebut dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

  Akan tetapi, transaksi yang menyimpang dari pola umum tidak otomatis merupakan kecurangan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh transaksi sah, kondisi musiman, atau perubahan operasional. Oleh karena itu, hasil analitik perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti dan konteks transaksi.

- **Artificial Intelligence dalam Akuntansi**

  AI dapat membantu sistem mengenali pola, memproses bahasa, membaca dokumen, mengklasifikasikan data, dan menghasilkan prediksi berdasarkan data yang tersedia.

  Penerapannya dalam akuntansi dapat meliputi:

  - ekstraksi data dari faktur dan dokumen pendukung;
  - rekomendasi klasifikasi transaksi;
  - identifikasi anomali dalam jurnal atau pembayaran;
  - penyusunan ringkasan awal laporan keuangan;
  - dukungan analisis tren dan perkiraan arus kas.

  Penggunaan AI memerlukan pengawasan karena keluaran sistem dapat mengandung kesalahan, bias, atau kesimpulan yang tidak didukung data. Akuntan harus mengevaluasi sumber data, asumsi, ketepatan klasifikasi, dan kesesuaian hasil dengan standar akuntansi yang berlaku.

- **Robotic Process Automation**

  Robotic Process Automation (RPA) merupakan teknologi otomatisasi yang menjalankan tugas berulang berdasarkan aturan dan alur kerja yang telah ditentukan.

  Dalam akuntansi, RPA dapat membantu memindahkan data antar-aplikasi, mengunduh laporan, melakukan pencocokan awal, serta menyusun ringkasan transaksi secara rutin. Otomatisasi tersebut dapat mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.

Namun, RPA tidak selalu mampu menangani transaksi yang memerlukan penilaian kompleks tanpa aturan tambahan atau intervensi manusia. Perubahan format dokumen, data tidak lengkap, dan kesalahan konfigurasi perlu diantisipasi melalui pemantauan serta pengujian berkala.

- **Blockchain dan Teknologi Buku Besar Terdistribusi**

  Blockchain merupakan teknologi pencatatan terdistribusi yang dapat membantu mempertahankan keterlacakan catatan transaksi dalam lingkungan yang dirancang sesuai kebutuhan. Dalam konteks tertentu, teknologi ini dapat digunakan untuk mendukung verifikasi transaksi antarorganisasi, pelacakan aset, dan pengelolaan catatan bersama.

  Meskipun demikian, blockchain tidak menjamin bahwa informasi yang dimasukkan sejak awal benar. Ketepatan data sumber, pengaturan hak akses, tata kelola jaringan, dan perlakuan akuntansi tetap perlu diperhatikan.

- **Perubahan Fokus Pekerjaan Akuntan**

  Ketika sebagian pekerjaan rutin dapat diotomatisasi, waktu kerja akuntan berpotensi lebih banyak digunakan untuk menganalisis informasi, memeriksa transaksi yang berisiko, mengevaluasi pengendalian, dan mengomunikasikan hasil analisis kepada manajemen.

  Perubahan ini tidak berarti semua pekerjaan pencatatan akan hilang. Organisasi tetap membutuhkan orang yang memahami transaksi, memeriksa hasil pemrosesan, menangani pengecualian, dan memastikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan.

Kajian Nurrahma et al. (2026) dan Wulandari et al. (2025) yang tercantum dalam daftar referensi awal dapat digunakan untuk mengembangkan pembahasan mengenai teknologi digital dalam akuntansi. Sebelum dikutip dalam naskah final, identitas bibliografis dan isi lengkap artikel perlu dicocokkan dengan publikasi aslinya.

**Perbandingan Perkembangan Akuntansi dari Masa ke Masa**

Setelah memahami berbagai tahap perkembangan akuntansi, mahasiswa perlu melihat hubungan antara perubahan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi. Perbandingan berikut merangkum perjalanan akuntansi dari pencatatan ekonomi sederhana hingga sistem berbasis komputasi awan.

**Tabel 1.3** Perjalanan Akuntansi Keuangan dari masa ke masa

| Periode | Karakteristik utama | Media atau teknologi | Fokus akuntansi |
|---|---|---|---|
| Peradaban kuno | Pencatatan barang, hasil pertanian, dan kewajiban | Tablet tanah liat, papirus, dan catatan tertulis | Administrasi dan pengendalian sumber daya |
| Abad Pertengahan | Perkembangan pencatatan transaksi perdagangan | Buku catatan dan buku besar | Pengelolaan modal, utang, piutang, dan hasil usaha |
| Akhir abad ke-15 | Penyebaran pengetahuan pembukuan | Buku dan manuskrip tercetak | Pencatatan debit-kredit yang sistematis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | berpasangan melalui karya cetak | | |
| Revolusi Industri | Pertumbuhan perusahaan manufaktur dan usaha berskala besar | Buku besar, dokumen, dan perangkat pembukuan | Akuntansi biaya, pengendalian, dan pertanggungjawaban |
| Abad ke-20 | Standardisasi pelaporan dan komputerisasi | Komputer, spreadsheet, dan perangkat lunak akuntansi | Pemrosesan data, pelaporan, dan analisis keuangan |
| Perkembangan internet | Integrasi transaksi dan pertukaran data elektronik | Jaringan komputer, internet, dan ERP | Integrasi proses bisnis dan penyediaan informasi lebih cepat |
| Era cloud | Akses sistem dan data melalui layanan berbasis jaringan | Cloud accounting dan basis data terintegrasi | Kolaborasi, fleksibilitas, dan pengelolaan data terpusat |
| Era AI dan analitik | Pemanfaatan otomatisasi dan analisis data tingkat lanjut | AI, RPA, big data analytics, dan blockchain | Analisis, deteksi anomali, otomatisasi, dan dukungan keputusan |

Pembagian periode merupakan penyederhanaan pedagogis; perkembangan teknologi dan praktik akuntansi berlangsung secara bertahap, saling tumpang tindih, dan berbeda antarwilayah. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan akuntansi tidak berlangsung melalui penggantian total satu teknologi oleh teknologi lainnya. Perusahaan modern masih menggunakan prinsip pembukuan berpasangan yang telah dikenal berabad-abad lalu, tetapi proses penerapannya kini dapat dibantu oleh perangkat lunak, jaringan, dan sistem otomatisasi.

Demikian pula, dokumen fisik belum sepenuhnya ditinggalkan, dan tidak semua perusahaan menggunakan AI atau cloud accounting. Pemilihan teknologi bergantung pada kebutuhan organisasi, sumber daya, risiko, serta lingkungan operasionalnya.

**Studi Kasus: Transformasi Akuntansi pada Perusahaan Dagang**

Untuk memperjelas hubungan antara sejarah dan praktik modern, perhatikan ilustrasi PT Nusantara Elektronik, sebuah perusahaan dagang yang memiliki tiga cabang. Pada tahap awal, setiap cabang mencatat penjualan dan persediaan menggunakan buku serta spreadsheet yang dikelola secara terpisah. Kantor pusat kemudian mengumpulkan laporan dari seluruh cabang untuk menyusun laporan keuangan bulanan. Ketika jumlah transaksi meningkat, perusahaan menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pengumpulan data, perbedaan saldo persediaan, pencatatan berulang, dan sulitnya menelusuri transaksi tertentu. Perusahaan kemudian mengembangkan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang menghubungkan penjualan, persediaan, penerimaan kas, dan buku besar.

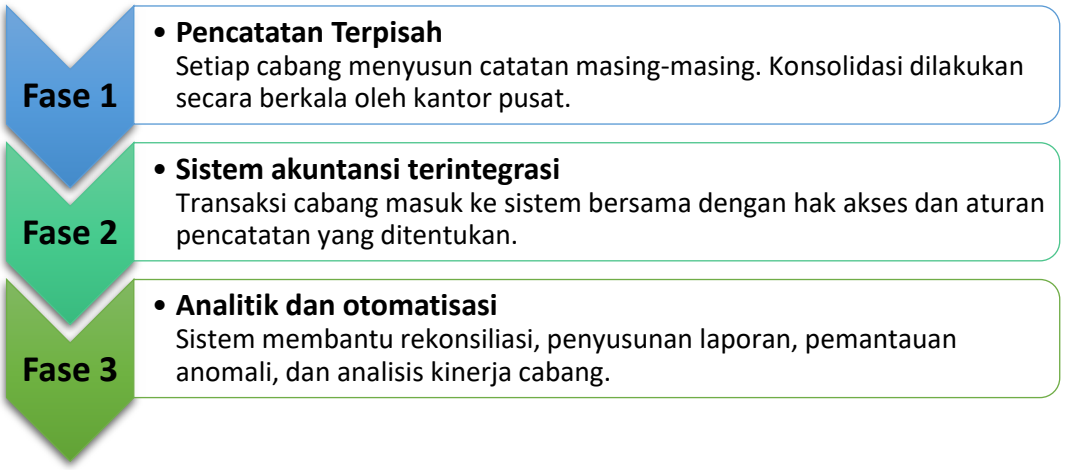


**Gambar 1.6** Ilustrasi tahapan digitalisasi akuntansi pada perusahaan dagang. Sumber: skenario pembelajaran yang disusun untuk buku ajar.

Setelah sistem terintegrasi diterapkan, kantor pusat berpotensi memperoleh informasi lebih cepat dan mengurangi pekerjaan memasukkan data yang sama secara berulang. Analitik juga dapat membantu mengidentifikasi cabang dengan perubahan biaya atau tingkat persediaan yang tidak biasa.

Namun, perusahaan tetap harus menetapkan standar pencatatan yang konsisten, menguji integrasi sistem, membatasi kewenangan pengguna, dan melakukan rekonsiliasi. Jika cabang menggunakan kode akun atau kebijakan pencatatan yang berbeda tanpa pemetaan yang tepat, integrasi teknologi belum tentu menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan. Kasus ini menggambarkan bahwa keberhasilan transformasi akuntansi bukan hanya ditentukan oleh pembelian perangkat lunak. Keberhasilan juga bergantung pada desain proses, kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap tata kelola informasi.

## 1.4 HIPERKONEKTIVITAS DAN VOLATILITAS LINGKUNGAN BISNIS MODERN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan menjalankan kegiatan operasional, berinteraksi dengan pelanggan, mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan bisnis. Internet, komputasi awan (cloud computing), perangkat bergerak, kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI), dan analisis data telah membentuk lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan bergantung pada informasi digital. Perubahan tersebut menciptakan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian, persaingan yang semakin dinamis, serta meningkatnya risiko operasional dan keuangan.

Dalam konteks ini, dua karakteristik penting lingkungan bisnis modern adalah hiperkonektivitas dan volatilitas. Hiperkonektivitas menggambarkan kondisi ketika individu, organisasi, sistem informasi, perangkat, dan pasar terhubung melalui jaringan digital sehingga pertukaran informasi dapat berlangsung dengan cepat dan dalam skala luas. Sementara itu,

volatilitas mengacu pada perubahan kondisi bisnis yang berlangsung cepat, sulit diprediksi, dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kedua karakteristik tersebut memiliki implikasi langsung terhadap akuntansi keuangan. Informasi keuangan tidak lagi cukup dipahami sebagai catatan transaksi masa lalu, tetapi juga sebagai sumber informasi yang membantu perusahaan mengevaluasi kondisi terkini, mengidentifikasi risiko, dan menyusun keputusan untuk menghadapi perubahan. Meskipun demikian, akuntansi tetap harus mempertahankan prinsip keandalan, relevansi, keterbandingan, dan representasi yang tepat dalam penyajian informasi keuangan.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang diterbitkan International Accounting Standards Board (IASB, 2018) menempatkan relevansi dan representasi tepat sebagai karakteristik fundamental informasi keuangan yang berguna. Dalam lingkungan bisnis digital, kedua karakteristik ini menjadi semakin penting karena kecepatan memperoleh informasi harus diimbangi dengan proses validasi, pengendalian internal, dan penyajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini, akuntansi keuangan beroperasi dalam lingkungan bisnis yang dicirikan oleh ketidakpastian yang tinggi, globalisasi tanpa sekat, dan hiperkonektivitas digital. Perusahaan tidak lagi berkompetisi secara lokal; rantai pasok mereka terintegrasi secara global. Transaksi bisnis terjadi dalam hitungan milidetik melalui platform *e-commerce*, mata uang kripto mulai melengkapi mata uang fiat, dan modal bergerak melintasi batas negara hanya dengan satu klik. Dampaknya terhadap akuntansi sangat masif. Model bisnis konvensional yang mengandalkan kepemilikan aset fisik (pabrik, mesin) kini bergeser ke arah aset takberwujud berbasis digital (*digital assets*), seperti algoritma kecerdasan buatan, hak paten perangkat lunak, data pengguna, dan *intellectual capital*. Lingkungan bisnis modern menuntut akuntansi keuangan untuk tidak hanya adaptif terhadap perubahan instrumen transaksi, tetapi juga mampu mengukur risiko-risiko baru yang bersifat non-finansial, termasuk kepatuhan terhadap isu lingkungan dan tata kelola (ESG).

**Konsep Hiperkonektivitas dalam Lingkungan Bisnis Modern**

Hiperkonektivitas merupakan perkembangan dari konektivitas digital yang memungkinkan hubungan antarmanusia, antarsistem, dan antarorganisasi berlangsung secara terus-menerus. Jika pada masa sebelumnya pertukaran informasi bisnis banyak bergantung pada dokumen fisik, surat-menyurat, atau komunikasi langsung, saat ini informasi dapat dikirim dan diproses melalui sistem digital yang terintegrasi.

Sebagai contoh, transaksi penjualan pada sebuah perusahaan perdagangan dapat langsung tercatat dalam sistem kasir digital. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke sistem persediaan, sistem piutang, sistem penerimaan kas, dan sistem akuntansi. Apabila sistem telah terintegrasi dengan baik, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai penjualan, persediaan, dan posisi keuangan tanpa harus mengumpulkan seluruh data secara manual dari setiap bagian. Hiperkonektivitas dalam dunia bisnis dapat dilihat melalui beberapa karakteristik berikut:

1. **Keterhubungan sistem informasi.** Berbagai fungsi perusahaan, seperti pemasaran, penjualan, produksi, persediaan, keuangan, dan sumber daya manusia, dapat

menggunakan sistem informasi yang saling terintegrasi. Integrasi ini mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data yang sama berulang kali dan membantu menjaga konsistensi informasi antarbagian.

2. **Pertukaran data secara cepat.** Transaksi dan perubahan kondisi operasional dapat diketahui dalam waktu relatif singkat. Informasi penjualan harian, misalnya, dapat digunakan oleh bagian keuangan untuk memantau penerimaan kas dan oleh bagian persediaan untuk memperkirakan kebutuhan pengadaan barang.
3. **Hubungan lintas organisasi.** Perusahaan dapat terhubung dengan pemasok, distributor, bank, penyedia layanan pembayaran, perusahaan logistik, dan pelanggan melalui platform digital. Hubungan tersebut mempercepat proses bisnis, tetapi juga meningkatkan ketergantungan pada sistem dan pihak eksternal.
4. **Pemanfaatan data dalam skala besar.** Aktivitas digital menghasilkan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi penjualan, aplikasi pelanggan, situs web, perangkat Internet of Things (IoT), dan sistem pembayaran elektronik. Data ini berpotensi memberikan gambaran yang lebih luas tentang perilaku konsumen, pola permintaan, serta efisiensi operasional.
5. **Akses informasi lintas Lokasi.** Teknologi jaringan dan komputasi awan memungkinkan pihak yang berwenang mengakses informasi perusahaan dari lokasi berbeda. Manajemen dapat memantau laporan keuangan beberapa cabang melalui sistem terpusat, sedangkan akuntan dapat melakukan rekonsiliasi data tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan unit operasional.

Walaupun menawarkan berbagai kemudahan, hiperkonektivitas tidak secara otomatis menjamin kualitas informasi. Sistem yang terhubung tetap dapat menghasilkan informasi yang salah apabila data sumber tidak akurat, integrasi tidak berjalan dengan baik, hak akses tidak dikelola, atau pengendalian internal tidak memadai.

**Konsep Volatilitas dalam Lingkungan Bisnis Modern**

Volatilitas lingkungan bisnis menggambarkan tingkat perubahan kondisi eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi aktivitas, pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan kelangsungan usaha perusahaan. Perubahan tersebut dapat berasal dari kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan, perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, maupun gangguan rantai pasok. Dalam praktiknya, volatilitas tidak selalu berarti bahwa perusahaan mengalami kerugian. Volatilitas juga dapat menghadirkan peluang pertumbuhan, misalnya ketika permintaan terhadap suatu produk meningkat secara tiba-tiba. Namun, perubahan yang cepat membuat perusahaan perlu melakukan pemantauan dan penyesuaian secara lebih teratur. Beberapa sumber volatilitas lingkungan bisnis modern antara lain sebagai berikut:

1. **Perubahan kondisi ekonomi.** Inflasi, fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, dan perubahan daya beli masyarakat dapat memengaruhi biaya produksi serta permintaan produk. Perusahaan yang mengimpor bahan baku, misalnya, dapat menghadapi kenaikan biaya ketika nilai tukar mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing.

2. **Perubahan teknologi.** Kemunculan teknologi baru dapat mengubah cara produk dibuat, dipasarkan, dan didistribusikan. Perusahaan yang tidak menyesuaikan proses bisnisnya berpotensi mengalami penurunan efisiensi atau kehilangan pelanggan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dapat menemukan model bisnis dan sumber pendapatan baru.
3. **Perubahan perilaku konsumen.** Konsumen semakin terbiasa membandingkan harga, membaca ulasan, dan melakukan transaksi melalui platform digital. Perubahan preferensi dapat berlangsung cepat sehingga perusahaan perlu memantau tren penjualan dan menyesuaikan strategi pemasaran maupun persediaannya.
4. **Ketidakpastian rantai pasok.** Gangguan transportasi, keterlambatan pemasok, kekurangan bahan baku, atau kenaikan biaya logistik dapat memengaruhi kemampuan perusahaan memenuhi permintaan. Dampaknya dapat terlihat pada peningkatan biaya, keterlambatan pengiriman, perubahan tingkat persediaan, dan penurunan margin keuntungan.
5. **Perubahan regulasi dan tuntutan kepatuhan.** Perusahaan harus menyesuaikan kegiatan operasional dan pelaporannya terhadap ketentuan yang berlaku. Perubahan kebijakan perpajakan, standar akuntansi, perlindungan data, atau kewajiban pelaporan dapat menimbulkan kebutuhan untuk memperbarui sistem, prosedur, dan kompetensi tenaga kerja.
6. **Risiko keamanan siber.** Semakin luas konektivitas digital, semakin penting perlindungan terhadap akses tidak sah, pencurian data, manipulasi transaksi, dan gangguan sistem. Insiden keamanan siber dapat menyebabkan kerugian finansial langsung, biaya pemulihan, gangguan operasi, dan kerusakan reputasi.

Dengan demikian, volatilitas perlu dipahami sebagai kondisi yang menuntut kemampuan perusahaan untuk mengenali perubahan, menilai dampaknya, dan menyesuaikan keputusan berdasarkan informasi yang relevan.

**Hubungan Hiperkonektivitas dan Volatilitas dengan Akuntansi Keuangan**

Hiperkonektivitas dan volatilitas saling berkaitan dalam membentuk kebutuhan informasi keuangan perusahaan. Hiperkonektivitas memungkinkan data dikumpulkan dan disebarkan dengan lebih cepat, sedangkan volatilitas meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menganalisis data tersebut secara berkala agar mampu merespons perubahan lingkungan bisnis.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2022) menjelaskan bahwa data merupakan aset strategis yang dapat mendorong inovasi dan memberikan keuntungan ekonomi. Namun, penggunaan serta pertukaran data yang semakin luas juga menimbulkan risiko, termasuk persoalan privasi, perlindungan data, dan keamanan digital. Dalam bidang akuntansi keuangan, hubungan kedua kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

1. Ketersediaan data keuangan yang lebih cepat. Integrasi sistem memungkinkan data transaksi diterima oleh bagian akuntansi segera setelah transaksi terjadi. Hal ini membantu mempercepat pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan.

2. Peningkatan kebutuhan analisis keuangan. Perubahan harga bahan baku, nilai tukar, biaya distribusi, dan permintaan konsumen mendorong perusahaan menganalisis pendapatan, biaya, margin keuntungan, serta arus kas secara lebih rutin.
3. Penguatan pengendalian internal. Semakin banyak sistem dan pihak yang terhubung, semakin penting pengaturan hak akses, pemisahan tugas, pencatatan aktivitas pengguna, validasi transaksi, serta pemeriksaan terhadap perubahan data.
4. Peningkatan relevansi dan ketepatan waktu informasi. Informasi yang tersedia tepat waktu dapat membantu pengguna mengambil keputusan. Namun, informasi yang cepat tersedia belum tentu akurat sehingga tetap memerlukan verifikasi dan pertimbangan profesional.
5. Pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Data historis dan informasi terkini dapat digunakan untuk menyusun proyeksi arus kas, menganalisis kemungkinan kenaikan biaya, mengidentifikasi piutang bermasalah, dan mengevaluasi skenario bisnis.

Hubungan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital dalam akuntansi tidak sekadar mengganti pencatatan manual dengan perangkat lunak. Transformasi juga mencakup perubahan proses kerja, tata kelola data, pengendalian internal, dan cara informasi digunakan untuk mendukung keputusan.

**Dampak terhadap Kualitas Informasi Keuangan**

Kualitas informasi keuangan merupakan aspek penting dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Berdasarkan Conceptual Framework for Financial Reporting dari IASB (2018), informasi keuangan yang berguna harus relevan dan merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat. Kegunaannya diperkuat oleh karakteristik keterbandingan, keterverifikasian, ketepatan waktu, dan keterpahaman. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

| Karakteristik | Penjelasan | Penerapan dalam lingkungan digital |
|---|---|---|
| Relevansi | Informasi mampu memengaruhi keputusan pengguna. | Laporan penjualan dan arus kas digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan. |
| Representasi tepat | Informasi menggambarkan substansi ekonomi secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material sejauh memungkinkan. | Data transaksi divalidasi sebelum masuk ke laporan keuangan. |
| Keterbandingan | Pengguna dapat membandingkan informasi antarperiode atau antarentitas. | Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika menyajikan laporan. |
| Keterverifikasian | Pengamat yang memiliki pengetahuan memadai dapat mencapai kesepakatan bahwa informasi menggambarkan fenomena yang disajikan secara tepat. | Transaksi didukung faktur, bukti pembayaran, kontrak, atau dokumen terkait. |
| Ketepatan waktu | Informasi tersedia cukup cepat untuk memengaruhi keputusan. | Manajemen menerima laporan penjualan dan posisi kas secara berkala. |

| | | |
|---|---|---|
| Keterpahaman | Informasi disajikan dengan jelas dan terstruktur. | Laporan dilengkapi penjelasan, klasifikasi akun, dan catatan yang memadai. |

Teknologi digital dapat membantu perusahaan meningkatkan ketepatan waktu dan keterbandingan informasi. Akan tetapi, kualitas informasi tetap bergantung pada kualitas data sumber, kebijakan akuntansi, kompetensi pengguna, dan efektivitas pengendalian.

Sebagai contoh, sistem akuntansi dapat menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis. Namun, jika terdapat transaksi penjualan fiktif, kesalahan klasifikasi biaya, atau transaksi yang belum dicatat, laporan tersebut tetap dapat menyesatkan. Otomatisasi mempercepat pemrosesan data, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan penilaian profesional dan pemeriksaan.

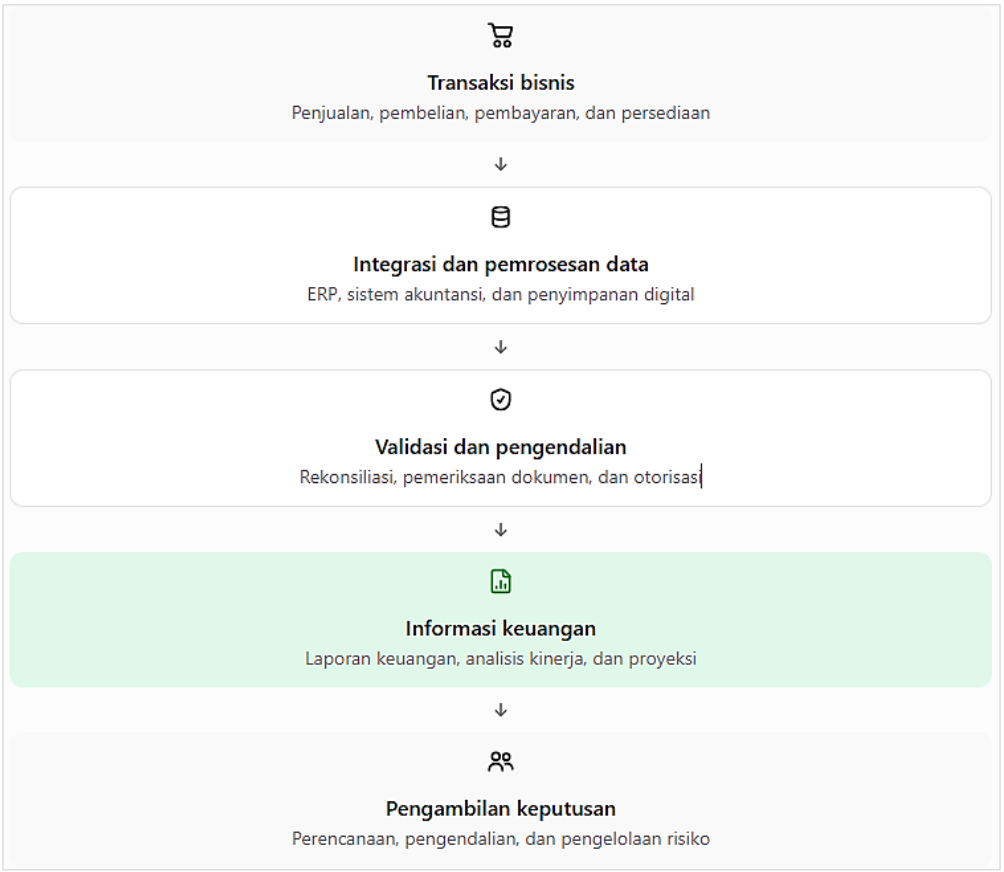


**Gambar 1.4.** Alur pemanfaatan data digital untuk menghasilkan informasi keuangan.

**Studi Kasus: Menghadapi Perubahan Pasar dengan Informasi Akuntansi Digital**

Untuk memahami penerapan konsep hiperkonektivitas dan volatilitas, perhatikan ilustrasi berikut. PT Nusantara Elektronik merupakan perusahaan dagang yang menjual peralatan elektronik melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Perusahaan menghadapi perubahan harga pemasok, persaingan harga di pasar digital, serta perubahan permintaan konsumen.

Pada awalnya, setiap cabang mencatat transaksi secara terpisah. Laporan penjualan dan persediaan baru dikumpulkan pada akhir bulan. Akibatnya, manajemen mengalami kesulitan mengetahui posisi persediaan secara cepat, membandingkan margin keuntungan setiap produk, dan memperkirakan kebutuhan kas untuk membayar pemasok.

Perusahaan kemudian menerapkan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan penjualan, persediaan, dan pembayaran digital. Setelah sistem berjalan, transaksi dari berbagai saluran penjualan dapat dikumpulkan ke dalam basis data terpusat. Bagian keuangan dapat melakukan rekonsiliasi, sedangkan manajemen dapat memantau perubahan pendapatan, biaya, dan persediaan secara lebih teratur. Berikut adalah contoh bagaimana informasi akuntansi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan bisnis.

| Kondisi bisnis | Informasi yang dibutuhkan | Respons yang dapat dipertimbangkan |
|---|---|---|
| Harga pemasok meningkat | Harga pokok penjualan dan margin per produk | Mengevaluasi harga jual, pemasok, atau struktur biaya. |
| Permintaan produk menurun | Tren penjualan dan perputaran persediaan | Menyesuaikan rencana pembelian dan strategi pemasaran. |
| Pembayaran pelanggan melambat | Umur piutang dan proyeksi penerimaan kas | Memperbaiki pemantauan piutang dan kebijakan kredit. |
| Biaya promosi meningkat | Biaya pemasaran dan pendapatan berdasarkan saluran penjualan | Mengevaluasi efektivitas pengeluaran promosi. |
| Terdapat transaksi tidak biasa | Log aktivitas, dokumen transaksi, dan hasil rekonsiliasi | Melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai prosedur. |

*Catatan: PT Nusantara Elektronik dan situasi yang digambarkan merupakan ilustrasi pembelajaran, bukan data perusahaan nyata.*

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa manfaat sistem digital tidak hanya terletak pada kecepatan penyusunan laporan. Nilai strategisnya muncul ketika informasi yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan mendukung keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sistem terintegrasi juga dapat memperluas dampak kesalahan apabila data yang tidak benar tersebar ke berbagai modul. Oleh sebab itu, perusahaan tetap membutuhkan pengendalian akses, prosedur otorisasi, rekonsiliasi berkala, pencadangan data, serta evaluasi terhadap keandalan sistem.

**Tantangan Akuntan dalam Lingkungan Bisnis yang Terhubung dan Volatil**

Perubahan lingkungan bisnis turut mengubah kompetensi yang dibutuhkan oleh profesi akuntan. Akuntan tidak hanya bertanggung jawab pada pencatatan dan penyajian laporan, tetapi juga perlu memahami bagaimana data diperoleh, diproses, dianalisis, dan digunakan oleh organisasi.

Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Menjaga kualitas data. Akuntan perlu memastikan transaksi dicatat secara lengkap, tepat, dan didukung bukti yang memadai.

2. Memahami teknologi. Pengetahuan mengenai sistem akuntansi digital, ERP, analitik data, dan AI membantu akuntan mengevaluasi informasi yang dihasilkan oleh sistem.
3. Memperkuat pengendalian internal. Akuntan perlu memahami risiko akses tidak sah, manipulasi transaksi, kesalahan integrasi, dan ketergantungan terhadap penyedia teknologi.
4. Menafsirkan informasi secara kritis. Hasil analitik dan proyeksi bukan kepastian mengenai masa depan. Asumsi, keterbatasan data, serta kondisi eksternal perlu dipertimbangkan.
5. Beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan model bisnis dan teknologi menuntut pembelajaran berkelanjutan serta penyesuaian prosedur kerja.
6. Menjaga etika dan kerahasiaan. Penggunaan data keuangan harus memperhatikan kewenangan akses, kerahasiaan informasi, dan ketentuan perlindungan data yang berlaku.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak menghilangkan peran akuntan. Sebaliknya, penggunaan teknologi meningkatkan pentingnya kemampuan untuk menilai kualitas informasi, memahami risiko, menerapkan standar akuntansi, dan menjelaskan implikasi keuangan kepada para pemangku kepentingan.

**Strategi Perusahaan Menghadapi Hiperkonektivitas dan Volatilitas**

Agar dapat memanfaatkan peluang digital tanpa mengabaikan risiko, perusahaan perlu mengembangkan pendekatan yang mencakup teknologi, manusia, proses, dan tata kelola.

1. Membangun integrasi sistem secara bertahap. Perusahaan perlu memetakan kebutuhan informasi, menentukan sistem yang akan diintegrasikan, dan menguji konsistensi data sebelum memperluas penerapan.
2. Menetapkan tata kelola data. Kebijakan perlu mengatur kepemilikan data, standar pencatatan, hak akses, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan data sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengembangkan pemantauan kinerja keuangan. Indikator seperti margin laba, perputaran persediaan, umur piutang, dan kecukupan kas dapat dipantau sesuai kebutuhan perusahaan.
4. Melakukan analisis skenario. Perusahaan dapat menguji dampak perubahan harga bahan baku, penurunan penjualan, atau keterlambatan penerimaan kas terhadap kinerja dan likuiditas.
5. Memperkuat keamanan dan keberlangsungan sistem. Pengendalian akses, autentikasi, pencadangan, pemulihan data, dan rencana penanganan insiden membantu mengurangi dampak gangguan digital.
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan teknologi, standar akuntansi, analisis data, dan etika profesi diperlukan agar pengguna dapat mengoperasikan sistem serta mengevaluasi hasilnya secara tepat.

Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat risiko yang dihadapi. Perusahaan tidak selalu

membutuhkan teknologi paling canggih; yang lebih penting adalah kesesuaian teknologi dengan kebutuhan informasi, kemampuan pengendalian, dan manfaat yang dapat diperoleh.

## 1.5 PERAN AKUNTAN DALAM ERA DIGITAL

Stigma klasik yang melekat pada profesi akuntan adalah sebagai seorang *bean counter*—seseorang yang duduk di belakang meja, memeriksa tumpukan nota, dan memasukkan angka ke dalam lembar kerja secara monoton. Di era digital, peran ini dipastikan usang. Otomatisasi berbasis *Robotic Process Automation* (RPA) dan kecerdasan buatan telah mengambil alih tugas-tugas klerikal rutin seperti input jurnal, rekonsiliasi bank, dan penyusunan draf awal laporan keuangan.

Lantas, apakah profesi akuntan akan punah? Tidak, melainkan bertransformasi. Peran akuntan bergeser ke tingkat yang lebih strategis (*Strategic Advisor*). Akuntan masa kini dituntut memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data besar (*Big Data*), merancang arsitektur sistem informasi keuangan yang aman, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis prediktif kepada jajaran eksekutif. Akuntan bertindak sebagai navigator yang menerjemahkan angka-angka digital menjadi narasi strategi bisnis yang komprehensif.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap praktik akuntansi, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan analisis kinerja perusahaan. Pada masa ketika proses bisnis masih banyak dilakukan secara manual, pekerjaan akuntan cenderung berfokus pada pencatatan transaksi, pengelompokan akun, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan berdasarkan dokumen yang tersedia. Saat ini, sebagian pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan sistem informasi akuntansi, *Enterprise Resource Planning* (ERP), komputasi awan (*cloud computing*), otomatisasi proses robotik (*robotic process automation* atau RPA), analitik data, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).

Perubahan ini tidak berarti bahwa profesi akuntan kehilangan relevansinya. Sebaliknya, perkembangan teknologi mendorong akuntan untuk memperluas kompetensi dan tanggung jawabnya. Akuntan tidak hanya dituntut menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga memahami proses bisnis, mengevaluasi kualitas data, menafsirkan informasi, mengidentifikasi risiko, serta memberikan masukan yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen.

International Accounting Standards Board (IASB, 2018), melalui *Conceptual Framework for Financial Reporting,* menekankan bahwa tujuan pelaporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada entitas. Tujuan ini tetap relevan dalam era digital. Teknologi dapat mempercepat pengolahan data, tetapi informasi yang dihasilkan harus tetap relevan, merepresentasikan kondisi ekonomi secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, *International Federation of Accountants* (IFAC) dan organisasi profesi akuntansi lainnya menempatkan kompetensi teknologi, kemampuan analitis, pertimbangan profesional, serta perilaku etis sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan profesi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan

penggunaan perangkat lunak, tetapi juga dengan perubahan pola pikir, proses kerja, dan kontribusi akuntan terhadap organisasi.

Dengan demikian, peran akuntan dalam era digital dapat dipahami sebagai perpaduan antara kemampuan teknis akuntansi, penguasaan teknologi, pemahaman bisnis, analisis informasi, dan integritas profesional.

**Pergeseran Peran Akuntan: Dari Pencatat Transaksi Menjadi Mitra Strategis**

Salah satu perubahan penting dalam profesi akuntan adalah pergeseran orientasi pekerjaan dari kegiatan administratif menuju kegiatan yang lebih analitis dan strategis. Perubahan ini terjadi karena sejumlah tugas rutin dapat diotomatisasi, sementara kebutuhan organisasi terhadap informasi yang akurat dan bermakna terus meningkat.

Pergeseran tersebut tidak berlangsung secara seragam pada semua perusahaan. Akuntan yang bekerja di organisasi kecil mungkin masih menjalankan banyak pekerjaan pencatatan secara langsung, sedangkan akuntan pada perusahaan besar dapat lebih banyak terlibat dalam analisis data, pengendalian, dan perencanaan strategis. Kedua bentuk pekerjaan tersebut tetap membutuhkan dasar akuntansi yang kuat.

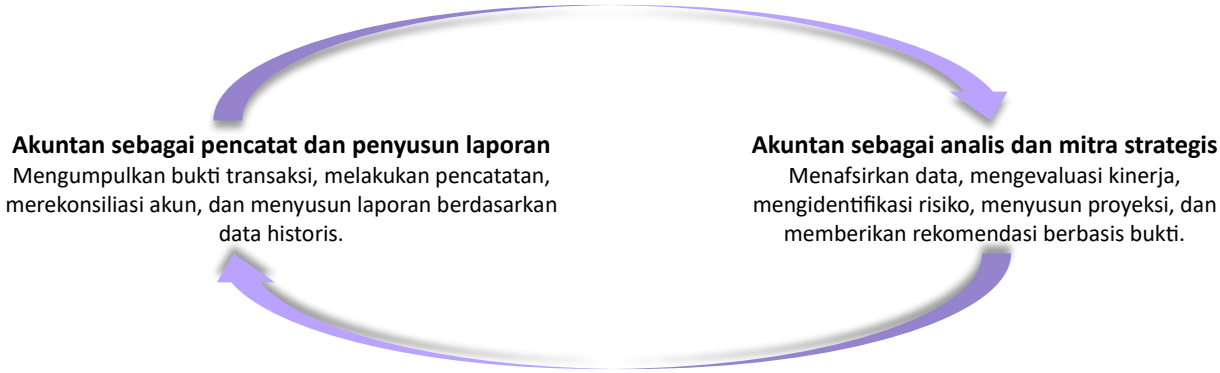


**Gambar 1.5.** Pergeseran orientasi peran akuntan dalam era digital.

Perbedaan orientasi peran akuntan dapat dilihat dalam tabel berikut.

| Aspek pekerjaan | Fokus konvensional | Fokus yang berkembang di era digital |
|---|---|---|
| Pencatatan transaksi | Memasukkan data transaksi secara manual. | Mengawasi pencatatan otomatis dan menangani transaksi yang memerlukan pemeriksaan. |
| Penyusunan laporan | Mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan laporan. | Memastikan kualitas laporan serta menjelaskan implikasi informasi kepada pengguna. |
| Rekonsiliasi | Membandingkan saldo melalui pemeriksaan manual. | Memanfaatkan pencocokan otomatis dan menyelidiki perbedaan yang terdeteksi. |
| Analisis keuangan | Menilai hasil historis. | Menggabungkan analisis historis dengan proyeksi dan analisis skenario. |
| Pengendalian | Memeriksa dokumen dan prosedur transaksi. | Mengevaluasi kontrol sistem, hak akses, jejak audit, dan risiko teknologi. |
| Dukungan manajemen | Menyediakan informasi keuangan. | Membantu menafsirkan informasi untuk perencanaan dan keputusan bisnis. |

Pergeseran ini menunjukkan bahwa otomatisasi lebih tepat dipahami sebagai perubahan komposisi pekerjaan, bukan penghapusan seluruh tanggung jawab akuntan. Proses rutin dapat dipercepat oleh teknologi, tetapi pemeriksaan, interpretasi, penilaian profesional, dan pertanggungjawaban tetap memerlukan keterlibatan manusia.

**Peran Akuntan dalam Pengelolaan Informasi Keuangan Digital**

Informasi keuangan merupakan salah satu dasar utama dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Dalam lingkungan digital, informasi tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti aplikasi penjualan, sistem pembayaran elektronik, sistem pengadaan, aplikasi penggajian, platform perdagangan elektronik, dan sistem manajemen persediaan.

Akuntan berperan memastikan bahwa data dari berbagai sumber tersebut dapat diolah menjadi informasi keuangan yang berkualitas. Peran ini meliputi beberapa kegiatan utama.

A. **Memastikan ketepatan pencatatan transaksi.** Meskipun sistem digital dapat mencatat transaksi secara otomatis, akuntan tetap perlu memastikan bahwa transaksi tersebut diakui, diukur, diklasifikasikan, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

   Sebagai contoh, sistem penjualan dapat mencatat pembayaran pelanggan pada saat transaksi terjadi. Namun, akuntan tetap perlu mengevaluasi apakah transaksi tersebut memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan, bagaimana perlakuan terhadap diskon, serta apakah terdapat retur atau kewajiban lain yang harus dicatat.

B. **Melakukan validasi dan rekonsiliasi data.** Data dari berbagai sistem tidak selalu memiliki nilai yang sama. Perbedaan dapat terjadi karena keterlambatan pembaruan, transaksi yang belum tercatat, duplikasi, kesalahan pemetaan akun, atau gangguan integrasi.

   Akuntan perlu melakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa saldo dan transaksi pada sistem yang berbeda dapat dijelaskan. Misalnya, saldo penerimaan kas dari sistem penjualan perlu dibandingkan dengan catatan bank dan buku besar.

C. **Menjaga konsistensi informasi.** Perusahaan yang memiliki banyak cabang atau saluran penjualan membutuhkan prosedur pencatatan yang konsisten. Akuntan berperan memastikan bahwa transaksi serupa diperlakukan dengan kebijakan akuntansi yang sesuai, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode dan antarunit.

D. **Mendukung penyusunan laporan keuangan.** Teknologi dapat mempercepat penyusunan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Namun, akuntan tetap perlu memeriksa kelengkapan data, ketepatan klasifikasi, penyesuaian akhir periode, dan kesesuaian penyajian dengan standar yang berlaku.

E. **Menjaga jejak audit.** Sistem digital dapat menyimpan informasi mengenai waktu transaksi, pengguna yang melakukan perubahan, dan dokumen pendukung. Akuntan perlu memastikan bahwa jejak tersebut tersedia, terlindungi, dan dapat digunakan untuk menelusuri asal-usul angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Melalui peran tersebut, akuntan berfungsi sebagai penghubung antara data operasional yang dihasilkan oleh sistem digital dan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen maupun pihak eksternal.

**Akuntan sebagai Analis Data dan Pendukung Pengambilan Keputusan**

Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan mengolah data keuangan dalam jumlah besar dan menggabungkannya dengan informasi operasional. Kondisi ini memperluas peran akuntan dari sekadar menyajikan angka menjadi menjelaskan arti angka tersebut bagi kegiatan bisnis. Akuntan dapat membantu manajemen menjawab pertanyaan seperti:

- Mengapa margin keuntungan menurun meskipun penjualan meningkat?
- Produk mana yang memberikan kontribusi laba terbesar?
- Apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek?
- Bagaimana perubahan harga bahan baku memengaruhi biaya dan laba?
- Apakah biaya pemasaran yang dikeluarkan sebanding dengan hasil penjualan?
- Bagaimana dampak keterlambatan pembayaran pelanggan terhadap arus kas?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akuntan dapat memanfaatkan analisis rasio keuangan, analisis tren, analisis varians, penganggaran, proyeksi arus kas, dan analisis skenario.

**Jenis analisis yang dapat dilakukan akuntan**

| Jenis analisis | Tujuan | Contoh penerapan |
|---|---|---|
| Analisis tren | Mengamati perubahan kinerja antarperiode. | Membandingkan pertumbuhan penjualan selama 12 bulan. |
| Analisis varians | Membandingkan realisasi dengan anggaran atau target. | Mengidentifikasi penyebab biaya produksi melebihi anggaran. |
| Analisis profitabilitas | Mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba. | Menghitung margin laba per produk atau cabang. |
| Analisis likuiditas | Menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. | Mengevaluasi posisi kas dan kewajiban lancar. |
| Analisis arus kas | Menilai pola penerimaan dan pengeluaran kas. | Memproyeksikan kebutuhan kas untuk membayar pemasok. |
| Analisis skenario | Mengukur kemungkinan dampak perubahan asumsi bisnis. | Menghitung dampak kenaikan harga bahan baku terhadap laba. |

Analisis tersebut tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga membantu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang perlu diperiksa lebih lanjut. Sebagai contoh, penurunan laba tidak selalu disebabkan oleh penurunan penjualan. Penurunan tersebut dapat terjadi akibat meningkatnya harga pokok penjualan, bertambahnya biaya distribusi, perubahan komposisi produk, atau meningkatnya biaya pendanaan.

Dalam konteks ini, akuntan perlu memiliki kemampuan analitis dan komunikasi agar hasil analisis dapat dipahami oleh manajemen. Rekomendasi yang diberikan juga perlu menjelaskan asumsi, keterbatasan data, dan risiko yang mungkin muncul.

**Peran Akuntan dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Otomatisasi**

Kecerdasan buatan dan otomatisasi menjadi bagian dari transformasi pekerjaan akuntansi. Teknologi tersebut dapat membantu memproses dokumen, mengelompokkan transaksi, menemukan pola yang tidak biasa, serta mendukung penyusunan proyeksi keuangan. Akan tetapi, penggunaan teknologi tidak berarti bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dapat diserahkan kepada mesin. Akuntan tetap perlu memeriksa apakah hasil yang dihasilkan sesuai dengan bukti, kebijakan akuntansi, dan konteks bisnis.

1. **Otomatisasi pengolahan dokumen.** Teknologi pengenalan karakter optik (optical character recognition atau OCR) dan RPA dapat membantu mengambil informasi dari faktur, kuitansi, dan dokumen pembayaran. Akuntan memeriksa hasil ekstraksi, menangani data yang tidak terbaca, dan memastikan dokumen dicatat dengan benar.

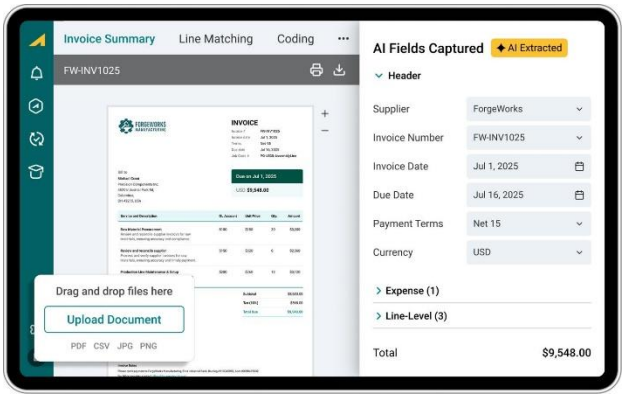


2. **Deteksi transaksi tidak biasa.** Model analitik dan AI dapat menandai transaksi yang menyimpang dari pola umum, misalnya pembayaran ganda, nilai transaksi yang tidak lazim, atau aktivitas di luar kebiasaan. Penandaan tersebut merupakan sinyal untuk pemeriksaan, bukan bukti otomatis bahwa kecurangan telah terjadi.

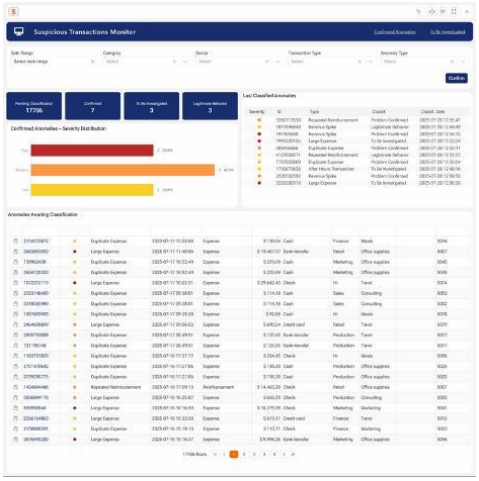


3. **Proyeksi keuangan.** Model analitik dapat membantu memperkirakan arus kas, pendapatan, atau biaya berdasarkan data historis dan asumsi tertentu. Akuntan perlu mengevaluasi kualitas data, kewajaran asumsi, dan kesesuaian hasil proyeksi dengan kondisi terkini.
4. **Penyusunan laporan dan ringkasan.** Sistem dapat membantu menyusun laporan rutin serta ringkasan perubahan kinerja. Akuntan tetap bertanggung jawab memastikan angka, penjelasan, dan kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dapat diverifikasi.

Penerapan AI dalam akuntansi juga menghadirkan risiko. Data yang tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Model yang sulit dijelaskan dapat menyulitkan proses pemeriksaan, sedangkan penggunaan layanan digital tanpa pengendalian yang memadai dapat menimbulkan risiko kerahasiaan informasi. Karena itu, akuntan perlu memahami setidaknya empat prinsip penggunaan teknologi:

1. Validasi hasil: hasil pemrosesan otomatis harus diperiksa berdasarkan dokumen atau sumber data yang relevan.

2. Pengawasan manusia: keputusan yang berdampak material tetap memerlukan pertimbangan profesional sesuai tanggung jawab dan kewenangan.
3. Perlindungan data: informasi keuangan dan data pribadi harus dikelola sesuai kebijakan serta peraturan yang berlaku.
4. Dokumentasi proses: metode, asumsi, perubahan, dan hasil pemeriksaan perlu didokumentasikan agar dapat ditelusuri.

Dengan demikian, kompetensi akuntan masa kini bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat digital, melainkan juga kemampuan mengevaluasi hasil teknologi secara kritis.

**Peran Akuntan dalam Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkenalkan risiko yang berbeda dari proses manual. Risiko tersebut meliputi kesalahan integrasi sistem, akses tanpa izin, manipulasi data, gangguan layanan, kehilangan data, dan ketergantungan terhadap penyedia teknologi.

Akuntan memiliki peran dalam membantu organisasi merancang, menjalankan, dan mengevaluasi pengendalian yang berkaitan dengan informasi keuangan.

Beberapa bentuk pengendalian yang relevan meliputi:

- Pengendalian akses: memastikan pengguna hanya dapat mengakses fungsi dan data sesuai tanggung jawabnya.
- Pemisahan tugas: menghindari pemusatan kewenangan yang memungkinkan satu orang membuat, menyetujui, dan menyelesaikan transaksi tanpa pemeriksaan.
- Otorisasi transaksi: menetapkan persetujuan sesuai batas kewenangan dan tingkat risiko.
- Rekonsiliasi berkala: membandingkan catatan dari sistem yang berbeda untuk mengidentifikasi selisih.
- Pemantauan aktivitas sistem: meninjau log aktivitas dan perubahan data yang relevan.
- Pencadangan dan pemulihan: memastikan data penting dapat dipulihkan apabila terjadi gangguan.
- Evaluasi penyedia layanan: memahami risiko yang timbul ketika pemrosesan atau penyimpanan data dilakukan oleh pihak ketiga.

Perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab atas keamanan teknologi biasanya dibagi antara fungsi keuangan, teknologi informasi, manajemen risiko, auditor internal, dan manajemen. Akuntan tidak selalu menjadi pihak yang mengelola seluruh pengamanan teknis, tetapi perlu memahami bagaimana risiko tersebut memengaruhi keandalan informasi keuangan.

Contohnya, apabila sistem pembayaran mengalami gangguan, penerimaan kas dapat tercatat pada platform pembayaran tetapi belum masuk ke rekening bank. Akuntan perlu melakukan rekonsiliasi dan memastikan perbedaan tersebut dapat dijelaskan. Jika ditemukan transaksi yang tidak sah, akuntan perlu bekerja sama dengan fungsi terkait untuk menginvestigasi dampak keuangannya dan memastikan pencatatannya sesuai.

**Akuntan sebagai Mitra Strategis Manajemen**

Selain menghasilkan informasi yang andal, akuntan dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan evaluasi strategi perusahaan. Peran ini sering berkaitan dengan

akuntansi manajemen, penganggaran, analisis biaya, pengukuran kinerja, dan perencanaan keuangan. Akuntan sebagai mitra strategis membantu manajemen memahami konsekuensi keuangan dari alternatif keputusan. Misalnya, sebelum perusahaan membuka cabang baru, akuntan dapat membantu menilai kebutuhan investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, kebutuhan modal kerja, dan kemungkinan periode pengembalian investasi.
Kontribusi akuntan dalam pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi empat kegiatan utama.

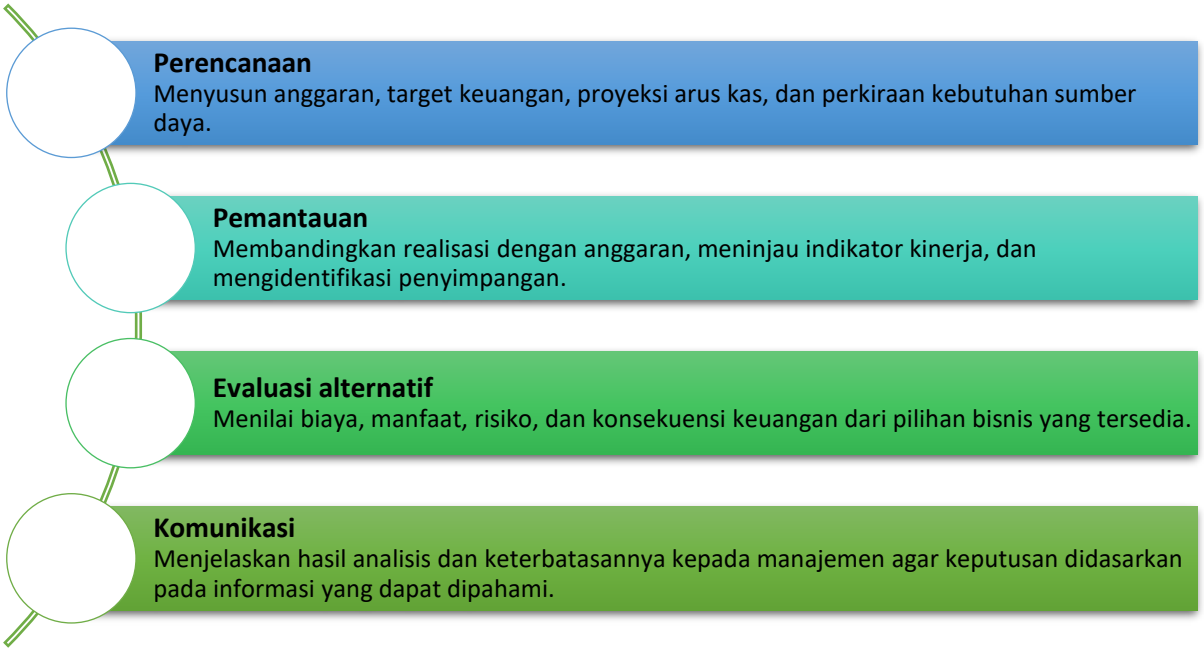


**Gambar 1.6.** Kontribusi akuntan dalam siklus pengambilan keputusan. Sumber: Ilustrasi penulis.

Sebagai ilustrasi, perusahaan dapat mempertimbangkan apakah akan mempertahankan pemasok lama atau beralih ke pemasok baru yang menawarkan harga lebih rendah. Akuntan dapat membantu menghitung penghematan biaya, tetapi analisis juga perlu mempertimbangkan kualitas barang, biaya pengiriman, syarat pembayaran, risiko keterlambatan, dan dampaknya terhadap persediaan.

Keputusan akhir tetap merupakan tanggung jawab manajemen sesuai kewenangannya. Kontribusi akuntan adalah menyediakan analisis yang transparan, menguji asumsi, dan menunjukkan konsekuensi keuangan dari setiap alternatif.

**Etika Profesi dan Tanggung Jawab Akuntan dalam Era Digital**

Semakin luasnya penggunaan teknologi dalam akuntansi membuat persoalan etika profesi menjadi semakin kompleks. Akuntan dapat memiliki akses terhadap informasi sensitif, seperti laporan keuangan internal, data gaji, informasi pelanggan, rincian transaksi, dan rencana bisnis. Informasi tersebut harus digunakan sesuai tujuan yang sah, kewenangan yang diberikan, serta ketentuan kerahasiaan yang berlaku.

Teknologi juga dapat menimbulkan situasi yang memerlukan pertimbangan etis. Sebagai contoh, sistem AI dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan data yang tidak

lengkap atau pola historis yang mengandung bias. Akuntan tidak seharusnya menerima hasil tersebut secara otomatis tanpa mengevaluasi kewajaran dan relevansinya. Dalam praktik profesional, akuntan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

1. Integritas. Akuntan harus menyajikan informasi secara jujur dan tidak dengan sengaja memanipulasi angka, menghilangkan informasi material, atau menggunakan teknologi untuk menyembunyikan penyimpangan.
2. Objektivitas. Kesimpulan dan rekomendasi harus didasarkan pada bukti yang relevan, bukan pada kepentingan pribadi atau tekanan pihak tertentu.
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Akuntan perlu memperbarui pengetahuan, memahami keterbatasan teknologi yang digunakan, dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar serta tingkat kompetensi yang dimiliki.
4. Kerahasiaan. Informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional tidak boleh diungkapkan atau dimanfaatkan secara tidak semestinya. Penggunaan layanan AI eksternal, misalnya, harus mempertimbangkan kebijakan organisasi, klasifikasi data, dan ketentuan perlindungan informasi.
5. Perilaku professional. Akuntan perlu mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kerangka etika profesi akuntan yang dikembangkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), khususnya International Code of Ethics for Professional Accountants. Dalam konteks digital, penerapan prinsip etika perlu didukung prosedur konkret, seperti pembatasan akses, dokumentasi penggunaan AI, pemeriksaan hasil otomatis, dan pengamanan dokumen elektronik.

Etika digital dengan demikian bukan sekadar persoalan menjaga kata sandi atau menghindari kebocoran data. Etika digital juga mencakup tanggung jawab dalam menggunakan informasi, menjelaskan keterbatasan analisis, menjaga objektivitas, dan memastikan teknologi tidak digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan yang menyesatkan.

**Kompetensi yang Dibutuhkan Akuntan di Era Digital**

Perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis menuntut akuntan untuk mengembangkan kombinasi kompetensi teknis, digital, analitis, interpersonal, dan etis. Kompetensi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh penguasaan perangkat lunak.

- *Kompetensi akuntansi.* Memahami standar akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan dan pengukuran transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta perpajakan sesuai ruang lingkup pekerjaan.
- *Kompetensi digital.* Mampu menggunakan perangkat lunak akuntansi, spreadsheet, ERP, sistem berbasis awan, dan alat analisis data yang relevan dengan pekerjaan.
- *Kompetensi analitis.* Mampu mengidentifikasi pola, mengevaluasi penyimpangan, menguji asumsi, dan menyusun kesimpulan berdasarkan data serta bukti yang tersedia.
- *Kompetensi komunikasi dan bisnis.* Mampu menjelaskan informasi keuangan kepada pengguna dengan latar belakang berbeda serta memahami proses bisnis yang menghasilkan angka-angka tersebut.

- *Kompetensi risiko dan tata Kelola.* Memahami pengendalian internal, keamanan informasi, jejak audit, risiko teknologi, dan mekanisme pemeriksaan terhadap proses digital.
- *Kompetensi etika dan pembelajaran berkelanjutan.* Menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta terus memperbarui pengetahuan seiring perubahan teknologi dan standar profesional.

Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan profesi berkelanjutan, sertifikasi yang relevan, praktik menggunakan data, dan kolaborasi dengan tenaga ahli teknologi informasi. Akuntan juga perlu mengembangkan sikap kritis agar mampu membedakan antara hasil perhitungan yang benar secara matematis dan kesimpulan yang benar secara akuntansi maupun bisnis.

Sebagai contoh, sistem dapat menghitung rasio profitabilitas secara tepat berdasarkan angka yang dimasukkan. Namun, jika biaya belum dicatat secara lengkap atau pendapatan diakui pada periode yang tidak tepat, rasio tersebut tetap dapat memberikan gambaran yang keliru. Oleh sebab itu, kompetensi akuntansi tetap menjadi fondasi bagi pemanfaatan teknologi.

**Studi Kasus: Transformasi Peran Akuntan pada Perusahaan Perdagangan Digital**

Untuk memperjelas pembahasan, perhatikan ilustrasi PT Cakrawala Niaga, sebuah perusahaan yang menjual perlengkapan rumah tangga melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Pada tahap awal, perusahaan menggunakan spreadsheet terpisah untuk mencatat penjualan, pembelian, persediaan, dan pengeluaran operasional. Bagian akuntansi membutuhkan waktu untuk menggabungkan data dari setiap unit. Ketika volume transaksi meningkat, risiko duplikasi pencatatan dan keterlambatan laporan juga bertambah.

Perusahaan kemudian menerapkan sistem akuntansi terintegrasi yang menghubungkan transaksi penjualan, persediaan, pembayaran, dan buku besar. Sistem tersebut menghasilkan ringkasan transaksi secara otomatis dan menyediakan laporan yang dapat diperbarui sesuai alur pemrosesan data. Perubahan ini memengaruhi pekerjaan akuntan dalam beberapa cara.

| Sebelum transformasi digital | Setelah transformasi digital |
|---|---|
| Menggabungkan data penjualan dari sejumlah file. | Memantau integrasi data dan memeriksa transaksi yang gagal diproses. |
| Memeriksa transaksi satu per satu secara manual. | Memanfaatkan aturan validasi dan memusatkan pemeriksaan pada transaksi yang ditandai sistem. |
| Menyusun laporan setelah data dari semua unit terkumpul. | Memantau laporan berkala dan memastikan kelengkapan serta ketepatan data. |
| Membuat rekap kinerja historis. | Menganalisis tren, varians, dan kemungkinan dampak perubahan biaya. |
| Melaporkan angka kepada manajemen. | Menjelaskan penyebab perubahan kinerja dan menyusun alternatif tindakan. |

Dalam salah satu periode, sistem menunjukkan bahwa penjualan meningkat, tetapi margin laba mengalami penurunan. Akuntan kemudian membandingkan harga pokok penjualan, biaya pengiriman, diskon penjualan, dan komposisi produk. Analisis menemukan bahwa peningkatan penjualan terutama berasal dari produk dengan margin lebih rendah, sementara biaya promosi dan pengiriman juga meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, akuntan menyampaikan analisis kepada manajemen. Manajemen selanjutnya dapat mempertimbangkan evaluasi strategi diskon, efisiensi distribusi, dan pengelolaan komposisi produk. Nilai tambah akuntan tidak berhenti pada kemampuan menyajikan laporan. Akuntan juga berperan menjelaskan mengapa perubahan terjadi, menguji bukti yang mendukung penjelasan tersebut, serta membantu manajemen memahami konsekuensi keuangan dari pilihan yang tersedia.

**Tantangan dan Peluang Profesi Akuntan pada Masa Mendatang**

Perkembangan teknologi membuka peluang bagi profesi akuntan untuk memperluas kontribusinya, tetapi juga menuntut kesiapan menghadapi perubahan.

**Tantangan profesi**

1. Perubahan kebutuhan kompetensi. Akuntan harus terus memperbarui kemampuan agar dapat menggunakan teknologi dan menilai hasilnya secara tepat.
2. Ketergantungan terhadap sistem. Gangguan layanan, kesalahan konfigurasi, atau integrasi yang tidak tepat dapat memengaruhi pencatatan dan pelaporan.
3. Risiko keamanan dan kerahasiaan. Semakin banyak informasi tersimpan secara digital, semakin penting perlindungan terhadap akses dan penggunaan yang tidak sah.
4. Ketidakpastian hasil AI. Model dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat apabila data, asumsi, atau proses validasinya bermasalah.
5. Perubahan proses dan organisasi. Penerapan sistem baru memerlukan penyesuaian prosedur, pembagian tugas, pelatihan, dan budaya kerja.

**Peluang profesi**

1. Analisis keuangan yang lebih mendalam. Akuntan dapat memanfaatkan data terintegrasi untuk memahami pola biaya, profitabilitas, dan arus kas.
2. Perluasan layanan profesional. Kompetensi digital dapat mendukung layanan konsultasi sistem informasi akuntansi, analisis bisnis, dan pengendalian risiko.
3. Peningkatan efisiensi. Otomatisasi pekerjaan rutin memungkinkan waktu dialihkan pada pemeriksaan, analisis, dan komunikasi dengan manajemen.
4. Penguatan pengendalian. Analitik dapat membantu mengidentifikasi anomali dan memprioritaskan pemeriksaan berdasarkan risiko.
5. Kolaborasi lintas disiplin. Akuntan dapat bekerja sama dengan ahli teknologi informasi, analis data, auditor, dan manajemen untuk meningkatkan kualitas keputusan.

Peluang tersebut tidak otomatis terwujud hanya dengan membeli perangkat lunak atau menerapkan AI. Hasilnya bergantung pada kesiapan organisasi, kualitas data, pengendalian internal, kompetensi tenaga kerja, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan perusahaan.

Oleh karena itu, masa depan profesi akuntan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan mempertahankan kualitas pertimbangan profesional di tengah proses bisnis yang semakin otomatis.

## 1.6 TANTANGAN PROFESI AKUNTAN ABAD KE-21

Profesi akuntan pada abad ke-21 menghadapi perubahan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, perubahan regulasi, meningkatnya tuntutan transparansi, serta berkembangnya perhatian terhadap keberlanjutan bisnis. Akuntan tidak lagi bekerja dalam lingkungan yang hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Mereka juga harus memahami perubahan model bisnis, risiko teknologi, kualitas data, tata kelola perusahaan, serta kebutuhan informasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Di samping perubahan teknologi, akuntan harus menghadapi tuntutan untuk menghasilkan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Investor, kreditor, regulator, manajemen, serta pihak lain membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, atau penyajian informasi yang tidak memadai dapat memengaruhi keputusan ekonomi dan kepercayaan terhadap perusahaan.

International Accounting Standards Board (IASB, 2018) melalui *Conceptual Framework for Financial Reporting* menegaskan pentingnya informasi keuangan yang relevan dan merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat. Prinsip tersebut tetap menjadi landasan profesi akuntan, sekalipun proses pengumpulan dan pengolahan data semakin bergantung pada teknologi digital.

Sementara itu, International Code of Ethics for Professional Accountants yang diterbitkan International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) menekankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut semakin penting ketika akuntan menggunakan sistem otomatis dan berhadapan dengan data dalam jumlah besar.

Dengan demikian, tantangan profesi akuntan abad ke-21 tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi. Tantangan tersebut juga mencakup kemampuan mempertahankan kualitas informasi, menilai risiko, mematuhi standar dan peraturan, menjaga etika, serta memberikan kontribusi yang bermakna bagi organisasi dan masyarakat.

**Tantangan Otomatisasi dan Perkembangan Kecerdasan Buatan**

Salah satu tantangan utama profesi akuntan adalah meningkatnya penggunaan otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam proses bisnis. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memasukkan data, membaca dokumen, mengklasifikasikan transaksi, melakukan rekonsiliasi, mendeteksi pola tidak biasa, serta membantu penyusunan laporan dan proyeksi keuangan. Pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu untuk dilakukan secara manual dapat diselesaikan lebih cepat apabila prosesnya terstruktur dan sistemnya dirancang

dengan baik. Akan tetapi, peningkatan otomatisasi juga menuntut perubahan kompetensi dan cara kerja akuntan.

A. **Perubahan komposisi pekerjaan akuntansi.** Pekerjaan rutin yang berulang dan mengikuti aturan tertentu relatif mudah diotomatisasi. Sebaliknya, pekerjaan yang memerlukan interpretasi standar akuntansi, evaluasi bukti, pemahaman konteks bisnis, dan pertimbangan profesional tetap membutuhkan pengawasan yang memadai.

   Sebagai contoh, perangkat lunak dapat mencocokkan faktur dengan pesanan pembelian dan bukti penerimaan barang. Namun, ketika terdapat perbedaan jumlah barang, ketidaksesuaian harga, atau ketentuan kontrak yang tidak biasa, akuntan perlu mengevaluasi penyebab perbedaan tersebut sebelum transaksi disetujui atau dicatat. Perubahan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

| Aspek pekerjaan | Perubahan akibat otomatisasi | Tantangan bagi akuntan |
|---|---|---|
| Pencatatan transaksi | Sebagian pencatatan dilakukan secara otomatis. | Memastikan data sumber dan klasifikasi akun benar. |
| Rekonsiliasi | Sistem dapat mencocokkan data dan menandai selisih. | Menyelidiki perbedaan yang tidak dapat diselesaikan otomatis. |
| Pengolahan dokumen | OCR dan AI dapat mengekstraksi data dokumen. | Memeriksa hasil pembacaan yang keliru atau tidak lengkap. |
| Analisis keuangan | Perangkat analitik dapat menghasilkan ringkasan dan proyeksi. | Menguji asumsi, menafsirkan hasil, dan menilai keterbatasan model. |
| Penyusunan laporan | Sistem dapat menghasilkan laporan berdasarkan data yang tersedia. | Menjamin kelengkapan, ketepatan, dan kepatuhan terhadap standar. |

B. **Risiko ketergantungan terhadap teknologi.** Otomatisasi tidak selalu menghasilkan informasi yang benar. Apabila sistem menerima data yang salah, menggunakan aturan yang tidak sesuai, atau mengalami kesalahan konfigurasi, hasil yang dihasilkan juga dapat keliru. Risiko ini sering dijelaskan melalui prinsip garbage in, garbage out, yaitu data masukan yang buruk dapat menghasilkan keluaran yang buruk. Dalam akuntansi, risiko tersebut dapat muncul ketika transaksi duplikat masuk ke sistem, akun dipetakan secara keliru, atau parameter penghitungan tidak diperbarui setelah terjadi perubahan kebijakan. Karena itu, akuntan harus memahami bagaimana sistem bekerja, bagaimana data diproses, dan kontrol apa yang diterapkan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan.

C. **Perubahan kompetensi professional.** Akuntan perlu meningkatkan kemampuan menggunakan sistem digital, memahami analitik data, mengevaluasi keluaran AI, dan berkomunikasi dengan tenaga ahli teknologi informasi. Kemampuan tersebut melengkapi, bukan menggantikan, pemahaman mengenai standar akuntansi dan prinsip etika.

   Akuntan yang hanya bergantung pada hasil sistem tanpa melakukan pemeriksaan berisiko menerima informasi yang keliru. Sebaliknya, akuntan yang memahami

keterbatasan teknologi dapat menggunakan otomatisasi secara lebih efektif sekaligus mempertahankan tanggung jawab profesional.

**Tantangan Keamanan Siber dan Perlindungan Data**

Digitalisasi membuat data keuangan semakin banyak disimpan, diproses, dan dipertukarkan melalui jaringan. Kondisi ini membantu meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas risiko keamanan informasi. Data akuntansi dapat mencakup saldo rekening, informasi pembayaran, identitas pelanggan, data penggajian, kontrak pemasok, dan laporan keuangan internal. Apabila data tersebut diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang, dampaknya dapat berupa kerugian finansial, gangguan operasional, kewajiban hukum, dan penurunan kepercayaan pemangku kepentingan. Beberapa risiko utama keamanan digital adalah sebagai berikut:

1. *Akses tanpa izin.* Pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat mencoba mengakses sistem melalui pencurian kredensial, penggunaan kata sandi yang lemah, atau penyalahgunaan hak akses pengguna.
2. *Serangan perangkat lunak berbahaya.* Malware dan ransomware dapat mengganggu sistem, mengenkripsi data, atau menghambat akses terhadap dokumen penting perusahaan.
3. *Manipulasi transaksi.* Perubahan tidak sah terhadap rekening penerima, nominal pembayaran, data pemasok, atau catatan transaksi dapat menyebabkan kerugian dan memengaruhi keandalan laporan keuangan.
4. *Kebocoran informasi.* Informasi keuangan atau data pribadi dapat tersebar akibat kesalahan konfigurasi, pengiriman dokumen kepada penerima yang salah, atau penggunaan layanan digital yang tidak sesuai kebijakan perusahaan.
5. *Gangguan penyedia layanan.* Perusahaan yang menggunakan layanan akuntansi berbasis awan dapat terdampak ketika penyedia layanan mengalami gangguan, insiden keamanan, atau masalah ketersediaan sistem.

Dalam menghadapi risiko tersebut, akuntan perlu bekerja sama dengan bagian teknologi informasi, keamanan siber, manajemen risiko, dan auditor internal. Langkah pengendalian yang dapat diterapkan meliputi pengaturan hak akses, autentikasi multifaktor, pemisahan tugas, pencatatan aktivitas pengguna, rekonsiliasi transaksi, pencadangan data, serta prosedur pemulihan ketika terjadi gangguan.

Di Indonesia, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sesuai ruang lingkup penerapannya. Pengelolaan data tidak cukup hanya berorientasi pada kemudahan akses; perusahaan juga harus mempertimbangkan dasar pemrosesan, tujuan penggunaan, keamanan, dan kewajiban yang berlaku. Dengan demikian, keamanan siber bukan semata-mata urusan teknis. Keamanan merupakan bagian dari tata kelola informasi yang menentukan keandalan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

**Tantangan Perubahan Standar Akuntansi dan Regulasi**

Profesi akuntan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan standar akuntansi, perpajakan, pelaporan, dan ketentuan lain yang relevan. Perubahan tersebut dapat

memengaruhi pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, penyajian laporan keuangan, pengungkapan informasi, serta prosedur pengendalian internal.

Dalam lingkungan bisnis global, perusahaan juga dapat berhadapan dengan transaksi lintas negara, mata uang asing, perbedaan yurisdiksi, dan persyaratan pelaporan yang beragam. Akuntan harus memahami ketentuan yang berlaku bagi entitas tempatnya bekerja serta memastikan bahwa kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten.

Tantangan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

1. Mengikuti perkembangan standar akuntansi. Standar akuntansi dapat mengalami perubahan untuk merespons perkembangan transaksi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Akuntan perlu memahami bukan hanya isi ketentuan baru, tetapi juga alasan perubahan dan dampaknya terhadap sistem serta laporan perusahaan. Misalnya, perubahan ketentuan mengenai pengakuan pendapatan atau akuntansi sewa dapat memengaruhi waktu pengakuan pendapatan, jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta rasio keuangan perusahaan.
2. Menyesuaikan sistem informasi. Perubahan kebijakan akuntansi mungkin memerlukan pembaruan konfigurasi sistem, struktur akun, prosedur penutupan buku, dan format laporan. Apabila perubahan hanya diterapkan pada kebijakan tertulis tanpa penyesuaian sistem, perusahaan berisiko menghasilkan laporan yang tidak konsisten.
3. Menjaga kepatuhan perpajakan. Perusahaan harus menyesuaikan pencatatan dan pelaporan pajak dengan ketentuan yang berlaku. Akuntan perlu memahami perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan perlakuan perpajakan, termasuk konsekuensinya terhadap rekonsiliasi fiskal dan kewajiban perpajakan.
4. Mengelola transaksi lintas negara. Perusahaan yang menjalankan transaksi internasional perlu mempertimbangkan perbedaan mata uang, ketentuan perpajakan, kontrak, dan standar pelaporan. Akuntan perlu memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat sesuai ketentuan yang relevan serta didukung dokumentasi yang memadai.
5. Menjaga dokumentasi dan kesiapan pemeriksaan. Kepatuhan tidak cukup dibuktikan dengan menyatakan bahwa perusahaan telah mengikuti standar. Perusahaan perlu memiliki bukti yang menunjukkan bagaimana kebijakan diterapkan, bagaimana angka dihitung, dan bagaimana keputusan akuntansi dibuat.

Oleh sebab itu, pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian penting dari profesi akuntan. Pelatihan, seminar profesional, pembaruan pengetahuan, dan konsultasi dengan ahli yang relevan dapat membantu akuntan memahami perubahan yang berdampak terhadap pekerjaannya.

**Tantangan Globalisasi dan Kompleksitas Transaksi Bisnis**

Globalisasi memperluas hubungan ekonomi antara perusahaan, pemasok, pelanggan, investor, dan lembaga keuangan di berbagai negara. Perusahaan dapat membeli bahan baku dari luar negeri, menjual produk melalui platform internasional, menerima pembayaran dalam mata uang asing, atau mengelola anak perusahaan di berbagai yurisdiksi. Perkembangan tersebut meningkatkan kompleksitas pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntan harus

memahami substansi transaksi, ketentuan yang berlaku, dan risiko yang muncul dari hubungan bisnis lintas negara. Beberapa tantangan utama meliputi:

- Fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai mata uang dapat memengaruhi nilai transaksi, saldo moneter, dan hasil keuangan perusahaan.
- Perbedaan ketentuan pelaporan. Entitas yang beroperasi di beberapa negara mungkin harus memenuhi ketentuan pelaporan yang berbeda.
- Kompleksitas rantai pasok. Perubahan biaya pengiriman, waktu pengadaan, dan kondisi pemasok dapat memengaruhi persediaan, biaya, dan arus kas.
- Perbedaan perpajakan. Transaksi lintas negara dapat melibatkan kewajiban perpajakan yang memerlukan analisis sesuai ketentuan terkait.
- Kebutuhan konsolidasi. Kelompok usaha dengan beberapa entitas perlu menyelaraskan kebijakan dan periode pelaporan serta melakukan penyesuaian konsolidasi yang diperlukan.

Sebagai ilustrasi, perusahaan Indonesia yang membeli bahan baku dalam dolar Amerika Serikat dapat mengalami perubahan nilai rupiah atas kewajiban tersebut antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Akuntan harus menentukan perlakuan akuntansi sesuai standar yang berlaku dan memastikan dampak perubahan kurs disajikan secara tepat.

Dalam konteks ini, kemampuan memahami transaksi lintas negara menjadi pelengkap bagi kompetensi akuntansi. Akuntan juga perlu mampu bekerja sama dengan bagian hukum, perpajakan, pengadaan, dan keuangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

**Tantangan Transparansi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Perusahaan**

Pemangku kepentingan semakin membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja, kondisi keuangan, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab perusahaan. Informasi yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan, meningkatkan ketidakpastian, dan menyulitkan evaluasi atas keputusan manajemen.

Dalam kondisi tersebut, akuntan memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan yang dapat ditelusuri, pelaporan yang sesuai standar, dokumentasi keputusan akuntansi, dan penerapan pengendalian internal.

Tantangan tata kelola dapat muncul dalam beberapa bentuk.

*Pertama,* tekanan untuk mencapai target keuangan. Manajemen mungkin menghadapi tekanan untuk mencapai target laba, pendapatan, atau rasio keuangan tertentu. Akuntan harus tetap berpegang pada bukti dan standar yang berlaku serta tidak mengubah perlakuan akuntansi secara tidak tepat hanya untuk menghasilkan gambaran kinerja tertentu.

*Kedua,* konflik kepentingan. Akuntan dapat menghadapi situasi ketika kepentingan pribadi atau kepentingan pihak tertentu bertentangan dengan kewajiban profesional. Kondisi tersebut memerlukan penilaian yang objektif dan penanganan sesuai kode etik serta prosedur organisasi.

*Ketiga,* keterbatasan informasi. Data yang tidak lengkap atau tidak tersedia tepat waktu dapat menghambat penyusunan laporan. Akuntan perlu mengidentifikasi kekurangan tersebut, menilai dampaknya, dan memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak menyesatkan.

*Keempat,* efektivitas pengawasan. Sistem pengendalian yang dirancang dengan baik tetap memerlukan pelaksanaan dan evaluasi. Akuntan perlu memastikan bahwa prosedur pemeriksaan, otorisasi, dan rekonsiliasi benar-benar diterapkan.

Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan tertulis, tetapi juga pada perilaku profesional, konsistensi pelaksanaan prosedur, dan kesediaan organisasi untuk menindaklanjuti penyimpangan.

**Tantangan Akuntansi Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial**

Selain informasi keuangan, perusahaan semakin menghadapi kebutuhan untuk menjelaskan dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola. Perhatian ini berkaitan dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan dan informasi yang berhubungan dengan risiko serta peluang lingkungan dan sosial. Akuntan dapat berkontribusi dalam proses pengumpulan data, perancangan pengendalian, pengukuran indikator, dokumentasi metodologi, dan pemeriksaan konsistensi informasi keberlanjutan. Namun, tidak semua informasi keberlanjutan merupakan informasi akuntansi keuangan, dan tidak semua akuntan otomatis memiliki kompetensi khusus untuk setiap aspek lingkungan atau sosial. Tantangan utama dalam bidang ini meliputi:

1. Kualitas data nonkeuangan. Informasi mengenai konsumsi energi, emisi, penggunaan air, atau keselamatan kerja dapat berasal dari berbagai unit dan sistem yang berbeda.
2. Konsistensi pengukuran. Perusahaan membutuhkan definisi, batas pengukuran, periode, dan metode perhitungan yang jelas agar informasi dapat dibandingkan.
3. Keterlacakan informasi. Angka yang dilaporkan perlu didukung dokumen, sumber data, dan prosedur yang dapat diperiksa.
4. Risiko klaim yang menyesatkan. Pernyataan mengenai kinerja keberlanjutan harus didukung bukti dan tidak boleh memberikan gambaran yang berlebihan.
5. Perkembangan standar pelaporan. Perusahaan perlu mengidentifikasi standar dan persyaratan yang relevan dengan yurisdiksi, sektor, serta karakteristik entitasnya.

Dalam konteks internasional, IFRS Foundation melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan, termasuk IFRS S1 mengenai persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan dan IFRS S2 mengenai pengungkapan terkait iklim. Penerapan standar tersebut harus memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi entitas terkait dan status adopsinya di yurisdiksi masing-masing.

Perkembangan ini memperluas kebutuhan kompetensi akuntan dalam pengelolaan data dan pengendalian informasi. Akuntan dapat membantu memastikan bahwa informasi keberlanjutan memiliki proses pengumpulan dan dokumentasi yang memadai, sedangkan pengukuran teknis tertentu mungkin memerlukan kolaborasi dengan ahli lingkungan, teknik, atau bidang terkait.

**Tantangan Etika dalam Penggunaan Teknologi Digital**

Penggunaan teknologi digital menimbulkan persoalan etika yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan prosedur teknis. Akuntan perlu mempertimbangkan

dampak keputusan, kerahasiaan informasi, objektivitas, serta tanggung jawab atas hasil pekerjaan.

Contohnya, seorang akuntan dapat menggunakan AI untuk membantu membuat ringkasan laporan keuangan. Namun, jika laporan tersebut berisi data internal yang bersifat rahasia, akuntan harus memastikan bahwa penggunaan layanan tersebut diizinkan dan sesuai dengan kebijakan keamanan informasi perusahaan.

Demikian pula, jika sistem AI menghasilkan indikasi adanya transaksi mencurigakan, akuntan tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Indikasi tersebut harus dievaluasi berdasarkan bukti, konteks, dan prosedur yang relevan. Prinsip etika yang penting dalam konteks ini meliputi:

- Integritas: menyampaikan informasi secara jujur dan tidak memanipulasi hasil.
- Objektivitas: menghindari bias serta konflik kepentingan dalam penilaian profesional.
- Kompetensi dan kehati-hatian: memahami keterbatasan teknologi dan memastikan pekerjaan diperiksa secara memadai.
- Kerahasiaan: melindungi informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional.
- Perilaku profesional: mematuhi ketentuan yang relevan dan menjaga kepercayaan publik.

Penerapan prinsip tersebut perlu diwujudkan dalam prosedur nyata, seperti peninjauan hasil AI, dokumentasi proses, pengendalian akses, pemeriksaan sumber informasi, dan pembatasan penggunaan data rahasia pada sistem yang tidak disetujui.

**Strategi Menghadapi Tantangan Profesi Akuntan Abad Ke-21**

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, akuntan dan organisasi perlu menerapkan strategi yang terencana. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga menjaga kualitas pekerjaan, ketahanan sistem, dan integritas profesi.

- *Pembelajaran profesional berkelanjutan*. Mengikuti pelatihan standar akuntansi, teknologi digital, analisis data, keamanan informasi, dan etika profesi sesuai kebutuhan pekerjaan.
- *Pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.* Memilih teknologi berdasarkan kebutuhan, menguji hasilnya, menetapkan kontrol, dan mengevaluasi risiko sebelum sistem digunakan secara luas.
- *Penguatan pengendalian internal.* Memastikan adanya pemisahan tugas, pembatasan akses, rekonsiliasi, pencatatan aktivitas, dan mekanisme tindak lanjut atas penyimpangan.
- *Pemantauan standar dan regulasi.* Menelaah pembaruan ketentuan yang relevan serta mengevaluasi dampaknya terhadap kebijakan akuntansi, sistem, dan prosedur pelaporan.
- *Kolaborasi lintas fungsi.* Bekerja sama dengan tenaga ahli teknologi informasi, hukum, perpajakan, manajemen risiko, auditor, dan bidang keberlanjutan sesuai kebutuhan.

- *Menjaga etika dan pertimbangan professional.* Memastikan keputusan dan pelaporan didukung bukti, dilakukan secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun prosesnya menggunakan teknologi otomatis.

Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan ukuran organisasi, kompleksitas transaksi, tingkat risiko, serta sumber daya yang tersedia. Perusahaan kecil, misalnya, dapat memulai dengan memperbaiki kualitas data, menggunakan perangkat lunak akuntansi yang sesuai, dan menerapkan pengendalian akses dasar sebelum mengadopsi sistem analitik yang lebih kompleks.

Sebaliknya, perusahaan dengan transaksi besar dan operasi lintas negara mungkin memerlukan tata kelola data yang lebih terstruktur, evaluasi sistem secara berkala, serta koordinasi antara berbagai fungsi profesional. Tujuan akhirnya adalah membangun profesi yang mampu beradaptasi dengan teknologi sekaligus menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik.

# BAB 2
# KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN

## 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL KONSTITUSI KEUANGAN

Kerangka konseptual akuntansi merupakan fondasi teoretis yang digunakan untuk menjelaskan tujuan, konsep, prinsip, dan dasar pemikiran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dalam praktik akuntansi modern, kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan agar informasi keuangan disusun secara konsisten, dapat dipahami, dan relevan bagi pihak-pihak yang menggunakannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan tidak sekadar berisi angka mengenai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Setiap angka yang disajikan merupakan hasil dari serangkaian keputusan akuntansi, mulai dari menentukan transaksi yang perlu dicatat, menetapkan kapan suatu transaksi diakui, memilih dasar pengukuran, hingga menentukan informasi yang perlu disajikan dan diungkapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan alasan di balik keputusan-keputusan tersebut.

Dalam konteks ini, kerangka konseptual dapat dianalogikan sebagai konstitusi keuangan. Sebagaimana konstitusi memberikan prinsip dasar bagi penyelenggaraan suatu negara, kerangka konseptual menyediakan landasan pemikiran bagi penyusunan dan pengembangan standar akuntansi. Analogi ini digunakan untuk menjelaskan peran fundamentalnya, bukan berarti kerangka konseptual mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan konstitusi negara.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat pentingnya kerangka konseptual. Sistem akuntansi berbasis cloud, perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP), analitik data, dan kecerdasan buatan memungkinkan transaksi diproses dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan pemrosesan tidak secara otomatis menjamin kebenaran informasi. Sistem tetap membutuhkan dasar konseptual untuk menentukan apakah suatu transaksi memenuhi definisi unsur laporan keuangan, kapan transaksi tersebut diakui, bagaimana nilainya diukur, dan informasi apa yang perlu diungkapkan.

Dengan demikian, kerangka konseptual menjadi penghubung antara teori akuntansi, standar pelaporan, teknologi, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

**Pengertian Kerangka Konseptual Akuntansi**

Secara umum, kerangka konseptual akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem konsep dan prinsip yang saling berkaitan untuk menjelaskan tujuan pelaporan keuangan serta menjadi dasar dalam pengembangan standar dan praktik akuntansi. Kerangka konseptual membantu menjawab pertanyaan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Untuk siapa laporan keuangan disusun?
2. Informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan?
3. Karakteristik apa yang membuat informasi keuangan berguna?

4. Kapan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi harus diakui?
5. Bagaimana aset, liabilitas, pendapatan, dan beban diukur?
6. Informasi apa yang harus disajikan atau diungkapkan?
7. Bagaimana ketidakpastian dan perubahan kondisi bisnis dipertimbangkan dalam pelaporan?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pencatatan transaksi, tetapi juga melibatkan pertimbangan konseptual mengenai substansi ekonomi suatu peristiwa.

Sebagai contoh, perusahaan menerima pembayaran sebesar Rp120.000.000 dari pelanggan pada bulan Desember untuk barang yang baru akan dikirimkan pada Januari tahun berikutnya. Sistem kas dapat langsung mencatat penerimaan uang tersebut sebagai arus kas masuk. Akan tetapi, penerimaan kas tidak dengan sendirinya menentukan kapan pendapatan harus diakui. Akuntan tetap harus mempertimbangkan substansi transaksi, kewajiban perusahaan kepada pelanggan, serta ketentuan standar yang berlaku.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan berbasis sistem harus tetap mengikuti prinsip pengakuan akuntansi. Kerangka konseptual membantu menjelaskan logika yang mendasari keputusan tersebut.

Menurut *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh IFRS Foundation, tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor yang berguna bagi investor yang ada dan calon investor, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya dalam mengambil keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Kerangka ini juga membahas karakteristik kualitatif informasi, unsur laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

Dengan demikian, kerangka konseptual bukanlah daftar prosedur teknis semata, melainkan struktur pemikiran yang menjelaskan mengapa suatu perlakuan akuntansi dipilih dan bagaimana perlakuan tersebut mendukung tujuan pelaporan keuangan.

**Tujuan dan Fungsi Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam menjaga agar penyusunan laporan keuangan tidak hanya mengikuti kebiasaan atau keputusan subjektif penyusun laporan. Kerangka ini menyediakan dasar pemikiran yang sistematis sehingga keputusan akuntansi dapat dipertanggungjawabkan.

**A. Menetapkan tujuan pelaporan keuangan**

Fungsi pertama adalah memberikan arah mengenai informasi yang harus dihasilkan oleh sistem akuntansi. Informasi keuangan disusun untuk membantu pengguna menilai kondisi keuangan, kinerja, serta kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masa depan.

Pengguna laporan keuangan meliputi investor, pemberi pinjaman, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan sesuai kebutuhan informasi masing-masing. Investor, misalnya, memerlukan informasi untuk menilai potensi imbal hasil dan risiko investasi.

Sementara itu, kreditor membutuhkan informasi untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran.

Kerangka konseptual membantu memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif.

**B. Menjadi dasar pengembangan standar akuntansi**

Standar akuntansi mengatur perlakuan terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Namun, dunia bisnis terus berkembang, sehingga dapat muncul transaksi baru yang belum diatur secara terperinci dalam standar yang tersedia.

Kerangka konseptual menyediakan landasan untuk mempertimbangkan transaksi tersebut secara logis. Meskipun demikian, kerangka konseptual tidak menggantikan standar akuntansi yang berlaku. Apabila suatu transaksi telah diatur oleh standar tertentu, entitas harus mengikuti ketentuan standar tersebut.

Sebagai contoh, transaksi yang melibatkan aset digital, kontrak berbasis teknologi, atau model bisnis berlangganan mungkin menimbulkan persoalan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Akuntan perlu menelaah standar yang relevan serta mempertimbangkan konsep dasar pelaporan keuangan ketika melakukan analisis.

**C. Meningkatkan konsistensi perlakuan akuntansi**

Kerangka konseptual membantu mengurangi perbedaan perlakuan terhadap transaksi yang memiliki substansi ekonomi serupa. Konsistensi diperlukan agar laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas.

Sebagai contoh, dua perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dengan karakteristik dan ketentuan kontrak yang sama seharusnya menerapkan ketentuan pengakuan pendapatan yang relevan secara konsisten. Perbedaan perlakuan perlu memiliki dasar yang dapat dijelaskan, bukan sekadar karena perbedaan preferensi penyusun laporan.

Konsistensi bukan berarti seluruh transaksi harus diperlakukan secara identik. Perbedaan substansi ekonomi, karakteristik kontrak, atau ketentuan standar dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda.

**D. Membantu penyelesaian persoalan akuntansi**

Dalam praktiknya, akuntan menghadapi transaksi yang membutuhkan pertimbangan profesional. Kerangka konseptual membantu proses penalaran dengan menghubungkan tujuan pelaporan, definisi unsur laporan keuangan, kriteria pengakuan, dasar pengukuran, serta kebutuhan pengungkapan.

Sebagai ilustrasi, perusahaan membeli perangkat lunak untuk mendukung operasional. Akuntan harus menilai apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset takberwujud atau harus dibebankan, dengan memperhatikan substansi kontrak dan standar yang berlaku. Keputusan tidak cukup didasarkan pada besarnya nilai transaksi atau keinginan manajemen untuk meningkatkan laba.

**E. Mendukung transparansi dan akuntabilitas**

Kerangka konseptual juga membantu perusahaan menyajikan informasi yang relevan dan menggambarkan substansi ekonomi transaksi secara tepat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Informasi yang transparan memungkinkan pengguna menilai kondisi perusahaan secara lebih objektif. Sebaliknya, perlakuan akuntansi yang tidak konsisten atau pengungkapan yang tidak memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi keuangan perusahaan.

**Komponen Utama Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan**

Kerangka konseptual terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan. Untuk memahaminya, mahasiswa perlu melihat bagaimana setiap komponen berkontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

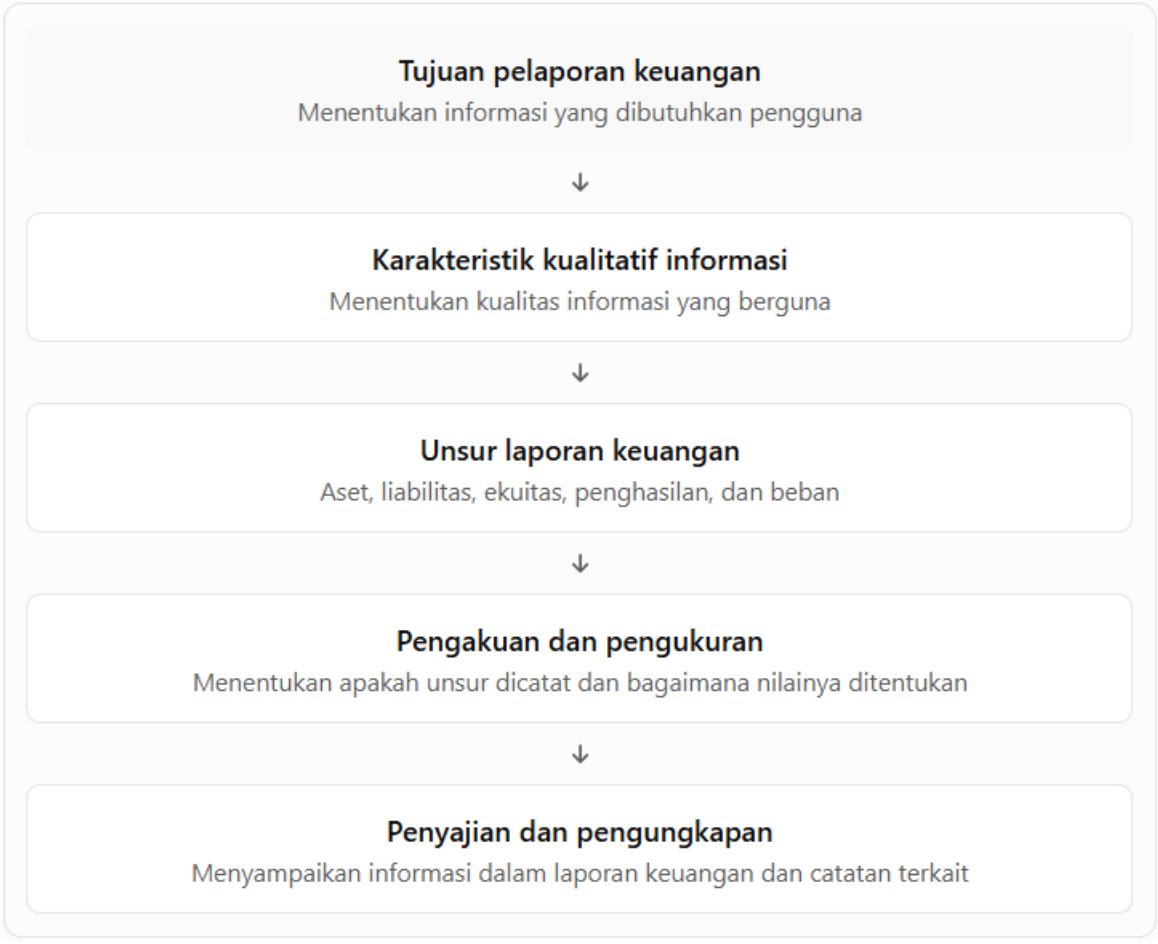


**Gambar 2.1.** Hubungan komponen kerangka konseptual pelaporan keuangan. Diagram merupakan penyederhanaan untuk tujuan pembelajaran, bukan urutan proses resmi IFRS.

Berdasarkan diagram tersebut, penyusunan laporan keuangan dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang saling memengaruhi. Tujuan pelaporan menentukan orientasi informasi, karakteristik kualitatif menjadi dasar penilaian kegunaan informasi, sedangkan definisi unsur dan ketentuan pengakuan serta pengukuran membantu menentukan informasi

yang dicatat. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan membantu pengguna memahami informasi tersebut. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan pelaporan keuangan. Menjelaskan tujuan umum penyediaan informasi keuangan, terutama untuk membantu investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lain dalam pengambilan keputusan penyediaan sumber daya.
2. Karakteristik kualitatif informasi keuangan. Menjelaskan kualitas yang membuat informasi berguna. Karakteristik fundamentalnya adalah relevansi dan representasi tepat, sedangkan karakteristik peningkatnya meliputi keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman.
3. Unsur laporan keuangan. Meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Definisi unsur membantu menentukan sifat ekonomi dari suatu sumber daya, kewajiban, perubahan ekuitas, atau perubahan lainnya yang relevan bagi pelaporan.
4. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Menjelaskan kapan suatu unsur dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan kapan unsur tersebut dikeluarkan. Pengakuan perlu mempertimbangkan definisi unsur, relevansi, representasi tepat, dan batasan biaya dalam penyediaan informasi.
5. Pengukuran. Menentukan dasar yang digunakan untuk menetapkan nilai moneter unsur laporan keuangan. Dasar pengukuran dapat mencakup biaya historis dan berbagai dasar nilai kini, sesuai standar serta karakteristik transaksi.
6. Penyajian dan pengungkapan. Menentukan bagaimana informasi dikelompokkan, ditampilkan, dan dijelaskan agar dapat dipahami pengguna. Catatan atas laporan keuangan, misalnya, dapat memberikan informasi tambahan mengenai kebijakan akuntansi, estimasi, risiko, dan ketidakpastian.

Penting dipahami bahwa kerangka konseptual IFRS telah mengalami pengembangan. Oleh sebab itu, pembahasan dalam buku sebaiknya mengacu pada edisi kerangka konseptual yang berlaku serta Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang relevan.

**Hubungan Kerangka Konseptual dengan Standar Akuntansi**

Kerangka konseptual dan standar akuntansi memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya tidak mempunyai fungsi yang sama. Kerangka konseptual menjelaskan landasan umum pelaporan keuangan, sedangkan standar akuntansi memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai transaksi atau peristiwa tertentu. Standar dapat menetapkan metode pengakuan, dasar pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan ketentuan transisi yang harus diterapkan oleh entitas.

Sebagai contoh, kerangka konseptual menjelaskan pengertian aset dan prinsip umum pengakuan serta pengukuran. Namun, perlakuan atas aset tetap secara teknis harus merujuk pada standar yang mengatur aset tetap, termasuk ketentuan biaya perolehan, penyusutan, dan penurunan nilai yang relevan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerangka konseptual tidak boleh digunakan secara terpisah dari standar yang berlaku. Kerangka konseptual memberikan arah pemikiran, sementara standar memberikan aturan operasional yang harus diterapkan.

**Perbedaan kerangka konseptual dan standar akuntansi**

| Aspek | Kerangka konseptual | Standar akuntansi |
|---|---|---|
| Fungsi utama | Menjelaskan konsep dan landasan umum | Mengatur perlakuan transaksi secara spesifik |
| Cakupan | Bersifat umum dan mendasar | Lebih khusus sesuai topik atau jenis transaksi |
| Kegunaan | Membantu pengembangan standar dan penalaran akuntansi | Menjadi acuan penerapan akuntansi oleh entitas |
| Contoh pembahasan | Definisi aset dan tujuan pelaporan keuangan | Pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap |
| Hubungan | Menjadi landasan konseptual | Diterapkan sesuai ketentuan standar yang berlaku |

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual dan standar akuntansi saling melengkapi. Pemahaman atas keduanya diperlukan agar akuntan tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi juga memahami dasar pemikiran di balik aturan tersebut.

**Kerangka Konseptual dalam Perspektif Penelitian Akuntansi**

Sejumlah penelitian mengenai kerangka konseptual menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar, tetapi juga oleh bagaimana konsep dan prinsip akuntansi diterapkan dalam praktik. Dalam konteks pengayaan materi buku, beberapa penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk mengembangkan tiga perspektif utama:

**A. Kerangka konseptual sebagai fondasi konsistensi pelaporan**

Pembahasan mengenai kerangka konseptual menekankan pentingnya fondasi pemikiran yang konsisten dalam pengembangan dan penerapan standar akuntansi. Konsistensi diperlukan agar informasi yang disajikan dapat dipahami dan dibandingkan oleh pengguna.

Namun, konsistensi tidak berarti perusahaan harus selalu menggunakan satu metode untuk seluruh transaksi. Perlakuan akuntansi harus mempertimbangkan substansi transaksi serta ketentuan standar yang relevan.

Dalam penulisan buku, perspektif ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kerangka konseptual merupakan alat penalaran profesional yang membantu akuntan memilih perlakuan akuntansi secara sistematis.

**B. Karakteristik kualitatif sebagai ukuran kegunaan informasi**

Penelitian Nobes dan Stadler (2015) membahas hubungan karakteristik kualitatif informasi keuangan dengan keputusan kebijakan akuntansi manajer. Sementara itu, penelitian Ebaid (2021) menelaah karakteristik kualitatif informasi akuntansi dalam konteks penerapan IFRS pada bank komersial di Arab Saudi.

Kedua penelitian tersebut relevan untuk memperluas pembahasan bahwa penerapan standar dan pilihan kebijakan akuntansi berkaitan dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Meskipun demikian, hasil penelitian dari sektor dan negara tertentu tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh perusahaan Indonesia. Kondisi

kelembagaan, karakteristik industri, dan ketentuan akuntansi yang berlaku perlu dipertimbangkan saat menafsirkan temuan penelitian.

**C. Pertimbangan konseptual dalam pengukuran**

Barth (2014), melalui pembahasan mengenai pengukuran dalam pelaporan keuangan, memberikan landasan untuk memahami pentingnya konsep dalam memilih dasar pengukuran. Perbedaan antara biaya historis dan nilai kini, misalnya, dapat menghasilkan informasi yang berbeda mengenai posisi keuangan suatu entitas.

Pilihan dasar pengukuran tidak semata-mata ditentukan oleh kemudahan perhitungan. Akuntan juga perlu mempertimbangkan karakteristik aset atau liabilitas, relevansi informasi, representasi tepat, serta ketentuan standar yang berlaku.

Ketiga perspektif ini memperlihatkan bahwa kerangka konseptual bukan sekadar teori abstrak. Kerangka tersebut memiliki hubungan langsung dengan kebijakan akuntansi, penilaian kualitas informasi, dan pertimbangan profesional dalam praktik.

Kerangka konseptual akuntansi merupakan fondasi pemikiran yang mendasari tujuan dan proses pelaporan keuangan. Kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara kebutuhan pengguna, karakteristik kualitatif informasi, unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Kerangka konseptual juga mendukung konsistensi, keterbandingan, dan pertimbangan profesional dalam menghadapi persoalan akuntansi. Namun, kerangka konseptual tidak menggantikan standar akuntansi yang berlaku. Akuntan tetap harus menerapkan ketentuan khusus yang relevan terhadap transaksi yang dihadapi.

Dalam era digital, pemahaman kerangka konseptual menjadi semakin penting karena sistem otomatis dan kecerdasan buatan dapat mempercepat pemrosesan data, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan substansi dan perlakuan akuntansi. Oleh sebab itu, kompetensi akuntan modern harus mencakup pemahaman konseptual, penguasaan standar, kemampuan analitis, serta kemampuan mengevaluasi hasil sistem digital secara kritis.

## 2.2 KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI KEUANGAN

Dalam akuntansi keuangan, keberhasilan penyusunan laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan pencatatan transaksi atau kesesuaian dengan standar akuntansi. Laporan keuangan juga harus menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk mengambil keputusan ekonomi. Informasi yang tersedia dalam jumlah besar belum tentu bermanfaat apabila tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi ekonomi secara tepat, sulit dibandingkan, atau disampaikan terlambat.

Karakteristik kualitatif informasi keuangan merupakan atribut yang menentukan tingkat kegunaan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut membantu perusahaan, akuntan, auditor, dan penyusun standar menilai apakah suatu informasi layak disajikan serta bagaimana informasi tersebut sebaiknya disusun agar mendukung keputusan pengguna.

Sebagai contoh, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis hanya beberapa detik setelah periode akuntansi berakhir. Namun, apabila sistem belum

memperhitungkan retur penjualan, transaksi yang belum dicatat, atau penurunan nilai persediaan, laporan tersebut belum tentu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat. Kecepatan penyusunan laporan tidak dapat menggantikan kualitas informasi.

Dalam era digital, persoalan ini semakin penting karena perusahaan memanfaatkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP), komputasi awan (*cloud computing*), analitik data, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau *AI*) untuk memproses transaksi. Teknologi tersebut memperluas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan informasi, tetapi kegunaan informasi tetap bergantung pada relevansi, ketepatan representasi, dan karakteristik kualitatif lainnya.

Berdasarkan *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang diterbitkan oleh IFRS Foundation, karakteristik kualitatif informasi keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu karakteristik fundamental dan karakteristik peningkat. Karakteristik fundamental terdiri atas relevansi dan representasi tepat (*faithful representation*), sedangkan karakteristik peningkat terdiri atas keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Pemahaman terhadap karakteristik tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi mutu informasi keuangan, baik yang dihasilkan melalui proses akuntansi konvensional maupun melalui sistem digital yang semakin terotomatisasi.

**Pengertian Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan**

Karakteristik kualitatif informasi keuangan adalah sifat atau atribut yang membuat informasi keuangan berguna bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Karakteristik ini menjadi pedoman untuk menilai kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, bukan sekadar menilai banyaknya data atau kecanggihan teknologi yang digunakan.

Dalam praktiknya, kualitas informasi perlu dinilai berdasarkan konteks penggunaannya. Informasi mengenai saldo kas, misalnya, sangat penting bagi perusahaan yang menghadapi tekanan likuiditas. Sebaliknya, informasi mengenai nilai wajar instrumen keuangan mungkin lebih relevan bagi investor yang menilai risiko dan potensi imbal hasil suatu investasi. Karakteristik kualitatif juga membantu menjelaskan mengapa informasi yang secara teknis benar belum tentu cukup berguna. Informasi dapat benar secara matematis, tetapi tidak relevan dengan keputusan pengguna. Sebaliknya, informasi yang relevan dapat menyesatkan apabila disajikan dengan cara yang tidak menggambarkan substansi ekonomi transaksi secara tepat.

Oleh karena itu, kualitas informasi keuangan perlu dipahami sebagai perpaduan antara ketepatan substansi, relevansi terhadap keputusan, dan cara penyajian yang memungkinkan pengguna memahami serta mengevaluasinya.

**Tujuan penerapan karakteristik kualitatif**

Penerapan karakteristik kualitatif memiliki beberapa tujuan utama:

1. Memastikan informasi yang disajikan berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi.
2. Mengurangi risiko kesalahan pemahaman akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

3. Memungkinkan pengguna membandingkan kondisi keuangan antarperiode dan antarentitas.
4. Mendukung pemeriksaan serta penelusuran informasi melalui bukti yang dapat diverifikasi.
5. Memastikan informasi tersedia pada waktu yang tepat untuk digunakan.
6. Menyajikan informasi dengan cara yang jelas, terstruktur, dan dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai kegiatan bisnis dan akuntansi.

Dengan demikian, karakteristik kualitatif berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan benar-benar mampu memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

**Karakteristik Fundamental Informasi Keuangan**

Karakteristik fundamental merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki informasi keuangan agar berguna bagi pengguna. Menurut kerangka konseptual IFRS, dua karakteristik fundamental tersebut adalah relevansi dan representasi tepat.

**A. Relevansi (Relevance)**

Informasi keuangan dikatakan relevan apabila mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi relevan dapat membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, atau kemungkinan hasil pada masa depan.

Relevansi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai transaksi. Informasi bernilai kecil dapat menjadi relevan apabila berkaitan dengan risiko penting, pelanggaran kontrak, atau perubahan kondisi bisnis. Sebaliknya, informasi bernilai besar belum tentu relevan bagi suatu keputusan apabila tidak berkaitan dengan kebutuhan pengguna.

Dalam kerangka konseptual, relevansi memiliki dua aspek penting, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatori.

1. Nilai prediktif (*predictive value*)

   Informasi mempunyai nilai prediktif apabila dapat digunakan sebagai masukan dalam proses memperkirakan hasil masa depan. Nilai prediktif tidak berarti laporan keuangan harus selalu berisi ramalan. Informasi historis pun dapat memiliki nilai prediktif ketika digunakan untuk menyusun perkiraan.

   Sebagai contoh, data penjualan selama tiga tahun terakhir dapat membantu manajemen memperkirakan kebutuhan persediaan pada periode mendatang. Informasi mengenai tren biaya distribusi juga dapat digunakan untuk memperkirakan margin laba dan kebutuhan kas.

2. Nilai konfirmatori (confirmatory value)

   Informasi mempunyai nilai konfirmatori apabila membantu pengguna mengonfirmasi atau mengubah penilaian yang telah dibuat sebelumnya.

   Sebagai contoh, manajemen memperkirakan bahwa penjualan produk tertentu akan meningkat sebesar 10%. Ketika laporan aktual menunjukkan kenaikan hanya

3%, informasi tersebut membantu manajemen mengevaluasi kembali asumsi mengenai permintaan pasar, strategi pemasaran, atau kemampuan distribusi.

Informasi dapat memiliki nilai prediktif sekaligus nilai konfirmatori. Data penjualan aktual, misalnya, dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan mendatang sekaligus mengevaluasi ketepatan perkiraan sebelumnya.

**Contoh penerapan relevansi**

PT Sejahtera Digital, sebuah perusahaan fiktif, sedang mempertimbangkan pembukaan gudang baru. Manajemen memiliki dua kelompok informasi:

- Informasi A: biaya administrasi kantor pusat sebesar Rp80.000.000 pada periode sebelumnya.
- Informasi B: peningkatan permintaan pelanggan sebesar 25% di wilayah yang akan menjadi lokasi gudang baru, disertai data biaya pengiriman dan proyeksi penjualan.

Walaupun kedua informasi dapat berguna untuk tujuan yang berbeda, informasi B lebih langsung berkaitan dengan keputusan pembukaan gudang. Data tersebut membantu manajemen memperkirakan potensi manfaat dan biaya keputusan yang akan diambil.

Contoh ini menunjukkan bahwa relevansi harus dinilai berdasarkan kebutuhan keputusan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan data.

**B. Materialitas sebagai aspek relevansi**

Materialitas merupakan aspek relevansi yang dibahas lebih lanjut dalam Subbab 2.5. Informasi bersifat material apabila penghilangan, kesalahan penyajian, atau pengaburan informasi tersebut secara wajar diperkirakan dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan.

Materialitas bergantung pada sifat dan besarnya informasi dalam konteks laporan keuangan entitas. Karena karakteristik setiap perusahaan berbeda, tidak tepat menetapkan satu persentase universal sebagai batas materialitas untuk seluruh transaksi dan seluruh perusahaan.

Sebagai ilustrasi, kesalahan pencatatan sebesar Rp10.000.000 mungkin tidak material bagi perusahaan besar, tetapi dapat sangat signifikan bagi usaha kecil yang memiliki kas terbatas. Selain nilai nominal, sifat transaksi juga perlu dipertimbangkan. Transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian pinjaman, misalnya, dapat menjadi material karena konsekuensi ekonominya.

**C. Representasi tepat (Faithful Representation)**

Informasi keuangan tidak cukup hanya relevan. Informasi tersebut juga harus merepresentasikan substansi ekonomi dari fenomena yang dilaporkan secara tepat.

Representasi tepat memiliki tiga karakteristik utama:

1. Lengkap (complete). Informasi mencakup keterangan yang diperlukan agar pengguna memahami fenomena yang dilaporkan.
2. Netral (neutral). Informasi disajikan tanpa keberpihakan yang sengaja ditujukan untuk memengaruhi keputusan pengguna.

3. Bebas dari kesalahan (free from error). Tidak terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penggambaran fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi telah dipilih serta diterapkan secara tepat.

Istilah bebas dari kesalahan tidak berarti seluruh angka akuntansi harus selalu pasti atau tidak mengandung estimasi. Dalam akuntansi, sejumlah nilai diperoleh melalui estimasi karena hasil ekonomi belum diketahui secara pasti. Estimasi tetap dapat menghasilkan representasi tepat apabila metode, asumsi, sumber data, dan ketidakpastiannya dijelaskan secara memadai.

1. **Kelengkapan informasi**

   Laporan keuangan perlu memuat informasi yang cukup untuk memahami transaksi yang dilaporkan. Sebagai contoh, pengungkapan mengenai pinjaman jangka panjang mungkin perlu menjelaskan tingkat bunga, jadwal jatuh tempo, persyaratan pinjaman, serta risiko tertentu yang relevan.

   Penyajian angka utang tanpa informasi penting mengenai kewajiban pembayarannya dapat mengurangi kemampuan pengguna untuk mengevaluasi risiko keuangan perusahaan.

2. **Netralitas informasi**

   Informasi yang netral tidak sengaja disusun untuk memberikan gambaran yang terlalu menguntungkan atau terlalu merugikan entitas.

   Sebagai contoh, manajemen tidak seharusnya memilih asumsi estimasi yang secara sengaja menghasilkan laba lebih tinggi hanya agar laporan terlihat menarik bagi investor. Asumsi harus dipilih berdasarkan bukti dan metode yang sesuai, bukan berdasarkan hasil yang diinginkan.

   Netralitas tidak berarti laporan keuangan tidak memiliki tujuan. Laporan tetap disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, tetapi informasi tidak boleh dimanipulasi demi mengarahkan keputusan mereka pada kesimpulan tertentu.

3. **Bebas dari kesalahan**

   Informasi harus disusun melalui proses yang tepat, dengan data dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan input, formula yang salah, transaksi ganda, dan penggunaan metode yang tidak sesuai dapat mengurangi kualitas representasi.

   Sebagai contoh, sistem akuntansi menghitung penyusutan secara otomatis. Apabila umur manfaat aset dimasukkan secara keliru, hasil perhitungan yang secara matematis benar tetap dapat menghasilkan informasi yang tidak tepat. Karena itu, validasi data dan pemeriksaan asumsi merupakan bagian penting dari pengendalian kualitas informasi.

**Hubungan relevansi dan representasi tepat**

Relevansi dan representasi tepat harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Informasi yang relevan tetapi tidak menggambarkan fenomena secara tepat dapat menyesatkan. Sebaliknya, informasi yang disajikan secara akurat tetapi tidak berkaitan dengan keputusan pengguna mungkin hanya memiliki sedikit manfaat.

| Kondisi informasi | Penjelasan | Dampak potensial |
|---|---|---|
| Relevan dan direpresentasikan secara tepat | Informasi berkaitan dengan keputusan dan menggambarkan substansi ekonomi secara memadai | Mendukung keputusan yang lebih terinformasi |
| Relevan, tetapi tidak direpresentasikan secara tepat | Informasi penting, tetapi terdapat kesalahan atau bias dalam penyajiannya | Berisiko menyesatkan pengguna |
| Direpresentasikan secara tepat, tetapi tidak relevan | Informasi benar, tetapi tidak membantu keputusan yang sedang dipertimbangkan | Kegunaan informasi terbatas |
| Tidak relevan dan tidak direpresentasikan secara tepat | Informasi tidak membantu keputusan dan menggambarkan fenomena secara keliru | Dapat mengurangi keandalan proses pengambilan keputusan |

Dengan demikian, karakteristik fundamental merupakan landasan untuk menilai apakah informasi layak menjadi dasar keputusan ekonomi.

**Karakteristik Peningkat Informasi Keuangan**

Selain karakteristik fundamental, kerangka konseptual IFRS menjelaskan empat karakteristik peningkat, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman.

Karakteristik ini meningkatkan kegunaan informasi yang telah relevan dan direpresentasikan secara tepat. Namun, karakteristik peningkat tidak dapat menggantikan karakteristik fundamental.

**A. Keterbandingan (Comparability)**

Keterbandingan adalah karakteristik yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai informasi. Keterbandingan dapat dilakukan antarperiode dalam perusahaan yang sama maupun antarperusahaan.

Keterbandingan penting karena pengguna laporan keuangan jarang mengambil keputusan berdasarkan satu angka secara terpisah. Investor, misalnya, dapat membandingkan pertumbuhan pendapatan, margin laba, tingkat utang, dan arus kas beberapa perusahaan sebelum menentukan alokasi investasinya.

Terdapat dua konsep yang perlu dibedakan, yaitu keterbandingan dan konsistensi.

- Keterbandingan merupakan tujuan agar pengguna dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan informasi.
- Konsistensi merupakan penggunaan metode yang sama untuk transaksi sejenis dari satu periode ke periode berikutnya atau dalam kondisi yang sebanding.

Konsistensi dapat membantu meningkatkan keterbandingan, tetapi bukan berarti perusahaan tidak boleh mengubah kebijakan akuntansi. Perubahan dapat diperlukan apabila diwajibkan oleh standar atau menghasilkan informasi yang lebih relevan dan direpresentasikan secara tepat, sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut perlu ditangani dan diungkapkan sesuai standar terkait.

Contoh: Perusahaan A dan Perusahaan B bergerak dalam industri ritel. Keduanya melaporkan pendapatan, beban pokok penjualan, dan laba kotor. Pengguna dapat

membandingkan margin laba kotor untuk memahami perbedaan kinerja. Namun, pengguna juga perlu memperhatikan perbedaan model bisnis, kebijakan akuntansi yang relevan, serta karakteristik operasi kedua perusahaan.

**B. Keterverifikasian (Verifiability)**

Keterverifikasian memungkinkan pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan independen untuk mencapai kesepakatan bahwa suatu penggambaran merupakan representasi yang tepat, meskipun mereka tidak selalu sepakat mengenai setiap rincian atau estimasi.

Keterverifikasian dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

1. Verifikasi langsung

   Verifikasi langsung dilakukan melalui pengamatan atau pemeriksaan secara langsung. Contohnya adalah menghitung uang tunai di kas atau memeriksa jumlah unit persediaan secara fisik.

2. Verifikasi tidak langsung

Verifikasi tidak langsung dilakukan dengan memeriksa masukan, metode, dan perhitungan yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi.

Contohnya adalah memeriksa data harga perolehan aset, umur manfaat, metode penyusutan, serta perhitungan beban penyusutan yang dihasilkan sistem.

Keterverifikasian tidak selalu berarti suatu angka memiliki satu nilai yang pasti. Dalam estimasi akuntansi, beberapa metode atau rentang nilai dapat diterima berdasarkan bukti dan asumsi yang wajar. Hal yang penting adalah bahwa proses pengukuran dapat diperiksa dan dijelaskan.

Dalam era digital, keterverifikasian dapat diperkuat melalui bukti transaksi elektronik, jejak audit (audit trail), pencatatan waktu transaksi, otorisasi berjenjang, dan dokumentasi perubahan data.

**C. Ketepatwaktuan (Timeliness)**

Ketepatwaktuan berarti informasi tersedia bagi pengambil keputusan pada waktu ketika informasi tersebut masih mampu memengaruhi keputusan.

Informasi yang sangat akurat tetapi terlambat disampaikan dapat kehilangan sebagian manfaatnya. Misalnya, informasi mengenai penurunan kas perusahaan baru diketahui setelah perusahaan mengalami kesulitan membayar pemasok. Dalam keadaan tersebut, informasi yang sebenarnya dapat membantu pencegahan risiko menjadi kurang bermanfaat karena tidak tersedia ketika dibutuhkan.

Sistem akuntansi digital membantu meningkatkan ketepatwaktuan melalui pemrosesan transaksi otomatis, integrasi data, dan pelaporan yang lebih cepat. Namun, ketepatwaktuan tidak boleh dicapai dengan mengabaikan proses validasi.

Perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian informasi dan ketepatan penyajiannya. Laporan sementara dapat digunakan untuk pemantauan operasional, sedangkan laporan keuangan formal tetap harus mengikuti prosedur penutupan, rekonsiliasi, dan standar yang berlaku.

**D. Keterpahaman (Understandability)**

Keterpahaman berarti informasi disajikan dan diklasifikasikan secara jelas serta ringkas agar dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta bersedia mempelajari informasi tersebut secara saksama.

Keterpahaman tidak berarti seluruh informasi harus dibuat sesederhana mungkin dengan menghilangkan hal-hal yang kompleks. Transaksi yang kompleks terkadang memang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Menghilangkan informasi penting hanya agar laporan terlihat sederhana justru dapat mengurangi kegunaannya.

Sebagai contoh, pengungkapan mengenai instrumen keuangan yang kompleks perlu disertai penjelasan mengenai sifat instrumen, risiko, dasar pengukuran, dan dampaknya terhadap posisi keuangan. Penyajian tabel dan ringkasan dapat membantu, tetapi tidak menggantikan penjelasan substantif yang diperlukan.

Keterpahaman dapat ditingkatkan melalui:

- pengelompokan akun yang sistematis;
- penggunaan istilah akuntansi secara konsisten;
- penyajian tabel, grafik, dan ringkasan yang relevan;
- penjelasan kebijakan akuntansi yang mudah diikuti;
- pengungkapan asumsi dan ketidakpastian secara jelas; serta
- penggunaan visualisasi data yang tidak menyesatkan.

Keterpahaman juga tidak berarti laporan keuangan harus dapat dipahami tanpa pengetahuan dasar akuntansi. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dan bersedia menelaah informasi yang disajikan.

**Perbedaan Karakteristik Fundamental dan Karakteristik Peningkat**

Karakteristik fundamental dan karakteristik peningkat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Karakteristik fundamental menentukan kualitas inti informasi yang berguna, sedangkan karakteristik peningkat memperbesar kegunaan informasi tersebut ketika diterapkan secara tepat.

| Aspek | Karakteristik fundamental | Karakteristik peningkat |
|---|---|---|
| **Komponen** | Relevansi dan representasi tepat | Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman |
| **Fungsi** | Menentukan kegunaan dasar informasi | Meningkatkan kegunaan informasi |
| **Pertanyaan utama** | Apakah informasi relevan dan menggambarkan fenomena secara tepat? | Apakah informasi dapat dibandingkan, diverifikasi, tersedia tepat waktu, dan dipahami? |
| **Contoh** | Informasi penurunan nilai persediaan yang relevan dan dihitung berdasarkan metode yang sesuai | Informasi disajikan konsisten, didukung dokumentasi, tersedia tepat waktu, dan dijelaskan dengan jelas |

Karakteristik tersebut tidak bekerja secara terpisah. Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan melibatkan pertimbangan untuk menyeimbangkan beberapa karakteristik sekaligus.

Sebagai contoh, perusahaan perlu menyampaikan informasi keuangan tepat waktu, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi material telah diperiksa. Perusahaan dapat menggunakan estimasi untuk mempercepat pelaporan, tetapi perlu memastikan bahwa metode dan asumsi estimasi dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala biaya dalam pelaporan. Biaya pengumpulan dan penyajian informasi perlu dipertimbangkan dibandingkan manfaat informasi tersebut bagi pengguna. Namun, pertimbangan biaya tidak berarti perusahaan dapat menghilangkan informasi yang diwajibkan oleh standar yang berlaku.

**Penerapan Karakteristik Kualitatif dalam Akuntansi Digital**

Teknologi digital mengubah cara informasi keuangan dikumpulkan dan diproses. Meskipun demikian, karakteristik kualitatif tetap menjadi dasar untuk mengevaluasi mutu informasi yang dihasilkan. Berikut penerapan setiap karakteristik dalam sistem akuntansi digital:

| Karakteristik | Penerapan dalam sistem digital | Risiko apabila diabaikan |
|---|---|---|
| **Relevansi** | Analitik penjualan, proyeksi arus kas, dan informasi risiko yang mendukung keputusan | Informasi berlimpah tetapi tidak menjawab kebutuhan pengguna |
| **Representasi tepat** | Validasi sumber data, rekonsiliasi, pemeriksaan asumsi, dan pengendalian transaksi | Kesalahan data atau hasil otomatis yang menyesatkan |
| **Keterbandingan** | Format pelaporan yang konsisten serta dokumentasi perubahan kebijakan | Perbandingan antarperiode atau antarentitas menjadi tidak tepat |
| **Keterverifikasian** | Jejak audit elektronik, bukti transaksi, dan dokumentasi perhitungan | Sulit menelusuri sumber angka dan perubahan data |
| **Ketepatwaktuan** | Integrasi sistem dan pembaruan laporan secara berkala | Informasi tersedia setelah keputusan harus dibuat |
| **Keterpahaman** | Dasbor, visualisasi, klasifikasi akun, dan penjelasan yang jelas | Pengguna salah menafsirkan angka atau tren |

**A. Relevansi dan analitik data**

Sistem analitik dapat mengolah data penjualan berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, dan periode. Hasil analisis dapat membantu perusahaan menentukan produk yang menghasilkan margin tinggi atau wilayah yang mengalami penurunan permintaan.

Akan tetapi, analisis harus dirancang berdasarkan kebutuhan keputusan. Dasbor yang memuat puluhan indikator belum tentu lebih berguna daripada laporan ringkas yang secara langsung menjelaskan tren pendapatan, margin, dan arus kas.

**B. Representasi tepat dan kecerdasan buatan**

AI dapat membantu mengklasifikasikan transaksi, mendeteksi pola tidak biasa, dan menghasilkan estimasi. Namun, kualitas keluarannya bergantung pada data, asumsi, desain model, dan proses pengawasan.

Sebagai contoh, AI dapat mengidentifikasi transaksi yang berpotensi ganda. Akuntan perlu memeriksa apakah transaksi tersebut benar-benar duplikat atau merupakan pembayaran yang sah untuk dua faktur berbeda. Dengan demikian, keluaran AI menjadi bahan pemeriksaan, bukan pengganti pertimbangan profesional.

**C. Keterverifikasian dan jejak audit**

Dalam sistem berbasis cloud, dokumentasi elektronik memungkinkan perusahaan menelusuri siapa yang memasukkan, mengubah, atau menyetujui transaksi. Jejak audit yang memadai membantu pemeriksaan internal dan eksternal.

Namun, tersedianya log sistem tidak otomatis membuktikan bahwa transaksi benar. Bukti tersebut tetap perlu dikaitkan dengan dokumen sumber, otorisasi, dan substansi transaksi.

**D. Ketepatwaktuan dan penutupan buku**

Otomatisasi memungkinkan perusahaan memantau penjualan dan saldo kas secara lebih cepat. Namun, laporan yang diperbarui setiap saat dapat tetap memerlukan penyesuaian akhir periode, seperti akrual beban, penyusutan, rekonsiliasi, dan penilaian persediaan.

Karena itu, perusahaan perlu membedakan informasi operasional sementara dari laporan keuangan yang telah melalui prosedur penutupan sesuai kebijakan dan standar yang berlaku.

**E. Keterpahaman melalui visualisasi data**

Dasbor dapat membantu pengguna melihat tren dan penyimpangan secara cepat. Akan tetapi, grafik yang menggunakan skala tidak proporsional, kategori yang tidak jelas, atau perbandingan periode yang tidak setara dapat mengarahkan pengguna pada interpretasi yang keliru.

Visualisasi yang baik harus menjelaskan sumber data, periode, satuan pengukuran, serta asumsi yang relevan. Tujuannya bukan sekadar membuat laporan menarik, melainkan membantu pengguna memahami informasi secara benar.

**Tantangan Menjaga Kualitas Informasi Keuangan**

Meskipun perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi modern, terdapat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan.

1. Kualitas data sumber. Kesalahan data yang berasal dari transaksi, dokumen pemasok, atau sistem penjualan dapat terbawa ke dalam laporan keuangan. Perusahaan perlu menerapkan validasi, rekonsiliasi, dan pengendalian atas data yang masuk.
2. Ketergantungan pada otomatisasi. Pemrosesan otomatis dapat mempercepat pekerjaan, tetapi kesalahan konfigurasi atau asumsi yang tidak sesuai dapat menghasilkan informasi yang keliru secara konsisten. Pemeriksaan manusia tetap diperlukan untuk transaksi dan estimasi yang signifikan.
3. Kompleksitas estimasi akuntansi. Penurunan nilai aset, provisi, dan estimasi kerugian dapat melibatkan ketidakpastian. Perusahaan perlu mendokumentasikan dasar estimasi, asumsi, sumber data, dan perubahan penilaian sesuai standar terkait.

4. Keterlambatan dan beban pelaporan. Informasi yang disusun terlalu lama dapat kehilangan manfaatnya, sedangkan proses yang terlalu cepat tanpa validasi dapat menurunkan kualitas. Perusahaan perlu menyeimbangkan ketepatwaktuan dan ketepatan informasi.
5. Kesulitan membandingkan informasi. Perbedaan model bisnis, kebijakan akuntansi, periode pelaporan, dan metode pengukuran dapat membatasi keterbandingan. Pengguna harus memahami konteks sebelum menyimpulkan bahwa perbedaan angka menunjukkan perbedaan kinerja.
6. Penyajian informasi yang berlebihan. Banyaknya data dan indikator tidak selalu meningkatkan keterpahaman. Informasi perlu dikelompokkan berdasarkan kepentingannya agar pengguna dapat mengenali persoalan utama tanpa kehilangan informasi material.
7. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu mengembangkan tata kelola data, pengendalian internal, dokumentasi kebijakan akuntansi, kompetensi digital, dan prosedur penelaahan laporan keuangan. Penerapan teknologi sebaiknya selalu diikuti evaluasi terhadap kualitas informasi yang dihasilkan.

## 2.3 PILAR AKSIOMA PELAPORAN DASAR AKUNTANSI

Setiap laporan keuangan disusun berdasarkan sejumlah konsep dan asumsi yang menjadi dasar dalam menentukan bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Asumsi tersebut membantu akuntan memahami kondisi ekonomi perusahaan secara sistematis sehingga laporan keuangan tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi merupakan representasi terstruktur atas aktivitas ekonomi suatu entitas. Dalam pembelajaran akuntansi konvensional, beberapa asumsi yang sering diperkenalkan antara lain entitas ekonomi (*economic entity*), kelangsungan usaha (*going concern*), periode akuntansi (*accounting period*), dan satuan moneter (*monetary unit*). Dalam kerangka konseptual modern, beberapa di antaranya tidak selalu ditempatkan sebagai "asumsi" secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari konsep dasar atau pertimbangan yang mendasari pelaporan keuangan.

Pembedaan ini penting karena perkembangan standar akuntansi modern telah membuat teori akuntansi semakin konseptual. Oleh karena itu, istilah "asumsi dasar" dalam buku ini digunakan sebagai pilar pemikiran yang membantu menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun, bukan sebagai daftar aturan yang berdiri sendiri.

Dalam era digital, asumsi dasar tersebut tetap relevan. Perubahan teknologi tidak menghilangkan prinsip dasar akuntansi. Sistem ERP, *cloud accounting*, kecerdasan buatan, dan otomatisasi hanya mengubah cara data dikumpulkan dan diproses. Pertanyaan fundamental seperti siapa entitas yang dilaporkan, periode apa yang diukur, dalam satuan apa informasi disajikan, dan apakah perusahaan diasumsikan melanjutkan operasinya tetap harus dijawab.

**Pengertian Asumsi Dasar Akuntansi**

Asumsi dasar akuntansi dapat dipahami sebagai anggapan atau konsep fundamental yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun dan menginterpretasikan informasi

keuangan. Asumsi tersebut membantu memberikan batasan terhadap objek yang dilaporkan. Tanpa konsep dasar, transaksi perusahaan akan sulit dipisahkan, diukur, dan dibandingkan secara sistematis.

Sebagai contoh, seorang pemilik perusahaan menggunakan uang perusahaan untuk membayar kebutuhan pribadi. Jika tidak terdapat konsep entitas ekonomi, transaksi tersebut dapat bercampur dengan transaksi perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan tidak lagi secara jelas menggambarkan posisi dan kinerja perusahaan.

Demikian pula, perusahaan tidak dapat menunggu hingga seluruh aktivitas bisnis berakhir untuk membuat laporan keuangan. Konsep periode akuntansi memungkinkan aktivitas ekonomi dibagi menjadi periode tertentu sehingga pengguna dapat memperoleh informasi mengenai kinerja perusahaan secara berkala.

Dengan demikian, asumsi dasar memberikan kerangka pembatas yang membantu akuntan menentukan transaksi apa yang termasuk dalam laporan, kapan transaksi dilaporkan, serta bagaimana informasi tersebut diinterpretasikan.

**Konsep Entitas Ekonomi (*Economic Entity*)**

Konsep entitas ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi suatu entitas harus dipisahkan dari aktivitas ekonomi pemilik atau entitas lainnya. Entitas dapat berupa:

- perusahaan perseorangan;
- persekutuan;
- perseroan terbatas;
- koperasi;
- organisasi nirlaba;
- anak perusahaan;
- kelompok perusahaan; atau
- bentuk organisasi lainnya sesuai lingkungan hukum dan pelaporan yang relevan.

Pemisahan ini sangat penting karena laporan keuangan bertujuan menggambarkan kondisi ekonomi entitas pelapor, bukan seluruh aktivitas ekonomi individu pemiliknya.

**Konsep Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)**

Konsep kelangsungan usaha mengandung gagasan bahwa laporan keuangan umumnya disusun dengan asumsi bahwa entitas akan melanjutkan operasinya dalam masa mendatang yang dapat diperkirakan. Konsep ini sangat penting karena memengaruhi cara aset dan liabilitas dipahami serta diukur.

Jika perusahaan dianggap akan terus beroperasi, aset tidak secara otomatis dinilai berdasarkan harga jual cepat atau nilai likuidasi. Sebaliknya, pengguna laporan keuangan memahami bahwa aset digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dalam kegiatan operasi perusahaan. Namun, *going concern* bukan berarti perusahaan diasumsikan akan hidup selamanya. Konsep tersebut berkaitan dengan asumsi kelangsungan operasi dalam masa mendatang yang relevan berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia. Akuntan tidak cukup hanya melihat laba atau rugi. Perlu dipertimbangkan pula:

- kemampuan menghasilkan kas;
- kemampuan membayar kewajiban;

- akses terhadap pembiayaan;
- rencana manajemen;
- kondisi pasar;
- risiko operasional;
- dan faktor lain yang relevan.

Apabila terdapat ketidakpastian material mengenai kemampuan perusahaan melanjutkan operasinya, kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

**Konsep Periode Akuntansi**

Kegiatan perusahaan berlangsung secara terus-menerus. Namun, pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi secara berkala.

Konsep periode akuntansi memungkinkan aktivitas ekonomi perusahaan dibagi menjadi periode tertentu, misalnya:

- bulanan;
- triwulanan;
- semesteran; dan
- tahunan.

Pembagian tersebut memungkinkan pengguna mengevaluasi perkembangan perusahaan tanpa harus menunggu sampai perusahaan berhenti beroperasi. Konsep periode akuntansi juga menjadi dasar bagi perbandingan:




Dengan adanya pembagian periode, pengguna dapat menganalisis tren pendapatan, biaya, laba, aset, kewajiban, dan arus kas.

**Konsep Satuan Moneter**

Akuntansi menggunakan satuan moneter sebagai media utama untuk mengukur dan menyajikan transaksi ekonomi. Di Indonesia, laporan keuangan umumnya menggunakan Rupiah sebagai mata uang penyajian sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Konsep satuan moneter memungkinkan berbagai jenis transaksi dibandingkan dalam satu ukuran. Tanpa satuan moneter, akan sulit menggabungkan berbagai jenis sumber daya dan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan. Namun, terdapat keterbatasan. Tidak seluruh informasi yang penting bagi perusahaan dapat direpresentasikan secara langsung dalam angka moneter. Misalnya:

- kompetensi karyawan;
- reputasi perusahaan;
- loyalitas pelanggan;
- kualitas kepemimpinan;
- budaya organisasi;
- kemampuan inovasi.

Informasi tersebut dapat memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, tetapi tidak otomatis memenuhi definisi dan kriteria pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu dibaca bersama informasi lain yang relevan.

**Substansi Ekonomi dalam Asumsi Dasar Akuntansi**

Salah satu perkembangan penting dalam akuntansi modern adalah semakin kuatnya perhatian terhadap **substansi ekonomi** suatu transaksi. Akuntansi tidak seharusnya hanya melihat bentuk hukum transaksi. Akuntan perlu memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya dan menerapkan standar yang relevan. Sebagai ilustrasi, perusahaan memperoleh penggunaan suatu aset melalui kontrak selama beberapa tahun. Secara hukum, perusahaan mungkin tidak memiliki aset tersebut secara langsung. Namun, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dianalisis berdasarkan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi modern membutuhkan kemampuan untuk menjawab:

*"Apa yang sebenarnya terjadi secara ekonomi?"*

bukan hanya:

*"Dokumen apa yang tersedia?"*

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting dalam ekonomi digital karena transaksi dapat dilakukan melalui:

- platform digital;
- *smart contract*;
- layanan berbasis langganan;
- transaksi elektronik;
- aset digital;
- pembayaran elektronik;
- dan model bisnis berbasis platform.

Akuntan harus mampu mengidentifikasi substansi ekonomi transaksi sebelum menentukan perlakuan akuntansinya.

**Hubungan Asumsi Dasar dengan Basis Akrual**

Asumsi dasar memiliki hubungan erat dengan basis akrual. Basis akrual mengakui dampak transaksi ketika peristiwa ekonomi terjadi, bukan semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Sebagai contoh, perusahaan memberikan jasa pada Desember 2026 tetapi pelanggan baru membayar pada Januari 2027. Dengan basis akrual, transaksi tersebut dianalisis berdasarkan periode ketika jasa diberikan dan hak atas imbalan timbul, sesuai ketentuan standar yang relevan. Secara sederhana:




Bukan sekadar:




Hubungan ini memperlihatkan bahwa laporan keuangan berusaha menggambarkan aktivitas ekonomi perusahaan dalam periode yang tepat.

**Asumsi Dasar dalam Lingkungan Akuntansi Digital**

Transformasi digital tidak menghilangkan asumsi dasar akuntansi. Sebaliknya, digitalisasi membuat penerapan konsep tersebut menghadapi bentuk persoalan baru:

1. Entitas ekonomi dan platform digital: Perusahaan dapat melakukan aktivitas melalui beberapa platform dan anak perusahaan. Sistem harus mampu mengidentifikasi entitas yang melakukan transaksi.
2. Going concern dan model bisnis digital: Perusahaan digital dapat memiliki aset fisik yang relatif kecil tetapi memiliki biaya teknologi dan pengembangan yang besar. Penilaian kelangsungan usaha perlu mempertimbangkan model bisnis, arus kas, pendanaan, dan kemampuan perusahaan menghasilkan manfaat ekonomi.
3. Periode akuntansi dan transaksi real-time: Transaksi digital dapat berlangsung 24 jam sehari. Sistem dapat mencatat transaksi secara *real-time*, tetapi laporan keuangan tetap menggunakan periode pelaporan tertentu.
4. Satuan moneter dan transaksi digital: Transaksi dapat melibatkan berbagai mata uang dan bentuk pembayaran digital. Sistem harus mampu mengidentifikasi mata uang transaksi, kurs yang relevan, serta mata uang penyajian sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Otomatisasi dan pertimbangan professional: Sistem dapat melakukan pencatatan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah diprogram. Namun, sistem tidak seharusnya dianggap sebagai pengganti pertimbangan profesional akuntan.

*Prinsip pentingnya adalah:*
*Otomatisasi proses tidak menghilangkan kebutuhan atas pertimbangan akuntansi.*

Asumsi dasar akuntansi merupakan fondasi pemikiran yang membantu akuntan menentukan batas, waktu, dan cara penyajian aktivitas ekonomi dalam laporan keuangan. Konsep entitas ekonomi memastikan bahwa aktivitas perusahaan dipisahkan dari aktivitas pemilik atau entitas lain. Konsep going concern memberikan konteks mengenai kelangsungan operasi. Konsep periode akuntansi memungkinkan aktivitas perusahaan dilaporkan secara berkala, sedangkan satuan moneter memungkinkan berbagai transaksi ekonomi diukur dan disajikan dalam ukuran yang dapat dibandingkan.

Dalam perkembangan akuntansi modern, konsep-konsep tersebut perlu dipahami bersama kerangka konseptual dan standar akuntansi yang berlaku. Istilah "asumsi dasar" yang digunakan dalam pembelajaran juga perlu dibedakan dari struktur formal kerangka konseptual modern agar mahasiswa tidak menganggap seluruh konsep tradisional sebagai kategori yang berdiri sendiri dalam standar.

Digitalisasi tidak menghapus asumsi dasar tersebut. Sebaliknya, integrasi ERP, *cloud accounting*, AI, transaksi real-time, dan model bisnis digital membuat penerapan konsep tersebut semakin membutuhkan pertimbangan profesional. Dengan demikian, *teknologi dapat mengotomatisasi proses akuntansi, tetapi konsep dasar tetap menjadi fondasi dalam menentukan makna ekonomi dari data yang diproses.*

## 2.4 PRINSIP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

**Pendahuluan**

Laporan keuangan tidak hanya berisi daftar transaksi yang dilakukan perusahaan. Di balik setiap angka yang disajikan terdapat dua pertanyaan fundamental, yaitu:

1. *Kapan suatu transaksi atau peristiwa harus diakui dalam laporan keuangan?*
2. *Berapa jumlah yang harus dicatat atau disajikan?*

Pertanyaan pertama berkaitan dengan pengakuan (*recognition*), sedangkan pertanyaan kedua berkaitan dengan pengukuran (*measurement*).

Pengakuan dan pengukuran merupakan bagian penting dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan karena keduanya menentukan bagaimana peristiwa ekonomi diterjemahkan menjadi informasi keuangan. Kesalahan dalam menentukan waktu pengakuan atau jumlah pengukuran dapat menyebabkan laporan keuangan memberikan gambaran yang tidak tepat mengenai posisi dan kinerja perusahaan.

Sebagai contoh, perusahaan menjual produk secara kredit pada tanggal 20 Desember, tetapi pelanggan baru membayar pada bulan Januari tahun berikutnya. Akuntan harus menentukan kapan pendapatan dan piutang diakui serta berapa nilai yang harus dicatat. Dalam lingkungan bisnis digital, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena transaksi dapat berlangsung secara otomatis, lintas negara, berbasis langganan, menggunakan platform digital, atau melibatkan aset dan kewajiban yang membutuhkan estimasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengakuan dan pengukuran menjadi salah satu kompetensi utama seorang akuntan modern.

**Pengertian Pengakuan**

Pengakuan (*recognition*) adalah proses memasukkan suatu unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan ketika unsur tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang berlaku.

Dengan kata lain, pengakuan menjawab pertanyaan:

*"Apakah suatu peristiwa ekonomi sudah memenuhi kondisi untuk dicatat sebagai unsur laporan keuangan?"*

Unsur laporan keuangan yang dapat menjadi objek pengakuan antara lain:

- aset;
- liabilitas;
- ekuitas;
- penghasilan;

- beban.

Sebagai ilustrasi, perusahaan membeli komputer secara tunai senilai Rp20 juta.
Transaksi tersebut menimbulkan:

- aset berupa peralatan komputer;
- penurunan kas.

Kedua unsur tersebut perlu dicatat karena transaksi telah memberikan perubahan ekonomi yang relevan terhadap perusahaan.

**Pengertian Pengukuran**

Setelah menentukan bahwa suatu unsur perlu diakui, pertanyaan berikutnya adalah:

*"Berapa nilai yang harus dicatat?"*

Pertanyaan tersebut dijawab melalui proses pengukuran (*measurement*). Pengukuran merupakan proses menentukan jumlah moneter yang digunakan untuk mencatat dan menyajikan unsur laporan keuangan.

Sebagai contoh, perusahaan membeli mesin dengan harga Rp500 juta. Setelah ditentukan bahwa mesin memenuhi kriteria sebagai aset, perusahaan perlu menentukan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Dalam kasus sederhana, nilai awalnya dapat didasarkan pada biaya perolehan. Namun, dalam kondisi tertentu, pengukuran dapat melibatkan:

- biaya historis;
- nilai wajar;
- nilai kini;
- nilai realisasi;
- biaya kini;

sesuai dengan standar akuntansi yang relevan.
Dengan demikian:

$$Pengakuan = menentukan\ apakah\ dan\ kapan\ dicatat.$$
$$Pengukuran = menentukan\ berapa\ nilai\ yang\ dicatat.$$

**Hubungan Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan dan pengukuran merupakan dua proses yang saling berkaitan.
Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Peristiwa\ ekonomi \rightarrow Identifikasi\ unsur \rightarrow Pengakuan \rightarrow Pengukuran \rightarrow Penyajian \rightarrow Pengungkapan$$

Contohnya:
PT Maju Digital membeli server cloud dengan nilai Rp300 juta.

1. Terjadi transaksi ekonomi.
2. Akuntan mengidentifikasi apakah terdapat aset.
3. Jika memenuhi kriteria pengakuan, aset diakui.

4. Nilai aset ditentukan berdasarkan ketentuan pengukuran yang relevan.
5. Aset disajikan dalam laporan posisi keuangan.
6. Informasi tambahan diungkapkan apabila diperlukan.

Proses tersebut menunjukkan bahwa angka dalam laporan keuangan merupakan hasil dari serangkaian keputusan akuntansi, bukan sekadar hasil memasukkan data transaksi ke dalam sistem.

**Unsur Laporan Keuangan yang Berkaitan dengan Pengakuan**

Kerangka konseptual mengidentifikasi beberapa unsur utama laporan keuangan.

1. **Aset.** Aset merupakan sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
   Contohnya:
   - kas;
   - piutang;
   - persediaan;
   - tanah;
   - bangunan;
   - mesin;
   - perangkat teknologi;
   - hak kontraktual tertentu.
2. **Liabilitas.** Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
   Contohnya:
   - utang usaha;
   - pinjaman bank;
   - utang gaji;
   - kewajiban kontraktual tertentu;
   - provisi yang memenuhi ketentuan pengakuan.
3. **Ekuitas.** Ekuitas merupakan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Secara sederhana:

$$Ekuitas = Aset - Liabilitas$$

4. **Penghasilan.** Penghasilan mencakup peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemilik.
5. **Beban.** Beban mencakup penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang menghasilkan penurunan ekuitas, selain distribusi kepada pemilik.

**Prinsip Pengakuan Aset**

Tidak setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan otomatis diakui sebagai aset. Akuntan perlu mengevaluasi apakah sumber daya tersebut memenuhi definisi dan kriteria yang berlaku. Contohnya, perusahaan mengeluarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp500 juta. Meskipun perusahaan berharap pelatihan tersebut meningkatkan produktivitas di masa

depan, biaya tersebut tidak otomatis dapat dicatat sebagai aset. Perlakuan akuntansinya harus mengikuti standar yang relevan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara:

$$Manfaat\ ekonomi\ yang\ diharapkan$$

dan

$$Aset\ yang\ memenuhi\ persyaratan\ pengakuan.$$

**Prinsip Pengakuan Liabilitas**

Liabilitas muncul ketika perusahaan memiliki kewajiban kini yang dapat menyebabkan pengalihan sumber daya ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan menerima pinjaman bank sebesar Rp5 miliar. Setelah dana diterima, perusahaan memiliki:

- peningkatan kas Rp5 miliar;
- kewajiban kepada bank Rp5 miliar.

Kewajiban tersebut harus dicatat sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku. Dalam bisnis digital, bentuk kewajiban dapat menjadi lebih kompleks, misalnya:

- kewajiban kepada pelanggan;
- kewajiban kontrak;
- kewajiban pembayaran kepada platform;
- kewajiban atas layanan yang belum diberikan;
- kewajiban pajak dari transaksi digital.

**Pengakuan Penghasilan dan Beban**

Pengakuan penghasilan dan beban berkaitan erat dengan basis akrual. Misalnya, perusahaan memberikan jasa pada Desember senilai Rp100 juta dan pelanggan membayar pada Januari. Apabila berdasarkan standar yang berlaku pendapatan telah memenuhi kriteria pengakuan pada Desember, maka transaksi tersebut tidak menunggu pembayaran tunai pada Januari untuk menentukan pengakuan. Sebaliknya, beban juga diakui berdasarkan terjadinya peristiwa ekonomi dan ketentuan standar, bukan semata-mata ketika kas dibayarkan.Hal ini menjadi dasar penting bagi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

**Pengukuran Awal**

Setelah unsur laporan keuangan memenuhi persyaratan untuk diakui, unsur tersebut perlu diukur. Pengukuran awal merupakan proses menentukan nilai ketika suatu aset, liabilitas, penghasilan, atau beban pertama kali dicatat. Sebagai contoh, perusahaan membeli kendaraan operasional dengan harga Rp300 juta dan mengeluarkan biaya tertentu yang memenuhi kriteria sebagai bagian dari biaya perolehan. Akuntan harus menentukan jumlah yang tepat untuk dicatat sebagai nilai awal aset berdasarkan standar yang berlaku.

**Dasar Pengukuran dalam Akuntansi**

Kerangka konseptual memungkinkan penggunaan berbagai dasar pengukuran. Dua kelompok besar yang penting untuk dipahami adalah:

A. **Historical Cost.** Biaya historis menggunakan informasi mengenai transaksi atau peristiwa yang menghasilkan aset atau liabilitas.

*Contoh:*

Perusahaan membeli mesin seharga Rp500 juta.

Pada saat awal pengakuan, biaya perolehan menjadi dasar nilai tercatat sesuai standar yang berlaku. Keunggulan pendekatan ini antara lain:

- relatif mudah diverifikasi;
- berkaitan langsung dengan transaksi;
- memiliki dasar dokumentasi yang jelas.

Namun, biaya historis dapat kurang mencerminkan kondisi ekonomi terkini apabila harga aset mengalami perubahan signifikan.

B. **Current Value.** *Current value* menggunakan informasi yang diperbarui untuk mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran. Bentuk pengukuran current value dapat mencakup:

- fair value;
- value in use untuk aset;
- fulfilment value untuk liabilitas;
- current cost.

Pendekatan ini dapat memberikan informasi yang lebih aktual, tetapi dalam beberapa kondisi membutuhkan estimasi dan judgment yang lebih tinggi.

**Nilai Wajar (*Fair Value*)**

Nilai wajar merupakan salah satu basis pengukuran yang banyak digunakan dalam standar akuntansi tertentu. Secara umum, nilai wajar berkaitan dengan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

*Contoh sederhana:*

Perusahaan memiliki investasi yang diperdagangkan secara aktif di pasar. Harga pasar pada tanggal pelaporan dapat menjadi informasi penting dalam menentukan nilai wajar investasi tersebut apabila standar yang relevan mensyaratkannya.

Namun, tidak semua aset dan liabilitas harus diukur pada nilai wajar. Penggunaan fair value harus mengikuti standar yang berlaku untuk unsur tersebut.

**Nilai Kini (Present Value)**

Nilai kini digunakan ketika nilai ekonomi suatu aset atau liabilitas berkaitan dengan arus kas masa depan. Konsep dasarnya adalah bahwa:

*Rp1 juta yang diterima hari ini tidak memiliki nilai ekonomi yang sama dengan Rp1 juta yang baru diterima beberapa tahun mendatang.*

Secara sederhana, nilai kini dapat dirumuskan:

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

Keterangan:

- $PV$ = Present Value atau nilai kini;
- $FV$ = Future Value atau nilai masa depan;
- r = tingkat diskonto;
- $n$ = jumlah periode.

Sebagai contoh, jika perusahaan akan menerima Rp110 juta satu tahun mendatang dan tingkat diskonto 10%, maka:

$$PV = \frac{110.000.000}{1{,}10}$$

$$PV = Rp100.000.000$$

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi sederhana. Dalam praktik, metode, tingkat diskonto, arus kas, serta periode harus mengikuti standar akuntansi yang relevan.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran tidak berhenti setelah suatu unsur pertama kali dicatat. Pada periode berikutnya, aset atau liabilitas dapat mengalami perubahan nilai.

*Contohnya:*

- aset tetap mengalami penyusutan;
- piutang mengalami perubahan estimasi kerugian kredit;
- investasi dapat mengalami perubahan nilai;
- liabilitas tertentu dapat berubah akibat perubahan estimasi;
- persediaan dapat mengalami penurunan nilai.

Dengan demikian, akuntan perlu memahami perbedaan:

*Pengukuran awal*

dan

*Pengukuran setelah pengakuan awal.*

**Pengakuan dan Pengukuran dalam Akuntansi Digital**

Transformasi digital menghasilkan bentuk transaksi yang semakin kompleks.

*Contohnya:*

1. *Subscription Business.* Perusahaan menyediakan layanan selama 12 bulan dan pelanggan membayar Rp12 juta di muka. Akuntan tidak serta-merta mengakui seluruh Rp12 juta sebagai pendapatan pada hari penerimaan kas. Perlakuannya harus mengikuti standar yang relevan dan mempertimbangkan kewajiban perusahaan untuk memberikan layanan selama periode kontrak.
2. *Marketplace.* Platform menerima dana dari pelanggan sebelum dana tersebut disalurkan kepada penjual. Akuntan harus menentukan:
   - siapa yang menjadi principal atau agent;
   - kapan pendapatan diakui;
   - berapa jumlah pendapatan yang diakui.

3. *Cloud Computing.* Perusahaan membayar layanan cloud selama beberapa periode. Akuntan perlu menentukan apakah pembayaran tersebut merupakan beban periode berjalan, pembayaran di muka, atau memiliki perlakuan lain berdasarkan karakter kontraknya dan standar yang relevan.
4. *Digital Assets.* Aset digital dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlakuan akuntansinya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan nama "digital asset", tetapi perlu dianalisis berdasarkan substansi ekonomi dan standar yang berlaku.

**Pengakuan dan Pengukuran dalam Sistem ERP**

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dapat mengotomatisasi banyak proses akuntansi.

Contohnya:

$$Transaksi\ penjualan \rightarrow Sistem\ ERP \rightarrow Jurnal\ otomatis \rightarrow Buku\ besar \rightarrow Laporan\ keuangan$$

Namun, otomatisasi tidak berarti seluruh keputusan akuntansi dapat dilakukan tanpa manusia. Akuntan tetap perlu menentukan:

- akun yang tepat;
- aturan pengakuan;
- metode pengukuran;
- estimasi;
- parameter sistem;
- kebijakan akuntansi;
- perlakuan terhadap transaksi tidak biasa.

Dengan demikian: *ERP mengotomatisasi proses, tetapi akuntan menentukan logika akuntansinya.*

**Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pengakuan dan Pengukuran**

AI dapat membantu proses akuntansi dengan melakukan:

- klasifikasi transaksi;
- pencocokan dokumen;
- identifikasi pola;
- estimasi;
- deteksi anomali;
- prediksi arus kas;
- analisis kontrak;
- ekstraksi informasi dari dokumen.

Sebagai contoh, AI dapat membaca kontrak pelanggan dan mengidentifikasi:

- tanggal kontrak;
- nilai kontrak;
- periode layanan;
- kewajiban perusahaan;

- jadwal pembayaran;
- klausul tertentu.

Informasi tersebut kemudian dapat membantu akuntan mengevaluasi perlakuan akuntansi. Namun, AI harus diposisikan sebagai **alat bantu**. Keputusan pengakuan dan pengukuran tetap perlu mempertimbangkan standar akuntansi, kualitas data, ketepatan model, dan professional judgment.

**Pengukuran dan Estimasi Akuntansi**

Tidak semua angka dalam laporan keuangan berasal dari transaksi dengan nilai yang dapat diketahui secara pasti. Beberapa angka membutuhkan *estimasi akuntansi.* Contohnya:

- umur manfaat aset;
- nilai residu;
- penyisihan kerugian kredit;
- provisi;
- nilai wajar ketika tidak tersedia harga pasar langsung;
- kewajiban tertentu;
- penurunan nilai aset.

Estimasi tidak berarti laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Estimasi merupakan bagian normal dari akuntansi apabila ketidakpastian melekat pada pengukuran suatu unsur. Yang penting adalah:

1. metode yang digunakan tepat;
2. asumsi memiliki dasar yang memadai;
3. informasi yang relevan digunakan;
4. estimasi diperbarui ketika kondisi berubah;
5. pengungkapan dilakukan sesuai standar.

**Ketidakpastian Pengukuran**

Ketidakpastian pengukuran terjadi ketika jumlah yang akan dicatat tidak dapat diketahui secara pasti dan harus diestimasi. Sebagai contoh, perusahaan memiliki piutang Rp10 miliar. Tidak semua pelanggan mungkin membayar seluruh piutang tersebut. Akuntan perlu melakukan estimasi mengenai jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan informasi yang relevan dan ketentuan standar yang berlaku. Dalam kondisi seperti ini: →

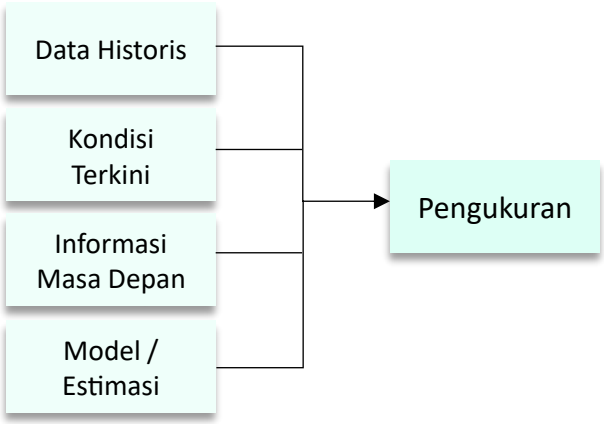


Ketidakpastian tersebut harus dikelola secara profesional agar angka laporan keuangan tetap memberikan informasi yang berguna.

---

**Pengakuan, Pengukuran, dan Kualitas Informasi Keuangan**

Pengakuan dan pengukuran memiliki hubungan langsung dengan kualitas informasi keuangan.

*Jika waktu pengakuan salah, maka informasi dapat kehilangan relevansinya.*

*Jika jumlah pengukuran salah, maka informasi dapat kehilangan representasi yang tepat.*

Hubungannya dapat digambarkan:

| Proses | Risiko Kesalahan | Dampak |
|---|---|---|
| Identifikasi | Unsur salah diidentifikasi | Informasi tidak tepat |
| Pengakuan | Waktu pengakuan salah | Periode laporan tidak tepat |
| Pengukuran | Nilai salah | Angka laporan tidak tepat |
| Penyajian | Klasifikasi salah | Sulit dipahami |
| Pengungkapan | Informasi penting tidak disampaikan | Keputusan pengguna terganggu |

Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

**Faktor yang Mempengaruhi Pengakuan dan Pengukuran**

Dalam praktik, akuntan perlu mempertimbangkan beberapa faktor:

1. **Standar Akuntansi.** Perlakuan akuntansi harus mengacu pada standar yang relevan.
2. **Substansi Ekonomi.** Akuntan perlu memahami substansi ekonomi transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya.
3. **Waktu.** Pengakuan harus ditempatkan pada periode yang sesuai.
4. **Ketidakpastian.** Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar kebutuhan terhadap estimasi dan judgment.
5. **Kualitas Data.** Pengukuran sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia.
6. **Kondisi Pasar.** Untuk pengukuran tertentu, kondisi pasar dapat menjadi faktor penting.
7. **Professional Judgment.** Akuntan perlu menggunakan pertimbangan profesional dalam menerapkan standar terhadap kondisi nyata.

**Tantangan Pengakuan dan Pengukuran di Era Digital**

Era digital menghadirkan beberapa tantangan baru.

1. **Transaksi Real Time.** Transaksi dapat terjadi setiap saat sehingga sistem harus mampu menentukan kapan transaksi terjadi dan kapan memenuhi kriteria pengakuan.
2. **Kontrak Digital.** Kontrak elektronik dapat memiliki berbagai kewajiban dan ketentuan yang perlu dianalisis.
3. **Model Bisnis Berbasis Platform.** Perusahaan harus menentukan hubungan antara platform, penjual, dan pelanggan.
4. **Aset Digital.** Karakteristik ekonomi aset digital dapat berbeda dari aset konvensional.
5. **Automated Accounting.** Sistem dapat melakukan pencatatan otomatis, tetapi kesalahan pada aturan sistem dapat menghasilkan kesalahan dalam jumlah besar.
6. **Artificial Intelligence.** AI dapat menghasilkan estimasi atau rekomendasi, tetapi hasilnya tetap perlu dievaluasi.

**Prinsip Praktis Pengakuan dan Pengukuran**

Untuk mempermudah pemahaman, mahasiswa dapat menggunakan pertanyaan berikut:

Tahap 1 – Identifikasi

Apa yang sebenarnya terjadi?

Tahap 2 – Klasifikasi

Unsur laporan keuangan apa yang terlibat?

Tahap 3 – Pengakuan

Apakah unsur tersebut memenuhi persyaratan untuk diakui?

Tahap 4 – Pengukuran

Berapa nilai yang harus dicatat?

Tahap 5 – Penyajian

Di mana unsur tersebut disajikan?

Tahap 6 – Pengungkapan

Informasi tambahan apa yang perlu dijelaskan

Alur tersebut dapat diringkas:




**Perspektif Penelitian Akuntansi**

Pembahasan pengukuran dalam literatur akuntansi menunjukkan bahwa pemilihan basis pengukuran bukan sekadar persoalan teknis. Barth (2014), misalnya, menekankan pentingnya konsep pengukuran dalam memahami bagaimana informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Perdebatan mengenai pengukuran juga berkaitan dengan trade-off antara relevansi informasi dan tingkat ketidakpastian yang melekat pada estimasi. Dalam konteks kerangka konseptual, hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode pengukuran perlu mempertimbangkan karakteristik ekonomi dari aset atau liabilitas dan kebutuhan pengguna informasi. Sementara itu, perkembangan transaksi digital memperluas kebutuhan terhadap pertimbangan mengenai bagaimana suatu transaksi atau sumber daya ekonomi seharusnya diterjemahkan ke dalam angka laporan keuangan.

**Relevansi Pengakuan dan Pengukuran bagi Akuntan Modern**

Akuntan modern tidak cukup hanya mampu membuat jurnal.

Akuntan perlu mampu:

- memahami substansi transaksi;
- membaca kontrak;
- memahami model bisnis;
- mengevaluasi data;
- memahami sistem informasi;
- menggunakan analytical tools;
- memahami estimasi;

- mengevaluasi risiko;
- menerapkan standar akuntansi;
- mempertanggungjawabkan judgment yang digunakan.

Oleh karena itu, kompetensi pengakuan dan pengukuran menjadi bagian dari kompetensi profesional akuntan di era digital.

Teknologi mungkin dapat menjawab:

*"Bagaimana transaksi dicatat secara otomatis?"*

Namun akuntan tetap harus menjawab:

*"Mengapa transaksi tersebut harus dicatat dengan cara tersebut?"*

Perbedaan tersebut merupakan salah satu pembeda utama antara operator sistem akuntansi dan profesional akuntansi. Pengakuan dan pengukuran merupakan dua konsep fundamental dalam pelaporan keuangan. Pengakuan berkaitan dengan keputusan mengenai apakah dan kapan suatu unsur ekonomi dimasukkan ke dalam laporan keuangan, sedangkan pengukuran berkaitan dengan penentuan jumlah moneter yang digunakan untuk mencatat dan menyajikan unsur tersebut.

Pengakuan dan pengukuran mencakup aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Dalam penerapannya, akuntan perlu memperhatikan standar akuntansi, substansi ekonomi transaksi, karakteristik unsur, ketidakpastian, kualitas data, serta kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Di era digital, proses pengakuan dan pengukuran semakin dipengaruhi oleh ERP, cloud accounting, AI, big data, transaksi real time, kontrak digital, dan model bisnis berbasis platform. Teknologi dapat membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi proses, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap professional judgment.

Dengan demikian, prinsip utama yang perlu dipahami adalah:

> *Pengakuan menentukan kapan informasi ekonomi masuk ke dalam laporan keuangan, sedangkan pengukuran menentukan berapa nilai yang digunakan untuk merepresentasikan informasi tersebut.*

## 2.5 MATERIALITAS BATASAN AMBANG PENGUNGKAPAN

Materialitas merupakan aspek spesifik entitas dari relevansi yang didasarkan pada sifat atau besaran (atau keduanya) dari pos-pos yang terkait dengan informasi tersebut dalam konteks laporan keuangan entitas individual. Secara sederhana, suatu informasi dianggap material jika kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Menentukan ambang batas materialitas memerlukan *professional judgment* yang mendalam dari akuntan dan auditor. Tidak ada angka persentase tunggal yang berlaku mutlak untuk semua entitas. Sebagai contoh, salah saji senilai Rp50.000.000 mungkin sangat material bagi usaha mikro (SAK EMKM), namun menjadi sangat tidak material bagi korporasi multinasional terbuka yang memiliki aset triliunan rupiah. Namun, kesalahan yang bernilai

kecil secara nominal tetap bisa dikategorikan material secara kualitatif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan pelanggaran hukum atau mengubah tren laba perusahaan dari rugi menjadi untung.

Dalam penyusunan laporan keuangan, tidak semua informasi memiliki tingkat kepentingan yang sama. Perusahaan dapat menghasilkan ribuan bahkan jutaan data transaksi dalam satu periode, tetapi hanya sebagian informasi yang benar-benar penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan akuntansi membutuhkan suatu konsep yang dapat menentukan informasi mana yang perlu diperhatikan, disajikan, atau diungkapkan secara lebih mendalam. Konsep tersebut dikenal sebagai **materialitas (materiality).**

Materialitas merupakan salah satu konsep penting dalam pelaporan keuangan karena membantu perusahaan menentukan apakah suatu informasi, transaksi, kesalahan, atau pengabaian informasi dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, materialitas tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya nominal suatu transaksi, tetapi juga mempertimbangkan **sifat, keadaan, serta konteks informasi**.

Dalam lingkungan bisnis digital, konsep materialitas menjadi semakin kompleks. Perusahaan dapat memiliki transaksi bernilai relatif kecil secara nominal, tetapi transaksi tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi, kepatuhan, keamanan data, atau model bisnis perusahaan. Sebaliknya, transaksi bernilai besar belum tentu material apabila tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dalam konteks tertentu.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai materialitas perlu diperluas dari sekadar pertanyaan *"berapa besar nilainya?"* menjadi *"apakah informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan?"*

**Pengertian Materialitas**

Materialitas pada dasarnya berkaitan dengan tingkat kepentingan suatu informasi bagi pengguna laporan keuangan. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, informasi dipandang material apabila penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi tersebut secara wajar dapat diperkirakan memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan yang menggunakan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dengan demikian, materialitas dapat dipahami melalui tiga unsur utama:

1. Informasi yang dihilangkan (*omission*). Informasi yang seharusnya tersedia tetapi tidak disajikan.
2. Informasi yang salah disajikan (*misstatement*). Informasi yang disajikan tetapi mengandung kesalahan.
3. Informasi yang dikaburkan (*obscuring*). Informasi yang sebenarnya tersedia, tetapi disajikan dengan cara yang membuat pengguna sulit memahami informasi tersebut.

Secara sederhana, materialitas dapat dirumuskan sebagai:

*Materialitas = tingkat kepentingan informasi dalam memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.*

Konsep ini menunjukkan bahwa materialitas tidak semata-mata merupakan persoalan matematis. Penilaian profesional tetap diperlukan untuk menentukan apakah suatu informasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan pengguna.

**Materialitas sebagai Bagian dari Relevansi**

Materialitas memiliki hubungan yang erat dengan karakteristik kualitatif **relevansi** yang telah dibahas pada sub bab 2.2. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut mampu membuat perbedaan dalam keputusan pengguna. Materialitas merupakan salah satu aspek yang menentukan apakah informasi tertentu cukup penting untuk dikategorikan sebagai informasi yang relevan. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

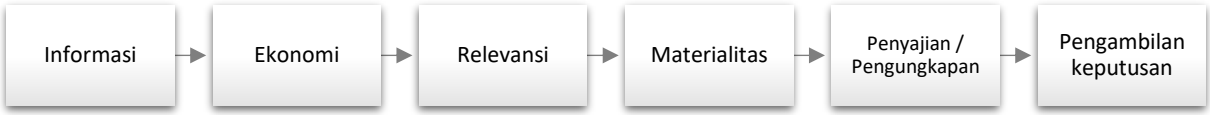


Sebagai contoh, perusahaan memiliki utang sebesar Rp500 miliar yang akan jatuh tempo dalam waktu enam bulan. Informasi mengenai jatuh tempo tersebut dapat menjadi sangat penting bagi kreditur dan investor karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, transaksi pembelian perlengkapan kantor senilai Rp500.000 mungkin tidak memerlukan pengungkapan individual dalam laporan keuangan karena nilainya relatif kecil dibandingkan keseluruhan aktivitas perusahaan. Namun, penilaian materialitas tidak boleh hanya didasarkan pada nominal.

**Materialitas Kuantitatif**

Pendekatan pertama dalam menilai materialitas adalah pendekatan **kuantitatif**, yaitu mempertimbangkan besarnya nilai suatu transaksi atau kesalahan dibandingkan dengan ukuran tertentu dalam laporan keuangan.

Beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

- total aset;
- total pendapatan;
- laba sebelum pajak;
- total ekuitas;
- total liabilitas;
- arus kas;
- ukuran tertentu yang relevan dengan karakteristik industri.

Sebagai ilustrasi, perusahaan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp20 miliar. Terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp50 juta. Secara nominal, Rp50 juta merupakan jumlah yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika dibandingkan dengan laba perusahaan sebesar Rp20 miliar, jumlah tersebut relatif kecil. Sebaliknya, kesalahan sebesar Rp2 miliar dapat memiliki dampak yang jauh lebih signifikan.

*Contoh sederhana:*

| **Komponen** | **Nilai** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Pendapatan | Rp500 miliar |
| Total aset | Rp350 miliar |
| Laba sebelum pajak | Rp20 miliar |
| Kesalahan pencatatan | Rp2 miliar |

Kesalahan Rp2 miliar dapat mencapai 10% dari laba sebelum pajak. Angka tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kesalahan perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, angka persentase tersebut **bukan batas universal** yang secara otomatis menentukan materialitas. Dalam praktik, penentuan materialitas membutuhkan pertimbangan terhadap kondisi dan karakteristik masing-masing entitas.

**Materialitas Kualitatif**

Selain ukuran nominal, materialitas juga dapat ditentukan berdasarkan **faktor kualitatif**. Suatu transaksi yang bernilai kecil dapat menjadi material apabila memiliki karakteristik tertentu. Contohnya:

- berkaitan dengan pelanggaran hukum;
- berkaitan dengan transaksi pihak berelasi;
- menyebabkan perusahaan melanggar perjanjian pinjaman;
- berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi;
- berhubungan dengan manajemen puncak;
- memengaruhi tren laba;
- mengubah perusahaan dari laba menjadi rugi;
- berkaitan dengan transaksi yang memiliki risiko reputasi tinggi.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki laba Rp1 miliar. Terdapat transaksi dengan pihak berelasi senilai Rp50 juta.

Secara kuantitatif, Rp50 juta mungkin relatif kecil. Namun, karena transaksi tersebut melibatkan pihak berelasi dan memiliki potensi kepentingan ekonomi tertentu, informasi mengenai transaksi tersebut dapat tetap penting bagi pengguna laporan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

*Jumlah kecil tidak selalu berarti tidak material.*

**Materialitas Berdasarkan Sifat dan Keadaan**

Materialitas perlu mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu:

1. *Magnitude* (besaran). Seberapa besar nilai suatu transaksi atau kesalahan?
2. *Nature* (sifat). Apa karakteristik atau sifat dari transaksi tersebut?

Hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:

| **Faktor** | **Pertanyaan yang Dipertimbangkan** |
|---|---|
| Besaran | Seberapa besar nilai transaksi? |
| Sifat | Apa karakter transaksi tersebut? |
| Konteks | Dalam kondisi apa transaksi terjadi? |
| Dampak | Apakah memengaruhi keputusan pengguna? |
| Risiko | Apakah terdapat risiko khusus? |
| Periode | Apakah terjadi pada periode penting? |

| | |
|---|---|
| Kepatuhan | Apakah berkaitan dengan peraturan atau kontrak? |

Oleh karena itu, materialitas harus dipandang sebagai ***judgment-based concept,*** yaitu konsep yang membutuhkan pertimbangan profesional.

**Materialitas dan Kesalahan Laporan Keuangan**

Materialitas juga memiliki hubungan erat dengan kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan dapat terjadi karena:

- salah klasifikasi akun;
- kesalahan perhitungan;
- transaksi yang tidak dicatat;
- transaksi yang dicatat pada periode yang salah;
- kesalahan estimasi;
- kesalahan penerapan standar akuntansi;
- kesalahan pengungkapan.

Misalnya, perusahaan seharusnya mencatat beban sebesar Rp1 miliar, tetapi hanya mencatat Rp700 juta. Terdapat selisih Rp300 juta. Akuntan perlu mengevaluasi apakah kesalahan tersebut material dengan mempertimbangkan:

1. nilai kesalahan;
2. dampaknya terhadap laba;
3. dampaknya terhadap posisi keuangan;
4. karakteristik transaksi;
5. kondisi perusahaan;
6. kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Dengan demikian, kesalahan tidak dapat dinilai hanya dengan melihat nominal secara terpisah.

**Materialitas dan Pengungkapan Informasi**

Materialitas memiliki peranan penting dalam menentukan informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan pengguna tidak memperoleh informasi penting. Sebaliknya, pengungkapan yang terlalu banyak dapat menyebabkan yaitu kondisi ketika pengguna menghadapi terlalu banyak informasi sehingga informasi yang benar-benar penting menjadi sulit ditemukan. Kondisi tersebut dapat digambarkan:

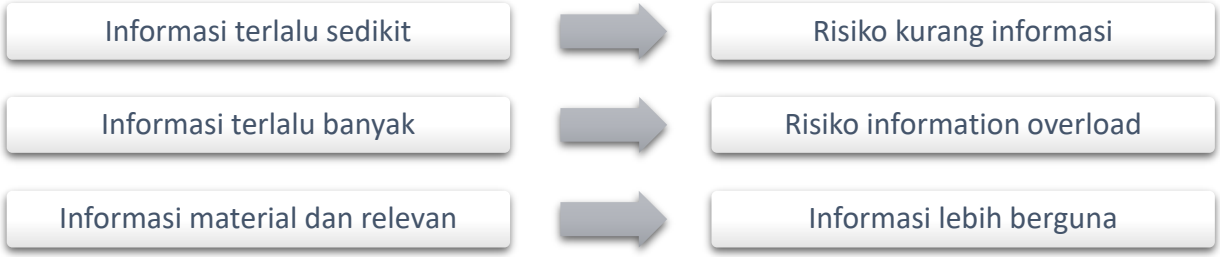


Oleh sebab itu, tujuan pengungkapan bukan sekadar menyediakan sebanyak mungkin informasi, tetapi menyediakan informasi yang *relevan, material, dan berguna bagi pengguna.*

**Materialitas dalam Lingkungan Digital**

Digitalisasi mengubah cara perusahaan menghasilkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi akuntansi.

Perusahaan modern dapat menghasilkan data melalui:

- sistem ERP;
- marketplace;
- aplikasi mobile;
- cloud accounting;
- sistem pembayaran digital;
- Internet of Things (IoT);
- artificial intelligence;
- blockchain;
- customer relationship management;
- sistem point of sale.

Jumlah data yang sangat besar tidak berarti seluruh data harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Di sinilah konsep materialitas menjadi semakin penting. Sebagai contoh, perusahaan marketplace memiliki jutaan transaksi setiap hari. Sistem dapat merekam setiap transaksi secara otomatis. Namun, laporan keuangan tidak perlu menyajikan setiap transaksi satu per satu. Data perlu dikelompokkan dan diringkas berdasarkan tingkat kepentingannya. Teknologi dapat membantu proses tersebut melalui:

- automated aggregation;
- anomaly detection;
- data classification;
- threshold monitoring;
- analytical dashboards;
- machine learning.

Namun demikian, teknologi *tidak menggantikan pertimbangan profesional* dalam menentukan materialitas.

**Materialitas dan Artificial Intelligence**

*Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi transaksi yang berpotensi material. Misalnya, sistem AI dapat menganalisis:

- transaksi bernilai besar;
- transaksi tidak biasa;
- transaksi dengan pihak berelasi;
- transaksi yang terjadi menjelang akhir periode;
- transaksi yang menyebabkan perubahan laba secara signifikan;
- transaksi yang berbeda dari pola historis.

*Contoh sederhana:*

Perusahaan memiliki 2 juta transaksi dalam satu tahun. Sistem AI dapat melakukan penyaringan awal dan memberikan daftar transaksi yang:

- memiliki nilai ekstrem;
- berbeda dari pola normal;

- memiliki karakteristik tertentu;
- membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, hasil AI tidak otomatis menjadi keputusan akuntansi.
Alur yang lebih tepat adalah:

*Data transaksi → AI/analitik → Identifikasi transaksi berisiko → Review akuntan → Pertimbangan materialitas → Keputusan penyajian/pengungkapan*

Dengan demikian, AI berfungsi sebagai ***decision-support tool,*** bukan pengganti professional judgment.

**Materialitas dan Audit**

Materialitas juga merupakan konsep penting dalam audit laporan keuangan. Auditor menggunakan materialitas untuk membantu menentukan:

- sifat prosedur audit;
- waktu pelaksanaan prosedur;
- luas pengujian;
- evaluasi salah saji;
- evaluasi dampak salah saji terhadap laporan keuangan.

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki 100.000 transaksi pembelian dalam satu tahun. Tidak mungkin auditor memeriksa seluruh transaksi dengan tingkat kedalaman yang sama. Auditor dapat menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan transaksi atau kelompok transaksi yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Namun, materialitas audit memiliki konteks dan tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, konsep materialitas dalam pelaporan keuangan dan materialitas dalam audit perlu dipahami sebagai konsep yang berkaitan tetapi tidak identik.

**Materialitas dan Pengambilan Keputusan Investor**

Investor menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi berbagai aspek perusahaan, seperti:

- profitabilitas;
- likuiditas;
- solvabilitas;
- arus kas;
- risiko;
- pertumbuhan;
- kemampuan menghasilkan laba;
- struktur modal.

Informasi yang material dapat mengubah penilaian investor terhadap kondisi perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan melaporkan laba Rp10 miliar. Namun, terdapat informasi bahwa

sebagian besar laba tersebut berasal dari keuntungan satu kali yang tidak berulang. Informasi tersebut dapat menjadi penting karena investor mungkin perlu membedakan antara:

$$laba\ berulang\ (recurring)$$
$$dan$$
$$laba\ tidak\ berulang\ (non-recurring).$$

Dengan demikian, materialitas tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga dengan kemampuan informasi dalam memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi ekonomi perusahaan.

**Materialitas dan Sustainability Reporting**

Perkembangan pelaporan keberlanjutan memperluas pembahasan materialitas. Dalam konteks sustainability reporting, dikenal konsep **materialitas dampak** dan dalam kerangka tertentu juga pendekatan **double materiality**. Konsep tersebut dapat mempertimbangkan dua arah hubungan:

1. bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi perusahaan; dan
2. bagaimana aktivitas perusahaan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Konsep tersebut perlu dibedakan dari materialitas dalam laporan keuangan umum. Setiap kerangka pelaporan memiliki tujuan, pengguna, dan definisi materialitas yang dapat berbeda. Hal ini penting bagi perusahaan karena semakin banyak pengguna informasi yang membutuhkan informasi mengenai:

- perubahan iklim;
- emisi;
- penggunaan energi;
- kondisi tenaga kerja;
- tata kelola;
- risiko rantai pasok;
- keamanan data;
- dampak sosial.

Dengan demikian, perkembangan pelaporan perusahaan menunjukkan bahwa penilaian materialitas semakin berkaitan dengan konteks informasi dan kebutuhan pengguna.

**Materialitas dan Keamanan Siber**

Dalam era digital, keamanan siber menjadi salah satu contoh menarik dalam pembahasan materialitas. Misalnya, sebuah perusahaan mengalami serangan siber yang menyebabkan:

- 100.000 data pelanggan terekspos;
- sistem operasional berhenti selama 24 jam;
- perusahaan harus mengeluarkan biaya pemulihan;
- muncul potensi tuntutan hukum;
- reputasi perusahaan terdampak.

Biaya pemulihan mungkin tidak selalu menjadi komponen terbesar dalam laporan keuangan. Namun, sifat dan dampak peristiwa tersebut dapat menyebabkan informasi terkait insiden menjadi penting bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa materialitas dapat muncul melalui ***dampak ekonomi dan karakteristik peristiwa,*** bukan hanya melalui nominal transaksi.

**Materialitas dalam Pengambilan Keputusan Akuntan**

Dalam praktik, akuntan dapat menggunakan beberapa pertanyaan berikut sebagai kerangka awal:

1. Apa jenis informasi atau transaksi tersebut?
2. Berapa nilai nominalnya?
3. Seberapa besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan?
4. Apakah transaksi tersebut bersifat tidak biasa?
5. Apakah terdapat pihak berelasi?
6. Apakah transaksi tersebut berkaitan dengan kepatuhan?
7. Apakah transaksi tersebut memengaruhi tren laba?
8. Apakah informasi tersebut dapat mengubah keputusan pengguna?
9. Apakah terdapat risiko salah tafsir jika informasi tidak diungkapkan?
10. Apakah terdapat kondisi khusus yang meningkatkan kepentingan informasi tersebut?

Pertanyaan tersebut tidak menggantikan standar akuntansi atau professional judgment, tetapi dapat membantu mahasiswa memahami proses berpikir dalam menilai materialitas.

**Tantangan Penentuan Materialitas di Era Digital**

Beberapa tantangan utama dalam penerapan materialitas di era digital adalah:

1. **Volume Data yang Sangat Besar.** Perusahaan digital dapat menghasilkan jutaan transaksi. Akuntan perlu membedakan antara data yang tersedia dan informasi yang benar-benar penting.
2. **Kecepatan Transaksi.** Transaksi digital berlangsung secara real time sehingga penilaian materialitas harus dapat dilakukan dalam lingkungan informasi yang sangat cepat.
3. **Transaksi Digital yang Kompleks.** Model bisnis berbasis platform, subscription, cloud service, digital assets, dan marketplace dapat menciptakan transaksi yang membutuhkan analisis lebih mendalam.
4. **Ketergantungan pada Sistem.** Kesalahan konfigurasi sistem dapat memengaruhi ribuan transaksi sekaligus. Kesalahan individual yang kecil dapat menjadi signifikan secara agregat.
5. **Penggunaan AI.** AI dapat membantu menemukan pola dan anomali, tetapi hasilnya tetap membutuhkan validasi manusia.
6. **Information Overload.** Semakin banyak data yang tersedia, semakin penting kemampuan menyaring informasi berdasarkan relevansinya.

**Prinsip Praktis Memahami Materialitas**

Untuk mempermudah pemahaman mahasiswa, konsep materialitas dapat diringkas melalui lima pertanyaan:

***"Berapa besar?"***

berkaitan dengan ukuran kuantitatif.

***"Apa sifatnya?"***

berkaitan dengan karakter transaksi.

***"Dalam konteks apa?"***

berkaitan dengan kondisi perusahaan.

***"Siapa penggunanya?"***

berkaitan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

***"Apakah keputusan dapat berubah?"***

berkaitan dengan pengaruh informasi terhadap pengambilan keputusan.

Dengan lima pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa materialitas merupakan konsep yang bersifat **kuantitatif sekaligus kualitatif**. Materialitas merupakan konsep penting dalam pelaporan keuangan yang berfungsi membantu menentukan informasi yang perlu disajikan dan diungkapkan kepada pengguna laporan keuangan. Materialitas berkaitan erat dengan relevansi karena informasi yang material berpotensi memengaruhi keputusan pengguna.

Penentuan materialitas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nominal transaksi. Faktor kuantitatif harus dipertimbangkan bersama dengan faktor kualitatif, sifat transaksi, kondisi perusahaan, kepatuhan, risiko, serta kebutuhan pengguna informasi. Digitalisasi semakin meningkatkan pentingnya konsep materialitas. Sistem ERP, cloud accounting, AI, big data, marketplace, dan transaksi digital menghasilkan volume data yang sangat besar. Dalam kondisi tersebut, tantangan akuntan bukan lagi hanya bagaimana memperoleh data, tetapi bagaimana menentukan **data mana yang memiliki makna dan kepentingan bagi pengambilan keputusan**.

Teknologi dapat membantu mengidentifikasi pola, anomali, dan transaksi yang berpotensi penting. Namun, keputusan akhir mengenai penerapan konsep materialitas tetap membutuhkan pemahaman terhadap standar akuntansi, konteks transaksi, serta pertimbangan profesional. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa:

*Materialitas bukan sekadar batas angka, melainkan pertimbangan mengenai apakah suatu informasi cukup penting untuk memengaruhi pemahaman dan keputusan pengguna laporan keuangan.*

## 2.6 GOING CONCERN SEBAGAI ASUMSI KELANGSUNGAN HIDUP ABADI

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Asumsi tersebut dikenal

sebagai ***going concern*** atau ***kelangsungan usaha***. Going concern merupakan salah satu konsep fundamental dalam pelaporan keuangan karena memengaruhi cara aset, liabilitas, pendapatan, dan beban diakui serta diukur. Jika suatu perusahaan diperkirakan akan terus beroperasi, laporan keuangan pada umumnya disusun berdasarkan asumsi keberlanjutan aktivitas usaha. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki niat atau kebutuhan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan kegiatan usaha, dasar penyusunan laporan keuangan dapat perlu disesuaikan dan dasar yang digunakan perlu dijelaskan.

Dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting*, IFRS Foundation menyatakan bahwa laporan keuangan pada umumnya disusun dengan asumsi bahwa entitas merupakan *going concern* dan akan melanjutkan operasinya untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan. Dengan demikian, going concern bukan berarti perusahaan harus selalu menghasilkan laba atau dijamin akan bertahan selamanya. Konsep ini berkaitan dengan *kemampuan dan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan operasinya sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan dasar yang sesuai.*

Dalam lingkungan bisnis modern, penilaian going concern menjadi semakin kompleks karena perusahaan menghadapi perubahan teknologi, persaingan, ketidakpastian ekonomi, perubahan perilaku konsumen, risiko pembiayaan, gangguan rantai pasok, serta risiko digital.

**Pengertian Going Concern**

*Going concern* adalah asumsi bahwa entitas akan melanjutkan kegiatan operasionalnya untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan dan tidak memiliki kebutuhan atau niat untuk melakukan likuidasi atau menghentikan perdagangan.

Dalam konteks sederhana:

Going concern menjawab pertanyaan:

“Apakah perusahaan masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya?”

Pertanyaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi laba atau rugi saat ini, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan menghadapi kewajiban, memperoleh sumber daya, mempertahankan operasi, serta mengelola risiko yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Sebagai contoh, perusahaan mengalami kerugian pada satu tahun tertentu belum tentu berarti perusahaan tidak *going concern*. Sebaliknya, perusahaan yang masih mencatat laba dapat menghadapi masalah going concern apabila memiliki masalah likuiditas yang serius atau kewajiban yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu:

*Rugi tidak otomatis berarti tidak going concern, dan laba tidak otomatis berarti going concern.*

Penilaian harus mempertimbangkan keseluruhan kondisi perusahaan.

**Going Concern dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan**

Going concern memiliki posisi penting dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. IFRS Conceptual Framework menjelaskan bahwa laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi dalam masa mendatang

yang dapat diperkirakan. Jika terdapat niat atau kebutuhan untuk melakukan likuidasi atau menghentikan perdagangan, laporan keuangan mungkin perlu disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar tersebut perlu dijelaskan. Konsep ini memberikan dasar bagi berbagai keputusan akuntansi. Sebagai ilustrasi:

| **Going concern ada** |
| --- |
| → Perusahaan diasumsikan terus beroperasi<br>→ Aset digunakan dalam kegiatan normal<br>→ Kewajiban diselesaikan melalui kegiatan usaha dan sumber pembiayaan yang tersedia<br>→ Pengukuran dan penyajian mengikuti standar yang relevan. |

SebaliknyaL

| **Going concern bermasalah** |
| --- |
| → Terdapat ketidakpastian mengenai kemampuan melanjutkan usaha<br>→ Diperlukan evaluasi lebih mendalam<br>→ Pengungkapan mengenai ketidakpastian menjadi semakin penting<br>→ Jika kondisi mengharuskan, dasar penyusunan laporan keuangan dapat berbeda. |

**Going Concern Bukan Jaminan Kelangsungan Perusahaan**

Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap going concern sebagai jaminan bahwa perusahaan pasti akan bertahan. Going concern **bukan jaminan**. Going concern merupakan **asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia**. Perusahaan tetap dapat mengalami:

- kebangkrutan;
- likuidasi;
- restrukturisasi;
- penghentian operasi;
- perubahan model bisnis;
- akuisisi;
- merger.

Dengan demikian, going concern harus dipahami sebagai konsep pelaporan keuangan yang berhubungan dengan kondisi perusahaan dan ketidakpastian masa depan.

**Indikator yang Dapat Menimbulkan Keraguan terhadap Going Concern**

Penilaian going concern dapat mempertimbangkan berbagai indikator.

**A. Indikator Keuangan**

Contohnya:

- kerugian berulang;
- modal kerja negatif;
- arus kas operasi negatif;
- kesulitan membayar utang;
- rasio utang yang tinggi;

- kegagalan memenuhi kewajiban;
- ketergantungan pada pembiayaan baru.

**B. Indikator Operasional**

Contohnya:

- kehilangan pelanggan utama;
- kehilangan pemasok utama;
- gangguan produksi;
- penurunan permintaan;
- kekurangan sumber daya;
- kegagalan teknologi;
- gangguan operasional.

**C. Indikator Eksternal**

Contohnya:

- perubahan regulasi;
- perubahan kondisi ekonomi;
- perubahan teknologi;
- persaingan yang semakin tinggi;
- litigasi;
- perubahan kondisi pasar.

**D. Indikator Bisnis Digital**

Untuk perusahaan digital, indikator dapat ditambah dengan:

- penurunan jumlah pengguna aktif;
- peningkatan biaya akuisisi pelanggan;
- ketergantungan pada satu platform;
- kegagalan sistem;
- serangan siber;
- kehilangan data;
- perubahan algoritma platform;
- perubahan kebijakan marketplace atau app store.

**Going Concern dan Likuiditas**

Salah satu aspek penting dalam menilai keberlangsungan usaha adalah **likuiditas**. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dapat memiliki aset yang besar tetapi tetap menghadapi masalah going concern apabila aset tersebut sulit dikonversi menjadi kas ketika kewajiban harus dibayar.

*Sebagai contoh:*

PT Arunika memiliki aset sebesar Rp500 miliar, tetapi hanya memiliki kas Rp5 miliar. Dalam waktu dekat perusahaan memiliki utang jatuh tempo Rp50 miliar.

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena:

$$Total\ aset\ besar\ \neq\ otomatis\ memiliki\ likuiditas\ yang\ cukup.$$

Dengan demikian, analisis going concern perlu memperhatikan bukan hanya ukuran aset, tetapi juga:

- kas;
- arus kas;
- kewajiban jatuh tempo;
- kemampuan memperoleh pembiayaan;
- kemampuan menghasilkan kas dari operasi.

**Going Concern dan Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan salah satu informasi penting dalam menilai kondisi perusahaan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator going concern. Perusahaan dapat mengalami rugi karena:

- investasi ekspansi;
- pembukaan pasar baru;
- biaya penelitian dan pengembangan;
- depresiasi aset;
- restrukturisasi;
- kondisi ekonomi sementara.

Sebaliknya, perusahaan dapat mencatat laba tetapi mengalami tekanan likuiditas. Oleh karena itu, analisis going concern perlu mempertimbangkan hubungan antara:

$$Profitabilitas + Likuiditas + Solvabilitas + Arus\ Kas + Kondisi\ Operasional$$

**Going Concern dan Arus Kas**

Arus kas merupakan salah satu informasi penting karena kelangsungan operasional perusahaan sangat berkaitan dengan kemampuan menghasilkan dan memperoleh kas. Perusahaan membutuhkan kas untuk:

- membayar pemasok;
- membayar karyawan;
- membayar utang;
- membayar pajak;
- melakukan investasi;
- mempertahankan kegiatan operasional.

Sebagai contoh, perusahaan memiliki laba bersih Rp10 miliar, tetapi arus kas operasi negatif secara berulang. Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan kegagalan going concern, tetapi dapat menjadi sinyal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan perlu memahami bahwa:

> Laba dan kas merupakan dua informasi yang berbeda dan keduanya dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap keberlangsungan usaha.

**Going Concern dan Leverage**

**Leverage** menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaannya. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan pada utang, semakin penting analisis terhadap:

- kemampuan membayar bunga;
- kemampuan membayar pokok;
- jatuh tempo utang;
- covenant atau persyaratan pinjaman;
- kemampuan memperoleh pembiayaan kembali.

Penelitian Mulyana, Widarsono, dan Apandi (2023) memberikan perspektif empiris yang relevan. Penelitian tersebut menggunakan 111 perusahaan yang tercatat pada *special surveillance board* Bursa Efek Indonesia dan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kemungkinan diperolehnya opini audit going concern, sedangkan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh dalam penelitian tersebut.

Temuan tersebut penting untuk pembelajaran karena menunjukkan bahwa tekanan keuangan yang tercermin melalui leverage dapat berkaitan dengan perhatian auditor terhadap keberlangsungan usaha.

Namun, temuan tersebut merupakan hasil empiris pada sampel dan periode penelitian tertentu, bukan aturan bahwa setiap perusahaan dengan leverage tinggi pasti memperoleh opini going concern.

**Going Concern dan Risiko Bisnis**

Going concern juga berkaitan dengan **business risk** atau risiko bisnis. Risiko bisnis dapat berasal dari:

- perubahan permintaan;
- persaingan;
- perubahan teknologi;
- ketergantungan terhadap pemasok;
- perubahan regulasi;
- perubahan harga;
- gangguan operasional;
- perubahan perilaku konsumen.

Pada perusahaan teknologi, risiko bisnis dapat meningkat apabila perusahaan bergantung pada teknologi yang cepat mengalami perubahan.

*Sebagai contoh:*

Perusahaan mengembangkan perangkat lunak yang selama lima tahun menjadi produk utama. Kemudian muncul teknologi baru yang menyebabkan produk perusahaan kehilangan daya saing. Walaupun laporan keuangan saat ini masih menunjukkan laba, perubahan tersebut dapat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi keberlangsungan usaha.

**Going Concern dan Ketidakpastian**

Salah satu kontribusi penting dari penelitian Barker, Penman, Linsmeier, dan Cooper (2020) adalah penekanan pada **uncertainty atau ketidakpastian** dalam pelaporan keuangan.

Mereka berpendapat bahwa ketidakpastian memiliki peran penting dalam memahami fungsi akuntansi akrual dan bagaimana laporan keuangan memberikan informasi kepada investor mengenai jumlah, waktu, serta ketidakpastian arus kas masa depan. Dalam konteks going concern, ketidakpastian menjadi penting karena kondisi masa depan perusahaan tidak dapat diketahui secara pasti.

*Contohnya:*

- apakah penjualan akan meningkat;
- apakah perusahaan dapat memperoleh pembiayaan;
- apakah pelanggan utama akan bertahan;
- apakah teknologi baru akan mengganggu model bisnis;
- apakah perusahaan mampu membayar utang;
- apakah strategi restrukturisasi berhasil.

Oleh karena itu, going concern dapat dipahami sebagai konsep yang sangat berkaitan dengan *pengelolaan ketidakpastian masa depan.*

**Going Concern dan Professional Judgment**

Karena masa depan tidak dapat diketahui secara pasti, penilaian going concern membutuhkan **professional judgment**. Akuntan dan auditor perlu mengevaluasi:

1. kondisi keuangan;
2. kondisi operasional;
3. rencana manajemen;
4. sumber pendanaan;
5. kewajiban yang akan jatuh tempo;
6. kondisi industri;
7. faktor eksternal;
8. informasi setelah periode pelaporan yang relevan;
9. tingkat ketidakpastian.

Professional judgment tidak berarti keputusan dilakukan secara subjektif tanpa dasar. Sebaliknya, judgment harus didukung oleh:

- bukti;
- data;
- analisis;
- standar akuntansi;
- informasi yang relevan;
- dokumentasi.

**Going Concern dan Opini Audit**

Konsep going concern memiliki hubungan erat dengan audit laporan keuangan. Auditor mengevaluasi apakah terdapat kondisi atau peristiwa yang menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sesuai kerangka audit yang berlaku. Apabila terdapat kondisi tertentu, auditor perlu mengevaluasi:

- bukti yang tersedia;
- rencana manajemen;

- kemampuan perusahaan menjalankan rencana;
- kecukupan pengungkapan;
- dampaknya terhadap laporan auditor.

Penting bagi mahasiswa untuk membedakan:

$$Asumsi\ going\ concern$$

dengan

$$Opini\ audit\ going\ concern.$$

Asumsi going concern merupakan konsep penyusunan laporan keuangan, sedangkan opini atau bagian tertentu dalam laporan auditor berkaitan dengan hasil evaluasi auditor atas kondisi yang relevan.

**Going Concern dan Internal Control**

Pengendalian internal dapat membantu perusahaan:

- mengidentifikasi risiko;
- mengendalikan kesalahan;
- menjaga aset;
- menghasilkan informasi yang andal;
- mendukung kepatuhan;
- mendeteksi masalah operasional.

Akan tetapi, berdasarkan penelitian Mulyana et al. (2023), variabel aktivitas pelatihan dan internal auditor dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh terhadap opini audit going concern. Temuan ini penting untuk dipahami secara tepat.

$$Tidak\ berpengaruh\ dalam\ suatu\ penelitian\ \neq\ tidak\ penting\ dalam\ praktik.$$

Artinya, penelitian tersebut tidak menemukan hubungan statistik yang signifikan dalam model dan sampel yang digunakan. Hal tersebut tidak berarti pengendalian internal secara umum tidak memiliki manfaat bagi organisasi.

**Going Concern di Era Digital**

Transformasi digital menciptakan bentuk risiko baru terhadap kelangsungan usaha.

a. **Risiko Teknologi.** Kegagalan sistem dapat menghentikan operasi perusahaan.
b. **Risiko Keamanan Siber.** Serangan siber dapat menyebabkan:
    - kehilangan data;
    - gangguan layanan;
    - biaya pemulihan;
    - tuntutan hukum;
    - kehilangan kepercayaan pelanggan.
c. **Risiko Platform.** Perusahaan yang bergantung pada platform pihak ketiga menghadapi risiko perubahan kebijakan platform.
d. **Risiko Model Bisnis.** Perusahaan digital dapat mengalami perubahan model bisnis dengan sangat cepat.

e. **Risiko Data.** Data merupakan sumber daya penting bagi banyak perusahaan digital. Kehilangan akses atau kualitas data dapat mengganggu kegiatan usaha.

f. **Risiko Ketergantungan Teknologi.** Ketergantungan terhadap vendor cloud, software, atau infrastruktur tertentu dapat menciptakan risiko operasional.

**Going Concern pada Perusahaan Startup**

Startup merupakan contoh menarik dalam pembahasan going concern.

Startup dapat mengalami:

- kerugian pada beberapa tahun awal;
- kebutuhan pendanaan eksternal;
- arus kas negatif;
- investasi besar;
- ketidakpastian model bisnis.

Namun, kerugian tersebut harus dianalisis dalam konteks keseluruhan kondisi perusahaan.

Misalnya:

PT Startup Digital memiliki:

- kerugian Rp20 miliar;
- kas Rp100 miliar;
- investor yang telah memberikan komitmen pendanaan;
- pertumbuhan pelanggan 50% per tahun;
- biaya operasional yang terkendali.

Kondisi tersebut berbeda dengan perusahaan yang memiliki kerugian Rp20 miliar dan hanya memiliki kas Rp2 miliar tanpa sumber pembiayaan yang jelas.

Dengan demikian:

*Satu indikator tidak cukup untuk menentukan kondisi going concern.*

**Going Concern dan Sustainability**

Going concern dan sustainability memiliki hubungan, tetapi keduanya tidak identik. *Going concern* terutama berkaitan dengan kemampuan perusahaan melanjutkan operasi. *Sustainability* memiliki cakupan lebih luas dan dapat mencakup:

- lingkungan;
- sosial;
- tata kelola;
- keberlanjutan model bisnis;
- penggunaan sumber daya.

Perusahaan yang mengabaikan isu lingkungan atau sosial tertentu dapat menghadapi risiko ekonomi jangka panjang yang pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, dalam lingkungan bisnis modern, analisis going concern dapat semakin membutuhkan pemahaman terhadap risiko keberlanjutan.

**Going Concern dan Data Analytics**

Teknologi analitik data dapat membantu mengidentifikasi indikator going concern. *Contohnya,* perusahaan dapat membangun dashboard yang memonitor:

| Indikator | Kondisi |
|---|---|
| Arus kas operasi | Menurun |
| Rasio utang | Meningkat |
| Piutang | Meningkat |
| Pendapatan | Menurun |
| Pelanggan aktif | Menurun |
| Biaya operasional | Meningkat |
| Cash runway | Menurun |
| Utang jatuh tempo | Meningkat |

Dengan data tersebut, manajemen dan akuntan dapat *melakukan early warning analysis.* Namun, dashboard hanya memberikan informasi. Interpretasi terhadap informasi tersebut tetap membutuhkan pertimbangan profesional.

**Model Sederhana Analisis Going Concern**

Untuk kepentingan pembelajaran, analisis going concern dapat dibuat dalam lima tahap:

**Tahap 1 – *Identifikasi Risiko***

Mengidentifikasi kondisi yang dapat mengancam keberlangsungan usaha.

**Tahap 2 – *Mengukur Dampak***

Menilai seberapa besar pengaruh risiko terhadap perusahaan.

**Tahap 3 – *Mengevaluasi Rencana Manajemen***

Menilai apakah perusahaan memiliki rencana untuk mengatasi masalah.

**Tahap 4 – *Menilai Ketidakpastian***

Menentukan tingkat ketidakpastian yang masih tersisa.

**Tahap 5 – *Menentukan Perlakuan Pelaporan***

Menentukan apakah diperlukan pengungkapan atau perlakuan tertentu berdasarkan standar yang berlaku.

Alurnya:




**Kesalahan Pemahaman yang Sering Terjadi**

**Kesalahan 1**

*"Perusahaan rugi berarti tidak going concern."*

**Koreksi:**

Kerugian merupakan salah satu indikator yang perlu dianalisis, bukan bukti otomatis bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan usaha.

**Kesalahan 2**

*"Perusahaan laba berarti pasti going concern."*

**Koreksi:**

Laba tidak menjamin perusahaan memiliki likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban.

**Kesalahan 3**

*"Going concern berarti perusahaan akan hidup selamanya."*

**Koreksi:**

Going concern berkaitan dengan asumsi keberlanjutan operasi untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan.

**Kesalahan 4**

*"Opini going concern berarti perusahaan pasti bangkrut."*

**Koreksi:**

Opini atau komunikasi audit mengenai going concern berkaitan dengan adanya kondisi atau ketidakpastian yang relevan terhadap kemampuan perusahaan melanjutkan usaha; hal tersebut tidak sama dengan kepastian bahwa perusahaan akan bangkrut.

**Kesalahan 5**

*"AI dapat menentukan going concern secara otomatis."*

**Koreksi:**

AI dapat membantu analisis data dan menemukan indikator risiko, tetapi evaluasi profesional tetap diperlukan.

**Relevansi Going Concern bagi Akuntan Modern**

Akuntan modern perlu memiliki kemampuan untuk memahami indikator keberlangsungan usaha secara lebih luas. Kompetensi tersebut meliputi:

- analisis laporan keuangan;
- analisis arus kas;
- analisis leverage;
- pemahaman model bisnis;
- pemahaman risiko;
- data analytics;
- pemahaman teknologi;
- evaluasi ketidakpastian;
- professional judgment;
- komunikasi informasi keuangan.

Peran akuntan tidak berhenti pada pencatatan transaksi. Akuntan juga berperan dalam membantu organisasi memahami:

$$"Apa\ arti\ angka - angka\ tersebut\ bagi\ keberlangsungan\ perusahaan?"$$

Going concern merupakan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan kegiatan operasionalnya untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan. Asumsi ini menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian going concern tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan laba atau rugi. Berbagai indikator perlu dipertimbangkan, termasuk:

- likuiditas;

- arus kas;
- leverage;
- profitabilitas;
- risiko bisnis;
- kondisi operasional;
- kewajiban jatuh tempo;
- kondisi eksternal;
- rencana manajemen;
- ketidakpastian masa depan.

Penelitian Mulyana, Widarsono, dan Apandi (2023) menunjukkan bahwa leverage dan pemberitaan media massa berhubungan positif dengan opini audit going concern pada sampel 111 perusahaan yang berada pada *special surveillance board*, sedangkan ukuran perusahaan, aktivitas pelatihan, dan internal auditor tidak menunjukkan pengaruh dalam model penelitian tersebut.

Sementara itu, Barker et al. (2020) menekankan pentingnya ketidakpastian dalam memahami fungsi pelaporan keuangan, khususnya dalam menyediakan informasi mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dalam era digital, going concern semakin kompleks karena perusahaan menghadapi risiko teknologi, keamanan siber, ketergantungan platform, perubahan model bisnis, dan perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, going concern dapat dirangkum dalam prinsip:

> *Kelangsungan usaha bukan sekadar persoalan apakah perusahaan memperoleh laba, tetapi merupakan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan operasi dalam menghadapi kewajiban, risiko, dan ketidakpastian masa depan.*

## 2.7 BASIS AKRUAL DAN SUBSTANSI EKONOMI DI ATAS ARUS KAS

Salah satu prinsip fundamental dalam penyusunan laporan keuangan adalah *basis akrual (accrual basis).* Basis akrual menempatkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi sebagai dasar utama pencatatan, bukan semata-mata waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Konsep ini sangat penting karena aktivitas ekonomi perusahaan tidak selalu berlangsung bersamaan dengan arus kas. Perusahaan dapat memberikan jasa hari ini tetapi menerima pembayaran beberapa bulan kemudian. Sebaliknya, perusahaan dapat membayar suatu biaya terlebih dahulu meskipun manfaat ekonominya baru digunakan pada periode berikutnya. Jika laporan keuangan hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang kurang lengkap mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting,* IFRS menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual menggambarkan dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi terhadap sumber daya ekonomi dan klaim entitas pada periode ketika dampak tersebut terjadi, meskipun penerimaan atau pembayaran kas terjadi pada periode yang berbeda. Kerangka tersebut menilai informasi berbasis akrual lebih berguna untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan kemampuan entitas menghasilkan arus kas bersih pada masa mendatang dibandingkan

informasi yang hanya berfokus pada arus kas. Dengan demikian, basis akrual dapat dipahami sebagai upaya akuntansi untuk menjawab pertanyaan:

*"Apa yang secara ekonomi terjadi pada perusahaan dalam suatu periode?"*

bukan sekadar:

*"Berapa kas yang diterima dan dibayarkan perusahaan dalam periode tersebut?"*

**Pengertian Basis Akrual**

Basis akrual adalah dasar pencatatan transaksi dan peristiwa ekonomi dengan mengakui dampaknya pada periode ketika hak, kewajiban, pendapatan, atau beban tersebut terjadi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Secara sederhana:

**Basis kas:**

$$Kas\ diterima \rightarrow dicatat\ sebagai\ penerimaan$$
$$Kas\ dibayar \rightarrow dicatat\ sebagai\ pengeluaran$$

**Basis akrual:**

$$Peristiwa\ ekonomi\ terjadi \rightarrow dianalisis \rightarrow diakui\ sesuai\ ketentuan \rightarrow kas\ dapat\ terjadi\ sebelum\ atau\ sesudah\ pengakuan.$$

Perbedaan tersebut merupakan dasar untuk memahami mengapa laporan laba rugi tidak sama dengan laporan arus kas.

**Mengapa Basis Akrual Diperlukan?**

Perusahaan menjalankan aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi waktu.

*Sebagai contoh:*

PT Arunika Teknologi memberikan jasa konsultasi pada Desember 2026 dengan nilai Rp 50 juta. Pelanggan baru membayar pada Januari 2027. Jika menggunakan pendekatan yang hanya memperhatikan kas:

- Desember 2026 → belum ada kas;
- Januari 2027 → kas Rp 50 juta diterima.

Namun secara ekonomi, jasa telah diberikan pada Desember.

Basis akrual memungkinkan dampak transaksi tersebut dicerminkan pada periode yang relevan berdasarkan ketentuan pengakuan yang berlaku. Dengan demikian, basis akrual membantu pengguna laporan keuangan memahami ***aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu periode,*** bukan hanya perpindahan kas.

**Basis Akrual dan Basis Kas**

Perbedaan antara basis akrual dan basis kas dapat dilihat melalui tabel berikut.

| Aspek | Basis Kas | Basis Akrual |
|---|---|---|
| Dasar pencatatan | Arus kas | Peristiwa ekonomi sesuai kriteria pengakuan |
| Pendapatan | Saat kas diterima | Saat memenuhi ketentuan pengakuan |
| Beban | Saat kas dibayar | Saat kewajiban/beban diakui sesuai ketentuan |

| | | |
|---|---|---|
| Piutang | Umumnya belum tercermin sebagai pendapatan hanya karena hak belum direalisasi dalam kas | Dapat diakui jika memenuhi ketentuan |
| Utang | Umumnya belum tercermin hanya karena belum dibayar | Dapat diakui jika memenuhi ketentuan |
| Kinerja | Berfokus pada arus kas | Menggambarkan aktivitas ekonomi |
| Kompleksitas | Relatif sederhana | Lebih kompleks |
| Informasi masa depan | Terbatas | Lebih informatif untuk analisis tertentu |

Basis kas memiliki kegunaan tertentu, terutama untuk memahami likuiditas dan arus kas. Namun, laporan keuangan bertujuan umum menggunakan basis akrual karena diperlukan informasi mengenai sumber daya ekonomi, klaim, serta perubahan keduanya.

**Hubungan Basis Akrual dengan Kerangka Konseptual**

Basis akrual tidak berdiri sendiri. Konsep ini berkaitan langsung dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dalam mengambil keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Untuk tujuan tersebut, pengguna membutuhkan informasi mengenai:

- aset;
- liabilitas;
- ekuitas;
- penghasilan;
- beban;
- arus kas;
- perubahan sumber daya ekonomi;
- ketidakpastian masa depan.

Basis akrual membantu menunjukkan perubahan sumber daya ekonomi dan klaim pada periode ketika perubahan tersebut terjadi. IFRS secara eksplisit mengaitkan informasi akrual dengan penilaian terhadap kinerja masa lalu dan kemampuan menghasilkan arus kas bersih masa depan.

**Basis Akrual dan Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu area yang paling mudah menimbulkan kesalahpahaman mengenai basis akrual. Penerimaan kas tidak selalu sama dengan pendapatan.

Sebagai contoh, pelanggan membayar Rp120 juta di muka untuk layanan selama 12 bulan.

Kas diterima: **Rp120 juta**

Namun perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan selama periode kontrak. Oleh karena itu, akuntan perlu menentukan perlakuan pendapatan berdasarkan standar yang relevan. Secara ilustratif apabila jasa diberikan secara merata selama 12 bulan:

$$\text{Rp.} \quad 120.000.000/12 = \text{Rp.}\, 10.000.000$$

Sehingga Rp10 juta merupakan ilustrasi jumlah pendapatan untuk setiap bulan apabila seluruh kondisi kontrak mendukung pola pengakuan tersebut. Perhitungan tersebut hanya contoh pedagogis. Pengakuan aktual harus mengikuti persyaratan standar pendapatan dan karakteristik kontrak.

**Basis Akrual dan Beban**

Prinsip akrual juga berlaku untuk beban. *Misalnya*, perusahaan menggunakan listrik selama Desember tetapi tagihan baru dibayar pada Januari.

*Secara ekonomi:*

$$Desember \rightarrow listrik\ telah\ digunakan$$
$$Januari \rightarrow kas\ dibayarkan$$

Apabila kewajiban dan beban memenuhi ketentuan pengakuan, dampaknya perlu dicerminkan dalam periode yang relevan.

*Contoh lain:*

Perusahaan memiliki karyawan yang bekerja pada bulan Desember. Gaji baru dibayarkan pada Januari. Akuntansi tidak hanya melihat tanggal pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan kapan jasa karyawan telah diterima dan kapan kewajiban perusahaan timbul.

**Accrual, Deferral, dan Allocation**

Basis akrual dalam praktik melibatkan beberapa mekanisme penting, antara lain:

**1. Accrual.** Mengakui dampak ekonomi sebelum kas diterima atau dibayar.

*Contoh:*

- pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum diterima;
- beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar.

**2. Deferral.** Menunda pengakuan sampai periode ketika penghasilan atau beban memenuhi kondisi pengakuan.

*Contoh:*

- penerimaan kas di muka;
- pembayaran biaya untuk manfaat periode mendatang.

**3. Allocation.** Mengalokasikan jumlah tertentu ke beberapa periode sesuai dengan pola konsumsi manfaat atau ketentuan standar.

*Contoh:*

- penyusutan aset tetap;
- amortisasi aset tertentu.

Dengan demikian, basis akrual tidak hanya berarti "mencatat sebelum kas diterima". Basis akrual merupakan sistem yang lebih luas untuk merepresentasikan dampak ekonomi pada periode yang relevan.

**Basis Akrual dan Konsep Matching**

Dalam literatur akuntansi, basis akrual sering dikaitkan dengan konsep **matching**, yaitu pengaitan beban dengan periode atau aktivitas yang relevan dalam menggambarkan kinerja. Namun, konsep matching perlu dipahami secara hati-hati. Dalam kerangka konseptual modern, pengakuan aset dan liabilitas menjadi dasar penting dalam menentukan penghasilan

dan beban. Dengan kata lain, akuntansi tidak sekadar melakukan pencocokan biaya dengan pendapatan secara mekanis.

Barker et al. (2020) memberikan kontribusi penting terhadap pembahasan ini dengan menunjukkan bahwa ketidakpastian memengaruhi bagaimana pengakuan di neraca dan pengukuran kinerja melalui laporan laba rugi saling berhubungan. Mereka berargumen bahwa akuntansi akrual memiliki peran khusus dalam menyediakan informasi kepada investor ketika hasil investasi mengandung ketidakpastian.

Dengan demikian, matching sebaiknya dipahami dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari proses menghasilkan informasi mengenai kinerja ekonomi, bukan sekadar mencocokkan angka pendapatan dan biaya.

**Basis Akrual dan Ketidakpastian**

Salah satu temuan konseptual paling penting dari Barker et al. (2020) adalah hubungan antara *accrual accounting* dan *uncertainty.* Menurut penelitian tersebut, ketidakpastian bukan sekadar masalah yang harus dihilangkan dari laporan keuangan. Ketidakpastian juga dapat menjadi informasi yang perlu dikomunikasikan kepada investor.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa akuntansi akrual memiliki peran informatif ketika hasil ekonomi masa depan tidak pasti. Hubungan antara pengakuan dan pengukuran aset/liabilitas serta pengakuan pendapatan/beban dapat membantu memberikan informasi mengenai ***jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan***.

*Implikasinya:*

> *Basis akrual bukan hanya teknik pencatatan, tetapi juga mekanisme untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan ketidakpastian Perusahaan.*

**Basis Akrual dan Kualitas Informasi Keuangan**

Basis akrual dapat membantu meningkatkan kualitas informasi karena memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi perusahaan. Sebagai contoh, dua perusahaan memiliki penerimaan kas yang sama:

***Perusahaan A:*** *Rp. 1 miliar*

***Perusahaan B:*** *Rp. 1 miliar*

Jika hanya melihat kas, keduanya terlihat sama. Namun setelah memperhatikan basis akrual:

| Informasi | Perusahaan A | Perusahaan B |
|---|---|---|
| Pendapatan yang diperoleh | Rp1 miliar | Rp700 juta |
| Penerimaan di muka | Rp0 | Rp300 juta |
| Piutang | Rp100 juta | Rp500 juta |
| Beban terutang | Rp50 juta | Rp200 juta |

Kondisi ekonomi kedua perusahaan dapat ternyata berbeda. Hal tersebut menunjukkan mengapa pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi akrual dan tidak cukup hanya melihat kas.

**Temuan Penelitian tentang Kualitas Informasi Berbasis Akrual**

Hubungan antara basis akrual dan kualitas informasi juga terlihat dalam penelitian empiris. Asrofa, Darwanis, dan Nuraini (2024) menganalisis **380 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia** dan menemukan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan serta pengungkapan akuntansi berbasis akrual selama periode 2017–2021, meskipun tidak ada pemerintah daerah dalam sampel yang mencapai skor kualitas pelaporan sempurna.

Temuan tersebut memberikan perspektif penting bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual bukan sekadar perubahan teknis pencatatan. Penerapannya berkaitan dengan kualitas informasi dan tingkat pengungkapan yang dihasilkan. Namun, hasil tersebut berasal dari konteks **sektor publik pemerintah daerah**, sehingga tidak dapat secara langsung digeneralisasi kepada seluruh perusahaan sektor swasta.

**Basis Akrual dan Laba**

Laba dalam basis akrual tidak sama dengan perubahan kas.

Secara sederhana:

$$Laba \neq Arus\ Kas$$

Laba dipengaruhi oleh:

- pendapatan;
- beban;
- penyusutan;
- amortisasi;
- akrual;
- penyesuaian;
- keuntungan atau kerugian tertentu.

Sedangkan arus kas berfokus pada:

- penerimaan kas;
- pengeluaran kas.

Contohnya, perusahaan membeli mesin seharga Rp 120 juta secara tunai.

Kas:

- **Rp120 juta**

Namun perusahaan tidak serta-merta mencatat Rp120 juta sebagai beban pada periode pembelian apabila mesin memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Biaya tersebut kemudian dialokasikan melalui penyusutan sesuai standar dan kondisi aset. Hal tersebut menyebabkan laba dan arus kas dapat berbeda secara signifikan.

**Basis Akrual dan Arus Kas**

Basis akrual bukan berarti arus kas tidak penting.

Sebaliknya:

*Laporan laba rugi → memberikan informasi mengenai kinerja berbasis akrual*

*Laporan posisi keuangan → memberikan informasi mengenai sumber daya dan kewajiban*

*Laporan arus kas → memberikan informasi mengenai arus kas aktual*

Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi. Pengguna laporan keuangan perlu memahami:

***Laba menjelaskan kinerja ekonomi, sedangkan arus kas menjelaskan pergerakan kas.***

Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena memiliki fungsi informasi yang berbeda.

**Basis Akrual dan Pengambilan Keputusan Investor**

Investor tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kas yang tersedia saat ini. Investor juga perlu memahami:

- kemampuan menghasilkan pendapatan;
- kewajiban perusahaan;
- piutang;
- beban;
- aset;
- kualitas laba;
- kemampuan menghasilkan arus kas masa depan.

Barker et al. (2020) menempatkan ketidakpastian arus kas masa depan sebagai bagian penting dari tujuan informasi keuangan. Dalam perspektif tersebut, akuntansi akrual memiliki fungsi informatif karena memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dari catatan penerimaan dan pembayaran kas.

**Basis Akrual dan Going Concern**

Basis akrual juga memiliki hubungan dengan **going concern** yang telah dibahas pada Subbab 2.6. Untuk mengevaluasi keberlangsungan usaha, pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai:

- piutang;
- utang;
- pendapatan;
- beban;
- arus kas;
- kewajiban masa depan;
- aset yang tersedia.

Jika perusahaan hanya menggunakan informasi kas, beberapa kewajiban ekonomi yang belum dibayar dapat tidak terlihat secara lengkap. Basis akrual membantu memberikan gambaran mengenai:

$$Apa\ yang\ telah\ diperoleh\ perusahaan?$$

dan

$$Apa\ yang\ telah\ menjadi\ kewajiban\ perusahaan.$$

Informasi tersebut dapat membantu pengguna menilai kondisi ekonomi perusahaan.

**Basis Akrual dan Materialitas**

Basis akrual juga memiliki hubungan dengan materialitas. Dalam lingkungan bisnis modern, perusahaan dapat memiliki ribuan transaksi yang:

- belum dibayar;
- sudah dibayar tetapi manfaatnya belum habis;

- sudah diperoleh tetapi belum diterima kasnya;
- telah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar.

Akuntan perlu menentukan transaksi mana yang perlu diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai standar serta mempertimbangkan materialitas.

Dengan demikian, konsep yang telah dipelajari sebelumnya saling berhubungan:

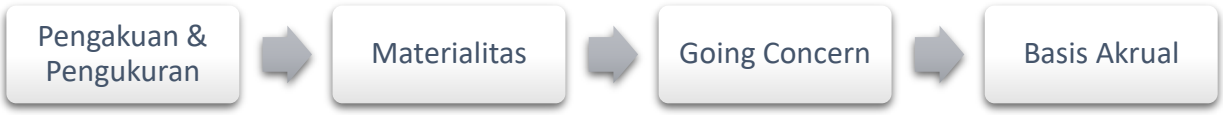


**Basis Akrual pada Bisnis Subscription**

Model bisnis subscription merupakan contoh yang sangat relevan dalam era digital.

*Misalnya:*

PT Cloud Nusantara menerima Rp. 24 juta pada 1 Januari untuk layanan selama 24 bulan.

Kas diterima:

**Rp 24 juta**

Tetapi perusahaan masih memiliki kewajiban memberikan layanan selama 24 bulan.

Jika sebagai ilustrasi sederhana layanan diberikan secara merata:

$$\text{Rp. } 24.000.000/24 = \text{Rp. } 1.000.000$$

per bulan.

Maka ilustrasi pendapatan bulanan adalah Rp. 1 juta.

Kas dan pendapatan memiliki waktu pengakuan yang berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa: $Penerimaan\ kas\ tidak\ selalu\ sama\ dengan\ pendapatan.$

**Basis Akrual pada Marketplace**

Marketplace menghadirkan persoalan akuntansi yang lebih kompleks.

*Misalnya:*

Pelanggan membayar Rp. 1 juta untuk produk yang dijual oleh merchant melalui marketplace. Marketplace menerima dana terlebih dahulu sebelum meneruskannya kepada merchant. Akuntan perlu menganalisis:

- siapa yang mengendalikan barang atau jasa;
- apakah marketplace bertindak sebagai principal atau agent;
- berapa bagian yang menjadi pendapatan marketplace;
- kapan pendapatan diakui.

Dengan demikian, basis akrual dalam bisnis digital tidak cukup dipahami melalui tanggal transaksi saja. Akuntan perlu memahami *substansi ekonomi dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.*

**Basis Akrual pada Cloud Computing**

Perusahaan modern banyak menggunakan:

- cloud storage;

- cloud infrastructure;
- software as a service;
- platform as a service.

Kontrak cloud dapat memiliki:

- biaya berlangganan;
- biaya implementasi;
- biaya penggunaan;
- biaya pemeliharaan;
- biaya tambahan berdasarkan volume.

Akuntan perlu menganalisis substansi kontrak dan menerapkan standar yang relevan untuk menentukan pengakuan dan pengukuran. Teknologi membuat transaksi semakin cepat, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap analisis akuntansi.

**Basis Akrual dan Artificial Intelligence**

AI dapat membantu perusahaan dalam proses akuntansi akrual.

*Contohnya:*

**Automated Accrual**

Sistem dapat mengidentifikasi transaksi yang telah terjadi tetapi belum tercatat secara lengkap.

**Predictive Accrual**

Model analitik dapat membantu menghasilkan estimasi berdasarkan data historis dan kondisi tertentu.

**Invoice Matching**

AI dapat mencocokkan:

- purchase order;
- invoice;
- goods receipt;
- pembayaran.

**Contract Analysis**

AI dapat membaca kontrak untuk menemukan:

- periode layanan;
- kewajiban;
- jadwal pembayaran;
- ketentuan harga.

Namun, penggunaan AI harus tetap dikendalikan.

Alurnya:

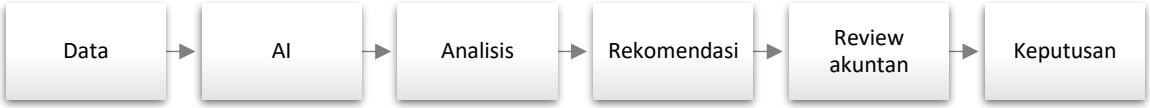


*Bukan:*

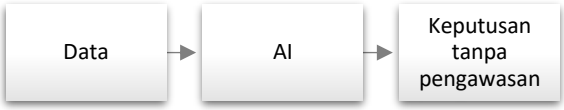


**Accrual Quality**

Dalam penelitian akuntansi, kualitas akrual sering digunakan sebagai salah satu perspektif dalam menilai kualitas informasi akuntansi. Secara konseptual, ***accrual quality*** berkaitan dengan seberapa baik akrual merepresentasikan informasi mengenai kondisi ekonomi perusahaan dan hubungan antara akrual dengan arus kas.

Penelitian Sugiri dan Susilowati mengenai perusahaan sektor industri di lima negara ASEAN menggunakan kualitas akrual dan *value relevance* sebagai dimensi kualitas informasi akuntansi. Penelitian tersebut menemukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada *earnings quality*, tetapi tidak menunjukkan dampak pada *value relevance* dalam sampel dan periode penelitian yang mereka gunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas akuntansi berbasis akrual dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis.

**Basis Akrual dan Earnings Management**

Akrual memberikan ruang bagi penggunaan estimasi dan judgment. Karena itu, mahasiswa perlu memahami hubungan antara akrual dan **earnings management**. Contohnya, manajemen mungkin memiliki ruang judgment dalam:

- estimasi umur aset;
- estimasi kerugian piutang;
- pengakuan provisi;
- estimasi kewajiban;
- penentuan beberapa asumsi pengukuran.

Tidak semua judgment merupakan manipulasi.

Perbedaan pentingnya adalah:




Oleh karena itu, kualitas pengendalian internal, audit, standar akuntansi, dan tata kelola menjadi penting.

**Basis Akrual dan Transparansi**

Basis akrual dapat meningkatkan transparansi apabila diterapkan dengan:

- standar yang tepat;
- data yang andal;

- estimasi yang masuk akal;
- dokumentasi memadai;
- pengungkapan yang sesuai.

Sebaliknya, kompleksitas akrual dapat menurunkan keterpahaman apabila informasi disajikan secara tidak jelas.

**Basis Akrual dalam Lingkungan Big Data**

Big Data memungkinkan perusahaan memiliki informasi dalam jumlah sangat besar.

*Contohnya:*

- transaksi pelanggan;
- data penjualan;
- data pembayaran;
- data persediaan;
- data kontrak;
- data pemasok;
- data penggunaan layanan.

Data tersebut dapat membantu menghasilkan estimasi akrual yang lebih baik.

Namun:

*Big Data tidak otomatis menghasilkan akuntansi yang berkualitas.*

Kualitas informasi tetap dipengaruhi oleh:

- kualitas data;
- relevansi;
- akurasi;
- integritas;
- model analisis;
- pengendalian;
- judgment profesional.

**Prinsip Praktis Memahami Basis Akrual**

Untuk memudahkan mahasiswa, basis akrual dapat dipahami melalui lima pertanyaan:

*Pertanyaan 1*

Apa peristiwa ekonominya?

*Pertanyaan 2*

Kapan peristiwa tersebut terjadi?

*Pertanyaan 3*

Apa hak atau kewajiban yang muncul?

*Pertanyaan 4*

Berapa nilai yang harus diakui berdasarkan standar?

*Pertanyaan 5*

Kapan kas diterima atau dibayarkan?

Jika pertanyaan kelima berbeda dari pertanyaan kedua, kemungkinan terdapat perbedaan waktu antara transaksi ekonomi dan arus kas.

*Alurnya:*

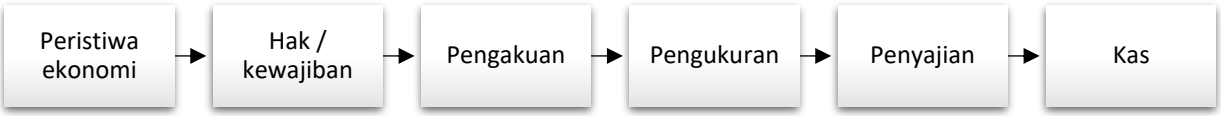


Basis akrual merupakan dasar penting dalam pelaporan keuangan karena mencatat dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi ekonomi pada periode ketika dampaknya terjadi, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual membantu pengguna memahami:

- pendapatan yang diperoleh;
- beban yang terjadi;
- aset yang dikendalikan;
- kewajiban yang timbul;
- perubahan sumber daya ekonomi;
- kinerja perusahaan;
- kondisi yang berkaitan dengan arus kas masa depan.

Barker et al. (2020) memberikan landasan konseptual penting bahwa ketidakpastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi akuntansi akrual. Menurut penelitian tersebut, akuntansi akrual memiliki peran khusus dalam menyediakan informasi kepada investor ketika hasil ekonomi masa depan tidak pasti, termasuk informasi mengenai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

Sementara itu, penelitian Asrofa et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, terdapat peningkatan kualitas pelaporan dan pengungkapan akuntansi berbasis akrual selama periode penelitian 2017–2021, meskipun belum seluruh entitas mencapai kualitas pelaporan yang sempurna.

Dalam era digital, basis akrual menjadi semakin penting karena perusahaan menghadapi transaksi real-time, subscription, marketplace, cloud computing, kontrak digital, dan berbagai model bisnis baru. Dengan demikian, prinsip utama yang perlu dipahami adalah:

> *Basis akrual tidak sekadar mencatat kapan uang berpindah, tetapi berusaha menggambarkan kapan suatu peristiwa ekonomi memengaruhi sumber daya dan kewajiban perusahaan.*

# BAB 3
# STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA DAN INTERNASIONAL

## 3.1 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan angka mengenai kondisi perusahaan, tetapi juga sebagai media komunikasi informasi ekonomi kepada investor, kreditor, pemerintah, regulator, manajemen, dan berbagai pihak berkepentingan lainnya.

Dalam lingkungan bisnis modern, kebutuhan terhadap standar akuntansi semakin kompleks. Perusahaan tidak lagi hanya melakukan transaksi konvensional berupa pembelian, penjualan, utang, piutang, dan persediaan. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menghasilkan berbagai model bisnis baru seperti perdagangan elektronik, layanan berbasis langganan, cloud computing, financial technology, transaksi lintas negara, aset digital, serta model bisnis berbasis platform.

Kondisi tersebut menyebabkan standar akuntansi harus mampu menyediakan kerangka yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui pengembangan ***Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI)*** yang membagi standar pelaporan keuangan ke dalam beberapa pilar. Struktur ini memungkinkan penerapan standar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas.

Berdasarkan kerangka yang dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), struktur SAK Indonesia mencakup **SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**. Dengan demikian, SAK Indonesia dapat dipahami bukan sebagai satu standar yang berlaku secara seragam bagi seluruh entitas, melainkan sebagai suatu **arsitektur pelaporan berlapis** yang mempertimbangkan karakteristik entitas dan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

**Pengertian Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan adalah seperangkat prinsip, ketentuan, dan pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa ekonomi dalam laporan keuangan.

Standar akuntansi diperlukan agar transaksi ekonomi yang serupa dapat diperlakukan secara konsisten sehingga laporan keuangan antarperiode dan ant perusahaan dapat dibandingkan. Secara sederhana, fungsi standar akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Transaksi\ ekonomi \rightarrow Identifikasi \rightarrow Pengakuan \rightarrow Pengukuran \rightarrow Penyajian \rightarrow Pengungkapan \rightarrow Informasi\ keuangan$$

Tanpa standar yang memadai, dua perusahaan dapat mencatat transaksi ekonomi yang sama dengan cara yang berbeda sehingga informasi yang dihasilkan sulit dibandingkan. Sebagai contoh, dua perusahaan memperoleh aset dengan karakteristik yang sama. Apabila perusahaan pertama mengakui dan mengukur aset tersebut berdasarkan suatu metode tertentu, sementara perusahaan kedua menggunakan pendekatan yang berbeda tanpa dasar standar yang jelas, laporan keuangan kedua perusahaan dapat menghasilkan angka yang tidak *comparable*. Oleh karena itu, standar akuntansi berfungsi sebagai ***bahasa bersama dalam pelaporan keuangan***.

**Tujuan Standar Akuntansi Keuangan**

Secara konseptual, standar akuntansi dikembangkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Beberapa tujuan utama penerapan SAK antara lain:

1. **Meningkatkan Kualitas Informasi Keuangan.** Standar memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi harus dicatat dan dilaporkan sehingga informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai.
2. **Meningkatkan Konsistensi.** Standar membantu perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dari periode ke periode sepanjang kondisi dan ketentuan yang berlaku tidak berubah.
3. **Meningkatkan Keterbandingan.** Penggunaan standar yang sama memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antarentitas.
4. **Meningkatkan Transparansi.** Standar menentukan informasi yang perlu disajikan dan diungkapkan sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan.
5. **Mendukung Pengambilan Keputusan.** Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar dapat membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya dalam menilai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan.
6. **Mendukung Akuntabilitas.** Standar memberikan dasar bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepadanya.

Dengan demikian, SAK tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pencatatan, tetapi juga sebagai **infrastruktur informasi ekonomi**.

**Lembaga Penyusun Standar Akuntansi di Indonesia**

Pengembangan SAK Indonesia dilakukan melalui lembaga penyusun standar yang berada dalam lingkungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu lembaga utama adalah **Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI)** yang bertugas mengembangkan standar akuntansi keuangan Indonesia dan berkontribusi terhadap perkembangan standar akuntansi internasional melalui proses penyusunan standar yang sesuai dengan *due process*. IFRS Foundation mencatat bahwa DSAK IAI merupakan badan penyusun standar akuntansi nasional yang independen dan bertugas menetapkan SAK Indonesia.

Selain DSAK IAI, terdapat **Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS IAI)** yang mengembangkan standar akuntansi syariah untuk transaksi dan aktivitas berbasis syariah.

Dengan demikian, ekosistem penyusunan standar di Indonesia tidak hanya mempertimbangkan perkembangan akuntansi konvensional, tetapi juga karakteristik transaksi syariah.

**Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia**

Salah satu perkembangan penting dalam sistem pelaporan keuangan Indonesia adalah terbentuknya **Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI)**. KSPKI memberikan struktur mengenai standar yang dapat digunakan oleh berbagai jenis entitas. Secara konseptual, arsitekturnya dapat digambarkan sebagai berikut:




Di samping struktur tersebut, standar akuntansi syariah dapat diterapkan sesuai karakteristik transaksi dan entitas yang bersangkutan. IAI menjelaskan bahwa KSPKI dirancang untuk menjelaskan pilar SAK, kriteria entitas yang dapat menggunakan masing-masing pilar, serta perpindahan antar-SAK.

**Pilar 1: SAK Internasional**

**SAK Internasional** merupakan standar yang mengadopsi penuh **IFRS Accounting Standards** yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB).

Dengan demikian:

*SAK Internasional = IFRS Accounting Standards yang diadopsi penuh ke dalam Bahasa Indonesia*

IFRS Foundation menjelaskan bahwa SAK Internasional merupakan standar yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards. Standar ini dapat digunakan oleh entitas tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. Pilar ini memiliki arti penting bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan pasar modal internasional.

Sebagai contoh, perusahaan Indonesia yang memiliki kegiatan perdagangan saham di lebih dari satu negara pada pasar yang diregulasi dapat memenuhi kriteria untuk menggunakan SAK Internasional sesuai ketentuan regulator. Namun, perlu diperhatikan bahwa **SAK Internasional tidak otomatis menjadi standar yang wajib digunakan oleh seluruh perusahaan Indonesia**.

Dalam profil Indonesia, IFRS Foundation menjelaskan bahwa SAK Internasional diperbolehkan bagi entitas tertentu yang memenuhi kriteria regulator, sedangkan perusahaan domestik yang saham atau efeknya diperdagangkan di pasar publik pada umumnya menggunakan SAK Indonesia.

**Pilar 2: SAK Indonesia**

Pilar kedua adalah **SAK Indonesia**, yang merupakan standar utama dalam sistem pelaporan keuangan Indonesia untuk berbagai entitas yang memiliki karakteristik dan akuntabilitas tertentu.

SAK Indonesia pada dasarnya **konvergen secara substansial dengan IFRS Accounting Standards**, tetapi tidak identik dengan IFRS.

Perbedaan tersebut dapat muncul karena:

- kebutuhan lingkungan ekonomi Indonesia;
- karakteristik hukum dan regulasi nasional;
- transaksi tertentu yang bersifat lokal;
- kebutuhan regulator;
- karakteristik transaksi syariah;
- keputusan DSAK IAI dalam proses adopsi dan konvergensi.

IFRS Foundation menjelaskan bahwa SAK Indonesia secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS Accounting Standards, tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan. Misalnya, terdapat standar lokal yang tidak memiliki padanan langsung dalam IFRS, termasuk pengaturan tertentu mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan transaksi syariah.

Oleh karena itu, istilah **konvergensi** perlu dibedakan dari **adopsi penuh**.

| Aspek | Konvergensi | Adopsi penuh |
|---|---|---|
| Hubungan dengan IFRS | Mengarah pada keselarasan | Menggunakan IFRS secara penuh |
| Modifikasi lokal | Dimungkinkan | Sangat terbatas/tidak ada |
| Standar lokal | Dapat tetap ada | Tidak menjadi bagian IFRS |
| Contoh | SAK Indonesia | SAK Internasional |
| Tujuan | Menyesuaikan IFRS dengan konteks Indonesia | Keseragaman dengan IFRS |

Perbedaan tersebut penting dipahami mahasiswa karena sering terjadi kekeliruan bahwa **PSAK Indonesia sama persis dengan IFRS**.

**Pilar 3: SAK Indonesia untuk Entitas Privat**

Pilar ketiga adalah **SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP)**. SAK EP ditujukan terutama bagi entitas yang **tidak memiliki akuntabilitas publik** dan menyusun laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna eksternal.

IAI menjelaskan bahwa SAK EP juga dapat digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik apabila regulator yang berwenang mengizinkannya.

SAK EP mulai berlaku efektif **1 Januari 2025** dan menggantikan SAK ETAP. SAK EP disusun dengan merujuk pada **IFRS for SMEs versi 2015**, dengan mempertimbangkan kondisi entitas privat di Indonesia. SAK EP memiliki 35 bab yang mencakup berbagai topik, antara lain:

- penyajian laporan keuangan;
- laporan posisi keuangan;
- laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif;
- laporan arus kas;
- instrumen keuangan;
- persediaan;
- aset tetap;
- aset takberwujud;

- kombinasi bisnis;
- sewa;
- pendapatan;
- pajak penghasilan;
- transaksi valuta asing;
- imbalan kerja;
- transaksi pihak berelasi;
- aktivitas khusus;
- ketentuan transisi.

Penggunaan SAK EP menunjukkan bahwa standar akuntansi Indonesia dirancang dengan mempertimbangkan **proporsionalitas**. Tidak semua entitas membutuhkan tingkat kompleksitas pelaporan yang sama.

**Pilar 4: SAK Indonesia untuk EMKM**

Pilar keempat adalah **SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**. SAK EMKM dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan penggunaannya. IFRS Foundation memasukkan SAK EMKM sebagai pilar tersendiri dalam struktur pelaporan keuangan Indonesia. Keberadaan SAK EMKM penting karena karakteristik UMKM berbeda dengan perusahaan besar atau perusahaan publik. UMKM pada umumnya memiliki:

- struktur organisasi yang lebih sederhana;
- sumber daya akuntansi yang terbatas;
- transaksi yang relatif lebih sederhana;
- kebutuhan pengguna laporan keuangan yang berbeda;
- keterbatasan biaya dalam penyusunan laporan keuangan.

Oleh karena itu, penerapan standar yang terlalu kompleks dapat meningkatkan beban pelaporan tanpa selalu memberikan manfaat yang sebanding bagi pengguna.

Dalam konteks ini, SAK EMKM dapat dipandang sebagai bentuk simplifikasi pelaporan keuangan yang proporsional.

**Perbandingan Empat Pilar SAK Indonesia**

Untuk memahami arsitektur SAK secara lebih mudah, mahasiswa dapat menggunakan tabel berikut.

| Pilar | Standar | Karakteristik Umum Entitas | Hubungan dengan IFRS |
|---|---|---|---|
| Pilar 1 | SAK Internasional | Entitas tertentu yang memenuhi kriteria penggunaan | Adopsi penuh IFRS |
| Pilar 2 | SAK Indonesia | Entitas dengan kebutuhan pelaporan umum dan akuntabilitas tertentu | Konvergensi substansial |
| Pilar 3 | SAK EP | Entitas privat tanpa akuntabilitas publik, serta entitas tertentu jika diizinkan regulator | Konvergensi dengan IFRS for SMEs |
| Pilar 4 | SAK EMKM | Entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan | Standar sederhana yang disesuaikan |

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa sistem SAK Indonesia menggunakan pendekatan berbasis karakteristik entitas, bukan pendekatan satu standar untuk seluruh perusahaan.

**SAK Indonesia dan Konvergensi IFRS**

Perkembangan SAK Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan IFRS. Indonesia melakukan proses konvergensi dengan IFRS sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan keterbandingan pelaporan keuangan. Maradona dan Chand dalam penelitian mengenai perjalanan Indonesia menuju IFRS menunjukkan bahwa perkembangan standar akuntansi Indonesia berlangsung melalui proses yang dipengaruhi oleh berbagai tujuan dan perubahan lingkungan, termasuk program konvergensi dengan IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan SAK bukan sekadar perubahan teknis nomor standar, tetapi merupakan bagian dari perkembangan institusi akuntansi Indonesia. Hubungannya dapat digambarkan sebagai:




Dengan demikian, perkembangan SAK bersifat dinamis.

**SAK Indonesia sebagai Sistem yang Dinamis**

Standar akuntansi tidak bersifat statis. Standar dapat diperbarui ketika terjadi perubahan pada:

- model bisnis;
- transaksi ekonomi;
- teknologi;
- regulasi;
- pasar modal;
- kebutuhan investor;
- praktik bisnis internasional;
- perkembangan IFRS.

IAI menerbitkan SAK Indonesia secara berkala untuk mencerminkan perkembangan tersebut. Sebagai contoh, dalam **SAK Indonesia efektif 1 Januari 2025**, terdapat perubahan penting antara lain:

- **PSAK 117 Kontrak Asuransi**, yang merujuk pada IFRS 17;
- **PSAK 221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**, terkait kekurangan ketertukaran;
- sejumlah amendemen konsekuensial terhadap PSAK lainnya sebagai akibat berlakunya PSAK 117.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi harus terus beradaptasi dengan transaksi dan risiko ekonomi yang berkembang.

**SAK Indonesia dalam Lingkungan Bisnis Digital**

Perubahan standar semakin penting ketika perusahaan beroperasi dalam lingkungan digital. Perusahaan digital dapat memiliki transaksi seperti:

- penjualan melalui marketplace;
- layanan berbasis subscription;
- cloud computing;
- transaksi digital lintas negara;
- pembayaran elektronik;
- kontrak jangka panjang;
- transaksi berbasis platform;
- aset tidak berwujud berbasis teknologi;
- transaksi berbasis saham;
- penggunaan data dan teknologi sebagai bagian dari model bisnis.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akuntansi yang semakin kompleks. Sebagai contoh, perusahaan SaaS menerima pembayaran pelanggan sebesar Rp120 juta untuk kontrak layanan selama 12 bulan.

Pertanyaan akuntansinya bukan sekadar:

*"Kapan uang diterima?"*

Namun:

> *"Kapan entitas memenuhi kewajibannya kepada pelanggan dan kapan pendapatan harus diakui sesuai standar yang berlaku?"*

Dengan demikian, penerapan SAK mengharuskan akuntan memahami **substansi ekonomi transaksi**, bukan hanya bentuk transaksi atau arus kasnya.

**Digitalisasi dan Infrastruktur Penerapan SAK**

Penerapan standar akuntansi modern semakin berkaitan dengan teknologi informasi. Perusahaan menggunakan berbagai sistem seperti:

- Enterprise Resource Planning (ERP);
- cloud accounting;
- accounting information system;
- electronic invoicing;
- payment gateway;
- data warehouse;
- business intelligence;
- artificial intelligence.

Teknologi dapat membantu perusahaan dalam:

1. mengumpulkan data transaksi;
2. mengklasifikasikan transaksi;
3. melakukan perhitungan;
4. menghasilkan jurnal;
5. melakukan rekonsiliasi;
6. menyediakan audit trail;
7. menghasilkan laporan keuangan.

Namun, teknologi tidak menentukan substansi akuntansi secara otomatis.

Sebagai contoh:

**Sistem:** mencatat transaksi pelanggan sebesar Rp 1 miliar.

**Akuntan:** menentukan bagaimana transaksi tersebut harus diklasifikasikan, diakui, diukur, dan disajikan berdasarkan standar yang berlaku.

Dengan demikian:

> *Teknologi mempercepat proses akuntansi, sedangkan standar akuntansi menentukan kerangka perlakuan akuntansinya.*

**SAK, Professional Judgment, dan Akuntan Modern**

Penerapan standar akuntansi modern membutuhkan ***professional judgment***. Hal tersebut terjadi karena tidak semua transaksi dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti prosedur mekanis. Akuntan dapat menghadapi situasi seperti:

- transaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya;
- estimasi nilai aset;
- penilaian risiko;
- penentuan klasifikasi transaksi;
- penilaian materialitas;
- pengakuan pendapatan;
- pengukuran instrumen keuangan;
- penilaian penurunan nilai;
- pengungkapan ketidakpastian.

Dalam situasi tersebut, akuntan harus:

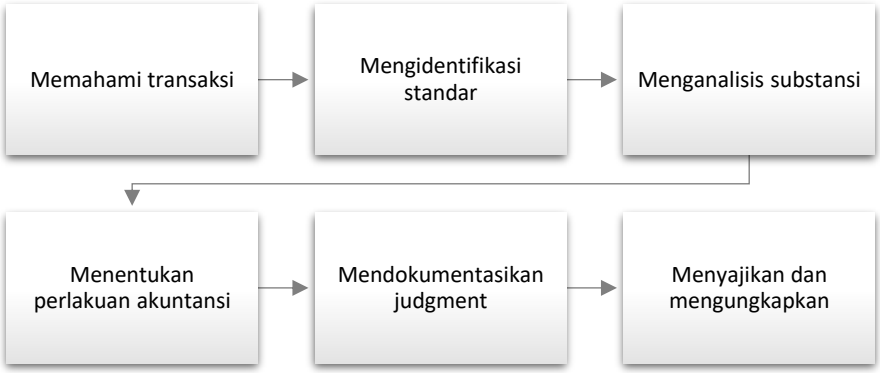


Dengan demikian, perkembangan standar justru meningkatkan kebutuhan terhadap kompetensi profesional.

**Tantangan Implementasi Arsitektur SAK**

Meskipun struktur SAK memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan karakteristik entitas, implementasinya memiliki sejumlah tantangan.

1. Kompleksitas Standar. Semakin kompleks transaksi perusahaan, semakin tinggi kebutuhan terhadap pemahaman standar.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Akuntan perlu memahami perkembangan standar nasional dan internasional.
3. Infrastruktur Teknologi. Sistem informasi harus mampu menyediakan data yang diperlukan untuk penerapan standar.
4. Perubahan Regulasi. Perubahan standar dapat menuntut penyesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur perusahaan.
5. Konsistensi Implementasi. Standar yang sama harus diterjemahkan secara tepat dalam proses bisnis.
6. Perbedaan Lingkungan Institusional. Implementasi IFRS di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang kosong. Faktor regulasi, budaya, bahasa, pendidikan, dan kepentingan pemangku kepentingan dapat memengaruhi proses implementasi.

Penelitian mengenai perjalanan adopsi IFRS di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan standar Indonesia merupakan proses institusional yang melibatkan berbagai tujuan dan kondisi lingkungan.

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia merupakan fondasi penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAK tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi mekanisme untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, keterbandingan, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan.

Dalam perkembangan kontemporer, Indonesia membangun arsitektur pelaporan melalui beberapa pilar, yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat, dan SAK Indonesia untuk EMKM. Setiap pilar memiliki karakteristik dan sasaran penggunaan yang berbeda.

SAK Internasional mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards, sedangkan SAK Indonesia secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS. SAK EP digunakan untuk entitas privat sesuai kriteria yang ditentukan, sementara SAK EMKM menyediakan kerangka yang lebih sederhana bagi entitas mikro, kecil, dan menengah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan Indonesia bergerak menuju struktur yang semakin terdiferensiasi, proporsional, dan terhubung dengan perkembangan standar internasional.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital membuat penerapan SAK menjadi semakin kompleks. ERP, cloud accounting, artificial intelligence, marketplace, transaksi digital, dan model bisnis berbasis platform menuntut akuntan untuk tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memahami substansi ekonomi transaksi.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa:

SAK Indonesia bukan sekadar kumpulan aturan pencatatan akuntansi, melainkan sebuah arsitektur pelaporan keuangan yang menghubungkan kebutuhan entitas, kepentingan

pengguna informasi, perkembangan bisnis, regulasi nasional, dan perkembangan standar akuntansi internasional.

## 3.2 PSAK TERBARU: RESPONS DINAMIS TERHADAP KOMPLEKSITAS BISNIS MODERN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak bersifat statis. Perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, munculnya model transaksi baru, meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, serta perubahan kebutuhan investor menyebabkan standar akuntansi harus terus dikembangkan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan tersebut tercermin melalui penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), amendemen terhadap standar yang telah ada, serta berbagai buletin implementasi yang membantu memastikan penerapan standar secara konsisten. Perubahan PSAK pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomor atau judul standar. Perubahan tersebut dapat memengaruhi:

- pengakuan transaksi;
- pengukuran aset dan liabilitas;
- penyajian laporan keuangan;
- pengungkapan informasi;
- sistem informasi akuntansi;
- kebijakan akuntansi;
- indikator kinerja;
- proses audit;
- kompetensi sumber daya manusia.

Dalam perkembangan terkini, salah satu perubahan paling penting adalah pengesahan **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan** oleh DSAK IAI pada 28 Mei 2025. PSAK 118 merujuk pada IFRS 18 *Presentation and Disclosure in Financial Statements* dan akan menggantikan PSAK 201 serta berlaku efektif mulai **1 Januari 2027**.

Selain itu, DSAK IAI juga telah mengesahkan **PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan**, yang merujuk pada IFRS 19 dan juga berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa PSAK Indonesia terus bergerak mengikuti perubahan lingkungan akuntansi internasional sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan pelaporan di Indonesia.

**Mengapa PSAK Harus Terus Berubah?**

Perubahan standar akuntansi terjadi karena lingkungan ekonomi juga mengalami perubahan. Beberapa faktor yang mendorong perubahan PSAK antara lain:

1. **Perubahan Model Bisnis**

   Perusahaan modern menggunakan berbagai model bisnis baru seperti:

   - subscription;
   - marketplace;
   - platform digital;
   - cloud computing;

- fintech;
- layanan berbasis aplikasi;
- transaksi lintas negara.

Model bisnis tersebut dapat menghasilkan transaksi yang berbeda dari model bisnis tradisional.

2. **Perkembangan Teknologi**

   Digitalisasi menyebabkan transaksi berlangsung semakin cepat dan menghasilkan data dalam jumlah besar. Teknologi seperti:

   - artificial intelligence;
   - blockchain;
   - cloud computing;
   - Internet of Things;
   - robotic process automation;
   - big data analytics

   membuat lingkungan transaksi semakin kompleks.

3. **Globalisasi**

   Perusahaan dapat beroperasi di berbagai negara dan memiliki investor internasional. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap standar yang dapat dibandingkan secara global.

4. **Kebutuhan Investor**

   Investor membutuhkan informasi yang tidak hanya menunjukkan jumlah laba, tetapi juga menjelaskan:

   - sumber laba;
   - risiko;
   - ketidakpastian;
   - kualitas laba;
   - arus kas;
   - kinerja operasi;
   - kebijakan manajemen.

5. **Perkembangan IFRS**

   Sebagian besar perkembangan PSAK Indonesia berkaitan dengan proses konvergensi terhadap IFRS.

Laporan perkembangan SAK IAI menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025 DSAK IAI melakukan berbagai aktivitas konvergensi, termasuk adopsi IFRS 17 menjadi PSAK 117, IFRS for SMEs menjadi SAK EP, dan IFRS 18 menjadi PSAK 118.

**Perubahan PSAK sebagai Siklus Pengembangan Standar**

Perubahan PSAK dapat dipahami sebagai sebuah siklus.




Siklus tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi merupakan ***living framework,*** yaitu kerangka yang terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan ekonomi.

**PSAK 117: Kontrak Asuransi**

Salah satu perubahan besar dalam SAK Indonesia adalah penerbitan **PSAK 117: Kontrak Asuransi**, yang merupakan hasil konvergensi dengan **IFRS 17 Insurance Contracts**. PSAK 117 mulai berlaku efektif pada **1 Januari 2025**. Perubahan ini merupakan salah satu perubahan besar dalam standar akuntansi Indonesia dan memiliki dampak khusus bagi industri asuransi.

Secara konseptual, PSAK 117 mengubah pendekatan akuntansi kontrak asuransi dengan menekankan pengukuran kewajiban kontrak berdasarkan estimasi arus kas masa depan, risiko, dan keuntungan yang belum diakui sesuai dengan model pengukuran yang ditentukan standar. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan angka laporan keuangan, tetapi juga dapat memengaruhi:

- sistem aktuaria;
- sistem akuntansi;
- data kontrak;
- proses estimasi;
- teknologi informasi;
- pengendalian internal;
- penyajian dan pengungkapan.

IAI memasukkan PSAK 117 sebagai salah satu adopsi besar IFRS yang berlaku dalam perkembangan SAK Indonesia.

**PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan**

PSAK 118 merupakan salah satu perkembangan paling penting dalam SAK Indonesia saat ini. DSAK IAI mengesahkan PSAK 118 pada 28 Mei 2025. PSAK tersebut merujuk pada **IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements**, menggantikan PSAK 201, dan berlaku efektif mulai **1 Januari 2027**. PSAK 118 dirancang untuk meningkatkan cara informasi

mengenai kinerja keuangan dikomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan. Perubahan penting mencakup penyajian laporan laba rugi.

PSAK 118 mensyaratkan antara lain:

1. penyajian subtotal **laba atau rugi operasi**;
2. penyajian subtotal **laba atau rugi sebelum pendanaan dan pajak penghasilan**;
3. klasifikasi penghasilan dan beban ke dalam kategori:
    - operasi;
    - investasi;
    - pendanaan;
    - pajak penghasilan;
    - operasi yang dihentikan.

PSAK 118 juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan mengenai Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM) atau *management-defined performance measures*.

**Mengapa PSAK 118 Penting?**

PSAK 118 penting karena laporan laba rugi merupakan salah satu laporan yang paling banyak digunakan oleh investor untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dalam praktik sebelumnya, perusahaan dapat menggunakan berbagai subtotal atau ukuran kinerja yang berbeda.

*Sebagai contoh:*

**Perusahaan A**

Laba operasi = Rp 100 miliar

**Perusahaan B**

Adjusted operating profit = Rp 110 miliar

Pengguna laporan keuangan perlu memahami bagaimana angka tersebut dibentuk dan apakah ukuran yang digunakan dapat dibandingkan.

PSAK 118 berusaha meningkatkan konsistensi penyajian sehingga pengguna lebih mudah memahami struktur kinerja perusahaan.

**Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen**

Salah satu aspek penting PSAK 118 adalah pengungkapan **Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM)**. UKTM pada dasarnya berkaitan dengan subtotal pendapatan dan beban yang digunakan manajemen dalam komunikasi publik untuk menyampaikan pandangannya mengenai aspek kinerja keuangan perusahaan, tetapi bukan subtotal yang secara khusus dipersyaratkan oleh PSAK. Konsep ini penting karena perusahaan sering menggunakan ukuran seperti:

- adjusted EBITDA;
- adjusted operating profit;
- recurring profit;
- core profit;
- adjusted earnings.

Masalah muncul ketika pengguna laporan keuangan tidak mengetahui bagaimana angka tersebut dihitung. PSAK 118 meningkatkan kebutuhan transparansi terhadap ukuran tersebut.

Secara sederhana:

$$Ukuran\ kinerja\ yang\ digunakan\ manajemen$$
$$\downarrow$$
$$Definisi\ dan\ rekonsiliasi$$
$$\downarrow$$
$$Pengungkapan\ dalam\ laporan\ keuangan$$
$$\downarrow$$
$$Investor\ memahami\ perspektif\ manajemen$$

Dengan demikian, PSAK 118 tidak melarang manajemen menggunakan ukuran kinerja tertentu, tetapi meningkatkan transparansi mengenai ukuran tersebut.

**PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan**

PSAK 119 merupakan standar baru yang disahkan DSAK IAI pada 27 Agustus 2025. PSAK 119 merujuk pada **IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures**. Standar tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2027**, dengan opsi penerapan dini. PSAK 119 memberikan alternatif persyaratan pengungkapan bagi entitas anak tertentu yang memenuhi kriteria. Entitas anak yang memenuhi syarat dapat menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 119, sementara untuk aspek selain pengungkapan tetap menerapkan ketentuan PSAK lainnya. Secara konseptual:

$$Pengakuan\ dan\ pengukuran\ \rightarrow\ PSAK\ yang\ berlaku$$
$$Pengungkapan\ \rightarrow\ PSAK\ 119\ jika\ memenuhi\ persyaratan$$

Pendekatan tersebut dapat mengurangi beban pengungkapan bagi entitas anak tertentu tanpa menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan pengguna.

**PSAK 109 dan PSAK 107: Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam**

Perkembangan standar juga terlihat pada amendemen terhadap PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Pada 7 Agustus 2025, DSAK IAI mengesahkan amendemen mengenai kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam (*nature-dependent electricity*). Amendemen tersebut merujuk pada amendemen IFRS 9 dan IFRS 7 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.

Amendemen tersebut memberikan pengaturan antara lain mengenai:

- pertimbangan sebagai pembeli neto dalam menerapkan ketentuan *own-use*;
- akuntansi lindung nilai;
- kontrak yang berkaitan dengan listrik yang bergantung pada kondisi alam.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan standar akuntansi dapat muncul dari perubahan model ekonomi dan teknologi energi, bukan hanya dari transaksi keuangan tradisional.

**PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Pada 1 Juli 2026, DSAK IAI mengesahkan Amendemen PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama mengenai opsi nilai wajar untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Amendemen tersebut muncul karena terdapat interpretasi yang berbeda mengenai hubungan antara ketentuan baru dalam PSAK 118 dengan opsi nilai wajar. Perubahan ini menunjukkan bahwa:

*Standar baru dapat menghasilkan kebutuhan interpretasi atau penyesuaian terhadap standar lain.*

Dengan demikian, perkembangan PSAK bukan proses sekali jadi. Ketika standar baru diterapkan, dapat muncul hubungan antarketentuan yang memerlukan klarifikasi.

**Amendemen PSAK 221**

Pada 6 Mei 2026, DSAK IAI mengesahkan Amendemen **PSAK 221** mengenai penjabaran ke mata uang penyajian ketika terdapat kondisi hiperinflasi. Amendemen tersebut berlaku efektif pada **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini.

Amendemen tersebut mengatur metode penjabaran ketika:

- mata uang penyajian berasal dari ekonomi hiperinflasi; sedangkan
- mata uang fungsional berasal dari ekonomi nonhiperinflasi.

Meskipun kondisi tersebut tidak selalu ditemukan dalam perusahaan domestik, pengaturannya menjadi penting bagi entitas yang memiliki operasi lintas negara.

**Buletin Implementasi sebagai Respons terhadap Permasalahan Praktis**

Perubahan standar tidak hanya dilakukan melalui penerbitan PSAK baru. DSAK IAI juga menerbitkan **Buletin Implementasi (BI)** untuk membantu penerapan SAK secara konsisten. Pada 2026, misalnya, DSAK IAI menerbitkan **Buletin Implementasi Volume 12** yang memuat berbagai isu implementasi yang merujuk pada *IFRIC Agenda Decisions*.

Isu yang dibahas antara lain:

- opsi pelunasan dipercepat yang melekat;
- penentuan dan akuntansi biaya transaksi;
- penyelesaian fisik kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan;
- klasifikasi keuntungan dan kerugian derivatif;
- selisih kurs dari liabilitas atau aset moneter intrakelompok;
- pengungkapan beban berdasarkan sifat.

Selanjutnya, Buletin Implementasi Volume 13 membahas bunga dan penalti terkait pajak penghasilan. Keberadaan buletin tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar membutuhkan interpretasi dan penyelesaian persoalan praktis secara berkelanjutan.

**Perubahan PSAK dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan**

Perubahan PSAK dapat berdampak pada berbagai komponen laporan keuangan.

| Area | Potensi Dampak |
|---|---|
| Pengakuan | Waktu transaksi diakui dapat berubah |
| Pengukuran | Nilai aset/liabilitas dapat berubah |
| Penyajian | Struktur laporan dapat berubah |
| Pengungkapan | Informasi yang harus disampaikan bertambah/berubah |
| Sistem | ERP dan sistem akuntansi perlu disesuaikan |
| Data | Data historis dan data transaksi perlu tersedia |
| SDM | Kompetensi akuntan perlu ditingkatkan |
| Audit | Prosedur audit dapat berubah |
| KPI | Indikator kinerja dapat mengalami penyesuaian |

Oleh karena itu, perusahaan tidak seharusnya memperlakukan perubahan PSAK hanya sebagai pekerjaan bagian akuntansi. Perubahan standar dapat menjadi ***proyek organisasi***.

**PSAK Terbaru dan Sistem Informasi Akuntansi**

Penerapan PSAK modern semakin membutuhkan dukungan sistem informasi. Sebagai contoh, penerapan PSAK 118 dapat membutuhkan data yang lebih terstruktur mengenai:

- pendapatan;
- beban;
- aktivitas operasi;
- aktivitas investasi;
- aktivitas pendanaan;
- subtotal kinerja;
- ukuran kinerja yang digunakan manajemen.

Demikian pula standar instrumen keuangan membutuhkan data mengenai:

- kontrak;
- jatuh tempo;
- arus kas;
- risiko kredit;
- risiko pasar;
- nilai wajar.

Dengan demikian:

**Perubahan PSAK**

→ ***Perubahan kebutuhan data***
→ ***Perubahan desain sistem***
→ ***Perubahan proses bisnis***
→ ***Perubahan laporan***

Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi modern semakin terintegrasi dengan teknologi informasi.

**PSAK Terbaru dan Artificial Intelligence**

Artificial Intelligence dapat membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan standar. AI dapat digunakan untuk:

- membaca kontrak;
- mengidentifikasi transaksi;
- mengklasifikasikan transaksi;
- mendeteksi anomali;
- melakukan rekonsiliasi;
- membantu analisis disclosure;
- membandingkan kebijakan akuntansi;
- mengidentifikasi perubahan standar;
- membantu proses dokumentasi.

Sebagai contoh, perusahaan memiliki ribuan kontrak pelanggan. AI dapat membantu mengidentifikasi:

- periode kontrak;
- nilai kontrak;
- kewajiban para pihak;
- tanggal pembayaran;
- klausul tertentu;
- perubahan kontrak.

Namun, hasil AI tidak otomatis menjadi kesimpulan akuntansi. Alur yang tepat adalah:




Dengan demikian, AI berperan sebagai **alat bantu**, bukan pengganti tanggung jawab profesional akuntan.

**PSAK Terbaru dan Digital Business Model**

Perubahan PSAK menjadi semakin relevan ketika perusahaan menggunakan model bisnis digital.

1. *Subscription Business.* Perusahaan menerima pembayaran pelanggan untuk layanan selama 12 bulan. Akuntan harus menentukan kapan pendapatan diakui berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak.
2. *Cloud Computing.* Perusahaan menyediakan layanan cloud berdasarkan kontrak jangka panjang. Akuntan perlu menganalisis sifat layanan dan hak pelanggan berdasarkan kontrak.
3. *Marketplace.* Marketplace dapat mempertemukan penjual dan pembeli tanpa selalu menjadi pemilik barang. Akuntan perlu memahami apakah perusahaan bertindak sebagai prinsipal atau agen dalam transaksi tertentu.
4. *Fintech.* Perusahaan fintech dapat memiliki transaksi instrumen keuangan, biaya layanan, risiko kredit, dan berbagai bentuk kontrak digital.
5. *Digital Platform.* Platform dapat memiliki berbagai sumber pendapatan sekaligus:
    - biaya transaksi;
    - subscription;

- iklan;
- komisi;
- layanan premium.

Kompleksitas model bisnis tersebut menuntut pemetaan transaksi terhadap standar yang relevan.

**PSAK 118 dan Transformasi Laporan Laba Rugi**

PSAK 118 merupakan contoh bagaimana standar merespons kebutuhan pengguna informasi keuangan. Sebelum perubahan, perusahaan dapat menyajikan laporan laba rugi dengan struktur yang relatif berbeda. Dengan PSAK 118, penghasilan dan beban diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu dan disajikan dengan subtotal yang ditentukan.

Secara sederhana, struktur dapat digambarkan:

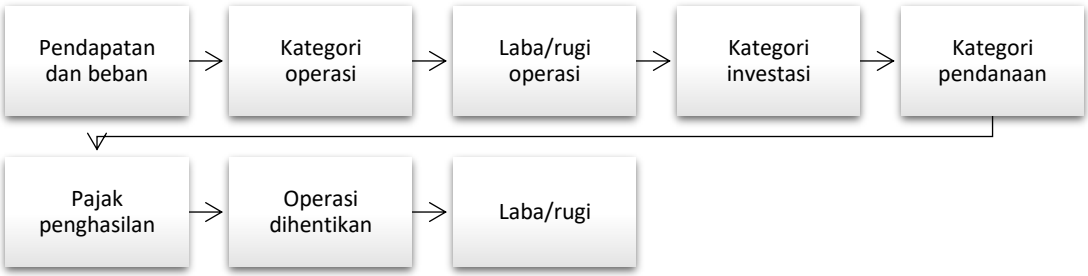


Tujuan utamanya adalah membantu pengguna memahami bagaimana perusahaan menghasilkan kinerja keuangannya.

**PSAK 118 dan Komparabilitas**

Salah satu tujuan penting PSAK 118 adalah meningkatkan komparabilitas. Bayangkan dua perusahaan menggunakan ukuran:

**Perusahaan A:**

*"Adjusted Operating Profit"*

**Perusahaan B:**

*"Core Operating Earnings"*

Jika definisinya berbeda, investor dapat kesulitan membandingkan kinerja. Pengungkapan mengenai ukuran kinerja manajemen membantu pengguna memahami:

1. apa ukuran tersebut;
2. bagaimana ukuran dihitung;
3. mengapa manajemen menggunakannya;
4. bagaimana ukuran tersebut direkonsiliasi dengan ukuran yang dipersyaratkan standar.

Dengan demikian, perubahan standar tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga meningkatkan **kualitas komunikasi keuangan**.

**PSAK Terbaru dan Pengungkapan Ketidakpastian**

Lingkungan bisnis modern penuh dengan ketidakpastian.

Contohnya:

- perubahan iklim;
- fluktuasi mata uang;
- ketidakpastian ekonomi;
- risiko rantai pasok;

- serangan siber;
- perubahan regulasi;
- ketidakpastian litigasi;
- risiko teknologi.

Pada 2026, DSAK IAI juga mengesahkan amendemen contoh ilustratif atas beberapa PSAK yang memberikan tambahan contoh pengungkapan dampak ketidakpastian dalam laporan keuangan, termasuk skenario terkait iklim. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan standar semakin memperhatikan kebutuhan pengguna untuk memahami ketidakpastian yang dapat memengaruhi laporan keuangan.

**Dampak Perubahan PSAK terhadap Profesi Akuntan**

Perubahan PSAK membuat kompetensi akuntan harus terus berkembang. Akuntan modern perlu memiliki kemampuan:

1. *Technical Accounting.* Memahami standar dan perubahan standar.
2. *Analytical Skills.* Menganalisis transaksi kompleks.
3. *Digital Skills.* Menggunakan sistem informasi, data analytics, dan teknologi AI.
4. *Professional Judgment.* Mengambil keputusan berdasarkan standar dan substansi transaksi.
5. *Communication Skills.* Menjelaskan dampak standar kepada manajemen dan pemangku kepentingan.
6. *Continuous Learning.* Memperbarui pengetahuan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, akuntan tidak dapat lagi mengandalkan pengetahuan yang diperoleh satu kali pada masa pendidikan.

**Tantangan Implementasi PSAK Terbaru**

Beberapa tantangan utama implementasi PSAK terbaru adalah:

1. **Kesiapan SDM.** Akuntan perlu memahami perubahan standar secara mendalam.
2. **Kesiapan Teknologi.** Sistem informasi harus mampu menyediakan data yang dibutuhkan.
3. **Kualitas Data.** Standar yang kompleks membutuhkan data yang lengkap dan akurat.
4. **Perubahan Proses Bisnis.** Proses transaksi mungkin perlu disesuaikan agar informasi yang dibutuhkan tersedia.
5. **Biaya Implementasi.** Perusahaan mungkin membutuhkan:
    - pelatihan;
    - konsultan;
    - upgrade sistem;
    - integrasi data;
    - perubahan prosedur.
6. **Interpretasi.** Transaksi kompleks dapat menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan professional judgment.
7. **Konsistensi.** Standar harus diterapkan secara konsisten oleh berbagai entitas.

**Hubungan PSAK Terbaru dengan IFRS**

Perkembangan PSAK Indonesia memiliki hubungan erat dengan perkembangan IFRS.

Beberapa contoh dapat dilihat sebagai berikut:

| Standar Internasional | Standar Indonesia | Status |
|---|---|---|
| IFRS 17 | PSAK 117 | Konvergensi |
| IFRS 18 | PSAK 118 | Konvergensi |
| IFRS 19 | PSAK 119 | Konvergensi |
| IFRS for SMEs 2015 | SAK EP | Konvergensi |
| IFRS 9/IFRS 7 amendments | Amendemen PSAK 109/107 | Konvergensi |

Data perkembangan SAK IAI menunjukkan hubungan tersebut secara jelas, termasuk PSAK 117, SAK EP, dan PSAK 118 sebagai hasil konvergensi dengan produk IFRS terkait. Namun, mahasiswa perlu memahami bahwa **konvergensi tidak selalu berarti identik**. Standar Indonesia dapat memiliki penyesuaian tertentu sesuai lingkungan hukum, ekonomi, dan kebutuhan pelaporan di Indonesia.

**PSAK Terbaru sebagai Bentuk Respons terhadap Kompleksitas Bisnis**

Perkembangan PSAK dapat dilihat sebagai respons terhadap tiga kelompok perubahan utama.

**A. Kompleksitas Transaksi**

*Contoh:*

- instrumen keuangan;
- kontrak asuransi;
- investasi;
- transaksi valuta asing.

**B. Kompleksitas Informasi**

*Contoh:*

- management-defined performance measures;
- pengungkapan risiko;
- ketidakpastian;
- informasi nonkeuangan.

**C. Kompleksitas Teknologi**

*Contoh:*

- sistem ERP;
- cloud;
- AI;
- digital transaction;
- big data.

> **Hubungannya dapat dirumuskan:**
> Semakin kompleks lingkungan bisnis, semakin penting standar akuntansi mampu menerjemahkan kompleksitas tersebut menjadi informasi keuangan yang dapat dipahami pengguna.

**Prinsip Praktis Memahami PSAK Terbaru**

Mahasiswa dapat menggunakan enam pertanyaan berikut ketika mempelajari suatu PSAK baru:

**1. Mengapa standar tersebut diterbitkan?**

Memahami masalah yang ingin diselesaikan.

**2. Transaksi apa yang diatur?**

Mengidentifikasi ruang lingkup.

**3. Apa yang berubah?**

Membandingkan dengan standar sebelumnya.

**4. Apa dampaknya terhadap laporan keuangan?**

Menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

**5. Apa dampaknya terhadap sistem perusahaan?**

Mengidentifikasi kebutuhan data dan teknologi.

**6. Apa dampaknya terhadap akuntan?**

Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan professional judgment.

Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya menghafalkan nomor PSAK, tetapi memahami **logika perubahan standar.**

## 3.3 IFRS DAN HARMONISASI GLOBAL

Perkembangan ekonomi global telah menyebabkan aktivitas perusahaan tidak lagi terbatas pada satu wilayah negara. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan dari investor asing, melakukan ekspansi ke berbagai negara, memiliki anak perusahaan di luar negeri, melakukan transaksi dalam berbagai mata uang, serta mencatatkan saham atau surat utang pada pasar modal internasional. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap informasi keuangan yang dapat dipahami dan dibandingkan secara lintas negara semakin penting.

Salah satu respons terhadap kebutuhan tersebut adalah berkembangnya **International Financial Reporting Standards (IFRS)** sebagai seperangkat standar pelaporan keuangan internasional yang dikembangkan oleh **International Accounting Standards Board (IASB)** di bawah IFRS Foundation. IFRS dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dibandingkan oleh investor, kreditor, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya di berbagai yurisdiksi.

Bagi Indonesia, perkembangan IFRS memiliki arti penting karena pasar modal, investasi, perdagangan internasional, dan aktivitas perusahaan multinasional semakin terintegrasi dengan perekonomian global. Indonesia secara resmi memiliki komitmen terhadap penggunaan standar akuntansi berkualitas tinggi yang berorientasi pada standar internasional. DSAK IAI berperan sebagai badan penyusun standar nasional sekaligus berkontribusi dalam pengembangan standar akuntansi internasional.

Namun demikian, harmonisasi dengan IFRS tidak berarti bahwa seluruh laporan keuangan perusahaan di Indonesia secara otomatis menggunakan IFRS secara langsung. Indonesia memiliki arsitektur SAK berjenjang. **SAK Internasional** mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh, sedangkan **SAK Indonesia** dikonvergensikan secara substansial dengan IFRS dengan tetap mempertimbangkan lingkungan hukum, ekonomi, dan kebutuhan pelaporan di Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan IFRS tidak hanya berkaitan dengan standar teknis akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan globalisasi pasar modal, kualitas informasi, investasi internasional, regulasi, teknologi informasi, kompetensi akuntan, serta kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan standar.

**Pengertian IFRS**

*International Financial Reporting Standards (IFRS)* adalah seperangkat standar pelaporan keuangan internasional yang dikembangkan oleh IASB untuk membantu menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi relevan dan merepresentasikan kondisi ekonomi entitas secara tepat bagi pengguna laporan keuangan.

IFRS menggunakan pendekatan yang relatif berbasis prinsip (*principles-based approach*). Artinya, standar tidak semata-mata memberikan daftar aturan untuk setiap kemungkinan transaksi, tetapi memberikan prinsip yang harus diterapkan dengan mempertimbangkan substansi ekonomi suatu transaksi. Pendekatan tersebut menyebabkan penerapan IFRS membutuhkan kemampuan profesional yang memadai. Akuntan tidak hanya dituntut mengetahui ketentuan standar, tetapi juga harus mampu:

1. memahami substansi transaksi;
2. mengidentifikasi standar yang relevan;
3. menentukan kebijakan akuntansi;
4. melakukan estimasi apabila diperlukan;
5. menggunakan pertimbangan profesional;
6. mendokumentasikan dasar pengambilan keputusan; dan
7. mengungkapkan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan.

Dengan demikian, IFRS dapat dipahami bukan hanya sebagai kumpulan aturan akuntansi, tetapi sebagai *sistem pelaporan keuangan global yang berorientasi pada penyediaan informasi ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.*

**Tujuan Pengembangan IFRS**

Pengembangan IFRS pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan keterbandingan pelaporan keuangan antarnegara. Beberapa tujuan penting IFRS antara lain:

1. *Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan***.** Investor yang membandingkan dua perusahaan dari negara berbeda akan menghadapi kesulitan apabila kedua perusahaan menggunakan standar akuntansi yang sangat berbeda. IFRS berupaya mengurangi perbedaan tersebut sehingga pengguna laporan keuangan dapat melakukan perbandingan dengan dasar yang lebih konsisten.

2. *Meningkatkan transparansi.* Standar internasional mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas, estimasi, risiko, serta berbagai transaksi material.
3. *Mendukung pengambilan keputusan investasi.* Investor membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai risiko dan prospek suatu perusahaan. Informasi keuangan yang lebih konsisten dapat membantu investor melakukan analisis lintas perusahaan dan lintas negara.
4. *Memfasilitasi akses terhadap pasar modal global.* Perusahaan yang memiliki aktivitas internasional dapat menghadapi kebutuhan pelaporan yang berbeda dari investor dan regulator di berbagai negara. Harmonisasi standar dapat mengurangi sebagian kompleksitas tersebut.
5. *Meningkatkan efisiensi komunikasi keuangan.* Standar yang semakin harmonis dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan penyesuaian informasi keuangan ketika perusahaan berhubungan dengan investor atau pihak lain dari negara berbeda.

**IFRS dan Konsep Harmonisasi Akuntansi**

Istilah **harmonisasi akuntansi** mengacu pada proses mengurangi perbedaan praktik dan standar akuntansi antarnegara. Harmonisasi tidak selalu berarti bahwa seluruh negara harus memiliki standar yang identik. Dalam praktiknya terdapat perbedaan antara:

- **harmonisasi**, yaitu mengurangi perbedaan;
- **konvergensi**, yaitu mendekatkan standar nasional dengan standar internasional; dan
- **adopsi**, yaitu menggunakan standar internasional dengan tingkat modifikasi tertentu atau tanpa modifikasi.

Perbedaan konsep tersebut penting dalam memahami perkembangan akuntansi Indonesia. Dalam konteks Indonesia, proses perkembangan menuju IFRS dilakukan secara bertahap. Penelitian Maradona dan Chand menunjukkan bahwa proses konvergensi IFRS di Indonesia berlangsung secara gradual dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan kelembagaan serta tujuan penyusunan standar pada setiap periode. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi tantangan berupa kompleksitas standar, kesiapan akuntan, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesional. Dengan demikian, konvergensi IFRS merupakan proses institusional dan profesional, bukan sekadar menerjemahkan standar internasional ke dalam Bahasa Indonesia.

**Perjalanan Konvergensi IFRS di Indonesia**

Perkembangan IFRS di Indonesia dapat dipahami sebagai proses bertahap. Secara historis, Indonesia memiliki standar akuntansi nasional yang berkembang sesuai kebutuhan perekonomian dan lingkungan hukum domestik. Seiring meningkatnya globalisasi ekonomi dan pasar modal, kebutuhan untuk mendekatkan SAK Indonesia dengan IFRS semakin besar.

Maradona dan Chand menjelaskan bahwa periode perkembangan standar akuntansi Indonesia dapat dipahami dalam beberapa tahap, termasuk periode awal pembentukan standar, periode pengembangan, dan periode konvergensi IFRS. Mereka menunjukkan bahwa

sejak periode konvergensi, DSAK IAI secara bertahap mengadopsi standar yang ekuivalen dengan IFRS. Perkembangan tersebut kemudian menghasilkan arsitektur pelaporan yang lebih beragam. Berdasarkan profil yurisdiksi IFRS, sejak 1 Januari 2024 Indonesia memiliki empat tingkat pelaporan, yaitu:

| Tingkat | Standar | Karakteristik |
|---|---|---|
| Tier 1 | SAK Internasional | Mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh |
| Tier 2 | SAK Indonesia | Secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS |
| Tier 3 | SAK EP | Dikembangkan dengan konvergensi terhadap IFRS for SMEs |
| Tier 4 | SAK EMKM | Standar sederhana untuk entitas mikro, kecil, dan menengah |

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*. Tingkat kompleksitas standar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelaporan entitas.

**SAK Internasional sebagai Bentuk Adopsi IFRS**

Salah satu perkembangan penting dalam arsitektur SAK Indonesia adalah hadirnya **SAK Internasional**. SAK Internasional merupakan standar yang mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh. Berdasarkan profil IFRS Foundation, SAK Internasional berlaku sebagai pilihan bagi entitas Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. Salah satu kriterianya berkaitan dengan perusahaan Indonesia yang memperdagangkan sahamnya di lebih dari satu negara pada pasar yang diregulasi.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara:

**IFRS Accounting Standards**

→ standar internasional yang dikembangkan IASB

**SAK Internasional**

→ IFRS Accounting Standards yang diadopsi ke dalam sistem standar Indonesia

**SAK Indonesia**

→ standar nasional Indonesia yang secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS.

Pemahaman ini penting agar mahasiswa tidak menyamakan istilah IFRS dengan seluruh SAK Indonesia.

**Perbedaan IFRS dan SAK Indonesia**

Meskipun SAK Indonesia memiliki tingkat konvergensi yang tinggi dengan IFRS, keduanya tidak selalu identik. IFRS Foundation menjelaskan bahwa SAK Indonesia secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS, tetapi masih terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, SAK Indonesia tidak memberikan pengecualian tertentu terhadap kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan Indonesia juga memiliki standar lokal yang tidak memiliki padanan langsung dalam IFRS, termasuk beberapa ketentuan mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali serta transaksi syariah. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

| Aspek | IFRS Accounting Standards | SAK Internasional | SAK Indonesia |
|---|---|---|---|
| Penyusun | IASB | DSAK IAI melalui proses adopsi | DSAK IAI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lingkup | Internasional | Indonesia | Indonesia |
| Hubungan dengan IFRS | Standar sumber | Adopsi penuh | Konvergensi substansial |
| Modifikasi lokal | Tidak dalam konteks standar IFRS | Pada prinsipnya tidak mengubah substansi IFRS | Dapat terdapat perbedaan tertentu |
| Tujuan | Pelaporan global | Pelaporan dengan standar IFRS di Indonesia | Pelaporan sesuai lingkungan Indonesia |
| Pertimbangan lokal | Tidak spesifik Indonesia | Sangat terbatas | Dapat diperhitungkan |

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa konvergensi bukan berarti identitas absolut antara kedua sistem.

**IFRS dan Keterbandingan Laporan Keuangan**

Salah satu alasan utama pentingnya IFRS adalah kebutuhan terhadap **comparability** atau keterbandingan. Bayangkan terdapat dua perusahaan teknologi:

- Perusahaan A beroperasi di Indonesia.
- Perusahaan B beroperasi di negara lain.
- Keduanya memiliki model bisnis berbasis langganan (*subscription*).
- Keduanya memiliki aset digital, kontrak dengan pelanggan, dan transaksi dalam mata uang asing.

Investor akan lebih mudah membandingkan kedua perusahaan apabila transaksi yang memiliki substansi ekonomi serupa diperlakukan berdasarkan prinsip pelaporan yang relatif sebanding. Namun, keterbandingan tidak berarti semua angka harus sama. Dua perusahaan yang menggunakan standar yang sama tetap dapat menghasilkan laporan berbeda karena:

- model bisnis berbeda;
- estimasi berbeda;
- tingkat risiko berbeda;
- kondisi ekonomi berbeda;
- kebijakan akuntansi tertentu berbeda;
- struktur transaksi berbeda.

Oleh karena itu, IFRS menyediakan **kerangka untuk meningkatkan keterbandingan**, bukan mekanisme untuk membuat seluruh perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang identik.

**IFRS dan Kualitas Informasi Keuangan**

Konvergensi IFRS sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan. Namun, kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh standar yang digunakan. Setidaknya terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan:




Dengan demikian, penerapan IFRS tidak otomatis menghasilkan laporan keuangan berkualitas apabila lingkungan penerapannya tidak mendukung. Literatur mengenai negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi dan kepatuhan terhadap IFRS berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk karakteristik perusahaan, lingkungan kelembagaan, konsekuensi ekonomi, serta mekanisme regulasi dan penegakan kepatuhan.

**IFRS dan Pasar Modal Global**

Pasar modal merupakan salah satu lingkungan yang paling membutuhkan informasi keuangan yang dapat dibandingkan. Investor global dapat melakukan investasi pada berbagai perusahaan dan yurisdiksi. Dalam kondisi tersebut, perbedaan standar akuntansi dapat meningkatkan biaya analisis.

*Sebagai ilustrasi:*

Investor A memiliki dana dan ingin membandingkan perusahaan teknologi dari Indonesia, Singapura, dan negara Eropa.

Investor tersebut perlu memahami:

1. standar akuntansi yang digunakan;
2. kebijakan pengakuan pendapatan;
3. metode pengukuran aset dan liabilitas;
4. pengungkapan risiko;
5. perlakuan terhadap instrumen keuangan;
6. perlakuan terhadap transaksi dengan pihak berelasi; dan
7. informasi nonkeuangan yang relevan.

Semakin besar perbedaan standar, semakin besar pula kebutuhan investor untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian analisis. Karena itu, harmonisasi standar berpotensi mengurangi sebagian hambatan informasi dalam pasar modal internasional.

**IFRS dan Perusahaan Multinasional**

Perusahaan multinasional menghadapi transaksi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di satu negara.

Contohnya:

- anak perusahaan berada di negara berbeda;
- transaksi menggunakan berbagai mata uang;
- investasi lintas negara;
- kontrak internasional;
- pembiayaan dari bank internasional;
- penerbitan obligasi;

- transaksi dengan pihak berelasi lintas negara.

Dalam kondisi tersebut, penggunaan standar yang semakin harmonis dapat membantu perusahaan dalam proses konsolidasi dan komunikasi keuangan.

Sebagai contoh, suatu grup perusahaan memiliki:

$$PT\ Nusantara\ Digital \rightarrow Indonesia$$
$$Nusantara\ Digital\ Pte.Ltd. \rightarrow Singapura$$
$$Nusantara\ Digital\ GmbH \rightarrow Jerman$$

Masing-masing entitas melakukan pencatatan transaksi di negara tempatnya beroperasi. Pada tingkat grup, laporan tersebut harus dikonsolidasikan. Harmonisasi standar dapat membantu mengurangi perbedaan perlakuan akuntansi dan mempermudah proses analisis sebelum konsolidasi.

**IFRS dan Professional Judgment**

Salah satu karakteristik penting dalam penerapan IFRS adalah kebutuhan terhadap *professional judgment.* Akuntan dapat menghadapi transaksi yang tidak secara eksplisit identik dengan contoh yang terdapat dalam standar. Dalam kondisi tersebut, akuntan harus:

1. memahami fakta dan kondisi transaksi;
2. menentukan substansi ekonominya;
3. mengidentifikasi standar yang relevan;
4. mengevaluasi alternatif perlakuan akuntansi;
5. menentukan estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. mendokumentasikan pertimbangan;
7. mempertimbangkan pengungkapan yang diperlukan.

Penelitian mengenai proses konvergensi IFRS di Indonesia juga menempatkan kemampuan akuntan menggunakan pertimbangan profesional sebagai salah satu tantangan penting dalam penerapan standar yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, digitalisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap akuntan. Sebaliknya, perkembangan standar meningkatkan kebutuhan terhadap akuntan yang mampu menggabungkan *technical accounting knowledge*, analisis bisnis, teknologi, dan professional judgment.

**IFRS dalam Era Digital**

Transformasi digital membawa transaksi baru yang tidak selalu ditemukan dalam model bisnis tradisional.

*Contohnya:*

- layanan berbasis *cloud*;
- platform digital;
- *software as a service* (SaaS);
- marketplace;
- layanan berlangganan;
- aset digital;
- transaksi berbasis aplikasi;
- pembayaran elektronik;

- *artificial intelligence as a service*;
- transaksi lintas negara secara digital.

Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan akuntansi seperti:

- kapan pendapatan diakui?
- bagaimana menentukan kewajiban pelaksanaan?
- bagaimana mengukur aset?
- apakah suatu pengeluaran memenuhi definisi aset?
- bagaimana menentukan nilai wajar?
- bagaimana mengidentifikasi risiko?
- bagaimana mengungkapkan informasi yang material?

Oleh sebab itu, IFRS harus terus berkembang mengikuti perubahan model bisnis.

Hubungan antara IFRS dan teknologi dapat digambarkan:

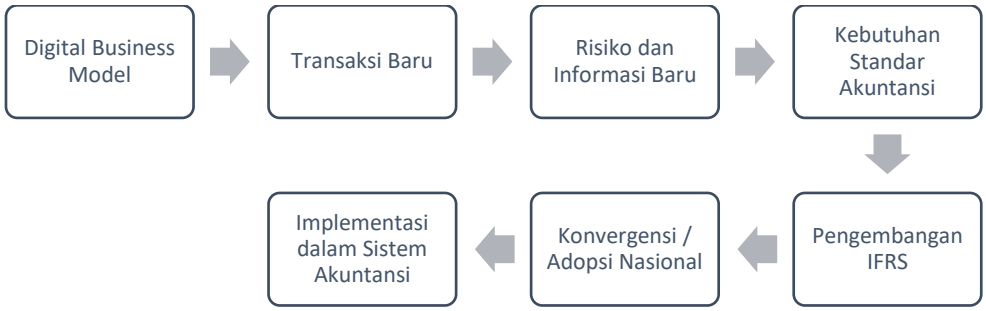


**IFRS dan Digital Financial Reporting**

Harmonisasi standar pada era digital tidak hanya berkaitan dengan isi laporan keuangan, tetapi juga cara informasi keuangan disampaikan. Laporan keuangan modern semakin terintegrasi dengan:

- sistem ERP;
- database perusahaan;
- *cloud accounting*;
- *business intelligence*;
- *data analytics*;
- XBRL;
- dashboard keuangan;
- sistem pelaporan regulator.

IFRS Foundation juga mengembangkan IFRS Accounting Taxonomy untuk mendukung pelaporan keuangan terstruktur secara digital. Sistem tersebut memungkinkan informasi yang berasal dari laporan keuangan berbasis IFRS ditandai dalam format yang dapat dibaca dan diproses oleh sistem digital. Dengan demikian, harmonisasi akuntansi pada era digital memiliki dua dimensi:

**Harmonisasi substansi**

→ keseragaman atau kedekatan prinsip akuntansi.

**Harmonisasi informasi digital**

→ kemampuan data laporan keuangan untuk diproses dan dibandingkan secara elektronik.

**IFRS dan Investasi Internasional**

Investasi internasional membutuhkan informasi yang dapat dipercaya dan dibandingkan. Misalnya, seorang investor memiliki tiga alternatif perusahaan:

| Informasi | Perusahaan A | Perusahaan B | Perusahaan C |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | Rp. 500 M | Rp. 550 M | Rp. 480 M |
| Laba bersih | Rp. 50 M | Rp. 55 M | Rp. 52 M |
| Aset | Rp. 700 M | Rp. 900 M | Rp. 650 M |
| Liabilitas | Rp. 400 M | Rp. 500 M | Rp. 300 M |

Angka tersebut belum cukup untuk membuat perbandingan yang bermakna. Investor juga perlu memahami:

- bagaimana pendapatan diakui;
- bagaimana aset diukur;
- bagaimana liabilitas diklasifikasikan;
- bagaimana estimasi dilakukan;
- bagaimana risiko diungkapkan;
- apakah terdapat transaksi pihak berelasi;
- apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

IFRS dan standar yang dikonvergensikan dengan IFRS membantu menciptakan basis informasi yang lebih konsisten untuk analisis tersebut.

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa isu *value relevance* menjadi salah satu bidang penelitian penting dalam periode konvergensi IFRS, termasuk penelitian yang membandingkan Indonesia dengan negara berkembang lainnya.

**Tantangan Harmonisasi IFRS di Indonesia**

Harmonisasi IFRS tidak terlepas dari berbagai tantangan.

1. Kompleksitas standar. Standar internasional terus berkembang dan mencakup transaksi yang semakin kompleks.
2. Kesenjangan kompetensi. Tidak semua akuntan memiliki tingkat pemahaman IFRS yang sama.
3. Bahasa dan terminology. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan tantangan dalam memahami terminologi teknis.
4. Professional judgment. Pendekatan berbasis prinsip membutuhkan pertimbangan profesional yang lebih kuat.
5. Sistem informasi. Perubahan standar dapat mengharuskan perusahaan mengubah:
    - *chart of accounts*;
    - database;
    - ERP;
    - modul akuntansi;
    - prosedur pelaporan;

- sistem pengendalian internal.

6. Biaya implementasi. Perubahan standar dapat memerlukan investasi dalam:
   - pelatihan;
   - konsultasi;
   - sistem;
   - audit;
   - pengembangan prosedur.
7. Lingkungan hukum dan kelembagaan. Standar akuntansi harus berinteraksi dengan regulasi perpajakan, hukum perusahaan, regulasi pasar modal, serta ketentuan sektoral.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi IFRS membutuhkan dukungan ekosistem, bukan hanya perubahan standar.

**IFRS, Regulasi, dan Enforcement**

Standar yang baik membutuhkan mekanisme penerapan dan pengawasan yang memadai. Secara sederhana dapat digambarkan:

**Standard Setting**
menetapkan prinsip

**Regulation**
menentukan kewajiban

**Implementation**
menerapkan standar

**Audit/Assurance**
memberikan keyakinan atas laporan

**Enforcement**
memastikan kepatuhan

Apabila salah satu komponen tersebut lemah, tujuan pelaporan keuangan dapat tidak tercapai secara optimal. Karena itu, harmonisasi IFRS tidak hanya merupakan agenda profesi akuntansi, tetapi juga melibatkan:

- pemerintah;
- regulator pasar modal;
- organisasi profesi;
- auditor;
- perusahaan;
- perguruan tinggi;
- investor;
- lembaga pendidikan dan pelatihan.

**IFRS dan Pendidikan Akuntansi**

Perubahan menuju standar internasional memberikan konsekuensi bagi pendidikan akuntansi. Mahasiswa tidak cukup hanya mempelajari:

*"Apa aturan akuntansinya?"*

Tetapi juga perlu memahami:

*"Mengapa perlakuan akuntansi tersebut diperlukan?"*

Kompetensi yang perlu dikembangkan antara lain:

| Kompetensi | Deskripsi |
|---|---|
| Technical accounting | Memahami standar akuntansi |
| Analytical thinking | Menganalisis substansi transaksi |
| Professional judgment | Menentukan perlakuan berdasarkan prinsip |
| Digital literacy | Menggunakan sistem informasi dan analitik data |
| Communication | Menjelaskan keputusan akuntansi |
| Ethics | Menjaga integritas informasi |
| Global awareness | Memahami lingkungan bisnis internasional |

Dengan demikian, pendidikan akuntansi harus bergerak dari pendekatan hafalan menuju pemahaman konseptual, analitis, digital, dan profesional.

**IFRS dan Profesi Akuntan Masa Depan**

Akuntan masa depan akan berhadapan dengan lingkungan yang semakin global dan digital. Peran akuntan tidak hanya sebagai:

*"Pencatat transaksi"*

tetapi berkembang menjadi:

*Pengelola, analis, interpreter, dan pengkomunikasi informasi bisnis.*

Akuntan perlu memahami hubungan antara:




Sebagai contoh, sistem ERP dapat menghasilkan ribuan transaksi secara otomatis. Namun sistem tidak secara otomatis menentukan seluruh pertimbangan akuntansi yang diperlukan. Akuntan tetap harus menentukan:

- apakah transaksi telah diidentifikasi secara tepat;
- apakah pengakuan telah sesuai standar;
- apakah estimasi masuk akal;
- apakah terdapat risiko salah saji;
- apakah pengungkapan sudah memadai.

Dengan demikian, teknologi dan IFRS justru dapat memperkuat peran akuntan sebagai *business information professional.*

**Masa Depan IFRS dan Harmonisasi Akuntansi**

Perkembangan IFRS akan semakin berkaitan dengan perubahan lingkungan bisnis. Beberapa isu yang kemungkinan terus menjadi perhatian antara lain:

1. digitalisasi ekonomi;

2. artificial intelligence;
3. aset dan transaksi digital;
4. keberlanjutan;
5. perubahan iklim;
6. risiko geopolitik;
7. transaksi lintas negara;
8. instrumen keuangan kompleks;
9. perubahan model bisnis;
10. pelaporan digital.

Perkembangan IFRS juga semakin bersinggungan dengan **IFRS Sustainability Disclosure Standards** yang dikembangkan oleh ISSB. Perkembangan penerapan standar pengungkapan keberlanjutan berbeda-beda antarjurisdiksi, sehingga perusahaan perlu memperhatikan perkembangan regulasi domestik selain perkembangan standar internasional.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa akuntansi modern semakin berkembang dari sekadar pelaporan angka keuangan menuju penyediaan informasi yang lebih luas mengenai kinerja, risiko, ketidakpastian, dan keberlanjutan perusahaan.

## 3.4 SAK EMKM SEBAGAI KATALISATOR AKUNTABILITAS SEKTOR USAHA MIKRO

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari struktur perekonomian karena kegiatan usahanya tersebar pada berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kuliner, manufaktur rumah tangga, jasa, pertanian, hingga ekonomi kreatif. Karakteristik UMKM yang relatif sederhana dalam struktur organisasi dan pengelolaan usaha menyebabkan kebutuhan informasi keuangannya berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki struktur organisasi kompleks dan aktivitas transaksi yang lebih beragam.

Dalam praktiknya, salah satu persoalan yang sering dihadapi UMKM adalah pencatatan keuangan yang masih sederhana. Sebagian pelaku usaha mencatat penerimaan dan pengeluaran secara manual, menggunakan buku kas, aplikasi pesan, lembar kerja sederhana, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemilik usaha untuk mengetahui secara akurat posisi aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan laba usaha.

Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya keberadaan standar akuntansi yang sederhana dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Ikatan Akuntan Indonesia mengembangkan **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)** sebagai standar yang lebih sederhana bagi entitas yang memenuhi kriteria tertentu. SAK tersebut disahkan pada 2016 dan efektif digunakan sejak 1 Januari 2018. Dalam perkembangan nomenklatur SAK Indonesia, standar tersebut kemudian dikenal sebagai **SAK Indonesia untuk EMKM**.

Kehadiran standar ini penting karena tujuan pelaporan keuangan UMKM bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Laporan keuangan dapat digunakan untuk memahami kinerja usaha, mengendalikan keuangan, memperoleh pembiayaan, mengambil keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas kepada pemilik dan pihak eksternal.

Dengan demikian, SAK EMKM dapat dipandang sebagai jembatan antara praktik pembukuan sederhana dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pengertian SAK EMKM**

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki karakteristik lebih sederhana dibandingkan entitas yang menggunakan standar akuntansi umum.

Secara konseptual, SAK EMKM berusaha menjawab pertanyaan:

*Bagaimana UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang memadai tanpa harus menghadapi kompleksitas standar akuntansi yang diperuntukkan bagi entitas dengan transaksi dan kebutuhan pelaporan yang lebih kompleks?*

Jawabannya adalah melalui penyederhanaan pada aspek:

- ruang lingkup;
- penyajian laporan keuangan;
- pengukuran;
- pengakuan;
- pengungkapan;
- kebutuhan informasi.

Penyederhanaan tersebut tidak berarti bahwa laporan keuangan UMKM dapat dibuat tanpa prinsip akuntansi. Sebaliknya, UMKM tetap perlu menerapkan konsep dasar akuntansi secara konsisten.

**Tujuan SAK EMKM**

SAK EMKM memiliki tujuan utama untuk menyediakan kerangka penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana bagi entitas yang memenuhi karakteristik EMKM. Secara praktis, tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa aspek.

a. Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan. UMKM dapat mengubah pencatatan transaksi sederhana menjadi informasi keuangan yang lebih sistematis.
b. Memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Standar mendorong penerapan konsep entitas bisnis sehingga transaksi usaha tidak bercampur dengan transaksi pribadi pemilik.
c. Menyediakan informasi untuk pengambilan Keputusan. Pemilik usaha dapat mengetahui apakah kegiatan usaha menghasilkan laba atau justru mengalami kerugian.
d. Meningkatkan akuntabilitas. Laporan keuangan memberikan dasar yang lebih jelas bagi pemilik, kreditur, investor, maupun pihak lain dalam menilai kondisi usaha.
e. Mendukung akses pembiayaan. Laporan keuangan yang tersusun dengan baik dapat membantu menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian kelayakan usaha.
f. Meningkatkan literasi akuntansi. Penerapan standar mendorong pemilik usaha memahami konsep dasar seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban.

**Karakteristik Entitas yang Menjadi Sasaran**

SAK EMKM dirancang bagi entitas yang memenuhi karakteristik sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah serta tidak memiliki akuntabilitas publik sebagaimana entitas yang diwajibkan menggunakan standar yang lebih kompleks. Hal yang penting dipahami adalah bahwa klasifikasi EMKM tidak semata-mata didasarkan pada bentuk hukum usaha.

Suatu usaha dapat berbentuk:

- usaha perseorangan;
- persekutuan;
- koperasi;
- perseroan terbatas;

dan tetap perlu dianalisis berdasarkan karakteristik entitas dan standar yang berlaku. Bahan edukasi IAI juga menekankan konsep **entitas bisnis**, bukan semata-mata bentuk hukum, dalam memahami penerapan standar bagi EMKM.

**Prinsip Kesederhanaan dalam SAK EMKM**

Salah satu karakteristik utama SAK EMKM adalah penyederhanaan. Jika dibandingkan dengan standar akuntansi umum, laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM memiliki komponen yang lebih sederhana. Laporan keuangan minimum terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi;
3. Catatan atas laporan keuangan.

Ketiga komponen tersebut secara eksplisit ditetapkan dalam SAK EMKM. Dengan demikian, SAK EMKM tidak mensyaratkan UMKM untuk menyusun seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana entitas dengan standar yang lebih kompleks. Penyederhanaan ini penting karena tujuan standar bukan meningkatkan beban administrasi UMKM, melainkan meningkatkan kualitas informasi keuangan secara proporsional.

**Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai posisi:

- aset;
- liabilitas; dan
- ekuitas

pada akhir periode pelaporan.

Pos yang dapat muncul antara lain:

| Kelompok | Contoh |
|---|---|
| Aset | Kas dan setara kas |
| Aset | Piutang |
| Aset | Persediaan |
| Aset | Aset tetap |
| Liabilitas | Utang usaha |
| Liabilitas | Utang bank |
| Ekuitas | Modal |
| Ekuitas | Saldo laba |

SAK EMKM tidak menetapkan format atau urutan penyajian secara kaku. Entitas dapat menyajikan pos berdasarkan relevansinya terhadap pemahaman kondisi keuangan.

**Contoh sederhana**

Misalnya sebuah usaha kuliner memiliki:

- Kas = Rp. 20.000.000
- Persediaan = Rp. 15.000.000
- Peralatan = Rp. 35.000.000
- Utang usaha = Rp. 10.000.000
- Modal pemilik = Rp. 60.000.000

Maka:

$$Total\ Aset\ =\ Rp70.000.000$$

$$Total\ Liabilitas\ +\ Ekuitas\ =\ Rp10.000.000\ +\ Rp60.000.000\ =\ Rp70.000.000$$

Persamaan akuntansi:

$$Aset\ =\ Liabilitas\ +\ Ekuitas$$

menunjukkan keseimbangan posisi keuangan usaha.

**Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama suatu periode. Secara sederhana:

$$Laba/Rugi\ =\ Pendapatan\ -\ Beban$$

Pos yang relevan antara lain:

- pendapatan;
- beban usaha;
- beban keuangan;
- beban pajak.

Laporan ini membantu pemilik menjawab pertanyaan penting:

*"Apakah usaha saya menghasilkan keuntungan?"*

Sebagai contoh:

| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan | Rp. 150.000.000 |
| Beban operasional | Rp. 95.000.000 |
| Beban keuangan | Rp. 5.000.000 |
| Laba sebelum pajak | Rp. 50.000.000 |

Informasi tersebut lebih bermanfaat daripada sekadar mengetahui jumlah uang yang masuk ke rekening.

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan atau **CaLK** sering dianggap sebagai bagian yang sederhana, tetapi sebenarnya memiliki fungsi penting. Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat:

1. pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar;
2. ikhtisar kebijakan akuntansi; dan
3. informasi tambahan serta rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material.

Dengan demikian, CaLK berfungsi memberikan konteks terhadap angka yang terdapat dalam laporan keuangan.

*Misalnya:*

$$\text{Persediaan} = \text{Rp.}\ \ 50.000.000$$

Angka tersebut belum tentu cukup untuk memahami kondisi perusahaan. Catatan dapat menjelaskan kebijakan pengukuran persediaan atau informasi lain yang relevan.

**Basis Akrual dalam SAK EMKM**

Salah satu aspek penting dalam SAK EMKM adalah penggunaan **basis akrual**. Basis akrual berarti transaksi dan peristiwa ekonomi diakui ketika memenuhi kriteria pengakuan, bukan semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan.

*Misalnya:*

Sebuah UMKM menjual barang senilai Rp10.000.000 secara kredit pada bulan Desember. Kas baru diterima pada Januari tahun berikutnya.

Dalam pendekatan akrual, transaksi tersebut tetap diperhitungkan pada periode ketika transaksi memenuhi kriteria pengakuan, bukan hanya ketika kas diterima.

Bahan ilustratif IAI menjelaskan bahwa entitas yang sebelumnya menggunakan pencatatan berbasis kas perlu melakukan penyesuaian terhadap pos material agar laporan keuangannya menggunakan basis akrual. Hal ini penting karena laporan keuangan harus menggambarkan aktivitas ekonomi, bukan hanya pergerakan uang tunai.

**Konsep Entitas Bisnis**

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan pada UMKM adalah tercampurnya uang pribadi pemilik dengan uang usaha.

*Contohnya:*

Pemilik menerima pendapatan usaha Rp10.000.000. Dari jumlah tersebut, Rp3.000.000 digunakan untuk membayar kebutuhan rumah tangga.

Jika seluruh Rp10.000.000 dianggap sebagai beban usaha, maka informasi keuangan menjadi tidak akurat.

Dalam konsep entitas bisnis:

*Keuangan usaha harus dipisahkan dari keuangan pribadi pemilik.*

Pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan:

- rekening bank khusus usaha;
- kas usaha terpisah;

- bukti transaksi;
- pencatatan modal;
- pencatatan pengambilan pribadi (*prive*) secara tepat.

Pemisahan tersebut merupakan langkah fundamental untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

**Pengakuan dan Pengukuran yang Sederhana**

SAK EMKM menyederhanakan beberapa ketentuan pengakuan dan pengukuran agar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik entitas yang menjadi sasaran. Namun, sederhana tidak berarti tanpa aturan.

Pemilik usaha tetap perlu memahami:

- kapan aset diakui;
- kapan liabilitas diakui;
- kapan pendapatan diakui;
- kapan beban diakui;
- bagaimana aset tetap dicatat;
- bagaimana penyusutan dilakukan;
- bagaimana kewajiban dicatat.

Kesalahan pada tahap pengakuan dan pengukuran dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi usaha secara wajar.

**SAK EMKM dan Aset Tetap**

Aset tetap merupakan salah satu kelompok penting bagi UMKM.

*Contohnya:*

- kendaraan;
- mesin;
- komputer;
- peralatan produksi;
- peralatan toko;
- bangunan.

Aset tersebut tidak selalu langsung dianggap sebagai beban pada saat pembelian. Jika memenuhi kriteria sebagai aset tetap, pengeluaran tersebut perlu dicatat sebagai aset dan kemudian dialokasikan melalui penyusutan sesuai dengan masa manfaatnya.

*Contoh:*

UMKM membeli mesin produksi:

Harga perolehan = Rp. 60.000.000

Umur manfaat = 5 tahun

Nilai residu = Rp. 0

Dengan metode garis lurus:

Penyusutan per tahun = Rp. 60.000.000 ÷ 5

= **Rp. 12.000.000**

Informasi penyusutan tersebut memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai konsumsi manfaat aset.

**SAK EMKM dan Persediaan**

UMKM perdagangan dan manufaktur umumnya memiliki persediaan.

*Contohnya:*

- bahan baku;
- barang dalam proses;
- barang jadi;
- barang dagangan.

Tanpa pencatatan persediaan yang baik, pemilik usaha dapat mengalami kesulitan menentukan:

- harga pokok;
- laba kotor;
- nilai aset;
- kebutuhan pembelian;
- tingkat perputaran persediaan.

Oleh karena itu, pencatatan persediaan menjadi bagian penting dalam membangun sistem akuntansi UMKM.

**SAK EMKM dan Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu komponen utama dalam laporan laba rugi. Dalam praktik UMKM, pendapatan dapat berasal dari:

- penjualan barang;
- jasa;
- komisi;
- kontrak tertentu;
- aktivitas operasional lainnya.

Permasalahan sering terjadi ketika seluruh penerimaan kas dianggap sebagai pendapatan.

*Padahal:*

$$Penerimaan\ kas\ tidak\ selalu\ identik\ dengan\ pendapatan.$$

Contohnya, pinjaman bank Rp100.000.000 meningkatkan kas, tetapi bukan pendapatan. Demikian pula tambahan modal pemilik meningkatkan kas, tetapi bukan pendapatan. Perbedaan tersebut merupakan alasan mengapa pemahaman akuntansi diperlukan dalam penerapan SAK EMKM.

**SAK EMKM dan Liabilitas**

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh entitas.

*Contohnya:*

- utang usaha;
- utang bank;
- utang gaji;
- utang pajak;
- kewajiban lainnya.

Pencatatan liabilitas penting untuk mengetahui seberapa besar kewajiban usaha.

Misalnya sebuah UMKM memiliki:

Aset = Rp. 200 juta

Liabilitas = Rp. 80 juta

Maka:

Ekuitas = Rp. 200 juta – Rp. 80 juta

**Ekuitas = Rp. 120 juta**

Informasi tersebut membantu pemilik memahami struktur pendanaan usaha.

**SAK EMKM dan Ekuitas Pemilik**

Dalam usaha kecil, modal pemilik sering bercampur dengan transaksi operasional. Penerapan konsep ekuitas membantu membedakan:

- modal awal;
- tambahan modal;
- laba;
- rugi;
- pengambilan pribadi.

Secara sederhana:

$$Ekuitas\ akhir\ =\ Modal\ awal\ +\ Tambahan\ modal\ +\ Laba\ -\ Price$$

Dengan pencatatan tersebut, pemilik dapat mengetahui berapa sebenarnya kekayaan bersih usaha.

**SAK EMKM dan Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh apakah laporan tersebut "*sudah dibuat*". Laporan yang berkualitas perlu memberikan informasi yang:

- relevan;
- dapat dipahami;
- dapat dipercaya;
- konsisten;
- dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian Khairunnisa, Ardiana, dan Ayutika pada UMKM di Ponorogo secara khusus menguji hubungan antara pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, penerapan SAK EMKM, dan kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, penelitian Pradewi, Masdiantini, dan Savitri pada 2026 menemukan bahwa pemahaman akuntansi, pengalaman usaha, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dalam sampel yang diteliti di Kabupaten Buleleng. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa standar akuntansi perlu didukung oleh **kapasitas manusia** yang mampu menerapkannya.

**Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM**

Systematic Literature Review yang dilakukan Ayem dkk. menunjukkan bahwa implementasi SAK EMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- pengetahuan mengenai SAK;
- pencatatan keuangan;

- sosialisasi;
- latar belakang pendidikan;
- umur usaha;
- omzet;
- persepsi pelaku usaha;
- kesiapan UMKM;
- motivasi;
- ukuran usaha;
- pemahaman teknologi informasi;
- kualitas sumber daya manusia.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa masalah penerapan SAK EMKM tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan standar. Diperlukan ekosistem pendukung yang meliputi:

$$Standar \rightarrow Edukasi \rightarrow Pendampingan \rightarrow Teknologi \rightarrow Implementasi \rightarrow Evaluasi$$

**Hambatan Implementasi SAK EMKM**

Dalam praktiknya, UMKM dapat menghadapi beberapa hambatan.

1. Rendahnya pemahaman akuntansi. Pemilik usaha sering memiliki kompetensi bisnis yang baik tetapi belum memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai.
2. Pencatatan masih sederhana. Sebagian usaha masih mengandalkan buku kas atau catatan manual.
3. Keuangan pribadi dan usaha bercampur. Hal ini menyulitkan penentuan laba sebenarnya.
4. Keterbatasan SDM. UMKM sering belum memiliki staf khusus akuntansi.
5. Persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit. Sebagian pelaku usaha menganggap penyusunan laporan keuangan membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi.
6. Kurangnya sosialisasi. Standar tidak akan efektif jika pelaku usaha tidak mengetahui keberadaannya.
7. Keterbatasan teknologi. Tidak seluruh pelaku UMKM memiliki kemampuan menggunakan aplikasi akuntansi.

Penelitian mengenai UMKM Kampung Kue di Surabaya, misalnya, menemukan bahwa pencatatan yang masih sederhana serta keterbatasan SDM dan kompetensi menjadi kendala dalam penerapan SAK EMKM.

**SAK EMKM dan Digitalisasi Akuntansi**

Era digital memberikan peluang besar untuk mempermudah penerapan SAK EMKM. Pencatatan yang sebelumnya dilakukan menggunakan:

$$\text{Buku} \rightarrow \text{kalkulator} \rightarrow \text{rekap manual}$$

dapat berkembang menjadi:

$$\text{Aplikasi} \rightarrow \text{database} \rightarrow \text{laporan otomatis} \rightarrow \text{analitik.}$$

Teknologi yang dapat dimanfaatkan UMKM antara lain:

- Microsoft Excel;
- aplikasi pembukuan;
- aplikasi kasir;
- *cloud accounting*;
- aplikasi inventori;
- *point of sale*;
- mobile banking;
- integrasi pembayaran digital.

Penelitian terbaru pada UMKM kuliner di Surakarta menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi dan penerapan SAK EMKM menjadi bagian penting dalam kajian kualitas laporan keuangan dan keputusan manajerial. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi **enabler** penerapan SAK EMKM.

Namun perlu dipahami:

*Teknologi membantu penerapan standar, tetapi teknologi tidak menggantikan pemahaman akuntansi.*

**SAK EMKM dan Sistem Informasi Akuntansi**

Penerapan SAK EMKM akan lebih efektif apabila didukung sistem informasi akuntansi yang sesuai. Sistem sederhana dapat memiliki alur:




Dengan sistem tersebut, transaksi penjualan, pembelian, kas, persediaan, utang, dan aset dapat diolah menjadi informasi keuangan. Penelitian terbaru mengenai UMKM di Kota Bandung juga menguji keterkaitan sistem informasi akuntansi, literasi keuangan, kepatuhan SAK EMKM, dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, walaupun pengaruh parsial masing-masing variabel perlu dibaca dengan memperhatikan hasil statistik dan keterbatasan penelitian.

**SAK EMKM dan Akses Pembiayaan**

Salah satu manfaat praktis laporan keuangan adalah membantu menyediakan informasi bagi pihak yang akan memberikan pembiayaan. Bank atau lembaga pembiayaan pada dasarnya membutuhkan informasi mengenai:

- pendapatan;
- laba;
- aset;
- utang;
- arus pembayaran;
- kemampuan usaha memenuhi kewajiban.

UMKM yang tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam menunjukkan kondisi usahanya secara objektif. Namun, penting ditekankan bahwa:

*Penerapan SAK EMKM tidak menjamin UMKM otomatis memperoleh kredit.*

Laporan keuangan hanya merupakan salah satu sumber informasi dalam proses penilaian pembiayaan.

**SAK EMKM sebagai Instrumen Pengambilan Keputusan**

Laporan keuangan tidak seharusnya hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Pemilik usaha dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan:

- Produk mana yang paling menguntungkan?
- Berapa biaya operasional sebenarnya?
- Apakah harga jual sudah memadai?
- Apakah usaha mampu membayar utang?
- Apakah perlu membeli aset baru?
- Apakah perlu menambah karyawan?
- Apakah usaha perlu membuka cabang?
- Apakah persediaan terlalu tinggi?

Dengan demikian:

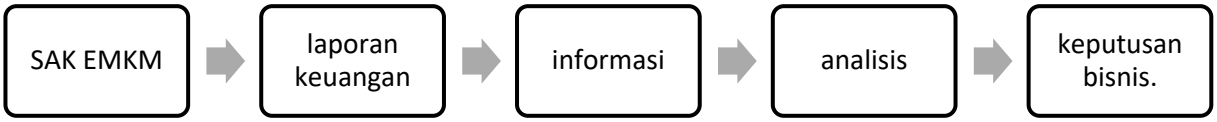


Inilah alasan mengapa akuntansi UMKM seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas administratif semata.

**Perbandingan SAK EMKM dengan SAK Indonesia dan SAK EP**

SAK EMKM perlu dipahami dalam konteks arsitektur SAK Indonesia secara keseluruhan.

| Aspek | SAK Indonesia | SAK EP | SAK EMKM |
|---|---|---|---|
| Kompleksitas | Tinggi | Menengah | Relatif sederhana |
| Sasaran | Entitas dengan kebutuhan pelaporan umum | Entitas privat yang memenuhi persyaratan | Entitas mikro, kecil, dan menengah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dasar pengembangan | IFRS dan kebutuhan nasional | IFRS for SMEs dengan penyesuaian Indonesia | Penyederhanaan untuk EMKM |
| Laporan | Relatif lengkap | Lebih sederhana dari SAK Indonesia | Minimum 3 komponen |
| Professional judgment | Tinggi | Menengah–tinggi | Relatif lebih sederhana |
| Tujuan utama | Informasi bagi pengguna laporan yang lebih luas | Pelaporan entitas privat | Pelaporan sederhana dan relevan bagi EMKM |

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa arsitektur SAK Indonesia menggunakan prinsip **proporsionalitas**: semakin kompleks karakteristik entitas dan kebutuhan penggunanya, semakin kompleks pula standar yang digunakan.

**SAK EMKM dan Akuntabilitas Usaha Mikro**

Akuntabilitas berarti kemampuan entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan sumber daya yang dikelolanya. Pada UMKM, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui:

- pencatatan transaksi;
- dokumentasi bukti;
- pemisahan keuangan;
- laporan keuangan;
- pengendalian internal;
- transparansi kepada pihak berkepentingan.

Dengan demikian, SAK EMKM dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan **financial accountability**. Penelitian mengenai penerapan SAK EMKM juga menunjukkan adanya hubungan antara penerapan standar dan peningkatan keteraturan, transparansi, serta pemahaman kondisi keuangan dalam studi kasus tertentu. Namun, hasil studi kasus tersebut tidak boleh digeneralisasikan kepada seluruh UMKM tanpa mempertimbangkan karakteristik sampel dan metode penelitian.

**SAK EMKM sebagai Jembatan Formalisasi UMKM**

UMKM yang berkembang biasanya mengalami peningkatan kompleksitas.

Pada tahap awal:

$$Pemilik \rightarrow kas \rightarrow buku\ catatan$$

Kemudian berkembang menjadi:

$$Pemilik \rightarrow karyawan \rightarrow persediaan \rightarrow utang \rightarrow pelanggan \rightarrow bank \rightarrow marketplace.$$

Ketika kompleksitas meningkat, kebutuhan terhadap sistem informasi juga meningkat. SAK EMKM dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu proses tersebut.

**Tantangan Masa Depan SAK EMKM**

Perubahan teknologi juga akan membawa tantangan baru bagi penerapan SAK EMKM. Beberapa di antaranya adalah:

a. Transaksi digital. Transaksi semakin tersebar pada banyak platform.

b. Integrasi data. Data keuangan perlu diintegrasikan dari bank, marketplace, POS, dan aplikasi lainnya.
c. Literasi digital. Pemilik usaha perlu memahami teknologi sekaligus akuntansi.
d. Keamanan data. Data transaksi merupakan aset penting yang harus dilindungi.
e. Artificial Intelligence. AI dapat membantu klasifikasi transaksi dan menghasilkan laporan, tetapi hasilnya tetap membutuhkan verifikasi manusia.
f. Perubahan model bisnis UMKM semakin banyak menggunakan:
    - marketplace;
    - subscription;
    - dropshipping;
    - reseller;
    - affiliate marketing;
    - social commerce;
    - digital services.

Perubahan tersebut menuntut pemilik usaha memahami substansi transaksi sebelum melakukan pencatatan.

**Integrasi SAK EMKM, Teknologi, dan Literasi Keuangan**

Model penerapan SAK EMKM di era digital dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$
\begin{gathered}
SAK\ EMKM \\
+ \\
Literasi\ Akuntansi \\
+ \\
Literasi\ Keuangan \\
+ \\
Literasi\ Digital \\
+ \\
Sistem\ Informasi\ Akuntansi \\
+ \\
Pengendalian\ Internal \\
\downarrow \\
Laporan\ Keuangan\ Berkualitas \\
\downarrow \\
Keputusan\ Bisnis\ yang\ Lebih\ Terinformasi
\end{gathered}
$$

Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan standar merupakan hasil interaksi antara standar, manusia, proses, dan teknologi.

## 3.5 SAK ENTITAS PRIVAT SEBAGAI SOLUSI TENGAH KORPORASI TERTUTUP

Tidak semua perusahaan membutuhkan tingkat kompleksitas pelaporan keuangan yang sama. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik, misalnya, memiliki kebutuhan informasi yang relatif tinggi karena laporan keuangannya digunakan oleh investor

publik, kreditor, regulator, analis, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, terdapat perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik tetapi telah berkembang jauh melampaui karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan tersebut dapat memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, transaksi kredit yang signifikan, aset tetap dalam jumlah besar, investasi pada entitas lain, kewajiban pembiayaan, transaksi valuta asing, serta kebutuhan pelaporan kepada pemilik dan kreditur.

Apabila perusahaan semacam itu menggunakan standar yang sangat kompleks, biaya penyusunan laporan keuangan dapat menjadi relatif tinggi. Sebaliknya, apabila menggunakan standar yang terlalu sederhana, informasi yang dihasilkan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia memiliki **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)**.

SAK EP ditujukan bagi entitas yang **tidak memiliki akuntabilitas publik** dan menyusun laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal. Dalam kondisi tertentu, entitas yang memiliki akuntabilitas publik juga dapat menggunakan SAK EP apabila regulator yang berwenang mengizinkannya. SAK EP berlaku efektif sejak **1 Januari 2025** dan menggantikan **SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**. Standar ini dikembangkan dengan merujuk pada **IFRS for SMEs Accounting Standard 2015**, dengan beberapa modifikasi untuk kondisi Indonesia.

Dengan demikian, SAK EP dapat dipahami sebagai jembatan pelaporan keuangan bagi entitas privat yang membutuhkan standar lebih komprehensif daripada SAK EMKM, tetapi tidak memerlukan seluruh kompleksitas SAK Indonesia berbasis IFRS Accounting Standards.

**Pengertian SAK Entitas Privat**

SAK Entitas Privat adalah standar akuntansi yang dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. IAI menjelaskan bahwa SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat dan terdiri atas **35 bab** yang membahas berbagai topik akuntansi. Secara sederhana, posisi SAK EP dapat digambarkan sebagai berikut:




Posisi tersebut tidak berarti bahwa setiap perusahaan bebas memilih standar berdasarkan tingkat kenyamanan. Pemilihan standar harus mempertimbangkan karakteristik entitas, persyaratan standar, dan ketentuan regulator yang berlaku.

**Mengapa SAK EP Dibutuhkan?**

Keberadaan SAK EP dapat dipahami dari adanya kebutuhan akan proporsionalitas dalam pelaporan keuangan. Bayangkan terdapat tiga jenis entitas:

**Entitas A**

Perusahaan publik dengan ribuan investor.

**Entitas B**

Perusahaan privat dengan ratusan karyawan, beberapa kreditur, aset tetap yang signifikan, dan transaksi bisnis yang kompleks.

**Entitas C**

Usaha mikro dengan aktivitas transaksi yang relatif sederhana.

Ketiganya membutuhkan laporan keuangan, tetapi kebutuhan informasi dan kompleksitas transaksinya berbeda. Apabila seluruh entitas diwajibkan menggunakan standar dengan tingkat kompleksitas yang sama, dapat terjadi ketidakseimbangan antara:

**biaya penyusunan laporan** dan **manfaat informasi yang dihasilkan**.

SAK EP berusaha menyediakan kerangka yang lebih proporsional bagi kelompok entitas privat.

**Peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP**

Salah satu perkembangan penting dalam standar akuntansi Indonesia adalah penggantian SAK ETAP dengan SAK EP. SAK EP berlaku efektif pada **1 Januari 2025**, sedangkan SAK ETAP sebelumnya digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama standar. SAK EP membawa kerangka yang lebih dekat dengan perkembangan standar internasional karena dikonvergensikan dengan IFRS for SMEs Accounting Standard 2015. Secara konseptual:

**SAK ETAP** → standar sebelumnya
↓
**Evaluasi perkembangan kebutuhan pelaporan**
↓
**SAK EP**
↓
**Konvergensi dengan IFRS for SMEs**
↓
**Pelaporan entitas privat yang lebih selaras dengan perkembangan internasional**

Penelitian terbaru mengenai transisi SAK ETAP menuju SAK EP menunjukkan bahwa proses tersebut membawa perubahan terhadap praktik pelaporan dan memerlukan penyesuaian pada kebijakan akuntansi perusahaan.

**SAK EP dan IFRS for SMEs**

Hubungan SAK EP dengan IFRS for SMEs merupakan aspek penting yang harus dipahami mahasiswa. **IFRS for SMEs Accounting Standard** dikembangkan oleh IASB sebagai standar yang lebih sederhana dibandingkan IFRS Accounting Standards penuh bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Indonesia kemudian mengembangkan SAK EP dengan mengacu pada IFRS for SMEs versi 2015 dan melakukan beberapa modifikasi untuk konteks nasional. Hubungannya dapat digambarkan:

**IFRS Accounting Standards**

standar internasional penuh

**IFRS for SMEs Accounting Standard**

versi yang disederhanakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik

**SAK EP**

standar Indonesia yang dikonvergensikan dengan IFRS for SMEs dengan beberapa modifikasi.

Dengan demikian, SAK EP tidak sama dengan IFRS penuh.

**Karakteristik Entitas Privat**

Karakteristik utama entitas yang menggunakan SAK EP adalah tidak memiliki akuntabilitas publik sebagaimana didefinisikan dalam standar. Secara umum, akuntabilitas publik berkaitan dengan kondisi ketika instrumen utang atau ekuitas entitas diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan pada pasar publik.

Selain itu, entitas yang memiliki aktivitas utama memegang aset dalam kapasitas fidusia bagi kelompok masyarakat luas juga dapat memiliki karakteristik akuntabilitas publik. Contoh aktivitas yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- bank;
- perusahaan asuransi;
- dana pensiun;
- perusahaan efek;
- reksa dana;
- lembaga tertentu yang mengelola dana masyarakat.

Namun, penentuan apakah suatu entitas memenuhi kriteria akuntabilitas publik harus dilakukan berdasarkan ketentuan SAK dan regulasi sektoral yang berlaku, bukan hanya berdasarkan nama atau bentuk badan usaha.

**Tujuan SAK EP**

SAK EP bertujuan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Pengguna tersebut dapat mencakup:

- pemilik;
- investor privat;
- kreditor;
- bank;
- pemasok;
- pelanggan tertentu;
- manajemen;
- regulator;
- pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan.

Laporan keuangan perlu memberikan informasi mengenai:

1. posisi keuangan;
2. kinerja keuangan;

3. arus kas;
4. perubahan ekuitas;
5. kebijakan akuntansi;
6. estimasi dan pertimbangan tertentu;
7. transaksi dengan pihak berelasi;
8. informasi relevan lainnya.

**Penyajian Laporan Keuangan**

SAK EP memberikan kerangka penyajian laporan keuangan yang lebih lengkap. Secara umum, laporan keuangan entitas privat mencakup:

- laporan posisi keuangan;
- laporan penghasilan komprehensif atau laporan laba rugi;
- laporan perubahan ekuitas;
- laporan arus kas;
- catatan atas laporan keuangan.

Dibandingkan SAK EMKM yang memiliki tiga komponen minimum, SAK EP menyediakan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pengguna eksternal. Hal tersebut menunjukkan prinsip:

*Semakin kompleks kebutuhan informasi pengguna, semakin luas pula informasi yang perlu disediakan.*

**Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas.

*Contohnya:*

| Pos | Nilai |
|---|---|
| Kas | Rp. 500.000.000 |
| Piutang | Rp. 750.000.000 |
| Persediaan | Rp. 1.000.000.000 |
| Aset tetap | Rp. 3.000.000.000 |
| **Total Aset** | **Rp. 5.250.000.000** |
| Utang usaha | Rp. 750.000.000 |
| Pinjaman bank | Rp. 1.500.000.000 |
| Ekuitas | Rp. 3.000.000.000 |
| **Total Liabilitas + Ekuitas** | **Rp. 5.250.000.000** |

Informasi tersebut membantu pengguna memahami:

- likuiditas;
- struktur pendanaan;
- investasi aset;
- tingkat kewajiban;
- posisi modal.

**Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laba Rugi**

SAK EP memiliki pengaturan mengenai laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai:

- pendapatan;
- beban;
- laba;
- perubahan tertentu pada ekuitas;
- komponen penghasilan komprehensif lain apabila relevan.

Dengan demikian, pengguna tidak hanya mengetahui posisi perusahaan pada akhir tahun, tetapi juga mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama periode pelaporan.

**Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan hak residual pemilik selama periode tertentu. Perubahan dapat berasal dari:

- modal yang disetor;
- laba;
- rugi;
- distribusi kepada pemilik;
- transaksi tertentu yang memengaruhi ekuitas.

Contoh sederhana:

| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Ekuitas awal | Rp. 2.500.000.000 |
| Tambahan modal | Rp. 250.000.000 |
| Laba tahun berjalan | Rp. 500.000.000 |
| Dividen/distribusi | (Rp. 250.000.000) |
| Ekuitas akhir | Rp. 3.000.000.000 |

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kekayaan bersih perusahaan berubah selama satu periode.

**Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas merupakan salah satu perbedaan penting ketika dibandingkan dengan struktur minimum SAK EMKM. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus:

1. aktivitas operasi;
2. aktivitas investasi;
3. aktivitas pendanaan.

*Contohnya:*

**Arus kas operasi**

- penerimaan dari pelanggan;
- pembayaran pemasok;
- pembayaran gaji.

**Arus kas investasi**

- pembelian mesin;
- penjualan kendaraan;

- pembelian investasi tertentu.

**Arus kas pendanaan**

- penerimaan pinjaman;
- pembayaran pinjaman;
- setoran modal;
- distribusi kepada pemilik.

Laporan arus kas membantu pengguna memahami apakah laba perusahaan didukung oleh kemampuan menghasilkan kas.

**Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang membantu pengguna memahami angka dalam laporan utama. Informasi tersebut dapat mencakup:

- kebijakan akuntansi;
- rincian akun;
- estimasi;
- pertimbangan;
- transaksi pihak berelasi;
- komitmen;
- ketidakpastian tertentu;
- informasi lainnya yang relevan.

Dengan demikian, laporan keuangan tidak dapat dipahami hanya dengan membaca angka utama. Hubungan antara laporan dan catatan dapat digambarkan:

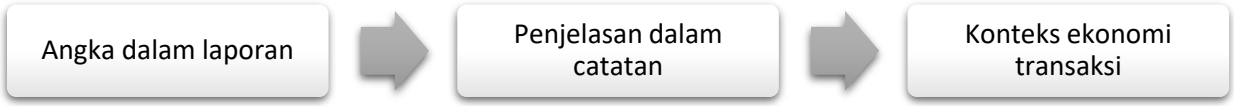


**Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan**

SAK EP memiliki bab khusus mengenai:

- kebijakan akuntansi;
- perubahan estimasi akuntansi;
- kesalahan periode sebelumnya.

Hal ini penting karena laporan keuangan tidak selalu dihasilkan dari transaksi yang nilainya diketahui secara pasti.

Contoh estimasi:

- umur manfaat aset;
- penyisihan piutang;
- estimasi kewajiban;
- nilai tertentu yang memerlukan pertimbangan.

Akuntan harus membedakan antara:

***perubahan estimasi***

*dan*

***koreksi kesalahan.***

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap bagaimana perubahan dicatat dan disajikan.

**Instrumen Keuangan**

SAK EP memiliki pengaturan khusus mengenai:

- instrumen keuangan dasar;
- isu terkait instrumen keuangan lainnya.

Contoh instrumen keuangan:

- kas;
- piutang;
- utang usaha;
- pinjaman bank;
- investasi tertentu.

Untuk perusahaan privat yang menggunakan pembiayaan bank dan melakukan transaksi kredit, pengaturan instrumen keuangan menjadi sangat penting. Hal tersebut juga memperlihatkan mengapa SAK EP lebih sesuai bagi perusahaan yang memiliki kompleksitas transaksi lebih tinggi daripada UMKM sederhana.

**SAK EP dan Aset Tetap**

Aset tetap merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas perusahaan privat.

*Contoh:*

- mesin;
- gedung;
- kendaraan;
- peralatan;
- fasilitas produksi.

Perusahaan perlu menentukan:

1. kapan aset diakui;
2. berapa nilai awalnya;
3. bagaimana penyusutan dilakukan;
4. bagaimana umur manfaat ditentukan;
5. bagaimana aset diturunkan nilainya;
6. bagaimana pelepasan aset dicatat.

*Sebagai ilustrasi:*

Perusahaan membeli mesin:

Harga perolehan = Rp. 1.200.000.000
Umur manfaat = 10 tahun
Nilai residu = Rp. 200.000.000

Dengan asumsi metode garis lurus:

Penyusutan tahunan
= (Rp. 1.200.000.000 – Rp. 200.000.000) ÷ 10
= **Rp. 100.000.000**

Perhitungan tersebut memengaruhi:

- beban;
- laba;
- nilai tercatat aset;
- ekuitas.

**SAK EP dan Persediaan**

Perusahaan privat yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur dapat memiliki persediaan dalam jumlah besar. Persediaan perlu dikelola agar:

- nilai aset dapat ditentukan;
- harga pokok penjualan dapat dihitung;
- laba kotor dapat dianalisis;
- risiko keusangan dapat diidentifikasi.

*Contoh sederhana:*

Persediaan awal = Rp. 500.000.000
Pembelian = Rp. 2.000.000.000
Persediaan akhir = Rp. 600.000.000

Maka secara sederhana:

Harga pokok penjualan
= Rp. 500.000.000 + Rp. 2.000.000.000 – Rp. 600.000.000
= **Rp. 1.900.000.000**

Informasi tersebut kemudian digunakan dalam menentukan laba kotor perusahaan.

**SAK EP dan Aset Takberwujud**

Dalam ekonomi modern, perusahaan privat semakin banyak memiliki aset tidak berwujud.

*Contohnya:*

- perangkat lunak;
- lisensi;
- hak tertentu;
- teknologi;
- aset berbasis pengetahuan.

SAK EP memiliki bab khusus mengenai aset takberwujud selain *goodwill.* Hal ini menjadi semakin relevan bagi perusahaan yang bergerak dalam:

- teknologi;
- jasa;
- manufaktur berbasis inovasi;
- ekonomi kreatif;
- pengembangan perangkat lunak.

Namun, tidak semua pengeluaran yang berkaitan dengan teknologi otomatis memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset. Akuntan harus mengevaluasi substansi dan kriteria pengakuan yang berlaku.

**SAK EP dan Sewa**

Perusahaan privat sering melakukan transaksi sewa:

- gedung;

- kendaraan;
- mesin;
- gudang;
- peralatan.

Transaksi sewa perlu dianalisis berdasarkan substansi dan ketentuan SAK EP yang berlaku. Hal ini penting karena kontrak yang secara hukum disebut "sewa" dapat memiliki implikasi akuntansi yang berbeda berdasarkan karakteristik transaksi.

**SAK EP dan Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu komponen terpenting dalam laporan keuangan. Perusahaan perlu menentukan:

- kapan pendapatan diakui;
- berapa jumlah pendapatan;
- transaksi apa yang termasuk pendapatan;
- bagaimana transaksi dengan pelanggan dicatat.

Dalam ekonomi digital, isu pendapatan semakin kompleks karena terdapat:

- langganan;
- marketplace;
- kontrak jangka panjang;
- layanan digital;
- komisi;
- bundling produk dan jasa.

Karena itu, pemahaman terhadap substansi kontrak menjadi penting.

**SAK EP dan Transaksi Valuta Asing**

Perusahaan privat yang melakukan transaksi internasional dapat menghadapi:

- pembelian dalam dolar AS;
- penjualan ekspor;
- pinjaman valuta asing;
- pembayaran kepada pemasok luar negeri.

SAK EP memiliki bab mengenai penjabaran valuta asing.

*Contoh:*

Perusahaan membeli barang senilai: USD 10.000

Kurs saat transaksi: Rp. 16.000/USD

Nilai transaksi: USD 10.000 × Rp. 16.000 = **Rp. 160.000.000**

Jika pada tanggal pelaporan kurs berubah menjadi Rp16.500/USD, nilai kewajiban dapat mengalami perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan kurs tersebut dapat memengaruhi laba rugi perusahaan.

**SAK EP dan Pajak Penghasilan**

Pajak merupakan bagian penting dari aktivitas perusahaan. SAK EP memiliki bab khusus mengenai **pajak penghasilan**. Akuntansi pajak perlu dibedakan dari sekadar perhitungan pajak menurut peraturan perpajakan. Akuntansi berusaha menggambarkan konsekuensi ekonomi pajak dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi.

Karena itu:

$$Akuntansi\ pajak\ \neq\ sekadar\ menghitung\ pajak\ terutang.$$

Pemahaman ini penting bagi mahasiswa karena perusahaan privat dapat menghadapi perbedaan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan.

**SAK EP dan Pihak Berelasi**

Perusahaan privat sering memiliki hubungan dengan:

- pemegang saham;
- anak perusahaan;
- perusahaan saudara;
- direktur;
- komisaris;
- anggota keluarga tertentu dari pihak manajemen.

Transaksi dengan pihak-pihak tersebut perlu mendapatkan perhatian karena dapat memengaruhi transparansi laporan keuangan. SAK EP memiliki bab khusus mengenai pengungkapan pihak berelasi.

Pengungkapan tersebut membantu pengguna memahami apakah transaksi tertentu dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan khusus dengan entitas.

**SAK EP dan Konsolidasi**

Perusahaan privat dapat memiliki anak perusahaan. Apabila memenuhi kondisi yang relevan, entitas dapat menghadapi kebutuhan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

*Contohnya:*

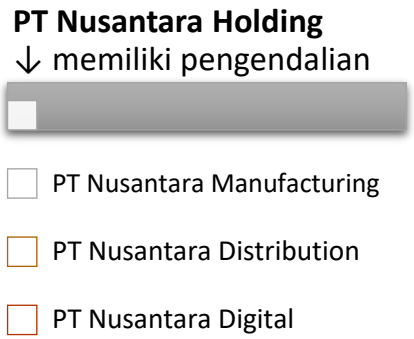


Laporan masing-masing perusahaan perlu dianalisis dalam konteks grup. SAK EP memiliki bab khusus mengenai:

$$Laporan\ Keuangan\ Konsolidasian\ dan\ Laporan\ Keuangan\ Tersendiri.$$

Hal tersebut menjadi salah satu pembeda penting antara entitas privat yang telah berkembang dengan usaha mikro yang memiliki struktur sederhana.

**Perbandingan SAK EP, SAK EMKM, dan SAK Indonesia**

Untuk memahami posisi SAK EP, mahasiswa perlu melihat ketiga standar tersebut secara bersamaan.

| Aspek | SAK Indonesia | SAK EP | SAK EMKM |
|---|---|---|---|
| Sasaran utama | Entitas dengan kebutuhan pelaporan umum yang lebih luas | Entitas privat | Entitas mikro, kecil, menengah |
| Akuntabilitas publik | Umumnya relevan untuk entitas dengan kebutuhan pelaporan publik | Tidak memiliki akuntabilitas publik, dengan pengecualian jika regulator mengizinkan | Tidak memiliki akuntabilitas publik |
| Hubungan dengan IFRS | Konvergensi dengan IFRS Accounting Standards | Konvergensi dengan IFRS for SMEs | Standar sederhana untuk EMKM |
| Kompleksitas | Tinggi | Menengah | Lebih sederhana |
| Jumlah topik | Sangat luas | 35 bab | Lebih terbatas |
| Konsolidasi | Diatur secara komprehensif | Diatur | Lebih sederhana |
| Instrumen keuangan | Relatif kompleks | Lebih sederhana daripada SAK Indonesia | Sangat disederhanakan |
| Pengguna | Investor, kreditor, regulator, dan pengguna lainnya | Pemilik, kreditor, dan pengguna eksternal | Pemilik dan pengguna eksternal dengan kebutuhan sederhana |

Perlu ditekankan bahwa tabel tersebut merupakan **gambaran konseptual**, bukan dasar tunggal untuk menentukan standar yang wajib digunakan oleh suatu perusahaan. Penentuan standar harus mengacu pada ketentuan SAK dan regulator yang relevan.

**SAK EP sebagai "Solusi Tengah"**

Secara pedagogis, SAK EP dapat disebut sebagai **solusi tengah**. Namun, istilah tersebut bukan nomenklatur resmi IAI. Yang dimaksud adalah posisi SAK EP dalam tingkat kompleksitas pelaporan:

**SAK Indonesia**
Kompleksitas tinggi
↓
**SAK EP**
Kompleksitas menengah
↓
**SAK EMKM**
Kompleksitas lebih sederhana

Pendekatan tersebut membantu mahasiswa memahami prinsip proportional financial reporting. Standar harus sesuai dengan:

*karakteristik entitas + kebutuhan pengguna + kompleksitas transaksi + lingkungan regulasi.*

**SAK EP dan Digitalisasi Akuntansi**

Penerapan SAK EP juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan sistem informasi akuntansi. Perusahaan privat dapat menggunakan:

- ERP;
- cloud accounting;
- aplikasi akuntansi;
- sistem inventori;
- sistem payroll;
- sistem perpajakan;
- business intelligence.

Data dari sistem tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan:

- laporan posisi keuangan;
- laporan laba rugi;
- laporan arus kas;
- laporan perubahan ekuitas;
- catatan laporan keuangan.

Namun, implementasi sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan SAK EP. Penelitian mengenai perancangan sistem informasi akuntansi pada unit SPBU menunjukkan bahwa kebutuhan digitalisasi pencatatan dapat dirancang dengan mengacu pada SAK EP sehingga transaksi penjualan dan pelaporan dapat lebih terstruktur.

Dengan demikian:

> *SAK EP menentukan prinsip pelaporan, sedangkan sistem informasi membantu mengotomatisasi proses pengumpulan dan pengolahan data.*

**SAK EP dan Audit**

Perubahan standar akuntansi juga berdampak pada proses audit. Auditor perlu memahami:

- kebijakan akuntansi baru;
- perubahan pengakuan;
- perubahan pengukuran;
- perubahan pengungkapan;
- risiko salah saji;
- dampak transisi.

Penelitian terbaru mengenai penerapan SAK EP dari perspektif auditor menunjukkan bahwa perubahan standar dapat memengaruhi risk assessment, audit planning, substantive testing, dan evaluasi pengendalian internal. Dengan demikian, transisi SAK EP bukan hanya persoalan bagi bagian akuntansi. Dampaknya dapat meluas ke:



**SAK EP dan Kualitas Laporan Keuangan**

Salah satu tujuan penerapan standar adalah menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Namun, penerapan standar tidak secara otomatis menjamin laporan keuangan berkualitas. Kualitas laporan dipengaruhi oleh:

- kompetensi akuntan;
- sistem informasi;
- pengendalian internal;
- dokumentasi;
- professional judgment;
- kepatuhan;
- kualitas audit.

Penelitian mengenai implementasi SAK EP pada BPR Bank Daerah Gianyar menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan telah diterapkan, termasuk pengakuan pendapatan berbasis akrual dan pengukuran aset menggunakan model biaya, tetapi masih terdapat ruang perbaikan dalam beberapa aspek pengungkapan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa:

*Penerapan standar merupakan proses, bukan sekadar keputusan untuk mengganti basis laporan.*

**Tantangan Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP**

Peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP dapat menimbulkan beberapa tantangan.

1. Pemahaman standar. Akuntan harus memahami struktur baru dan perubahan ketentuan.
2. Penyesuaian kebijakan akuntansi. Kebijakan yang sebelumnya diterapkan berdasarkan SAK ETAP perlu dievaluasi.
3. Penyesuaian data. Data historis mungkin perlu diklasifikasikan atau disesuaikan.
4. Sistem informasi. ERP atau aplikasi akuntansi dapat membutuhkan perubahan.
5. Dokumentasi. Perusahaan perlu mendokumentasikan kebijakan dan pertimbangan akuntansi.
6. Pelatihan. SDM perlu mendapatkan pelatihan mengenai standar baru.
7. Audit. Auditor harus menyesuaikan prosedur dan penilaian risiko.

Penelitian komparatif mengenai transisi SAK ETAP ke SAK EP pada perusahaan manufaktur dan jasa juga menunjukkan adanya perubahan dan kesulitan yang perlu dikelola selama masa transisi.

**Tahapan Implementasi SAK EP**

Perusahaan yang beralih ke SAK EP dapat melakukan pendekatan bertahap.

**Tahap 1 – Identifikasi entitas**

Menentukan apakah perusahaan memenuhi kriteria penggunaan SAK EP.

**Tahap 2 – Gap analysis**

Membandingkan kebijakan akuntansi yang digunakan dengan ketentuan SAK EP.

**Tahap 3 – Identifikasi dampak**

Menentukan akun dan transaksi yang mengalami perubahan.

**Tahap 4 – Penyesuaian kebijakan**

Menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan SAK EP.

**Tahap 5 – Penyesuaian sistem**

Mengubah *chart of accounts*, modul ERP, laporan, dan prosedur apabila diperlukan.

**Tahap 6 – Pelatihan**

Memberikan pelatihan kepada:

- akuntan;
- finance;
- auditor internal;
- manajemen;
- pengguna sistem.

**Tahap 7 – Penyusunan laporan**

Menyusun laporan keuangan sesuai SAK EP.

**Tahap 8 – Review dan audit**

**SAK EP dan Professional Judgment**

Walaupun lebih sederhana dibandingkan SAK Indonesia, SAK EP tetap membutuhkan pertimbangan profesional. Akuntan harus mampu menjawab:

- apakah suatu transaksi memenuhi definisi aset?
- apakah pengeluaran harus dibebankan atau dikapitalisasi?
- bagaimana menentukan umur manfaat?
- bagaimana mengidentifikasi penurunan nilai?
- bagaimana mengklasifikasikan kewajiban?
- bagaimana menentukan pengungkapan yang relevan?

Dengan demikian, penggunaan SAK EP tidak berarti bahwa perusahaan dapat mengabaikan professional judgment. Justru akuntan perlu memiliki:

*pemahaman standar + pemahaman bisnis + kemampuan analisis + integritas profesional.*

**SAK EP dan Tata Kelola Perusahaan Privat**

Penerapan SAK EP dapat mendukung tata kelola perusahaan privat. Laporan keuangan yang lebih terstruktur dapat membantu pemilik dan pihak eksternal memahami:

- penggunaan sumber daya;
- kinerja;
- kewajiban;
- risiko;
- transaksi dengan pihak berelasi;
- posisi likuiditas.

Dengan demikian:




Namun, SAK EP bukan satu-satunya instrumen tata kelola. Tata kelola juga membutuhkan struktur organisasi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan mekanisme pengawasan.

**SAK EP dan Keberlanjutan Bisnis**

Informasi keuangan yang berkualitas membantu manajemen memahami kondisi bisnis. *Contohnya:*

- apakah utang terlalu tinggi?
- apakah perusahaan memiliki kas yang cukup?
- apakah investasi aset produktif?
- apakah margin menurun?
- apakah biaya meningkat?
- apakah perusahaan memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu?

Penelitian mengenai implementasi SAK EP pada BPR Bank Daerah Gianyar menghubungkan penerapan standar dengan peningkatan transparansi dan kualitas informasi keuangan, meskipun masih ditemukan kebutuhan perbaikan dalam pengungkapan. Dengan demikian, SAK EP dapat mendukung keberlanjutan bisnis melalui penyediaan informasi yang lebih sistematis. Namun, penting dipahami:

$$SAK\ EP\ tidak\ menjamin\ keberlanjutan\ perusahaan.$$

Standar menyediakan informasi; keputusan bisnis tetap berada pada manajemen dan pemilik.

**Posisi SAK EP dalam Arsitektur SAK Indonesia**

Setelah membahas SAK Indonesia, PSAK terbaru, IFRS, dan SAK EMKM, posisi SAK EP dapat dipahami secara lebih lengkap.

| | |
|---|---|
| SAK Internasional | → IFRS Accounting Standards secara penuh |
| SAK Indonesia | → konvergensi dengan IFRS Accounting Standards |
| SAK EP | → konvergensi dengan IFRS for SMEs |
| SAK EMKM | → kerangka sederhana untuk EMKM |

Dengan demikian, terdapat diferensiasi tingkat kompleksitas pelaporan. Konsep tersebut memungkinkan standar lebih sesuai dengan karakteristik entitas dan kebutuhan pengguna.

**Implikasi bagi Sistem Informasi Akuntansi**

Penerapan SAK EP dapat memengaruhi desain sistem informasi akuntansi. Sistem harus mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk:

- pengakuan transaksi;
- pengukuran;
- klasifikasi;
- penyusutan;
- persediaan;
- piutang;
- utang;
- pendapatan;
- pajak;
- transaksi pihak berelasi;
- laporan konsolidasian;
- pengungkapan.

Oleh karena itu, implementasi SAK EP sebaiknya melibatkan:

$$\textbf{Akuntansi} + \textbf{IT} + \textbf{Manajemen} + \textbf{Audit Internal}$$

bukan hanya bagian akuntansi.

**Implikasi bagi Profesi Akuntan**

Perubahan dari SAK ETAP menuju SAK EP memperluas tuntutan kompetensi akuntan. Akuntan perlu menguasai:

**Kompetensi teknis**
Memahami SAK EP.

**Kompetensi digital**
Menggunakan ERP, spreadsheet, database, dan analitik.

**Kompetensi analitis**
Menganalisis transaksi dan dampaknya.

**Kompetensi komunikasi**
Menjelaskan kebijakan akuntansi kepada manajemen.

**Kompetensi etika**
Menjaga objektivitas dan integritas.

**Kompetensi bisnis**
Memahami model bisnis perusahaan.

Dengan demikian, akuntan modern tidak cukup hanya menjadi “operator pencatatan”.

**Tantangan Masa Depan SAK EP**

SAK EP akan menghadapi tantangan seiring perubahan lingkungan bisnis. Beberapa isu yang perlu diperhatikan adalah:

1. digitalisasi transaksi;
2. penggunaan artificial intelligence;

3. transaksi berbasis platform;
4. aset digital;
5. transaksi lintas negara;
6. perubahan model bisnis;
7. keberlanjutan;
8. keamanan data;
9. kebutuhan informasi investor privat;
10. perubahan standar internasional.

Karena SAK EP memiliki hubungan dengan IFRS for SMEs, perkembangan internasional dapat menjadi salah satu sumber perubahan di masa mendatang. Namun, setiap perubahan tetap harus dilihat melalui proses penyusunan dan pengesahan standar di Indonesia.

## 3.6 HAMBATAN KULTURAL, TEKNIS, DAN INFRASTRUKTUR IMPLEMENTASI IFRS

*International Financial Reporting Standards* (IFRS) dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, keterbandingan, transparansi, dan relevansi informasi keuangan lintas negara. Namun, keberadaan standar yang berkualitas tidak secara otomatis menjamin bahwa standar tersebut dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh entitas. Implementasi IFRS merupakan proses yang melibatkan standar akuntansi, sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, budaya organisasi, profesi akuntansi, auditor, regulator, serta karakteristik lingkungan bisnis.

Dalam konteks Indonesia, implementasi IFRS dilakukan terutama melalui proses konvergensi ke dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Indonesia tidak sekadar menerjemahkan IFRS secara langsung ke dalam seluruh pelaporan keuangan domestik. SAK Indonesia secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS Accounting Standards, sedangkan SAK Internasional mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh untuk entitas tertentu yang memenuhi persyaratan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa implementasi IFRS di Indonesia berlangsung melalui suatu arsitektur standar yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan nasional.

Penelitian Maradona dan Chand mengenai perjalanan transisi IFRS di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan standar akuntansi Indonesia merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai tujuan dan kondisi kelembagaan. Dengan demikian, implementasi IFRS tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas mengganti standar lama dengan standar baru.

**Mengapa Implementasi IFRS Tidak Hanya Masalah Teknis?**

IFRS sering dipersepsikan sebagai seperangkat aturan teknis mengenai bagaimana transaksi harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Pandangan tersebut benar tetapi tidak lengkap. Implementasi IFRS dapat dipahami melalui lima lapisan berikut:

| Lapisan | Permasalahan Utama |
|---|---|
| Standar | Apakah ketentuan IFRS/SAK dapat dipahami dengan benar? |
| SDM | Apakah akuntan dan auditor memiliki kompetensi yang memadai? |
| Organisasi | Apakah kebijakan dan proses bisnis telah disesuaikan? |
| Teknologi | Apakah sistem mampu menyediakan data yang dibutuhkan? |

| | |
|---|---|
| Institusi | Apakah regulator dan mekanisme enforcement mendukung penerapan? |

Dengan demikian, perusahaan yang telah membeli software akuntansi baru belum tentu telah siap menerapkan IFRS. Demikian pula, perusahaan yang memiliki akuntan bersertifikat belum tentu mempunyai sistem data yang mampu menghasilkan informasi sesuai kebutuhan standar. Implementasi IFRS pada akhirnya merupakan proses perubahan organisasi.

**Hambatan Kultural dan Perbedaan Praktik Akuntansi**

Salah satu tantangan implementasi standar akuntansi internasional adalah perbedaan budaya dan tradisi akuntansi antarnegara. Praktik akuntansi suatu negara berkembang dalam lingkungan hukum, ekonomi, perpajakan, pendidikan, bisnis, dan kelembagaan tertentu. Oleh karena itu, standar internasional yang sama dapat menghadapi kondisi implementasi yang berbeda ketika diterapkan di negara yang berbeda. Perbedaan dapat muncul dalam bentuk:

1. budaya konservatisme;
2. tingkat keterbukaan informasi;
3. hubungan antara akuntansi dan perpajakan;
4. dominasi aturan hukum dibandingkan prinsip akuntansi;
5. tingkat penggunaan professional judgment;
6. kebiasaan perusahaan dalam melakukan pengungkapan;
7. kualitas corporate governance; dan
8. persepsi terhadap regulator dan auditor.

Penelitian mengenai negara berkembang menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya dapat memengaruhi implementasi IFRS. Nurunnabi, misalnya, menemukan bahwa faktor budaya, institusional, dan enforcement memiliki keterkaitan dengan implementasi standar global dalam konteks Bangladesh.

Temuan tersebut tidak berarti bahwa pengalaman Bangladesh dapat secara langsung digeneralisasikan kepada Indonesia. Namun, penelitian tersebut memberikan pelajaran penting bahwa implementasi IFRS harus mempertimbangkan lingkungan institusional tempat standar tersebut diterapkan.

**Kesenjangan Pendidikan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

IFRS menggunakan pendekatan yang dalam banyak area memberikan ruang bagi professional judgment. Akibatnya, implementasi standar memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu menghafalkan ketentuan, tetapi juga memahami substansi ekonomi transaksi. Kompetensi yang dibutuhkan meliputi:

- pemahaman standar akuntansi;
- kemampuan membaca dan menafsirkan ketentuan;
- kemampuan melakukan estimasi;
- kemampuan melakukan analisis transaksi;
- pemahaman bisnis;
- kemampuan menggunakan teknologi informasi;
- kemampuan berkomunikasi dengan auditor;
- kemampuan melakukan dokumentasi professional judgment.

Tantangan pendidikan menjadi semakin besar karena standar akuntansi terus berkembang. Penelitian Mita dan Siregar terhadap 243 pendidik akuntansi di Indonesia menemukan adanya keterlambatan sebagian besar responden dalam memasukkan standar baru yang signifikan seperti IFRS 9, IFRS 15, dan IFRS 16 ke dalam materi pembelajaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika standar juga menjadi tantangan bagi institusi pendidikan dalam menjaga relevansi kurikulum. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi tidak seharusnya hanya berorientasi pada standar yang berlaku saat ini, tetapi juga membangun kemampuan mahasiswa untuk mempelajari standar baru secara mandiri.

**Professional Judgment dan Ketidakpastian**

Salah satu karakteristik penting standar berbasis prinsip adalah kebutuhan untuk menggunakan professional judgment. Professional judgment diperlukan ketika akuntan menghadapi transaksi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan prosedur mekanis. Contohnya adalah ketika perusahaan harus menentukan:

- apakah suatu aset mengalami penurunan nilai;
- estimasi umur manfaat aset;
- estimasi provisi;
- klasifikasi instrumen keuangan;
- estimasi nilai wajar;
- pengakuan pendapatan dalam transaksi kompleks;
- tingkat materialitas;
- asumsi dalam pengukuran tertentu.

Permasalahan muncul apabila dua profesional yang kompeten menghasilkan pertimbangan yang berbeda. Hal tersebut tidak selalu menunjukkan kesalahan. Dalam standar berbasis prinsip, perbedaan judgment dapat terjadi karena adanya ketidakpastian, informasi yang berbeda, asumsi yang berbeda, atau karakteristik transaksi yang kompleks. Oleh sebab itu, professional judgment harus didukung oleh:

1. bukti;
2. dokumentasi;
3. kebijakan akuntansi;
4. analisis yang memadai;
5. konsistensi;
6. review;
7. pengawasan auditor dan manajemen.

**Infrastruktur Sistem Informasi**

Implementasi IFRS membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi yang mampu menghasilkan data secara tepat, lengkap, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Sistem lama yang hanya dirancang untuk menghasilkan laporan berdasarkan kebutuhan administratif mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan standar yang lebih kompleks. Sebagai contoh, perubahan standar dapat membutuhkan informasi mengenai:

- kontrak pelanggan;
- karakteristik instrumen keuangan;

- umur manfaat aset;
- arus kas masa depan;
- nilai wajar;
- segmentasi pendapatan;
- data transaksi individual;
- informasi pihak berelasi;
- data untuk pengungkapan.

Apabila sistem tidak mampu menyediakan data tersebut, perusahaan mungkin harus melakukan rekonsiliasi manual. Penelitian mengenai implementasi PSAK 117 di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan teknologi informasi dan kesiapan data merupakan bagian penting dari infrastruktur implementasi. Keterbatasan integrasi data dapat meningkatkan pekerjaan rekonsiliasi manual dan risiko inkonsistensi antara angka dan pengungkapan. Dengan demikian:

$$IFRS \rightarrow membutuhkan\ data \rightarrow data\ membutuhkan\ sistem \rightarrow sistem\ membutuhkan\ tata\ kelola\ data.$$

**Biaya Implementasi dan Beban Kepatuhan**

Implementasi standar baru dapat menimbulkan biaya langsung maupun tidak langsung.

**Biaya langsung**

Contohnya:

- pelatihan karyawan;
- konsultasi;
- pengembangan sistem;
- pembaruan software;
- jasa auditor atau tenaga ahli;
- pengembangan database;
- perubahan dokumentasi.

**Biaya tidak langsung**

Contohnya:

- waktu karyawan untuk mempelajari standar;
- perubahan prosedur kerja;
- penyesuaian kontrak;
- rekonsiliasi data;
- perubahan indikator kinerja;
- komunikasi dengan investor;
- penyesuaian proses audit.

Penelitian Pawsey mengenai implementasi IFRS di Australia menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi biaya transisi dan biaya berkelanjutan, termasuk biaya sistem informasi akuntansi, pelatihan, penyesuaian laporan, serta jasa profesional.

Temuan tersebut berasal dari konteks Australia dan periode implementasi tertentu sehingga tidak dapat dianggap sebagai ukuran biaya implementasi untuk seluruh perusahaan Indonesia.

Namun, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan standar dapat mempunyai konsekuensi ekonomi yang lebih luas daripada sekadar perubahan pencatatan jurnal.

**Regulasi dan Enforcement**

Standar yang baik memerlukan mekanisme penerapan dan pengawasan yang efektif. Enforcement diperlukan agar:

- perusahaan menerapkan standar secara konsisten;
- pelanggaran dapat diidentifikasi;
- pengungkapan menjadi lebih dapat dipercaya;
- auditor memiliki dasar evaluasi;
- pengguna laporan keuangan memperoleh perlindungan yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, DSAK IAI berperan dalam penyusunan SAK, sedangkan regulator memiliki peran sesuai kewenangannya dalam mengatur dan mengawasi pelaporan entitas yang berada dalam lingkup regulasinya. Penelitian mengenai implementasi standar internasional di berbagai negara menunjukkan bahwa keberadaan standar saja tidak cukup. Kualitas enforcement, kapasitas institusi, dan lingkungan regulasi turut menentukan bagaimana standar diterapkan dalam praktik.

**Tantangan Konvergensi versus Adopsi**

Indonesia memiliki karakteristik khusus karena terdapat perbedaan antara:

**adopsi penuh IFRS** dan **konvergensi SAK dengan IFRS**.

SAK Indonesia secara substansial dikonvergensikan dengan IFRS Accounting Standards. Di sisi lain, SAK Internasional mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh untuk entitas yang memenuhi persyaratan regulator. Perbedaan tersebut memiliki implikasi penting.

| Aspek | Adopsi Penuh | Konvergensi |
|---|---|---|
| Hubungan dengan IFRS | Mengadopsi secara penuh | Diselaraskan secara substansial |
| Penyesuaian lokal | Sangat terbatas | Dapat terdapat penyesuaian |
| Bahasa | Diterjemahkan | Diterjemahkan dan disesuaikan |
| Lingkungan hukum | Perlu diperhatikan | Sangat diperhatikan |
| Implementasi | Relatif langsung | Membutuhkan proses harmonisasi |

IFRS Foundation mencatat bahwa SAK Indonesia secara substansial telah dikonvergensikan dengan IFRS Accounting Standards, sementara SAK Internasional merupakan standar yang mengadopsi IFRS Accounting Standards secara penuh.

**Tantangan bagi Perusahaan Privat dan UMKM**

Tidak semua perusahaan memiliki kapasitas yang sama untuk menerapkan standar akuntansi yang kompleks. Perusahaan besar biasanya memiliki:

- departemen akuntansi;
- internal audit;
- sistem ERP;
- tenaga ahli;
- akses terhadap konsultan;
- sumber daya untuk pelatihan.

Sebaliknya, perusahaan privat dan UMKM dapat memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Karena itu, arsitektur SAK Indonesia menyediakan beberapa tingkatan standar. SAK EP ditujukan untuk entitas privat yang memenuhi karakteristik yang ditentukan, sedangkan SAK EMKM ditujukan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai kriteria yang berlaku. Struktur tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi internasional tidak harus berarti seluruh entitas menggunakan standar dengan tingkat kompleksitas yang sama.

**Tantangan bagi Auditor**

Perubahan standar akuntansi juga mengubah pekerjaan auditor. Auditor tidak hanya harus memahami:

*"Apa aturan yang berlaku?"*

tetapi juga:

*"Bagaimana perusahaan menerapkan aturan tersebut dan apakah bukti yang tersedia mendukung penerapannya?"*

Area yang dapat menjadi lebih kompleks meliputi:

1. estimasi akuntansi;
2. nilai wajar;
3. impairment;
4. pengakuan pendapatan;
5. instrumen keuangan;
6. konsolidasi;
7. pengungkapan;
8. professional judgment;
9. sistem informasi;
10. pengendalian internal.

Perkembangan teknologi juga membuat auditor perlu memahami sistem yang menghasilkan informasi keuangan. Penelitian terbaru mengenai keterampilan auditor dalam audit implementasi ERP menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap kompetensi teknologi, dokumentasi sistem, integrasi sistem, serta pelatihan pengguna.

**Tantangan Digitalisasi, ERP, XBRL, dan Artificial Intelligence**

Implementasi standar akuntansi modern semakin berkaitan dengan teknologi.

**Enterprise Resource Planning (ERP)**

ERP mengintegrasikan berbagai fungsi seperti:

- penjualan;
- pembelian;
- persediaan;
- produksi;
- aset;
- keuangan;
- sumber daya manusia.

Apabila desain ERP tidak selaras dengan kebutuhan standar akuntansi, sistem dapat menghasilkan data yang tidak memadai untuk pelaporan.

**XBRL**

XBRL memungkinkan informasi keuangan diberikan dalam format terstruktur sehingga dapat diproses oleh komputer. Penelitian Amalia mengenai XBRL di pasar modal Indonesia menunjukkan adanya variasi respons organisasi terhadap kewajiban pelaporan XBRL, termasuk pola kepatuhan yang berbeda yang berkaitan dengan enforcement dan dinamika organisasi.

**Artificial Intelligence**

AI dapat digunakan untuk:

- membaca dokumen;
- mengklasifikasikan transaksi;
- mendeteksi anomali;
- membantu rekonsiliasi;
- menganalisis kontrak;
- membantu pencarian ketentuan standar.

Namun, AI tidak menghilangkan kebutuhan atas professional judgment dan tanggung jawab manusia.

Prinsip yang dapat digunakan adalah:

*AI membantu proses analisis, tetapi akuntan tetap bertanggung jawab atas keputusan akuntansi.*

**Tantangan Data dan Kualitas Informasi**

Implementasi standar yang kompleks memerlukan data yang berkualitas. Data yang diperlukan harus memenuhi prinsip:

- accuracy;
- completeness;
- consistency;
- timeliness;
- traceability;
- security.

Sebagai contoh, perusahaan mungkin memiliki ribuan kontrak pelanggan. Jika data kontrak tidak terstruktur, perusahaan akan kesulitan melakukan analisis berdasarkan ketentuan standar yang berkaitan dengan pendapatan. Masalah data juga dapat muncul ketika:

- sistem lama tidak terintegrasi;
- terdapat data duplikat;
- definisi data berbeda antarunit;
- histori transaksi tidak lengkap;
- data disimpan dalam spreadsheet terpisah;
- tidak terdapat audit trail.

Karena itu, implementasi IFRS pada era digital sebenarnya juga merupakan proyek tata kelola data.

**IFRS dan Sustainability Reporting**

Perkembangan pelaporan korporasi juga memperluas perhatian dari informasi keuangan menuju informasi terkait keberlanjutan. IFRS Foundation melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan yang dirancang untuk menyediakan informasi berguna bagi investor. Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan karena informasi keberlanjutan sering kali berasal dari departemen yang berbeda dengan fungsi akuntansi.

*Contohnya:*

- emisi karbon berasal dari bagian operasional;
- konsumsi energi berasal dari fasilitas;
- data tenaga kerja berasal dari HR;
- risiko iklim berasal dari risk management;
- informasi rantai pasok berasal dari procurement.

Dengan demikian, perusahaan membutuhkan integrasi data lintas fungsi.

**Strategi Implementasi IFRS/SAK**

Implementasi standar sebaiknya dilakukan secara sistematis.

**Tahap 1: Gap Analysis**

Perusahaan membandingkan: **praktik saat ini vs ketentuan standar**

Hasilnya berupa daftar kesenjangan.

**Tahap 2: Impact Assessment**

Perusahaan mengidentifikasi dampak terhadap:

- laporan keuangan;
- sistem;
- proses bisnis;
- kontrak;
- pajak;
- SDM;
- audit.

**Tahap 3: Data Mapping**

Setiap informasi yang diperlukan dipetakan ke sumber datanya.

**Tahap 4: System Adjustment**

Sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.

**Tahap 5: Training**

Akuntan, auditor internal, manajemen, dan pengguna informasi diberikan pelatihan.

**Tahap 6: Parallel Testing**

Perusahaan dapat melakukan pengujian antara sistem lama dan sistem baru untuk mengidentifikasi perbedaan.

**Tahap 7: Documentation**

Seluruh kebijakan dan judgment penting harus didokumentasikan.

**Tahap 8: Review**

Hasil implementasi direview oleh pihak yang kompeten.

**Tahap 9: Evaluation**

Setelah diterapkan, perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem dan proses.

**Peran IAI, DSAK, Regulator, dan Profesi**

Implementasi IFRS/SAK merupakan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak.

| Pihak | Peran |
|---|---|
| DSAK IAI | Menyusun dan mengembangkan standar |
| IAI | Mendukung pengembangan profesi dan standar |
| Regulator | Mengatur dan mengawasi entitas dalam lingkup kewenangannya |
| Perusahaan | Menerapkan standar |
| Akuntan | Menyusun dan mengevaluasi informasi keuangan |
| Auditor | Memberikan assurance |
| Perguruan tinggi | Mempersiapkan SDM |
| Penyedia teknologi | Menyediakan infrastruktur sistem |
| Investor | Menggunakan informasi keuangan |

Keberhasilan implementasi karena itu merupakan hasil interaksi antarpihak, bukan hanya tanggung jawab akuntan perusahaan.

**Masa Depan Harmonisasi Akuntansi**

Harmonisasi akuntansi akan semakin dipengaruhi oleh tiga perkembangan utama.

1. *Digitalisasi.* Laporan keuangan semakin terhubung dengan sistem digital dan structured data.
2. *Artificial Intelligence.* AI akan meningkatkan kemampuan pengolahan dan analisis data.
3. *Integrasi Financial dan Sustainability Reporting.* Pengguna informasi semakin membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan sekaligus faktor keberlanjutan yang relevan.

Akuntan masa depan dengan demikian perlu memiliki kombinasi kompetensi:

$$\textbf{Accounting} + \textbf{Technology} + \textbf{Data} + \textbf{Business} + \textbf{Ethics}$$

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa profesi akuntansi tidak menghilang akibat IFRS dan teknologi. Sebaliknya, sifat pekerjaan akuntan mengalami transformasi dari pekerjaan administratif menuju pekerjaan yang lebih analitis dan berbasis judgment.

# BAB 4
# SIKLUS AKUNTANSI
# DARI PENCATATAN HINGGA PELAPORAN BERBASIS ERP

## 4.1 SIKLUS AKUNTANSI TRADISIONAL VS MODERN

Menjelaskan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang mendorong transformasi siklus akuntansi dari proses manual menuju proses digital, terintegrasi, dan berbasis data. Fokus pembahasan:

- perubahan lingkungan bisnis;
- digitalisasi transaksi;
- peningkatan volume dan kecepatan data;
- kebutuhan informasi keuangan yang lebih cepat;
- munculnya sistem akuntansi terintegrasi.

**Konsep Dasar Siklus Akuntansi**

Membahas pengertian dan tujuan siklus akuntansi sebagai rangkaian proses yang mengubah transaksi ekonomi menjadi informasi keuangan.

Alur dasar:




Bagian ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana siklus tersebut mengalami perubahan pada lingkungan digital.

**Siklus Akuntansi Tradisional**

Membahas karakteristik siklus akuntansi sebelum penggunaan sistem terintegrasi secara luas.

Alur:

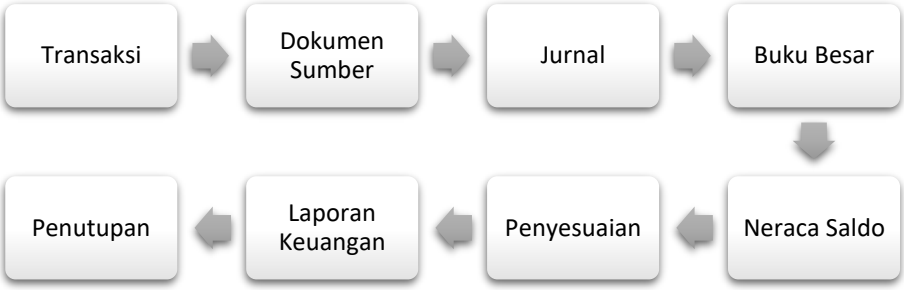


Fokusnya bukan menjelaskan setiap tahapan secara mendalam, karena tahapan tersebut akan dibahas pada subbab 4.2–4.5.

**Keterbatasan Siklus Akuntansi Tradisional**

Menganalisis kelemahan pendekatan tradisional, antara lain:

- input data berulang;
- ketergantungan pada dokumen dan spreadsheet;
- potensi human error;

- keterlambatan informasi;
- duplikasi data;
- rekonsiliasi yang membutuhkan waktu;
- pekerjaan menumpuk pada akhir periode;
- keterbatasan pemantauan transaksi secara cepat.

Bagian ini menjadi dasar mengapa transformasi digital diperlukan.

**Munculnya Siklus Akuntansi Modern**

Menjelaskan bagaimana teknologi informasi mengubah siklus akuntansi.

Perubahan utama:

| Tradisional | Modern |
|---|---|
| Manual | Digital |
| Terpisah | Terintegrasi |
| Periodik | Semakin berkelanjutan |
| Input berulang | Data terintegrasi |
| Pemeriksaan setelah proses | Pengendalian sepanjang proses |
| Spreadsheet dominan | Sistem informasi/ERP |
| Berorientasi pencatatan | Berorientasi informasi dan analisis |

Pembahasan di bagian ini bersifat konseptual dan tidak masuk terlalu jauh ke teknis ERP.

**Dari Transaction Recording menuju Information Processing**

Perubahan penting dalam paradigma akuntansi adalah pergeseran dari pencatatan transaksi menuju pengelolaan informasi keuangan.

Dalam paradigma tradisional:

$$Transaksi \rightarrow Dicatat \rightarrow Dikelompokkan \rightarrow Dilaporkan$$

Dalam paradigma modern:

$$Business\ Event \rightarrow Data\ Capture \rightarrow Processing \rightarrow Integration \rightarrow Information$$

Dengan demikian, sistem akuntansi modern tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi sebagai bagian dari sistem informasi organisasi.

**Integrasi Proses Bisnis dan Akuntansi**

Membahas bagaimana transaksi bisnis semakin terhubung langsung dengan konsekuensi akuntansinya.

*Contoh sederhana:*

| Penjualan | | Pembelian |
|---|---|---|
| - Transaksi penjualan<br>- Pengiriman barang<br>- Piutang<br>- Penerimaan kas<br>- Informasi pendapatan | *Demikian pula:* | - Permintaan pembelian<br>- Pengadaan<br>- Penerimaan barang<br>- Utang<br>- Pembayaran |

Pembahasan ini memperkenalkan konsep integrasi tanpa mengulang detail validasi, posting, dan rekonsiliasi yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

**Peran Sistem Informasi dalam Siklus Akuntansi Modern**

Membahas sistem informasi akuntansi sebagai infrastruktur yang mendukung:

- pengumpulan data;
- pemrosesan transaksi;
- integrasi informasi;
- penyimpanan data;
- pengendalian;
- penyediaan informasi;
- pelaporan.

ERP diperkenalkan sebagai salah satu bentuk sistem terintegrasi yang dapat mendukung proses tersebut.

> ***Catatan:*** *pembahasan teknis mengenai ERP sebaiknya tidak diperpanjang di sini karena akan menjadi bagian pendukung pada subbab berikutnya.*

**Perubahan Paradigma: Dari Batch Processing menuju Real-Time Processing**

Membahas perubahan cara transaksi diproses. Pada pendekatan tradisional, transaksi dapat dikumpulkan dan diproses secara berkala. Pada sistem modern, transaksi semakin memungkinkan untuk:

- dicatat segera;
- divalidasi secara otomatis;
- diproses dalam sistem terintegrasi;
- menghasilkan informasi dengan jeda waktu yang lebih pendek.

Konsep real-time processing diperkenalkan sebagai karakteristik penting akuntansi digital. Namun, perlu ditekankan bahwa real-time processing tidak berarti laporan keuangan selalu final secara real time, karena beberapa informasi tetap membutuhkan penyesuaian dan professional judgment.

**Perbandingan Siklus Akuntansi Tradisional dan Modern**

Perbandingan dapat dirangkum sebagai berikut:

| Aspek | Tradisional | Modern |
|---|---|---|
| Sumber data | Dokumen fisik/digital terpisah | Data digital terintegrasi |
| Pencatatan | Banyak dilakukan manual | Semakin otomatis |
| Integrasi | Terbatas | Tinggi |
| Pemrosesan | Periodik | Semakin real time |
| Pengendalian | Banyak bersifat setelah proses | Semakin preventif dan berkelanjutan |
| Rekonsiliasi | Periodik | Dapat dilakukan lebih sering |
| Pelaporan | Menunggu akhir periode | Informasi tersedia lebih cepat |
| Peran akuntan | Pencatatan dan pemeriksaan | Analisis, kontrol, assurance, dan judgment |

**Dampak Transformasi terhadap Peran Akuntan**

Transformasi siklus akuntansi menyebabkan perubahan orientasi pekerjaan akuntan. Akuntan tidak lagi hanya berfokus pada:

- input transaksi;
- posting;
- perhitungan manual;
- rekonsiliasi rutin.

Perhatian semakin diarahkan pada:

- kualitas data;
- pengendalian sistem;
- analisis informasi;
- evaluasi risiko;
- interpretasi laporan;
- professional judgment;
- pengambilan keputusan.

Temuan penelitian mengenai ERP menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan dampak transformatif terhadap fungsi dan profesi akuntansi. Oleh karena itu, transformasi teknologi perlu dipahami sebagai perubahan terhadap **pekerjaan dan kompetensi**, bukan sekadar perubahan perangkat lunak.

**Siklus Akuntansi Modern sebagai Ekosistem Data**

Pada tahap ini, siklus akuntansi dapat dipahami sebagai ekosistem:

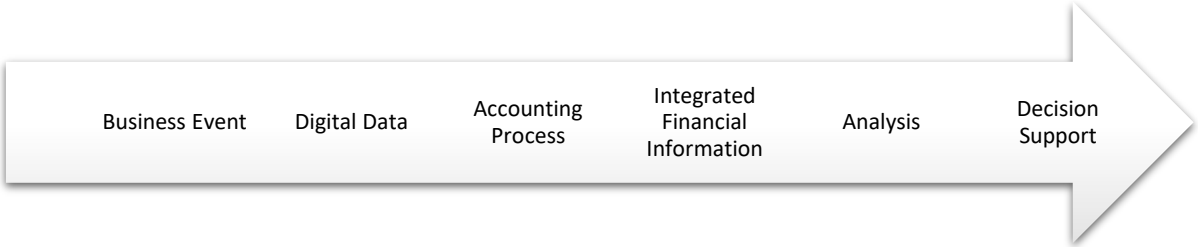


Konsep ini menjadi dasar pemahaman bahwa akuntansi modern tidak berdiri sendiri. Akuntansi terhubung dengan proses operasional, sistem informasi, teknologi, pengendalian internal, dan kebutuhan manajemen.

**Implikasi Transformasi Digital terhadap Siklus Akuntansi**

Transformasi digital memberikan beberapa implikasi:

1. **Kecepatan.** Informasi dapat diproses lebih cepat.
2. **Integrasi.** Data dari berbagai fungsi dapat terhubung.
3. **Otomatisasi.** Aktivitas rutin dapat dikurangi secara manual.
4. **Transparansi.** Aktivitas transaksi lebih mudah ditelusuri.
5. **Pengendalian.** Pengendalian dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber transaksi.
6. **Analitik.** Data akuntansi dapat dianalisis dengan lebih luas.
7. **Perubahan kompetensi**. Akuntan membutuhkan kemampuan teknologi dan analitik yang lebih kuat.

**Rekonstruksi Paradigma Siklus Akuntansi**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, paradigma siklus akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Paradigma Tradisional**

$$Record \rightarrow Post \rightarrow Adjust \rightarrow Report$$

berubah menuju:

**Paradigma Modern**

$$Capture \rightarrow Integrate \rightarrow Process \rightarrow Control \rightarrow Analyze \rightarrow Report$$

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan siklus akuntansi modern bukan hanya menghasilkan laporan keuangan, tetapi juga menyediakan informasi yang:

- cepat;
- akurat;
- relevan;
- terintegrasi;
- dapat ditelusuri;
- mendukung pengambilan keputusan.

## 4.2 DOKUMEN SUMBER DIGITAL DAN VALIDASI DATA

Hulu dari seluruh siklus akuntansi adalah dokumen sumber (*source documents*). Secara konvensional, dokumen ini berupa kertas fisik seperti faktur penjualan, kuitansi, nota debet, atau struk kas. Dalam akuntansi modern, kertas-kertas ini bermigrasi menjadi dokumen sumber digital (*e-documents*), seperti faktur pajak elektronik (*e-Faktur*), *electronic data interchange* (EDI), dan berkas format PDF terenkripsi.

Tantangan ilmiah terbesar di hulu siklus akuntansi modern bukan lagi bagaimana mengarsip dokumen tersebut agar tidak hilang, melainkan bagaimana memastikan validitas, otentisitas, dan integritas data sebelum masuk ke dalam basis data keuangan. Proses ini memanfaatkan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) yang dikombinasikan dengan algoritma kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). OCR mendeteksi karakter teks pada dokumen digital, mengekstrak data penting (seperti tanggal, nama vendor, nilai nominal, dan tarif pajak), lalu melakukan validasi silang (*cross-validation*) dengan pesanan pembelian (*Purchase Order*) dan laporan penerimaan barang (*Good Receipt Note*). Protokol penandingan tiga arah (*three-way matching*) ini kini berjalan secara otomatis demi mencegah terjadinya fraud akuntansi di tingkat paling dasar.

Kualitas informasi akuntansi sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang menjadi sumber pencatatannya. Kesalahan yang terjadi pada tahap awal dapat terbawa ke proses berikutnya dan pada akhirnya memengaruhi informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam siklus akuntansi tradisional, dokumen sumber umumnya berbentuk fisik dan menjadi dasar pencatatan transaksi. Digitalisasi mengubah kondisi tersebut. Transaksi modern dapat berasal dari berbagai sistem elektronik, seperti aplikasi penjualan, sistem pembelian, marketplace, perbankan digital, point of sale, dan sistem ERP.

Perubahan tersebut menyebabkan dokumen sumber tidak lagi hanya dipandang sebagai bukti transaksi, tetapi sebagai sumber data yang menjadi bagian dari aliran informasi akuntansi. Oleh karena itu, tahap awal siklus akuntansi modern perlu memberikan perhatian terhadap dua hal utama:

1. Bagaimana data transaksi diperoleh; dan
2. Bagaimana kualitas data tersebut divalidasi sebelum diproses lebih lanjut.

**Pengertian Dokumen Sumber**

Dokumen sumber adalah bukti atau rekaman yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan memproses suatu transaksi ekonomi. Dalam akuntansi tradisional, contoh dokumen sumber antara lain:

- faktur penjualan;
- faktur pembelian;
- kuitansi;
- nota;
- bukti penerimaan kas;
- bukti pengeluaran kas;
- surat jalan;
- purchase order;
- dokumen penggajian.

Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai:

- apa yang terjadi;
- kapan transaksi terjadi;
- siapa pihak yang terlibat;
- berapa nilai transaksi;
- jenis barang atau jasa;
- dasar transaksi;
- pihak yang memberikan persetujuan.

Dengan demikian, dokumen sumber memiliki fungsi sebagai *evidence of transaction* sekaligus dasar pengolahan informasi akuntansi.

**Perubahan dari Dokumen Fisik ke Dokumen Digital**

Digitalisasi mengubah bentuk dokumen sumber dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.

*Contohnya:*

| Tradisional | Digital |
|---|---|
| Faktur kertas | E-invoice |
| Kuitansi fisik | Bukti pembayaran elektronik |
| Purchase order manual | Digital purchase order |
| Surat jalan kertas | Electronic delivery document |
| Formulir persetujuan | Digital approval |
| Arsip fisik | Digital repository |

Perubahan tersebut memberikan beberapa keuntungan:

- mengurangi penggunaan kertas;
- mempercepat distribusi dokumen;
- memudahkan penyimpanan;
- mempermudah pencarian;

- mempercepat proses persetujuan;
- mendukung audit trail.

Namun, digitalisasi dokumen tidak otomatis menjamin kualitas data. Dokumen digital yang salah tetap menghasilkan data yang salah.

**Dokumen Sumber sebagai Titik Awal Data Akuntansi**

Dalam sistem modern, dokumen sumber dapat dipandang sebagai **entry point** informasi ke dalam sistem. Contohnya pada transaksi penjualan:

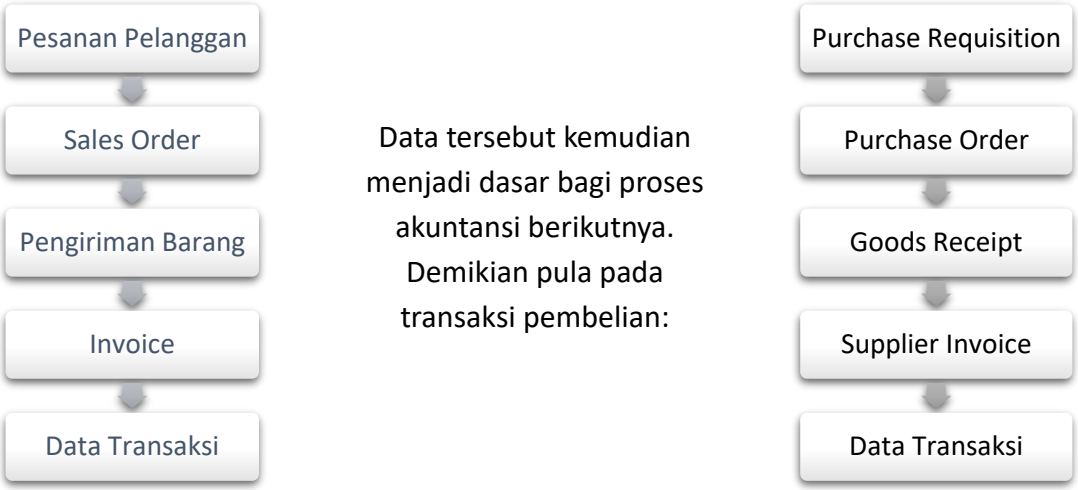


Dengan demikian, kualitas pencatatan akuntansi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia sejak awal.

**Karakteristik Dokumen Sumber Digital yang Berkualitas**

Dokumen sumber digital yang baik seharusnya memiliki karakteristik:

1. Lengkap. Informasi penting tersedia.
2. Akurat. Nilai dan informasi transaksi benar.
3. Valid. Transaksi benar-benar terjadi dan memiliki dasar yang sah.
4. Terotorisasi. Transaksi memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.
5. Dapat ditelusuri. Sumber dan riwayat transaksi dapat diketahui.
6. Tepat waktu. Data tersedia pada periode yang sesuai.
7. Konsisten. Data memiliki format dan struktur yang sesuai.

Karakteristik tersebut menjadi dasar sebelum data diproses lebih lanjut.

**Audit Trail pada Dokumen Digital**

Salah satu keunggulan lingkungan digital adalah kemampuan menciptakan **audit trail**. Audit trail merupakan jejak informasi yang memungkinkan organisasi menelusuri aktivitas yang terjadi terhadap suatu data atau transaksi. Audit trail dapat menunjukkan:

- siapa yang membuat transaksi;
- kapan transaksi dibuat;
- siapa yang mengubah data;
- kapan perubahan dilakukan;
- apa yang diubah;

- siapa yang menyetujui;
- status transaksi;
- dokumen yang menjadi sumber.

Sebagai contoh:

$\boldsymbol{User\ A}$

$\rightarrow\ membuat\ invoice$

$\boldsymbol{User\ B}$

$\rightarrow\ melakukan\ review$

$\boldsymbol{User\ C}$

$\rightarrow\ memberikan\ approval$

$\boldsymbol{System}$

$\rightarrow\ mencatat\ waktu\ dan\ aktivitas$

Dengan demikian, dokumen digital tidak hanya menjadi bukti transaksi, tetapi juga bagian dari mekanisme penelusuran dan pengendalian.

**Pengertian Validasi Data**

Setelah data diperoleh dari dokumen sumber, langkah penting berikutnya adalah validasi data. Validasi data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang masuk ke sistem memenuhi aturan, struktur, dan kondisi yang telah ditentukan. Tujuan validasi antara lain:

- mencegah data tidak lengkap;
- mengurangi kesalahan input;
- mencegah transaksi tidak sah;
- menjaga konsistensi data;
- memastikan transaksi sesuai aturan;
- meningkatkan kualitas informasi.

Secara sederhana:

$$Dokumen\ sumber\ \rightarrow\ Data\ \rightarrow\ Validasi\ \rightarrow\ Data\ layak\ diproses$$

Validasi menjadi penting karena kesalahan pada tahap awal dapat menyebar ke proses akuntansi berikutnya.

**Jenis-Jenis Validasi Data**

Validasi data dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan.

1. Validasi Format

   Memastikan data mengikuti format yang ditentukan.

   *Contoh:*

   Tanggal harus menggunakan format:

   **DD-MM-YYYY**

2. Validasi Kelengkapan

   Memastikan field yang wajib telah diisi.

*Contoh:*

Invoice tidak dapat diproses apabila nomor pelanggan kosong.

3. **Validasi Nilai**

   Memastikan nilai berada dalam batas yang diperbolehkan.

   Contoh:

   Jumlah barang tidak boleh bernilai negatif.

4. **Validasi Referensi**

   Memastikan data merujuk pada data master yang valid.

   *Contoh:*

   Kode vendor harus terdapat dalam daftar vendor aktif.

5. **Validasi Duplikasi**

   Memastikan transaksi yang sama tidak dicatat lebih dari satu kali.

   *Contoh:*

   Invoice dengan nomor yang sama tidak boleh diproses dua kali.

6. **Validasi Otorisasi**

   Memastikan transaksi diproses oleh pengguna yang memiliki kewenangan.

**Validasi Transaksi Penjualan**

Sebagai ilustrasi, perusahaan menerima transaksi penjualan sebesar Rp50 juta. Sistem dapat melakukan pemeriksaan:

- apakah pelanggan terdaftar;
- apakah produk tersedia;
- apakah harga sesuai;
- apakah jumlah barang valid;
- apakah transaksi telah disetujui;
- apakah nomor invoice unik;
- apakah tanggal transaksi sesuai.

Jika seluruh pemeriksaan terpenuhi, transaksi dapat diteruskan ke proses berikutnya. Dengan demikian:

$$\text{Input} \rightarrow \text{Validation} \rightarrow \text{Accepted / Rejected}$$

Transaksi yang tidak memenuhi aturan dapat ditempatkan sebagai ***exception*** untuk diperiksa lebih lanjut.

**Validasi Transaksi Pembelian**

Dalam transaksi pembelian, validasi dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa dokumen. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah ***three-way matching***. Dokumen yang dibandingkan:

1. *Purchase Order;*
2. *Goods Receipt;*
3. *Supplier Invoice.*

Hubungannya:

| | |
|---|---|
| **Purchase Order** | Apa yang dipesan? |
| **Goods Receipt** | Apa yang benar-benar diterima? |
| **Supplier Invoice** | Apa yang ditagihkan? |

Apabila ketiganya sesuai, transaksi dapat diproses. Jika ditemukan perbedaan, transaksi menjadi exception.

*Contohnya:*

PO: 100 unit

Goods Receipt: 100 unit

Invoice: 100 unit

→ ***Match***

*Sedangkan:*

PO: 100 unit

Goods Receipt: 80 unit

Invoice: 100 unit

→ ***Exception***

Pendekatan ini membantu mengurangi risiko pembayaran yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diterima.

**Master Data sebagai Dasar Validasi**

Validasi transaksi sangat bergantung pada kualitas ***master data***. Master data dapat mencakup:

- pelanggan;
- pemasok;
- produk;
- rekening;
- pusat biaya;
- aset;
- karyawan;
- chart of accounts.

Contohnya, apabila kode vendor salah dalam master data, transaksi pembelian dapat diarahkan ke pihak yang salah.

Karena itu: *Kualitas transaksi sangat dipengaruhi oleh kualitas master data.*

Pengelolaan master data perlu mencakup:

- pembuatan;
- perubahan;
- verifikasi;
- persetujuan;
- pemutakhiran;
- penghapusan atau penonaktifan.

**Validasi Otomatis dan Pemeriksaan Manusia**

Tidak seluruh proses validasi harus dilakukan secara manual. Sistem dapat melakukan pemeriksaan otomatis terhadap aturan yang bersifat rutin.

*Contohnya:*

- format tanggal;
- kelengkapan field;
- duplikasi invoice;
- batas nilai;
- kode pelanggan;
- kode vendor.

Namun, beberapa kondisi membutuhkan pemeriksaan manusia.

*Misalnya:*

- transaksi tidak biasa;
- transaksi bernilai sangat besar;
- transaksi pihak berelasi;
- transaksi yang tidak sesuai pola historis;
- perubahan data yang sensitif.

Dengan demikian, model yang lebih tepat adalah:

$$\text{Automated Validation} + \text{Human Review}$$

bukan:

$$\text{Automated Validation Only}$$

**Exception-Based Processing**

Dalam lingkungan digital, tidak semua transaksi perlu mendapatkan tingkat pemeriksaan manusia yang sama. Transaksi normal dapat diproses secara otomatis, sedangkan transaksi yang menyimpang diarahkan untuk pemeriksaan.

*Contohnya:*

$$\begin{gathered}10.000 \text{ transaksi} \\ \downarrow \\ 9.800 \text{ normal} \\ \downarrow \\ 200 \text{ exception}\end{gathered}$$

Akuntan dapat memusatkan perhatian pada 200 transaksi tersebut. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi karena tenaga manusia digunakan pada transaksi yang membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Konsep exception-based processing akan menjadi dasar penting untuk pembahasan otomatisasi dan analitik pada subbab berikutnya.

**Pengendalian pada Tahap Sumber Data**

Validasi data juga merupakan bagian dari pengendalian internal. Pengendalian dapat diterapkan sebelum transaksi diproses.

*Contohnya:*

- mandatory field;
- approval;
- authorization;
- duplicate check;
- validation rule;
- access restriction.

Dengan demikian, pengendalian tidak hanya dilakukan setelah kesalahan terjadi, tetapi dapat diterapkan sejak sumber transaksi. Hal ini dapat digambarkan:

$$Preventive\ Control \rightarrow Transaction \rightarrow Validation \rightarrow Processing$$

Pendekatan tersebut membantu mengurangi kemungkinan kesalahan masuk ke tahap akuntansi berikutnya.

**Segregation of Duties dalam Pengelolaan Data**

Dalam sistem digital, pemisahan tugas tetap penting. *Contoh sederhana:*

| Aktivitas | Pengguna |
|---|---|
| Membuat vendor | User A |
| Memproses PO | User B |
| Menerima barang | User C |
| Memproses invoice | User D |
| Menyetujui pembayaran | User E |

Tujuannya adalah mengurangi risiko satu pengguna memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses transaksi. Dengan demikian, digitalisasi tidak menghilangkan prinsip segregation of duties, tetapi mengimplementasikannya melalui hak akses dan workflow sistem.

**Digital Approval Workflow**

Dokumen digital dapat diintegrasikan dengan workflow persetujuan.

*Contoh:*




Setiap tahap dapat memiliki:

- pengguna tertentu;
- batas kewenangan;
- waktu penyelesaian;
- status;
- bukti persetujuan.

Workflow tersebut membantu memastikan bahwa transaksi tidak diproses tanpa otorisasi yang sesuai.

**Risiko Kesalahan pada Tahap Data**

Walaupun menggunakan sistem digital, kesalahan tetap dapat terjadi. Beberapa sumber kesalahan antara lain:

- input yang salah;
- master data tidak akurat;
- duplikasi transaksi;
- konfigurasi sistem yang salah;
- integrasi sistem gagal;
- akses tidak sah;
- dokumen pendukung tidak lengkap.

Hal yang penting dipahami adalah:

*Digitalisasi mengurangi jenis kesalahan tertentu, tetapi tidak menghilangkan risiko kesalahan.*

Bahkan, kesalahan dalam sistem dapat berdampak luas apabila diterapkan secara otomatis terhadap banyak transaksi.

**Data Quality dan Dampaknya terhadap Informasi Keuangan**

Hubungan antara kualitas data dan laporan keuangan dapat digambarkan:

Data Sumber
↓
Data Validation
↓
Accounting Processing
↓
Financial Information

Apabila data awal salah, maka proses berikutnya dapat menghasilkan informasi yang salah.

*Contohnya:*

Harga produk seharusnya Rp100.000, tetapi master data mencatat Rp10.000.

Jika transaksi diproses otomatis sebanyak 10.000 kali, kesalahan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, pengendalian terhadap data sumber merupakan bagian penting dari kualitas informasi keuangan.

**Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan Dokumen Digital**

Berbagai teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan dokumen sumber. Antara lain:

- *Electronic Document Management;*
- *Enterprise Resource Planning;*
- *cloud storage;*
- *electronic invoicing;*
- *workflow management;*
- *Optical Character Recognition (OCR);*
- *Intelligent Document Processing (IDP).*

OCR, misalnya, dapat digunakan untuk membaca informasi dari dokumen seperti invoice dan mengubahnya menjadi data yang dapat diproses sistem. Namun, hasil ekstraksi tetap perlu melalui validasi karena teknologi pengenalan dokumen dapat menghasilkan kesalahan.

**Artificial Intelligence dalam Validasi Data**

AI dapat digunakan sebagai teknologi pendukung validasi.

*Contohnya:*

- mendeteksi invoice duplikat;
- menemukan pola transaksi tidak normal;
- mengidentifikasi ketidaksesuaian;
- melakukan klasifikasi dokumen;
- membantu matching;
- memberikan prioritas terhadap exception.

Alur sederhananya:

$$Dokumen \rightarrow Data\ Extraction \rightarrow Validation \rightarrow AI\ Analysis \rightarrow Exception \rightarrow Human\ Review$$

AI dengan demikian lebih tepat digunakan sebagai alat bantu pengawasan dan penyaringan, bukan sebagai pengganti seluruh proses pengendalian. Pembahasan AI secara lebih luas akan ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan otomatisasi dan analitik pada subbab berikutnya.

**Prinsip "Trust but Verify"**

Sistem digital dapat dipercaya untuk menjalankan aturan yang telah dikonfigurasi, tetapi hasilnya tetap perlu diawasi. Prinsip yang dapat digunakan adalah:

**Trust but Verify.**

*Artinya:*

- gunakan otomatisasi untuk pekerjaan rutin;
- gunakan sistem untuk validasi;
- gunakan workflow untuk pengendalian;
- tetapi tetap lakukan monitoring dan review.

Prinsip ini penting karena sistem hanya menjalankan aturan dan data yang tersedia. Apabila aturan atau data salah, otomatisasi dapat memperbesar dampak kesalahan.

**Implikasi bagi Akuntan**

Perubahan dari dokumen fisik menuju dokumen digital mengubah kompetensi yang dibutuhkan akuntan. Akuntan tidak cukup hanya memahami:

- jurnal;
- akun;
- debit;
- kredit.

Akuntan juga perlu memahami:

- aliran data;
- dokumen elektronik;

- master data;
- validation rules;
- workflow;
- access control;
- audit trail;
- kualitas data.

Dengan demikian, akuntan perlu mampu memahami bagaimana data transaksi terbentuk sebelum akhirnya menjadi informasi keuangan.

## 4.3 OTOMATISASI JURNAL DAN POSTING BUKU BESAR

Pada sistem akuntansi tradisional, pencatatan transaksi merupakan salah satu aktivitas yang membutuhkan banyak pekerjaan manual. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi, menentukan akun yang digunakan, menghitung nilai yang harus dicatat, membuat jurnal, dan selanjutnya melakukan posting ke buku besar. Digitalisasi mengubah pola tersebut. Setelah data transaksi tersedia dan memenuhi persyaratan validasi, sistem dapat menjalankan sejumlah aturan akuntansi secara otomatis. Transaksi tertentu dapat menghasilkan jurnal secara langsung berdasarkan konfigurasi akun, jenis transaksi, nilai transaksi, dan aturan bisnis yang telah ditetapkan.

Perubahan ini tidak berarti bahwa fungsi akuntan menjadi tidak diperlukan. Sebaliknya, fokus pekerjaan akuntan bergeser dari memasukkan transaksi secara manual menuju memastikan bahwa logika, konfigurasi, dan hasil pemrosesan akuntansi berjalan dengan benar. Dengan demikian, inti otomatisasi jurnal bukan sekadar mempercepat pencatatan, tetapi mengubah cara proses akuntansi dilaksanakan.

**Dari Jurnal Manual menuju Jurnal Otomatis**

Dalam sistem tradisional, alur pencatatan dapat digambarkan sebagai:

$$Transaksi \rightarrow Analisis\ Akuntan \rightarrow Jurnal \rightarrow Posting \rightarrow Buku\ Besar$$

Akuntan memiliki peran besar dalam menentukan:

- akun debit;
- akun kredit;
- nilai transaksi;
- tanggal pencatatan;
- keterangan transaksi.

Dalam sistem digital terintegrasi, alurnya dapat berubah menjadi:

$$Transaksi\ Valid \rightarrow Accounting\ Rules \rightarrow Account\ Determination \rightarrow Jurnal \rightarrow Posting \rightarrow General\ Ledger$$

Perbedaan utama terletak pada siapa atau apa yang menjalankan proses pencatatan. Pada sistem tradisional, sebagian besar proses dilakukan oleh manusia. Pada sistem modern, pekerjaan rutin dapat dilakukan oleh sistem berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

**Konsep Otomatisasi Jurnal**

Otomatisasi jurnal adalah proses menghasilkan pencatatan akuntansi secara otomatis berdasarkan transaksi dan aturan akuntansi yang telah dikonfigurasi dalam sistem. Sebagai contoh, perusahaan melakukan penjualan tunai sebesar Rp 10.000.000.

Sistem dapat menghasilkan:

$$Debit\ Kas = \text{Rp.}\ \ 10.000.000$$
$$Kredit\ Pendapatan = \ \text{Rp.}\ \ 10.000.000$$

Akuntan tidak harus mengetik jurnal tersebut satu per satu apabila sistem telah mengetahui:

- jenis transaksi;
- metode pembayaran;
- akun pendapatan;
- akun kas;
- tanggal transaksi;
- aturan pencatatan yang berlaku.

Dengan demikian, sistem melakukan pekerjaan klerikal yang sebelumnya dilakukan secara manual.

**Prinsip Dasar Otomatisasi Jurnal**

Otomatisasi jurnal pada dasarnya bergantung pada hubungan antara empat komponen:

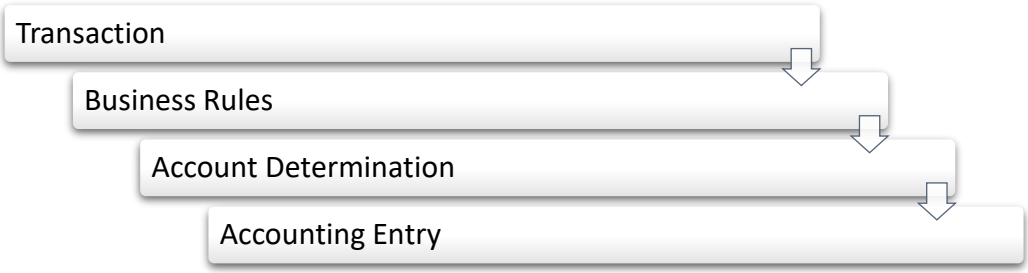


- Transaction menyediakan informasi mengenai kejadian ekonomi.
- Business rules menentukan bagaimana transaksi diperlakukan.
- Account determination menentukan akun yang digunakan.
- Accounting entry menghasilkan jurnal yang kemudian dapat diposting ke buku besar.

Apabila salah satu komponen tersebut tidak tepat, jurnal yang dihasilkan sistem juga berpotensi salah.

**Account Determination**

Salah satu komponen penting dalam otomatisasi jurnal adalah **account determination**, yaitu proses menentukan akun-akun yang harus digunakan berdasarkan karakteristik transaksi. Contohnya, sistem dapat menggunakan informasi:

- jenis produk;
- kelompok pelanggan;
- jenis transaksi;

- lokasi;
- metode pembayaran;
- pusat biaya;
- kode pajak;
- jenis aset.

Sebagai ilustrasi:

**Penjualan Produk A**

→ Product Group A

→ Revenue Account 410001

→ Tax Account 220001

→ Customer Receivable 130001

Sistem kemudian membentuk jurnal berdasarkan pemetaan tersebut. Karena itu, otomatisasi jurnal sangat bergantung pada ketepatan aturan pemetaan akun.

**Otomatisasi Jurnal Berdasarkan Jenis Transaksi**

Tidak semua transaksi menghasilkan pola jurnal yang sama. Sistem dapat dikonfigurasi berdasarkan karakteristik masing-masing transaksi.

Contohnya:

- Penjualan Kredit
- Debit Piutang Usaha
- Kredit Pendapatan
- Penerimaan Piutang
- Debit Kas
- Kredit Piutang Usaha
- Pembelian Kredit
- Debit Persediaan/Beban
- Kredit Utang Usaha
- Pembayaran Utang
- Debit Utang Usaha
- Kredit Kas

Dengan aturan yang tepat, transaksi yang berulang tidak perlu dibuat jurnal secara manual satu per satu.

**Subledger dan General Ledger**

Dalam sistem akuntansi modern, pencatatan tidak selalu dimulai dari General Ledger secara langsung. Transaksi dapat terlebih dahulu diproses dalam **subledger**, seperti:

- Accounts Receivable;
- Accounts Payable;
- Inventory;
- Fixed Assets;
- Payroll;
- Cash Management.

Informasi dari subledger kemudian berhubungan dengan General Ledger.

Secara konseptual:

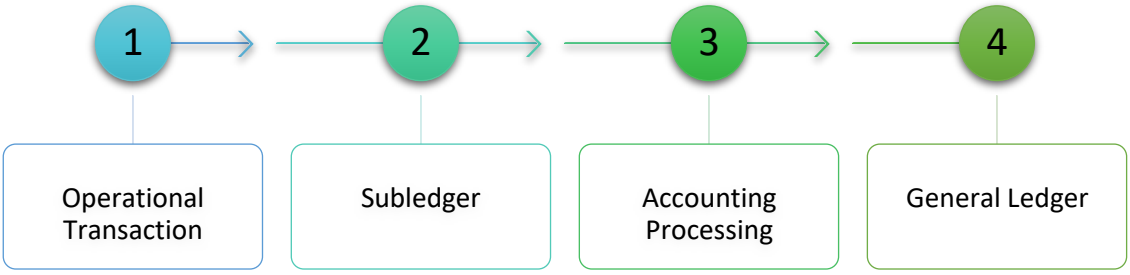


Pendekatan tersebut memungkinkan transaksi operasional diproses dalam modul yang sesuai sebelum informasi keuangannya menjadi bagian dari buku besar.

**Otomatisasi pada Accounts Receivable**

Accounts Receivable atau piutang usaha merupakan salah satu area yang dapat memperoleh manfaat besar dari otomatisasi. Contohnya, ketika perusahaan menerbitkan invoice kepada pelanggan:

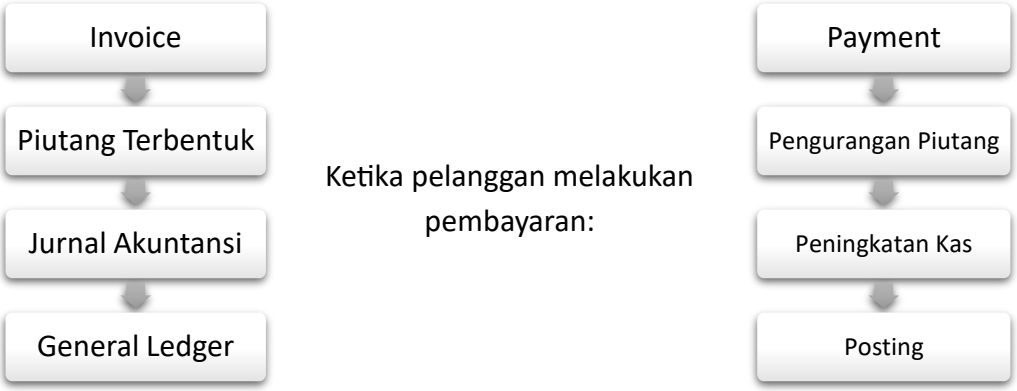


Dengan demikian, perubahan saldo piutang dan kas dapat mengikuti transaksi yang terjadi tanpa memerlukan pencatatan manual untuk setiap kejadian.

**Otomatisasi pada Accounts Payable**

Pada sisi utang usaha, sistem dapat menghasilkan pencatatan berdasarkan transaksi pembelian yang telah memenuhi ketentuan pemrosesan. Secara konseptual:

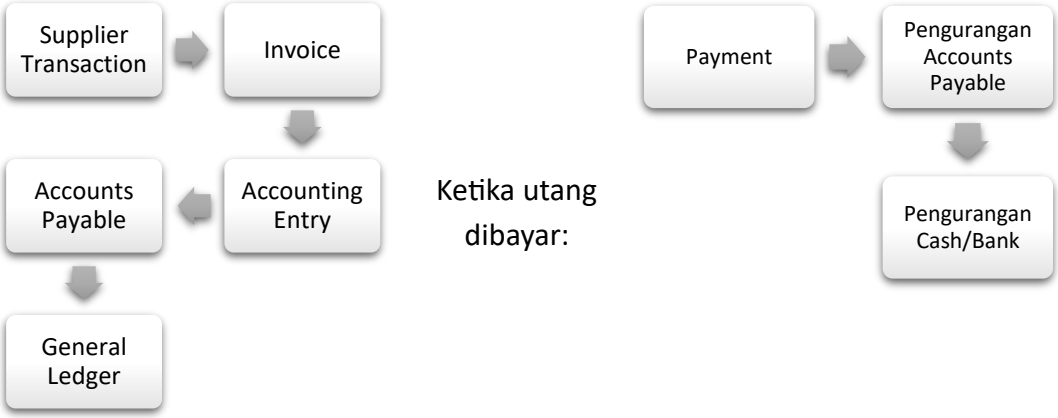


Proses tersebut mengurangi kebutuhan untuk membuat jurnal pembayaran secara manual.

**Otomatisasi Jurnal Akrual dan Penangguhan**

Selain transaksi rutin, sistem dapat membantu menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan accrual dan deferral. Contohnya, perusahaan memiliki biaya listrik yang telah digunakan tetapi tagihan belum diterima pada akhir periode.

Sistem dapat membantu mencatat:

$$Debit\ Beban\ Listrik$$
$$Kredit\ Utang/Beban\ Akrual$$

Ketika tagihan aktual diterima, saldo dapat disesuaikan sesuai kondisi transaksi. Namun, nilai akrual tertentu membutuhkan estimasi. Oleh karena itu, otomatisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pertimbangan akuntan.

**Recurring Journal**

Perusahaan sering memiliki transaksi yang berulang dengan pola yang relatif sama.

Contohnya:

- sewa;
- langganan;
- biaya jasa;
- amortisasi tertentu;
- biaya administrasi;
- biaya periodik lainnya.

Untuk transaksi semacam itu, sistem dapat menggunakan **recurring journal**.

Contoh:

Beban langganan bulanan:

$$Debit\ Beban\ Rp5.000.000$$
$$Kredit\ Utang/Kas\ Rp5.000.000$$

Jika transaksi berlangsung dengan pola yang sama setiap bulan, sistem dapat menghasilkan jurnal berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Pengendalian tetap diperlukan untuk memastikan transaksi tersebut masih berlaku dan nilainya masih sesuai.

**Otomatisasi Penyusutan Aset Tetap**

Aset tetap merupakan salah satu area yang dapat memanfaatkan otomatisasi. Setelah aset:

- diakui;
- dikapitalisasi;
- memiliki nilai yang tepat;
- memiliki umur manfaat;
- memiliki metode penyusutan;

sistem dapat menghitung dan mencatat penyusutan secara periodik.

Contoh jurnal:

$$Debit\ Beban\ Penyusutan$$
$$Kredit\ Akumulasi\ Penyusutan$$

Keuntungan utamanya adalah mengurangi perhitungan manual dan menjaga konsistensi pencatatan periodik.

Namun, penentuan umur manfaat, metode penyusutan, nilai residu, dan perubahan kondisi aset tetap dapat memerlukan pertimbangan profesional.

**Otomatisasi Jurnal Pajak**

Sistem akuntansi juga dapat membantu proses pencatatan pajak berdasarkan transaksi yang telah dikonfigurasi. Contohnya, transaksi tertentu dapat dikaitkan dengan:

- kode pajak;
- jenis pajak;
- tarif;
- akun pajak;
- dasar pengenaan.

Sistem kemudian dapat menghasilkan informasi pencatatan yang sesuai dengan konfigurasi. Namun, perubahan peraturan perpajakan dapat menyebabkan konfigurasi sistem perlu diperbarui. Karena itu, otomatisasi membutuhkan pemeliharaan dan pengawasan berkelanjutan.

**Posting ke General Ledger**

Setelah jurnal terbentuk, tahap berikutnya adalah **posting ke General Ledger (GL)**. General Ledger merupakan kumpulan akun yang menjadi dasar utama penyusunan informasi keuangan. Secara sederhana:

Jurnal
↓
Posting
↓
General Ledger
↓
Saldo Akun
↓
Laporan Keuangan

Dalam sistem digital, posting dapat dilakukan secara otomatis setelah transaksi memenuhi kondisi yang ditetapkan.

**General Ledger sebagai Pusat Informasi Keuangan**

General Ledger memiliki posisi penting karena berbagai transaksi pada akhirnya memberikan dampak terhadap saldo akun yang terdapat di dalamnya.

*Contohnya:*

$$Penjualan \rightarrow Pendapatan$$
$$Pembelian \rightarrow Persediaan/Beban\ dan\ Utang$$
$$Pembayaran \rightarrow Kas\ dan\ Utang$$
$$Payroll \rightarrow Beban\ dan\ Liabilitas$$
$$Penyusutan \rightarrow Beban\ dan\ Akumulasi\ Penyusutan$$

Dengan demikian, General Ledger menjadi titik penting dalam mengonsolidasikan dampak keuangan dari berbagai aktivitas bisnis. Namun, pembahasan mengenai pemeriksaan saldo dan penyesuaian akan ditempatkan pada Subbab 4.4.

**Integrasi Subledger dan General Ledger**

Integrasi antara subledger dan General Ledger memungkinkan informasi transaksi mengalir dari aktivitas operasional menuju informasi keuangan.

*Contoh:*

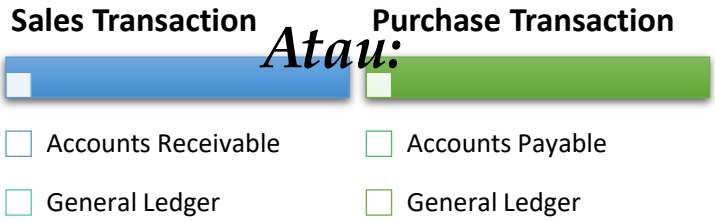


Integrasi tersebut mengurangi kebutuhan untuk memasukkan data yang sama berulang kali. Hal ini merupakan salah satu karakteristik penting sistem akuntansi modern.

**Otomatisasi dan Pengurangan Pekerjaan Klerikal**

Otomatisasi terutama memberikan dampak terhadap pekerjaan yang:

- berulang;
- memiliki aturan yang jelas;
- memiliki volume tinggi;
- membutuhkan perhitungan rutin;
- menggunakan pola transaksi yang relatif konsisten.

Contohnya:

| Aktivitas | Manual | Otomatis |
|---|---|---|
| Input jurnal rutin | Tinggi | Rendah |
| Posting | Manual | Sistem |
| Perhitungan penyusutan | Manual | Sistem |
| Recurring journal | Manual | Sistem |
| Pencatatan transaksi berulang | Manual | Sistem |
| Review transaksi tidak biasa | Manual | Tetap membutuhkan manusia |

Dengan demikian, otomatisasi tidak menghilangkan pekerjaan akuntansi, tetapi mengurangi proporsi pekerjaan yang bersifat klerikal.

**Perubahan Peran Akuntan**

Perubahan tersebut berdampak langsung pada profesi akuntansi. Akuntan tidak lagi hanya bertugas:

"***Membuat jurnal.***"

Akuntan semakin berperan dalam:

- memahami aturan akuntansi;
- mengevaluasi konfigurasi sistem;
- memeriksa hasil otomatisasi;
- menganalisis transaksi;
- menangani transaksi kompleks;
- mengevaluasi risiko;
- melakukan judgment;

- mengawasi pengendalian;
- memastikan kepatuhan.

Penelitian mengenai ERP menunjukkan bahwa penerapan sistem terintegrasi dapat mengubah pekerjaan dan peran akuntan. Karena pekerjaan rutin dapat semakin terotomatisasi, perhatian akuntan dapat bergeser menuju aktivitas yang memberikan nilai tambah.

**Jurnal Manual dalam Lingkungan Digital**

Meskipun otomatisasi semakin berkembang, **jurnal manual tidak sepenuhnya hilang**. Jurnal manual masih dapat diperlukan untuk transaksi tertentu, seperti:

- penyesuaian;
- estimasi;
- koreksi;
- transaksi tidak rutin;
- transaksi kompleks;
- kejadian yang membutuhkan judgment.

Namun, jurnal manual dalam sistem digital sebaiknya memiliki pengendalian yang lebih kuat. Misalnya:

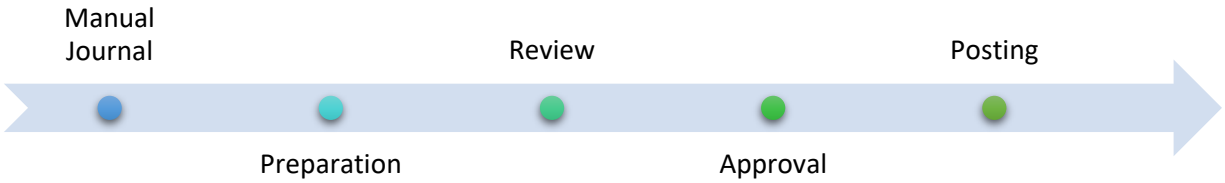


Pendekatan tersebut membantu mengurangi risiko jurnal manual yang tidak sah atau tidak didukung bukti memadai.

**Pengendalian terhadap Jurnal Otomatis**

Otomatisasi tidak berarti pengendalian menjadi tidak diperlukan. Pengendalian perlu diarahkan pada:

1. konfigurasi sistem;
2. account mapping;
3. akses pengguna;
4. perubahan aturan;
5. jurnal yang dihasilkan;
6. transaksi yang gagal diproses;
7. jurnal manual;
8. perubahan master dan parameter yang memengaruhi pencatatan.

Dengan demikian, pengendalian bergeser dari:

*"Apakah akuntan memasukkan jurnal dengan benar?"*

menjadi:

*"Apakah sistem menghasilkan jurnal berdasarkan aturan yang benar?"*

Perubahan pertanyaan tersebut menunjukkan perubahan paradigma pengendalian dalam lingkungan digital.

**Risiko Otomatisasi Jurnal**

Otomatisasi memiliki manfaat besar, tetapi juga menciptakan risiko. Beberapa risiko utama adalah:

- konfigurasi akun salah;
- mapping akun tidak tepat;
- parameter tidak diperbarui;
- transaksi salah klasifikasi;
- sistem menghasilkan jurnal secara massal;
- perubahan sistem tidak terdokumentasi;
- akses pengguna terlalu luas.

Salah satu risiko penting adalah **automation of error**. Jika aturan yang salah diterapkan pada satu transaksi, dampaknya mungkin kecil. Namun, jika aturan tersebut digunakan pada 100.000 transaksi, kesalahan dapat menjadi sangat besar.

Oleh karena itu:

*Otomatisasi dapat mempercepat proses yang benar, tetapi juga dapat mempercepat proses yang salah.*

**Audit Trail pada Jurnal**

Lingkungan digital memungkinkan sistem menyimpan informasi mengenai proses pembentukan jurnal. Audit trail dapat membantu menjawab:

- transaksi apa yang menghasilkan jurnal;
- kapan jurnal dibuat;
- akun apa yang digunakan;
- siapa yang melakukan perubahan;
- aturan apa yang digunakan;
- kapan jurnal diposting;
- apakah jurnal berasal dari proses otomatis atau manual.

Informasi tersebut penting bagi proses pengawasan dan pemeriksaan. Namun, audit trail bukan berarti setiap transaksi otomatis benar. Audit trail membantu **menelusuri proses**, sedangkan penilaian atas kewajaran dan ketepatan transaksi tetap membutuhkan pemeriksaan.

**Full-Population Analysis pada General Ledger**

Lingkungan digital menghasilkan volume data yang besar sehingga pemeriksaan terhadap General Ledger tidak selalu harus bergantung pada sampel kecil. Pendekatan **full-population analysis** memungkinkan data transaksi dianalisis secara lebih menyeluruh.

Sebagai contoh, sistem dapat mencari:

- jurnal bernilai ekstrem;
- jurnal di luar jam normal;

- jurnal pada akhir periode;
- jurnal manual;
- jurnal dengan pola tidak biasa;
- transaksi dengan pengguna tertentu;
- transaksi yang memiliki karakteristik risiko tertentu.

Penelitian mengenai multidimensional audit data sampling menunjukkan bahwa analisis data General Ledger dapat membantu mengidentifikasi posting yang memiliki risiko lebih tinggi dalam populasi data yang besar. Pendekatan ini memperluas fungsi data akuntansi dari sekadar **record keeping** menjadi sumber informasi untuk pengawasan dan assurance.

**Artificial Intelligence sebagai Pendukung Otomatisasi**

AI dapat digunakan untuk mendukung proses jurnal dan General Ledger, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan identifikasi pola.

Contohnya:

- mendeteksi jurnal tidak biasa;
- mengidentifikasi transaksi berisiko;
- memberikan rekomendasi klasifikasi;
- memprediksi transaksi yang membutuhkan review;
- menemukan pola yang berbeda dari periode sebelumnya.

Alurnya dapat digambarkan:

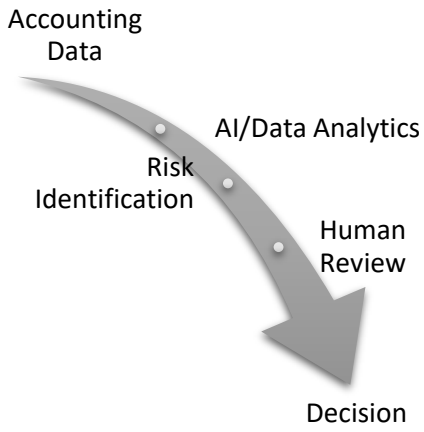


AI dalam konteks ini sebaiknya dipandang sebagai **alat bantu pengambilan keputusan**, bukan sebagai pengganti akuntan.

**Otomatisasi dan Professional Judgment**

Tidak semua transaksi dapat direduksi menjadi aturan sederhana. Beberapa transaksi membutuhkan pertimbangan mengenai:

- substansi ekonomi;
- estimasi;
- ketidakpastian;
- klasifikasi;
- kontrak;
- kondisi khusus;

- penerapan standar akuntansi.

Karena itu, terdapat batas antara:

$$Rule - Based\ Accounting$$

dan

$$Judgment - Based\ Accounting$$

Sistem sangat efektif untuk transaksi yang dapat didefinisikan melalui aturan. Sebaliknya, transaksi yang kompleks tetap membutuhkan keterlibatan manusia.

**Prinsip "Automate the Routine, Review the Exceptional"**

Salah satu prinsip yang dapat digunakan dalam lingkungan akuntansi modern adalah:

$$Automate\ the\ Routine, Review\ the\ Exceptional.$$

Artinya:

- $transaksi\ rutin \rightarrow otomatisasi;$
- $transaksi\ berulang \rightarrow otomatisasi;$
- $transaksi\ berbasis\ aturan \rightarrow otomatisasi;$
- $transaksi\ tidak\ biasa \rightarrow review;$
- $transaksi\ kompleks \rightarrow professional\ judgment;$
- $transaksi\ berisiko\ tinggi \rightarrow pengawasan\ lebih\ lanjut.$

Prinsip ini membantu menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab profesional akuntan.

**Implikasi terhadap Sistem Pengendalian**

Otomatisasi jurnal menyebabkan pengendalian internal mengalami perubahan fokus. Dalam sistem tradisional:




Dalam sistem modern:




Artinya, pengendalian tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir, tetapi juga terhadap logika yang menghasilkan hasil tersebut. Area yang perlu diperhatikan meliputi:

- konfigurasi;
- akses;
- perubahan sistem;
- mapping akun;
- interface;
- parameter;
- log aktivitas.

## 4.4 PENGENDALIAN VALIDITAS DATA NERACA SALDO

Setelah transaksi diproses dan diposting ke General Ledger, tahap berikutnya dalam siklus akuntansi adalah memastikan bahwa saldo akun dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Salah satu instrumen penting pada tahap ini adalah **neraca saldo (trial balance)**. Neraca saldo merupakan daftar saldo akun yang terdapat dalam buku besar pada suatu tanggal tertentu. Dalam sistem pembukuan berpasangan, jumlah saldo debit dan kredit secara prinsip harus sama. Namun, kondisi bahwa:

$$Total\ debit\ =\ total\ kredit$$

belum berarti seluruh pencatatan akuntansi sudah benar. Kesalahan tertentu tetap dapat terjadi meskipun neraca saldo berada dalam kondisi seimbang. Misalnya, transaksi tidak dicatat, transaksi dicatat pada akun yang salah, transaksi dicatat pada periode yang salah, atau nilai transaksi salah tetapi tetap menghasilkan jumlah debit dan kredit yang sama.

Oleh karena itu, neraca saldo bukan sekadar alat untuk memeriksa keseimbangan matematis, tetapi juga merupakan titik pengendalian penting sebelum laporan keuangan disusun. Dalam lingkungan akuntansi modern, pemeriksaan neraca saldo semakin diarahkan pada pertanyaan yang lebih luas:

*Apakah saldo akun tidak hanya seimbang, tetapi juga lengkap, tepat, wajar, dan sesuai dengan periode pelaporan?*

### Pengertian Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar seluruh akun buku besar beserta saldo debit atau kreditnya pada tanggal tertentu. Contoh sederhana:

| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas | Rp. 50.000.000 | - |
| Piutang Usaha | Rp. 30.000.000 | - |
| Persediaan | Rp. 40.000.000 | - |
| Peralatan | Rp. 80.000.000 | - |
| Utang Usaha | - | Rp. 45.000.000 |
| Modal | - | Rp. 100.000.000 |
| Pendapatan | - | Rp. 35.000.000 |
| Beban | Rp. 20.000.000 | - |
| Total | Rp. 220.000.000 | Rp180.000.000 |

Contoh di atas belum seimbang sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut. Dalam praktik, neraca saldo disusun berdasarkan saldo akun setelah seluruh transaksi yang telah diproses sampai tanggal tertentu masuk ke buku besar.

### Fungsi Neraca Saldo dalam Siklus Akuntansi

Neraca saldo memiliki beberapa fungsi utama.

1. Memeriksa keseimbangan debit dan kredit. Fungsi paling dasar adalah memastikan bahwa jumlah debit dan kredit berada dalam kondisi seimbang.
2. Menyediakan ringkasan saldo akun. Neraca saldo memberikan gambaran mengenai posisi saldo setiap akun tanpa harus membaca seluruh transaksi satu per satu.
3. Menjadi dasar proses penyesuaian. Akuntan dapat menggunakan neraca saldo sebagai titik awal untuk menentukan akun yang membutuhkan penyesuaian.
4. Menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Setelah dilakukan penyesuaian, saldo akun dapat digunakan untuk proses penyusunan laporan keuangan.

Dengan demikian, neraca saldo menjadi penghubung antara General Ledger dan laporan keuangan.

**Neraca Saldo sebagai Control Point**

Dalam siklus akuntansi, neraca saldo dapat dipandang sebagai salah satu **control point**. Alur sederhananya:

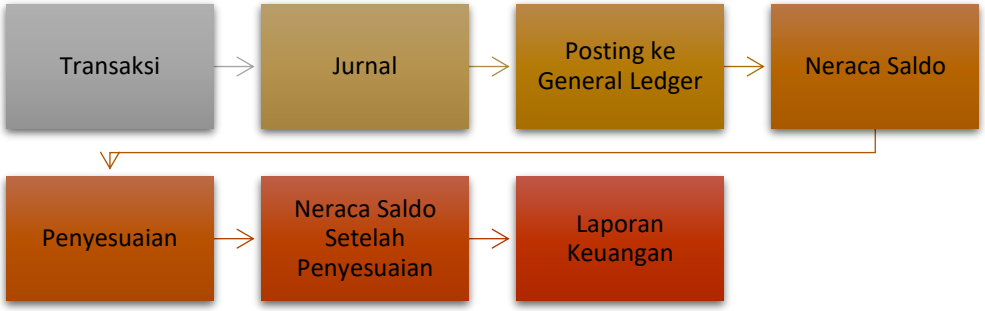


Pada setiap tahap, kualitas informasi perlu dijaga. Namun, neraca saldo memiliki karakteristik khusus karena memberikan kesempatan bagi akuntan untuk melihat kondisi akun secara keseluruhan sebelum laporan keuangan disusun.

**Mengapa Neraca Saldo Seimbang Belum Tentu Benar?**

Salah satu konsep penting yang harus dipahami mahasiswa adalah:

*Balanced does not always mean correct.*

Neraca saldo dapat seimbang tetapi masih mengandung kesalahan. Contohnya, perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar Rp5.000.000 tetapi transaksi tersebut tidak dicatat sama sekali. Tidak ada debit maupun kredit yang dicatat sehingga neraca saldo tetap seimbang.

Contoh lainnya, perusahaan seharusnya mencatat:

$Debit\ Beban\ Rp10.000.000$

$Kredit\ Utang\ Rp10.000.000$

tetapi justru mencatat:

$Debit\ Beban\ Rp10.000.000$

$Kredit\ Kas\ Rp10.000.000$

Secara matematis tetap seimbang, tetapi akun yang digunakan salah.

Oleh karena itu, keseimbangan neraca saldo hanya menunjukkan bahwa prinsip debit dan kredit dalam pencatatan yang masuk ke buku besar tetap terpenuhi. Keseimbangan tersebut belum membuktikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar.

**Jenis Kesalahan yang Tidak Selalu Terlihat pada Neraca Saldo**

Beberapa kesalahan dapat tetap menghasilkan neraca saldo yang seimbang.

1. Kesalahan Omisi. Transaksi tidak dicatat.
2. Kesalahan Komisi. Transaksi dicatat tetapi salah akun atau salah objek.
3. Kesalahan Prinsip. Transaksi dicatat pada kelompok akun yang tidak sesuai dengan sifat ekonominya.
4. Kesalahan Cut-Off. Transaksi dicatat pada periode yang salah.
5. Kesalahan Estimasi. Nilai transaksi atau akun tertentu ditentukan berdasarkan estimasi yang tidak tepat.
6. Kesalahan Klasifikasi. Transaksi dimasukkan ke akun yang salah meskipun jumlah debit dan kredit tetap sama.

Karena itu, pemeriksaan neraca saldo tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah total debit dan kredit sama.

**Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian**

Neraca saldo sebelum penyesuaian (*unadjusted trial balance*) merupakan neraca saldo yang disusun sebelum jurnal penyesuaian dicatat. Neraca ini menggambarkan saldo akun berdasarkan transaksi yang telah dicatat sampai akhir periode, tetapi masih mungkin terdapat akun yang belum mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya pada tanggal pelaporan. Contohnya, perusahaan membayar asuransi untuk satu tahun di muka.

Pada saat pembayaran:

*Debit Asuransi Dibayar di Muka*
*Kredit Kas*

Pada akhir periode, sebagian manfaat asuransi mungkin sudah digunakan. Oleh karena itu, saldo akun perlu disesuaikan agar mencerminkan bagian yang sudah menjadi beban dan bagian yang masih menjadi aset.

**Mengapa Penyesuaian Diperlukan?**

Penyesuaian diperlukan karena tidak seluruh perubahan ekonomi terjadi secara bersamaan dengan penerimaan atau pembayaran kas. Beberapa transaksi membutuhkan penyesuaian karena adanya:

- penggunaan aset secara bertahap;
- pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat;
- beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar;
- pembayaran di muka;
- pendapatan diterima di muka;
- penyusutan;
- estimasi tertentu.

Tujuan penyesuaian adalah memastikan bahwa pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat serta aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang relevan pada akhir periode. Dengan demikian, jurnal penyesuaian berkaitan erat dengan penerapan **basis akrual** yang telah dibahas pada Bab 2.

**Jenis-Jenis Jurnal Penyesuaian**

Beberapa penyesuaian yang umum dijumpai antara lain:

1. beban yang masih harus dibayar;
2. pendapatan yang masih harus diterima;
3. beban dibayar di muka;
4. pendapatan diterima di muka;
5. penyusutan aset tetap;
6. penyesuaian persediaan;
7. estimasi tertentu.

Masing-masing penyesuaian bertujuan agar saldo akun pada akhir periode lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

**Penyesuaian Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang masih harus dibayar terjadi ketika perusahaan telah menerima manfaat atau telah menggunakan jasa, tetapi pembayaran belum dilakukan.

*Contoh:*

Pada akhir Desember, perusahaan memiliki beban listrik sebesar Rp8.000.000 yang belum dibayar.

Jurnal penyesuaian:

$Debit\ Beban\ Listrik$ Rp. 8.000.000
$Kredit\ Utang\ Beban$ Rp. 8.000.000

Penyesuaian tersebut memastikan bahwa beban diakui pada periode ketika manfaat ekonomi telah digunakan.

**Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang masih harus diterima terjadi ketika perusahaan telah memperoleh hak atas pendapatan tetapi kas belum diterima.

*Contoh:*

Perusahaan telah memberikan jasa senilai Rp. 12.000.000 pada akhir periode, tetapi invoice belum diterbitkan.

*Jurnal penyesuaian:*

$Debit\ Piutang\ Pendapatan$ Rp. 12.000.000
$Kredit\ Pendapatan\ Jasa$ Rp. 12.000.000

Penyesuaian tersebut membantu memastikan pendapatan diakui pada periode yang tepat.

**Penyesuaian Beban Dibayar di Muka**

Beban dibayar di muka pada awalnya dicatat sebagai aset karena manfaat ekonomi belum seluruhnya digunakan. Misalnya perusahaan membayar asuransi Rp. 24.000.000 untuk masa 12 bulan.

Jika enam bulan manfaat telah digunakan, maka:

$Beban\ Asuransi = 6/12 \times$ Rp. 24.000.000
$Beban\ Asuransi =$ Rp. 12.000.000

Jurnal penyesuaian:

$Debit\ Beban\ Asuransi$ Rp. 12.000.000
$Kredit\ Asuransi\ Dibayar\ di\ Muka$ Rp. 12.000.000

Saldo aset setelah penyesuaian menjadi Rp. 12.000.000.

**Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan diterima di muka terjadi ketika perusahaan telah menerima kas tetapi kewajiban untuk memberikan barang atau jasa belum seluruhnya dipenuhi. Misalnya perusahaan menerima Rp36.000.000 untuk kontrak jasa selama 12 bulan.

Jika sampai akhir periode perusahaan telah memberikan jasa selama tiga bulan:

$$Pendapatan\ yang\ telah\ menjadi\ hak\ = 3/12 \times Rp36.000.000$$
$$= Rp9.000.000$$

Penyesuaian dilakukan agar bagian yang telah menjadi pendapatan diakui pada periode yang tepat, sedangkan bagian yang belum diperoleh tetap mencerminkan kewajiban perusahaan.

**Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap**

Aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasi umumnya memberikan manfaat selama lebih dari satu periode. Penggunaan aset tersebut perlu dicerminkan melalui beban penyusutan sesuai kebijakan dan standar yang berlaku.

*Contoh sederhana:*

$$Nilai\ perolehan\ mesin\ = Rp120.000.000$$
$$Umur\ manfaat\ = 5\ tahun$$

Dengan metode garis lurus dan tanpa mempertimbangkan nilai residu:

$$Penyusutan\ tahunan\ = Rp120.000.000\ /\ 5$$
$$= Rp24.000.000$$

Jurnal:

$$Debit\ Beban\ Penyusutan\ Rp24.000.000$$
$$Kredit\ Akumulasi\ Penyusutan\ Rp24.000.000$$

Perhitungan penyusutan dapat dibantu oleh sistem, tetapi keputusan mengenai umur manfaat, metode, nilai residu, dan perubahan estimasi tetap membutuhkan pertimbangan akuntansi.

**Cut-Off sebagai Bagian Penting dari Penyesuaian**

Cut-off berkaitan dengan penentuan periode ketika suatu transaksi harus diakui. Kesalahan cut-off dapat menyebabkan pendapatan, beban, aset, atau liabilitas masuk ke periode yang salah.

*Contoh:*

Barang telah dikirim kepada pelanggan pada 30 Desember, tetapi transaksi baru dicatat pada 2 Januari tahun berikutnya.

Jika berdasarkan kondisi transaksi pendapatan seharusnya telah diakui pada Desember, maka pencatatan pada Januari dapat menyebabkan kesalahan cut-off. Cut-off menjadi penting terutama pada akhir periode karena kesalahan beberapa hari dapat memengaruhi laporan keuangan.

**Review terhadap Saldo Akun**

Setelah neraca saldo tersedia, akuntan perlu melakukan review terhadap saldo akun. Review tidak hanya bertanya:

*"Apakah debit dan kredit seimbang?"*

tetapi juga:

- Apakah saldo masuk akal?
- Apakah terdapat perubahan yang tidak biasa?
- Apakah saldo sesuai dengan aktivitas bisnis?
- Apakah terdapat akun dengan nilai ekstrem?
- Apakah ada akun yang mengalami perubahan signifikan?
- Apakah terdapat saldo yang seharusnya sudah diselesaikan?
- Apakah terdapat transaksi yang seharusnya masuk periode berbeda?

Dengan pendekatan tersebut, neraca saldo menjadi alat analisis, bukan sekadar daftar angka.

**Analytical Review terhadap Neraca Saldo**

Analytical review dapat digunakan untuk memahami kewajaran saldo akun. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain:

**Perbandingan Periode**

Membandingkan saldo periode berjalan dengan periode sebelumnya.

**Analisis Tren**

Mengidentifikasi pola perubahan selama beberapa periode.

**Analisis Rasio**

Membandingkan hubungan antar-akun atau indikator keuangan.

**Analisis Varians**

Mengidentifikasi perbedaan antara realisasi dan anggaran atau ekspektasi.

Sebagai contoh, beban listrik perusahaan biasanya berkisar Rp100 juta per bulan. Jika pada bulan tertentu meningkat menjadi Rp350 juta, kondisi tersebut perlu ditelusuri.

Kenaikan tersebut mungkin disebabkan oleh:

- peningkatan aktivitas produksi;
- perubahan tarif;
- pencatatan transaksi beberapa periode sekaligus;
- kesalahan klasifikasi;
- kesalahan pencatatan.

Dengan demikian, analytical review membantu menentukan area yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

**Saldo Akun dan Rekonsiliasi**

Saldo tertentu perlu dibandingkan dengan sumber informasi yang relevan untuk memastikan kewajarannya.

*Contohnya:*

| Akun | Informasi Pembanding |
|---|---|
| Kas/Bank | Rekening koran |
| Piutang | Daftar piutang pelanggan |
| Utang | Daftar utang pemasok |
| Persediaan | Catatan persediaan |
| Aset tetap | Register aset |
| Pajak | Catatan perpajakan |

| | |
|---|---|
| Payroll | Daftar penggajian |

Tujuannya bukan sekadar mencari perbedaan, tetapi memastikan bahwa saldo buku besar memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Rekonsiliasi secara lebih teknis telah diperkenalkan pada tahapan sebelumnya; dalam subbab ini fokusnya adalah bagaimana hasil rekonsiliasi mendukung kewajaran saldo sebelum laporan keuangan disusun.

**Neraca Saldo Setelah Penyesuaian**

Setelah seluruh jurnal penyesuaian yang diperlukan dicatat, perusahaan dapat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance). Secara sederhana:

$$\textit{Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian}$$
$$\times$$
$$\textit{Jurnal Penyesuaian}$$
$$=$$
$$\textit{Neraca Saldo Setelah Penyesuaian}$$

Neraca saldo setelah penyesuaian mencerminkan saldo akun yang telah diperbarui setelah penyesuaian akhir periode. Saldo inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk penyusunan laporan keuangan.

**Contoh Neraca Saldo Sebelum dan Sesudah Penyesuaian**

Misalnya perusahaan memiliki saldo berikut:

| Akun | Sebelum Penyesuaian |
|---|---|
| Kas | Rp. 50.000.000 |
| Piutang | Rp. 30.000.000 |
| Perlengkapan | Rp. 20.000.000 |
| Peralatan | Rp. 100.000.000 |
| Utang | Rp. 40.000.000 |
| Modal | Rp. 100.000.000 |
| Pendapatan | Rp. 80.000.000 |
| Beban | Rp. 20.000.000 |

Pada akhir periode diketahui:

- perlengkapan yang telah digunakan Rp. 8.000.000;
- penyusutan peralatan Rp. 10.000.000;
- beban listrik yang masih harus dibayar Rp. 5.000.000.

Maka diperlukan jurnal penyesuaian.

Penyesuaian perlengkapan
Debit Beban Perlengkapan Rp. 8.000.000
Kredit Perlengkapan Rp. 8.000.000
Penyesuaian penyusutan
Debit Beban Penyusutan Rp. 10.000.000
Kredit Akumulasi Penyusutan Rp. 10.000.000
Penyesuaian beban listrik

Debit Beban Listrik Rp. 5.000.000
Kredit Utang Beban Rp. 5.000.000

Setelah penyesuaian dicatat, saldo akun berubah dan digunakan untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

**Penyesuaian dalam Sistem Akuntansi Digital**

Dalam sistem digital, sebagian penyesuaian dapat dibantu oleh sistem, terutama transaksi yang memiliki pola dan aturan yang relatif jelas.

Contohnya:

- penyusutan periodik;
- amortisasi;
- recurring accrual;
- pembalikan jurnal tertentu;
- alokasi biaya periodik.

Namun, tidak semua penyesuaian dapat sepenuhnya otomatis.

Penyesuaian yang membutuhkan:

- estimasi;
- interpretasi kontrak;
- evaluasi kondisi ekonomi;
- pertimbangan standar akuntansi;

tetap membutuhkan keterlibatan profesional. Oleh karena itu, teknologi pada tahap ini berfungsi untuk **membantu konsistensi dan efisiensi**, bukan menggantikan judgment akuntansi.

**Analytical Validation dalam Lingkungan Digital**

Volume transaksi yang besar menyebabkan pemeriksaan satu per satu menjadi tidak selalu efisien. Karena itu, analisis dapat diarahkan pada:

- saldo yang berubah secara signifikan;
- transaksi yang berada di luar pola historis;
- akun dengan saldo tidak biasa;
- perubahan rasio yang ekstrem;
- transaksi pada akhir periode;
- akun yang sering mengalami jurnal koreksi.

Sebagai contoh, jika biaya pemasaran biasanya sekitar 5% dari pendapatan tetapi meningkat menjadi 18%, akuntan dapat menjadikan perubahan tersebut sebagai area yang perlu diperiksa. Pendekatan ini tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan. Fungsinya adalah mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

**Trial Balance dan Kualitas Informasi Keuangan**

Kualitas neraca saldo akan memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hubungannya:

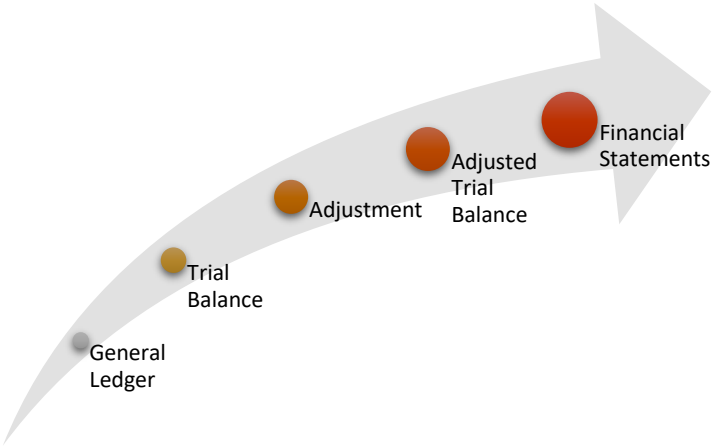


Jika saldo akun mengandung kesalahan yang tidak teridentifikasi, dampaknya dapat diteruskan ke laporan keuangan. Oleh karena itu, pemeriksaan neraca saldo merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan.

**Financial Statement Mapping**

Setelah saldo akun dianggap memadai, setiap akun perlu diarahkan ke komponen laporan keuangan yang sesuai.

Contohnya:

| Akun | Kelompok Laporan |
|---|---|
| Kas | Aset Lancar |
| Piutang | Aset Lancar |
| Persediaan | Aset Lancar |
| Peralatan | Aset Tidak Lancar |
| Utang Usaha | Liabilitas |
| Modal | Ekuitas |
| Pendapatan | Pendapatan |
| Beban Gaji | Beban |
| Beban Penyusutan | Beban |

Proses ini disebut secara umum sebagai financial statement mapping. Ketepatan pemetaan penting karena kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan meskipun total debit dan kredit tetap seimbang.

**Risiko pada Tahap Neraca Saldo**

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan adalah:

1. saldo akun tidak lengkap;
2. kesalahan cut-off;
3. salah klasifikasi;
4. jurnal penyesuaian tidak dibuat;
5. estimasi tidak tepat;
6. saldo tidak direkonsiliasi;
7. transaksi koreksi belum diproses;
8. saldo abnormal tidak ditelusuri;
9. akun dipetakan ke laporan yang salah;
10. penyesuaian dilakukan tanpa dasar yang memadai.

Risiko tersebut menunjukkan bahwa proses neraca saldo membutuhkan lebih dari sekadar pemeriksaan matematis.

**Prinsip "Balance Is Not Enough"**

Salah satu prinsip penting dalam memahami neraca saldo adalah:

$$"Balance\ is\ necessary, but\ balance\ is\ not\ enough."$$

Artinya, keseimbangan debit dan kredit merupakan kondisi penting, tetapi bukan satu-satunya indikator bahwa informasi akuntansi telah benar. Pemeriksaan harus mempertimbangkan setidaknya empat aspek:

**Completeness**

Apakah seluruh transaksi yang relevan telah dicatat?

**Accuracy**

Apakah nilai transaksi telah dicatat dengan benar?

**Classification**

Apakah transaksi masuk ke akun yang tepat?

**Cut-Off**

Apakah transaksi dicatat pada periode yang tepat?

Dengan demikian:

$$Saldo\ seimbang\ +\ lengkap\ +\ akurat\ +\ tepat\ klasifikasi\ +\ tepat\ periode$$
$$=$$
$$dasar\ informasi\ yang\ lebih\ andal.$$

## 4.5 PROSES PENUTUPAN BUKU (CLOSING PROCESS)

Penutupan buku atau **closing process** merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi suatu periode sebelum informasi keuangan digunakan untuk pelaporan. Pada tahap ini, perusahaan memastikan bahwa aktivitas akuntansi untuk suatu periode telah diselesaikan, saldo akun telah diperiksa, penyesuaian yang diperlukan telah dilakukan, dan informasi yang relevan telah siap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam sistem tradisional, proses penutupan sering terkonsentrasi pada beberapa hari terakhir setelah periode berakhir. Kondisi tersebut dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi karena banyak aktivitas harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Perkembangan sistem informasi akuntansi, ERP, otomatisasi, analitik data, dan teknologi digital mendorong perubahan dari:

$$\boldsymbol{Period - End\ Closing}$$

menuju:

$$\boldsymbol{Continuous\ Closing}$$

Perubahan tersebut bukan berarti perusahaan tidak lagi melakukan penutupan pada akhir periode. Continuous closing berarti sebagian pekerjaan yang sebelumnya menumpuk pada akhir periode dilakukan secara lebih teratur sepanjang periode.

Dengan demikian, tujuan utama perubahan tersebut adalah mengurangi pekerjaan yang menumpuk pada akhir periode, meningkatkan kualitas informasi, dan mempercepat proses pelaporan.

**Pengertian Closing Process**

Closing process adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan proses akuntansi suatu periode sehingga saldo dan informasi keuangan dapat digunakan untuk pelaporan. Secara sederhana, closing dapat digambarkan:

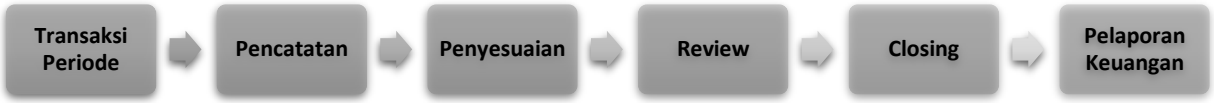


Aktivitas closing dapat mencakup:

- memastikan seluruh transaksi periode telah diproses;
- menyelesaikan penyesuaian;
- melakukan review saldo;
- menyelesaikan rekonsiliasi yang diperlukan;
- menyelesaikan jurnal akhir periode;
- melakukan review akhir;
- memastikan periode dapat ditutup.

Dengan demikian, closing merupakan proses yang bersifat **integratif** karena menggunakan hasil dari berbagai tahap sebelumnya.

**Tujuan Penutupan Buku**

Penutupan buku memiliki beberapa tujuan utama.

1. Menetapkan batas periode pelaporan. Closing membantu memastikan transaksi periode berikutnya tidak bercampur dengan periode yang sedang ditutup.
2. Menyelesaikan proses akuntansi periode berjalan. Seluruh aktivitas penting yang berkaitan dengan periode tersebut perlu diselesaikan.
3. Menyiapkan laporan keuangan. Saldo yang telah diperiksa menjadi dasar bagi proses pelaporan.
4. Menjaga konsistensi informasi. Proses closing membantu memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam pelaporan telah melalui prosedur yang ditetapkan.
5. Mempercepat penyediaan informasi. Closing yang efektif memungkinkan manajemen memperoleh informasi keuangan lebih cepat setelah periode berakhir.

**Traditional Closing**

Dalam lingkungan tradisional, proses closing sering dilakukan setelah periode akuntansi berakhir.

Contohnya:

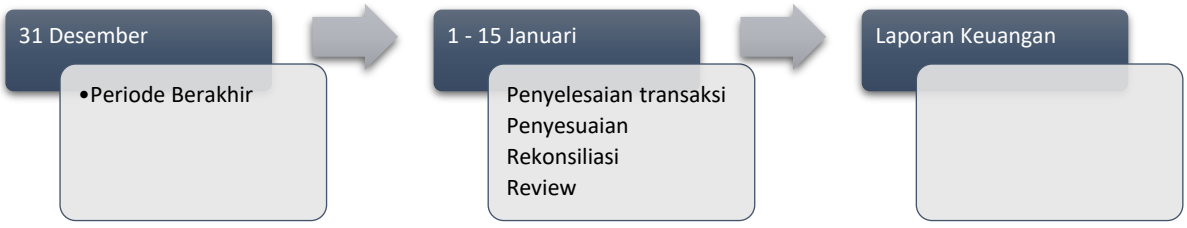

Pendekatan tersebut membuat banyak pekerjaan terkonsentrasi setelah tanggal akhir periode. Jika volume transaksi tinggi, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap tim akuntansi.

**Permasalahan Traditional Closing**

Beberapa permasalahan yang dapat muncul antara lain:

1. Beban Kerja Menumpuk. Banyak pekerjaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
2. Tekanan Waktu. Tim akuntansi harus menyelesaikan berbagai aktivitas dalam waktu singkat.
3. Ketergantungan Antarproses. Keterlambatan satu aktivitas dapat menyebabkan aktivitas berikutnya ikut tertunda.
4. Koreksi Berulang. Kesalahan yang ditemukan di akhir periode dapat menyebabkan pekerjaan harus diulang.
5. Keterlambatan Informasi. Semakin lama closing berlangsung, semakin lama manajemen memperoleh informasi keuangan periode tersebut.
6. Risiko Kelelahan. Tekanan pekerjaan pada akhir periode dapat meningkatkan risiko human error.

Oleh karena itu, transformasi closing bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah desain proses kerja.

**Month-End Close**

Salah satu bentuk closing yang umum adalah **month-end close**, yaitu proses penutupan pada akhir bulan.

Contoh kalender sederhana:

| Hari | Aktivitas |
|---|---|
| Hari terakhir bulan | Cut-off transaksi |
| Hari +1 | Penyelesaian transaksi |
| Hari +2 | Penyesuaian |
| Hari +3 | Review saldo |
| Hari +4 | Review manajemen |
| Hari +5 | Laporan awal |
| Hari +6 | Finalisasi |
| Hari +7 | Closing |

Semakin lama proses tersebut berlangsung, semakin lambat informasi keuangan tersedia bagi manajemen. Karena itu, perusahaan berusaha mengurangi *close cycle time.*

**Close Cycle Time**

**Close cycle time** adalah waktu yang dibutuhkan sejak periode berakhir sampai proses closing selesai dan informasi keuangan siap digunakan.

Sebagai contoh:

*Perusahaan A membutuhkan 15 hari untuk menyelesaikan month-end close.*

*Perusahaan B membutuhkan 7 hari.*

Jika kualitas informasi relatif sama, perusahaan B memiliki proses closing yang lebih cepat. Namun, kecepatan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Closing yang cepat tetapi menghasilkan informasi yang tidak akurat tetap tidak memberikan manfaat yang optimal.

Oleh karena itu:

***Fast closing harus tetap disertai dengan reliable closing.***

**Dari Periodic Closing menuju Continuous Closing**

Perubahan utama dalam akuntansi modern adalah pergeseran dari pekerjaan yang terkonsentrasi di akhir periode menuju pekerjaan yang dilakukan secara lebih merata.

**Periodic Closing**

$$Sebagian\ besar\ pekerjaan \rightarrow Akhir\ periode$$

**Continuous Closing**

$$Pekerjaan\ closing \rightarrow Didistribusikan\ sepanjang\ periode$$

Perubahan tersebut dapat digambarkan:

**Traditional**

$$Record \rightarrow Wait \rightarrow Close \rightarrow Report$$

**Continuous**

$$Record \rightarrow Review \rightarrow Reconcile \rightarrow Monitor \rightarrow Close \rightarrow Report$$

Dengan continuous closing, perusahaan tidak menunggu seluruh pekerjaan sampai akhir bulan untuk mulai melakukan pemeriksaan.

**Pengertian Continuous Closing**

*Continuous closing* adalah pendekatan pengelolaan proses penutupan akuntansi yang mendistribusikan sebagian aktivitas closing sepanjang periode sehingga beban pekerjaan pada akhir periode dapat dikurangi. Aktivitas yang dapat dilakukan lebih awal antara lain:

- rekonsiliasi berkala;
- review transaksi;
- penyelesaian item terbuka;
- analisis saldo;
- penyelesaian akun tertentu;
- monitoring jurnal;
- penyelesaian perbedaan data.

Dengan pendekatan tersebut, akhir periode tidak lagi menjadi titik ketika seluruh pekerjaan baru dimulai.

**Continuous Closing Bukan Berarti Tidak Ada Closing**

Konsep continuous closing sering disalahpahami sebagai kondisi ketika perusahaan tidak perlu melakukan closing. Pemahaman tersebut tidak tepat. Perusahaan tetap memiliki:

- akhir bulan;
- akhir kuartal;
- akhir tahun;
- batas periode pelaporan.

Yang berubah adalah **distribusi pekerjaan**.

Traditional closing:

$$Banyak\ pekerjaan \rightarrow Akhir\ periode$$

Continuous closing:

$$Sebagian\ pekerjaan \rightarrow Dilakukan\ sepanjang\ periode$$

$$Pekerjaan\ akhir \rightarrow Lebih\ terfokus\ pada\ aktivitas\ yang\ memang\ harus\ menunggu\ akhir\ periode$$

Dengan demikian, continuous closing dapat dipahami sebagai reorganisasi waktu pekerjaan, bukan penghapusan proses closing.

**Karakteristik Continuous Closing**

Continuous closing memiliki beberapa karakteristik utama:

1. pekerjaan closing dilakukan secara bertahap;
2. rekonsiliasi dilakukan lebih sering;
3. item terbuka diselesaikan lebih awal;
4. aktivitas berulang semakin terstruktur;
5. pekerjaan akhir periode menjadi lebih terfokus;
6. informasi keuangan tersedia lebih cepat;
7. proses lebih mudah dimonitor;
8. tanggung jawab antarbagian lebih jelas.

Pendekatan tersebut mendukung konsep *continuous accounting,* yaitu lingkungan ketika aktivitas akuntansi tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan besar yang dilakukan hanya pada akhir periode.

**Continuous Reconciliation**

Salah satu elemen penting dalam continuous closing adalah **continuous reconciliation**. Dalam pendekatan tradisional, rekonsiliasi dapat terkonsentrasi pada akhir bulan. Dalam pendekatan continuous, rekonsiliasi dilakukan lebih sering sesuai karakteristik akun. Contohnya:

- $akun\ kas \rightarrow harian$;
- $transaksi\ tertentu \rightarrow mingguan$;
- $akun\ tertentu \rightarrow bulanan$;
- $akun\ kompleks \rightarrow sesuai\ kebutuhan.$

Tujuannya adalah menemukan perbedaan sedini mungkin.

Prinsipnya:

$$Find\ the\ difference\ early, not\ at\ the\ end.$$

Jika selisih ditemukan pada awal periode, waktu penyelesaiannya biasanya lebih panjang dibandingkan jika selisih baru ditemukan pada hari terakhir closing.

**Exception Management dalam Closing**

Tidak semua pekerjaan perlu diperiksa dengan tingkat intensitas yang sama. Perusahaan dapat memusatkan perhatian pada **exception**, yaitu kondisi yang berbeda dari aturan atau pola normal. Contohnya:

- saldo meningkat secara ekstrem;
- akun belum direkonsiliasi;
- jurnal tertentu belum disetujui;
- transaksi berada di luar pola;
- terdapat perbedaan saldo;
- item closing masih terbuka.

Pendekatan tersebut membantu tim akuntansi memusatkan sumber daya pada area yang benar-benar membutuhkan perhatian.

**Digital Closing Checklist**

Closing membutuhkan koordinasi banyak aktivitas. Oleh karena itu, checklist menjadi instrumen penting. Contoh:

| Aktivitas | Penanggung Jawab | Status |
|---|---|---|
| Cut-off transaksi | Accounting | ✓ |
| Rekonsiliasi kas | Finance | ✓ |
| Review piutang | Accounting | ✓ |
| Review utang | Accounting | ✓ |
| Penyesuaian | Accounting | ✓ |
| Review saldo | Supervisor | ✓ |
| Management review | Manager | ✓ |
| Final closing | Controller | ✓ |

Dalam lingkungan digital, checklist dapat dikelola melalui sistem sehingga status pekerjaan dapat dipantau secara lebih terstruktur. Fungsi checklist bukan sekadar administrasi, tetapi memastikan bahwa tidak ada aktivitas penting yang terlewat.

**Closing Calendar**

Selain checklist, perusahaan dapat menggunakan **closing calendar**. Closing calendar menetapkan:

- aktivitas;
- tanggal jatuh tempo;
- penanggung jawab;
- dependensi;
- status;
- reviewer.

Contoh:

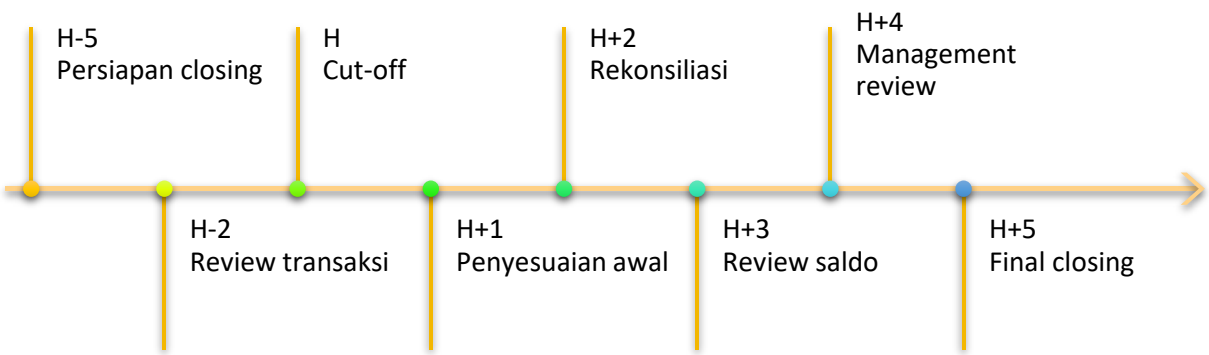


Closing calendar membantu mengubah closing dari aktivitas yang bersifat reaktif menjadi proses yang direncanakan.

**Workflow dan Tanggung Jawab**

Closing melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab harus ditentukan dengan jelas. Contohnya:

- staf accounting → menyiapkan data;
- supervisor → melakukan review;
- accounting manager → melakukan evaluasi;
- controller → memberikan persetujuan;
- manajemen → menggunakan hasil untuk pengambilan keputusan.

Kejelasan tanggung jawab mengurangi risiko pekerjaan yang:

- tidak memiliki pemilik;
- dilakukan ganda;
- terlambat;
- tidak direview.

**Manual Journal pada Proses Closing**

Walaupun banyak transaksi telah diproses secara otomatis, jurnal manual masih dapat muncul pada tahap closing. Contohnya:

- accrual tertentu;
- estimasi;
- koreksi;
- penyesuaian khusus;
- transaksi nonrutin.

Karena jurnal manual dapat memengaruhi hasil akhir laporan keuangan, proses closing perlu memastikan bahwa jurnal tersebut:

1. memiliki dasar yang jelas;
2. telah disiapkan oleh pihak yang berwenang;
3. telah direview;
4. telah disetujui;
5. tercatat pada periode yang tepat.

Pembahasan teknis mengenai jurnal telah dilakukan pada Subbab 4.3. Pada bagian ini, jurnal manual dilihat hanya dari perspektif **penutupan periode**.

**Continuous Accounting**

Continuous closing berkaitan erat dengan konsep **continuous accounting**. Continuous accounting menggambarkan pendekatan ketika aktivitas akuntansi, pengendalian, rekonsiliasi, dan analisis dilakukan secara lebih berkelanjutan daripada menunggu akhir periode.
Perbedaannya dapat dilihat:

| Pendekatan Tradisional | Continuous Accounting |
|---|---|
| Aktivitas terkonsentrasi di akhir periode | Aktivitas didistribusikan |
| Rekonsiliasi periodic | Rekonsiliasi lebih sering |
| Review setelah periode berakhir | Review dapat dilakukan sepanjang periode |
| Informasi lebih lambat | Informasi lebih cepat |
| Koreksi terkonsentrasi di akhir | Koreksi dapat dilakukan lebih awal |

Dengan demikian, continuous accounting menjadi fondasi proses continuous closing.

**Peran Teknologi dalam Continuous Closing**

Teknologi dapat mendukung continuous closing melalui:

- otomatisasi pekerjaan rutin;
- integrasi sistem;
- dashboard;
- workflow;
- notifikasi;
- rekonsiliasi berbantuan sistem;
- analytical review;
- monitoring status closing.

Namun, teknologi bukan satu-satunya faktor keberhasilan.
Continuous closing juga membutuhkan:

- proses yang jelas;
- pembagian tanggung jawab;
- disiplin;
- standar kerja;
- kompetensi;
- governance.

Oleh karena itu:

*Technology enables continuous closing, but process discipline makes it sustainable.*

**Artificial Intelligence dalam Closing**

AI dapat mendukung proses closing terutama dalam aktivitas analisis.
Contohnya:

- mendeteksi pola saldo tidak biasa;
- mengidentifikasi akun yang berpotensi membutuhkan review;
- memprioritaskan item exception;

- menganalisis tren;
- membantu klasifikasi masalah;
- memberikan rekomendasi area yang perlu diperiksa.

*Contoh sederhana:*

Sistem menemukan bahwa saldo beban tertentu meningkat 250% dibandingkan rata-rata historis.

Sistem kemudian memberikan peringatan:

*High variance detected — review required.*

Akuntan kemudian memeriksa penyebab perubahan tersebut.

Dengan demikian, AI berfungsi sebagai **alat prioritisasi dan decision support**, bukan sebagai pengganti keputusan akuntan.

**Continuous Closing dan General Ledger**

General Ledger tetap menjadi salah satu sumber utama informasi selama proses closing. Dalam continuous closing, saldo General Ledger tidak hanya dilihat pada akhir bulan, tetapi dapat dimonitor secara berkala.

*Contohnya:*




Pendekatan tersebut memungkinkan masalah ditemukan lebih awal sehingga pekerjaan akhir periode menjadi lebih ringan.

**Closing dan Management Review**

Closing bukan hanya aktivitas bagian akuntansi.

Hasil closing digunakan oleh manajemen untuk memahami:

- kinerja;
- profitabilitas;
- posisi keuangan;
- arus kas;
- biaya;
- risiko;

- perkembangan bisnis.

Karena itu, kualitas closing memengaruhi kualitas keputusan manajemen.

Closing yang terlambat dapat menyebabkan keputusan dibuat berdasarkan informasi yang sudah tidak lagi mencerminkan kondisi terbaru.

**Indikator Keberhasilan Closing**

Keberhasilan proses closing dapat diukur melalui beberapa indikator.




Dengan indikator tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah proses closing hanya cepat atau benar-benar **efektif dan berkualitas**.

**Maturity Model Closing**

Transformasi closing dapat dipahami melalui tingkat kematangan.

| Level | Karakteristik |
|---|---|
| 1. Manual | Banyak pekerjaan dilakukan secara manual |
| 2. Digitized | Dokumen dan proses mulai terdigitalisasi |
| 3. Integrated | Sistem dan proses mulai terintegrasi |
| 4. Automated | Pekerjaan rutin semakin otomatis |
| 5. Continuous | Aktivitas closing didistribusikan sepanjang periode |
| 6. Intelligent | Analitik dan AI mendukung prioritas serta keputusan |

Tidak semua perusahaan harus langsung mencapai tingkat tertinggi.

Transformasi sebaiknya disesuaikan dengan:

- ukuran perusahaan;
- kompleksitas transaksi;
- kesiapan teknologi;
- kompetensi sumber daya manusia;

- biaya implementasi;
- kebutuhan bisnis.

**Risiko Continuous Closing**

Continuous closing juga memiliki risiko.

1. **Closing Terlalu Dini.** Perusahaan dapat melakukan review sebelum seluruh informasi tersedia.
2. **Fragmentasi Pekerjaan.** Pekerjaan yang terlalu tersebar dapat menyulitkan koordinasi.
3. **Ketergantungan pada Sistem.** Gangguan sistem dapat menghambat proses.
4. **Automation Bias.** Akuntan dapat terlalu percaya pada hasil sistem.
5. **Perubahan Proses.** Perubahan metode kerja dapat menimbulkan resistensi.
6. **Governance yang Lemah.** Jika perubahan sistem dan proses tidak dikelola dengan baik, kualitas closing dapat menurun.

Karena itu, continuous closing harus diterapkan secara bertahap dan dikendalikan.

**Change Management dalam Transformasi Closing**

Transformasi dari traditional closing menuju continuous closing bukan hanya proyek teknologi. Perusahaan perlu mengelola perubahan pada:

- proses kerja;
- struktur tanggung jawab;
- kompetensi;
- indikator kinerja;
- budaya organisasi;
- teknologi.

Akuntan perlu memahami bahwa pekerjaan tidak lagi hanya dilakukan pada akhir bulan. Contohnya:

***Sebelum***

*"Nanti kita selesaikan saat closing."*

***Sesudah***

*"Masalah ini harus diselesaikan sebelum masuk closing."*

Perubahan cara berpikir tersebut merupakan bagian penting dari continuous closing.

**Governance dalam Proses Closing**

Closing membutuhkan governance agar proses berjalan konsisten. Governance dapat mencakup:

- kebijakan closing;
- closing calendar;
- pembagian tanggung jawab;
- approval;
- dokumentasi;
- monitoring;
- escalation procedure;
- evaluasi berkala.

Dengan governance yang baik, closing tidak bergantung sepenuhnya pada individu tertentu. Hal tersebut penting terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak unit, cabang, atau entitas.

**Rekonstruksi Paradigma Siklus Akuntansi**

Jika siklus tradisional dirumuskan:

$$\boldsymbol{Record \rightarrow Post \rightarrow Adjust \rightarrow Close \rightarrow Report}$$

maka siklus modern dapat dipahami sebagai:

$$\boldsymbol{Capture \rightarrow Validate \rightarrow Process \rightarrow Monitor \rightarrow Adjust \rightarrow Close \rightarrow Report}$$

Perbedaannya terletak pada intensitas monitoring dan distribusi aktivitas.

*Dalam pendekatan tradisional, banyak aktivitas menunggu akhir periode.*

*Dalam pendekatan modern, sebagian aktivitas dilakukan secara berkelanjutan.*

Dengan demikian, transformasi siklus akuntansi bukan sekadar:

$$\boldsymbol{Manual \rightarrow Digital}$$

tetapi:

$$\boldsymbol{Periodic \rightarrow Continuous}$$

dan:

$$\boldsymbol{Reactive \rightarrow Proactive}$$

**Temuan Penelitian yang Mendukung Transformasi**

Penelitian mengenai ERP dan sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa teknologi terintegrasi dapat mengubah proses dan praktik akuntansi. Implementasi ERP tidak hanya berkaitan dengan penggantian perangkat lunak, tetapi juga dengan perubahan proses organisasi dan praktik akuntansi.

Penelitian tentang General Ledger dan analitik audit juga menunjukkan bahwa volume data yang besar membuka peluang penggunaan teknik analitik terhadap keseluruhan populasi

transaksi, sehingga proses pengawasan dapat diarahkan pada transaksi yang lebih berisiko. Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa akuntansi modern bergerak dari proses pencatatan dan pemeriksaan yang bersifat periodik menuju proses yang semakin terintegrasi, analitis, dan berkelanjutan. Namun, transformasi tersebut tetap membutuhkan pengendalian, tata kelola, serta keterlibatan profesional.

# BAB 5
# LAPORAN KEUANGAN UTAMA DAN PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURES*)

## 5.1 PELAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI

Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari sistem informasi ekonomi suatu entitas. Aktivitas perusahaan menghasilkan berbagai peristiwa ekonomi, seperti penjualan, pembelian, investasi, pendanaan, pembayaran kewajiban, dan penggunaan sumber daya. Peristiwa tersebut kemudian diproses melalui sistem akuntansi dan menghasilkan informasi yang disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif tradisional, pelaporan keuangan sering dipahami sebagai kegiatan menghasilkan laporan keuangan pada akhir periode. Pemahaman tersebut masih benar, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan fungsi pelaporan keuangan modern. Pelaporan keuangan pada hakikatnya merupakan **proses komunikasi informasi ekonomi** yang menghubungkan entitas dengan pengguna informasi di luar maupun di dalam organisasi.

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan IFRS menempatkan tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum sebagai penyediaan informasi keuangan mengenai entitas yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor yang ada maupun potensial dalam mengambil keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Informasi tersebut membantu pengguna menilai prospek arus kas masa depan serta bagaimana manajemen menggunakan sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, pelaporan keuangan dapat dipahami melalui tiga unsur utama:

$$aktivitas\ ekonomi \rightarrow informasi\ akuntansi \rightarrow komunikasi\ kepada\ pengguna$$

Perubahan perspektif tersebut penting dalam akuntansi modern. Akuntan tidak lagi hanya dituntut mampu menghasilkan angka yang benar, tetapi juga harus memahami apakah angka dan penjelasan yang disampaikan mampu memberikan gambaran yang bermakna bagi pengguna.

Pelaporan keuangan dengan demikian memiliki dua fungsi penting. Pertama, fungsi informasi, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi, kinerja, dan perubahan kondisi ekonomi entitas. Kedua, fungsi komunikasi, yaitu menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak selalu mempunyai akses langsung terhadap sistem internal perusahaan.

**Pelaporan Keuangan sebagai Proses**

Secara konseptual, proses pelaporan keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:




Dalam alur tersebut, laporan keuangan bukanlah titik akhir yang berdiri sendiri. Laporan keuangan merupakan media yang menghubungkan informasi internal perusahaan dengan proses pengambilan keputusan pengguna.

**Laporan Keuangan sebagai Media Komunikasi**

Laporan keuangan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk bahasa ekonomi perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan menyampaikan informasi mengenai apa yang dimiliki, apa yang menjadi kewajibannya, bagaimana kinerjanya, bagaimana kas digunakan dan diperoleh, serta bagaimana perubahan ekuitas terjadi.

Bahasa akuntansi memiliki karakteristik khusus. Informasi disampaikan melalui angka, klasifikasi, tabel, kebijakan akuntansi, penjelasan naratif, dan pengungkapan tambahan. Oleh karena itu, memahami laporan keuangan tidak cukup hanya dengan membaca angka.

Sebagai contoh, informasi:

*Pendapatan perusahaan sebesar Rp500 miliar.*

merupakan informasi akuntansi. Namun, pengguna masih membutuhkan konteks untuk memahami arti angka tersebut. Pengguna dapat membandingkannya dengan:

- pendapatan tahun sebelumnya;
- target perusahaan;
- pertumbuhan industri;
- laba yang dihasilkan;
- arus kas operasi;
- tingkat utang;
- perubahan biaya;
- kondisi ekonomi.

Dengan demikian, sebuah angka baru mempunyai makna ekonomi ketika ditempatkan dalam konteks yang tepat.

**Tabel 5.1.** Perubahan Perspektif terhadap Laporan Keuangan

| **Perspektif Tradisional** | **Perspektif Modern** |
|---|---|
| Laporan sebagai hasil akhir proses akuntansi | Laporan sebagai media komunikasi |
| Fokus pada angka | Fokus pada informasi dan makna |
| Menekankan kepatuhan | Menekankan kegunaan informasi |
| Pembaca laporan bersifat pasif | Pengguna melakukan interpretasi dan analisis |
| Informasi berbentuk dokumen | Informasi semakin berbasis data digital |
| Disclosure sebagai pelengkap | Disclosure sebagai bagian dari komunikasi |

Dalam konteks tersebut, laporan keuangan harus dipandang sebagai **produk komunikasi yang memiliki audiens**. Artinya, penyusun laporan perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna tanpa mengabaikan standar akuntansi yang berlaku. Kerangka Konseptual juga menegaskan bahwa laporan keuangan bertujuan umum tidak dirancang untuk menunjukkan secara langsung nilai suatu entitas. Laporan tersebut menyediakan informasi yang membantu investor, pemberi pinjaman, dan kreditor dalam mengestimasi nilai entitas. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara:

$$Accounting\ information \neq Entity\ value$$

Informasi akuntansi merupakan salah satu dasar bagi pengguna untuk membentuk penilaian mengenai perusahaan, tetapi bukan satu-satunya sumber informasi yang digunakan.

**Pengguna dan Kebutuhan Informasi**

Pelaporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari pengguna informasi. Informasi hanya mempunyai nilai apabila dapat membantu pengguna memahami kondisi entitas dan membuat keputusan. Dalam Kerangka Konseptual IFRS, pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum adalah investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lain yang ada maupun potensial. Kelompok tersebut membutuhkan informasi untuk menilai keputusan penyediaan sumber daya kepada entitas. Meskipun demikian, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh berbagai pihak lainnya.

**Tabel 5.2.** Pengguna dan Kebutuhan Informasi

| **Pengguna** | **Kebutuhan Informasi** |
|---|---|
| Investor | Profitabilitas, risiko, pertumbuhan, arus kas dan prospek |
| Kreditor | Kemampuan membayar pokok dan bunga |
| Pemasok | Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek |
| Manajemen | Evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan |
| Regulator | Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku |
| Pemerintah | Informasi untuk kepentingan ekonomi dan fiskal |
| Karyawan | Stabilitas dan keberlanjutan perusahaan |
| Analis | Evaluasi kinerja dan prospek perusahaan |

Perbedaan kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa satu laporan keuangan dapat digunakan untuk berbagai tujuan analisis. Sebagai contoh, investor mungkin lebih memperhatikan:

*Pertumbuhan laba, arus kas, risiko, dan prospek perusahaan.*

Sementara kreditor lebih mungkin memberikan perhatian terhadap:

*Likuiditas, solvabilitas, struktur utang, dan kemampuan membayar kewajiban.*

Perbedaan kebutuhan tersebut tidak berarti perusahaan harus membuat laporan keuangan yang berbeda untuk setiap pengguna. Standar pelaporan berusaha menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang umum dari pengguna utama.

Kerangka Konseptual menyatakan bahwa pengguna utama dapat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda atau bahkan bertentangan. Oleh sebab itu, pelaporan bertujuan umum berusaha menyediakan kumpulan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dari sebanyak mungkin pengguna utama.

**Asimetri Informasi dalam Pelaporan Keuangan**

Salah satu alasan penting mengapa pelaporan keuangan diperlukan adalah adanya asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Dalam perusahaan modern, manajemen biasanya memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap informasi internal dibandingkan investor atau kreditor eksternal. Manajemen dapat mengetahui:

- kondisi pelanggan;
- kualitas produk;
- rencana investasi;
- kondisi operasional;
- risiko internal;
- strategi perusahaan;
- kondisi keuangan secara lebih rinci.

Sebaliknya, investor eksternal tidak mempunyai akses yang sama terhadap seluruh informasi tersebut. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai:

$$Manajemen$$
$$\downarrow$$
$$Informasi\ internal\ lebih\ lengkap$$
$$\downarrow$$
$$Asimetri\ Informasi$$
$$\downarrow$$
$$Investor/Kreditor$$
$$\downarrow$$
$$Membutuhkan\ informasi\ eksternal\ yang\ dapat\ dipercaya$$

Literatur pelaporan keuangan menunjukkan bahwa lingkungan informasi perusahaan berkembang sebagai konsekuensi dari asimetri informasi dan masalah keagenan antara investor, pemilik, dan manajer. Informasi akuntansi memiliki peran ex-ante untuk membantu menilai peluang investasi dan ex-post untuk membantu memantau penggunaan modal yang telah ditanamkan.

**Peran Pelaporan Keuangan dalam Mengurangi Asimetri Informasi**

Pelaporan keuangan membantu memperkecil kesenjangan informasi dengan menyediakan informasi yang:

1. disusun berdasarkan standar;
2. dapat dibandingkan;
3. dapat dianalisis;

4. dapat diaudit atau diverifikasi melalui mekanisme yang berlaku;
5. dilengkapi dengan pengungkapan yang relevan.

Namun demikian, pelaporan keuangan tidak menghilangkan seluruh asimetri informasi. Hal ini penting dipahami mahasiswa. Perusahaan tetap mempunyai informasi internal yang tidak seluruhnya dapat atau harus dipublikasikan. Selain itu, laporan keuangan juga menggunakan estimasi, pertimbangan, dan model tertentu. Kerangka Konseptual mengakui bahwa laporan keuangan bertujuan umum tidak dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan pengguna sehingga pengguna juga perlu mempertimbangkan sumber informasi lainnya.

Dengan demikian, tujuan pelaporan bukan:

*Menghilangkan seluruh ketidakpastian*

melainkan:

*Menyediakan informasi yang membantu pengguna mengurangi ketidakpastian yang relevan bagi keputusan ekonomi.*

**Decision Usefulness dalam Pelaporan Keuangan**

Konsep **decision usefulness** menjelaskan bahwa informasi keuangan dinilai berdasarkan kemampuannya membantu pengguna mengambil keputusan. Dalam konteks pelaporan keuangan, pertanyaan penting bukan hanya:

$$\text{“}Apakah\ laporan\ ini\ benar?\text{”}$$

tetapi juga:

$$\text{“}Apakah\ informasi\ yang\ disajikan\ membantu\ pengguna\ membuat\ keputusan?\text{”}$$

Investor dapat menggunakan informasi keuangan untuk memutuskan apakah akan:

- membeli saham;
- mempertahankan investasi;
- menjual investasi;
- menambah investasi.

Kreditor dapat menggunakannya untuk memutuskan apakah akan:

- memberikan pinjaman;
- memperpanjang fasilitas kredit;
- mengubah persyaratan kredit;
- menilai kemampuan pembayaran debitur.

Kerangka Konseptual menyebutkan bahwa keputusan pengguna berkaitan dengan pembelian, penjualan atau kepemilikan instrumen ekuitas dan utang, pemberian atau penyelesaian pinjaman, serta penggunaan hak untuk memengaruhi tindakan manajemen.

**Contoh Decision Usefulness**

Misalnya sebuah perusahaan melaporkan:

*Laba bersih meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar.*

Sekilas informasi tersebut menunjukkan perkembangan positif.
Namun, pengguna kemudian menemukan bahwa:

- arus kas operasi menurun;
- piutang meningkat tajam;
- utang juga meningkat;
- peningkatan laba terutama berasal dari keuntungan non-rutin.

Interpretasi pengguna kemudian berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa decision usefulness tidak berasal dari satu angka secara terpisah, tetapi dari kemampuan pengguna menghubungkan berbagai informasi dalam laporan keuangan dan disclosure yang menyertainya.

**Informasi untuk Penilaian Masa Depan**

Informasi keuangan juga digunakan untuk memperkirakan:

- jumlah arus kas masa depan;
- waktu terjadinya arus kas;
- ketidakpastian arus kas;
- kemampuan manajemen menggunakan sumber daya;
- keberlanjutan kegiatan usaha.

Dengan demikian, pelaporan keuangan memiliki orientasi historis sekaligus memiliki nilai informasional untuk menilai masa depan.

**Dari Data Akuntansi Menuju Informasi Ekonomi**

Salah satu perubahan penting dalam akuntansi modern adalah pergeseran perhatian dari data menuju informasi yang dapat diinterpretasikan. Data merupakan fakta atau hasil pengukuran yang belum tentu memberikan pemahaman yang memadai. Informasi muncul ketika data diproses, diklasifikasikan, dibandingkan, dan diberikan konteks sehingga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Secara sederhana:




**Tabel 5.3**. Data, Informasi, dan Interpretasi

| Data Akuntansi | Informasi | Interpretasi |
|---|---|---|
| Pendapatan Rp500 miliar | Pendapatan meningkat 20% | Perusahaan mengalami pertumbuhan |
| Utang Rp200 miliar | Utang naik 30% | Risiko leverage perlu diperhatikan |
| Kas operasi Rp40 miliar | Kas operasi lebih rendah dari laba | Kualitas konversi laba menjadi kas perlu dianalisis |
| Persediaan Rp150 miliar | Persediaan meningkat 35% | Efisiensi pengelolaan persediaan perlu dievaluasi |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi tidak berhenti ketika angka telah disajikan. Pengguna harus dapat menghubungkan angka dengan kondisi ekonomi yang mendasarinya.

**Peran Konteks**

Konteks dapat berupa:

- periode sebelumnya;
- target perusahaan;
- kondisi industri;
- kondisi ekonomi;
- kebijakan perusahaan;
- risiko;
- transaksi material;
- perubahan strategi.

Tanpa konteks, angka dapat menimbulkan interpretasi yang keliru. Sebagai contoh, peningkatan utang tidak selalu berarti kondisi perusahaan memburuk. Utang dapat meningkat karena perusahaan melakukan ekspansi yang menghasilkan arus kas masa depan. Sebaliknya, utang yang tidak disertai kemampuan menghasilkan kas dapat meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, pelaporan keuangan modern tidak hanya bertujuan menyampaikan angka, tetapi menyediakan konteks yang memungkinkan pengguna memahami makna angka tersebut.

**Disclosure sebagai Perpanjangan Komunikasi**

Laporan keuangan utama memberikan informasi yang penting, tetapi angka-angka tersebut tidak selalu dapat menjelaskan seluruh kondisi ekonomi perusahaan. Di sinilah disclosure atau pengungkapan memiliki peranan. Disclosure dapat dipahami sebagai penyediaan informasi tambahan yang membantu pengguna memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hubungannya dapat digambarkan:

$$\boldsymbol{Laporan\ Keuangan\ Utama}$$
$$\downarrow$$
$$Memberikan\ informasi\ inti$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Catatan\ dan\ Disclosure}$$
$$\downarrow$$
$$Memberikan\ konteks, rincian, dan\ penjelasan$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Pengguna}$$
$$\downarrow$$
$$Interpretasi\ dan\ keputusan$$

Dengan demikian:

> ***Disclosure bukan sekadar lampiran laporan keuangan, tetapi merupakan perpanjangan dari proses komunikasi keuangan.***

Misalnya laporan posisi keuangan menunjukkan:

*Aset tetap = Rp. 500 miliar.*

Informasi tersebut belum menjelaskan seluruh hal yang perlu diketahui pengguna. Catatan laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai:

- metode penyusutan;
- umur manfaat;
- nilai tercatat;
- akumulasi penyusutan;
- perubahan nilai;
- impairment;
- aset yang dijaminkan;
- komitmen terkait aset.

Informasi tambahan tersebut membantu pengguna memahami bagaimana angka Rp. 500 miliar terbentuk dan apa implikasinya.

**Disclosure sebagai Pengurangan Information Gap**

Literatur pelaporan keuangan menunjukkan bahwa keputusan voluntary disclosure dan mandatory disclosure merupakan bagian dari lingkungan informasi perusahaan yang terbentuk antara manajemen, investor, regulator, dan pihak lain. Oleh karena itu, disclosure dapat menjalankan beberapa fungsi:

1. Mengurangi kesenjangan informasi;
2. Meningkatkan pemahaman pengguna;
3. Memberikan konteks terhadap angka;
4. Menjelaskan ketidakpastian;
5. Membantu pengguna menilai risiko;
6. Meningkatkan transparansi.

Pembahasan lebih mendalam mengenai mandatory dan voluntary disclosure akan diberikan pada **Subbab 5.4**. Pada bagian ini, disclosure cukup dipahami sebagai komponen penting dari komunikasi informasi keuangan.

**Kualitas Komunikasi Informasi Keuangan**

Kualitas pelaporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh apakah angka telah disusun sesuai dengan standar. Kualitas juga berkaitan dengan apakah informasi tersebut dapat dikomunikasikan dan dipahami secara efektif. Dalam konteks ini, komunikasi informasi keuangan setidaknya perlu memperhatikan beberapa aspek.

Aspek **understandability** menjadi semakin penting dalam era digital. Jumlah informasi yang tersedia semakin besar, tetapi banyaknya informasi tidak otomatis meningkatkan kualitas komunikasi. Penelitian Souza et al. (2019) menunjukkan bahwa kompleksitas bahasa dalam narrative accounting disclosure dapat mengurangi keterbacaan informasi. Penelitian tersebut menemukan bukti bahwa perusahaan dengan kinerja buruk dapat menggunakan narasi yang lebih kompleks sehingga informasi menjadi lebih sulit dipahami.

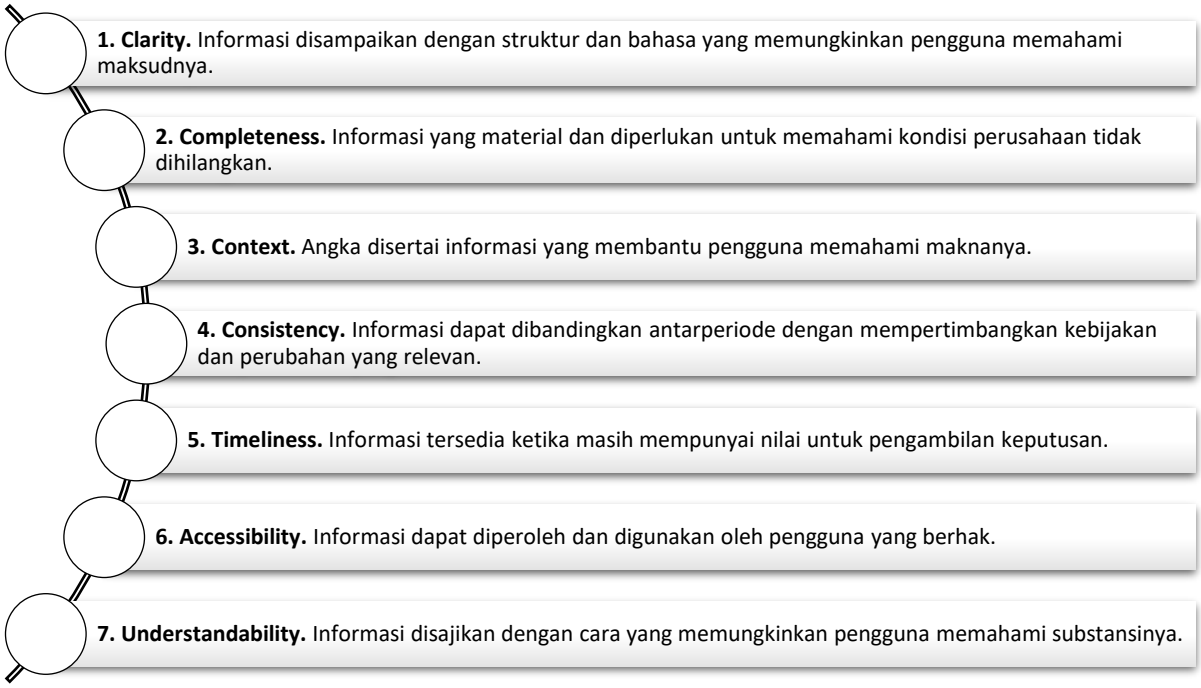


Temuan tersebut memberikan pelajaran penting:

***Transparansi bukan hanya persoalan seberapa banyak informasi yang diungkapkan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan.***

**Information Overload**

Pada era digital, perusahaan dapat menyediakan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi tersebut menciptakan risiko information overload, yaitu keadaan ketika pengguna menerima terlalu banyak informasi sehingga kesulitan mengidentifikasi informasi yang benar-benar penting. Oleh karena itu, pelaporan keuangan modern menghadapi dua tantangan sekaligus:

**Under-disclosure**

→ informasi terlalu sedikit.

**Over-disclosure**

→ informasi terlalu banyak tetapi sulit digunakan.

Tujuan pelaporan yang baik berada di antara kedua kondisi tersebut:

$$memberikan\ informasi\ yang\ cukup, relevan, kontekstual, dan\ dapat\ dipahami.$$

**Pelaporan Keuangan dalam Era Digital**

Digitalisasi mengubah cara informasi keuangan diproduksi, disajikan, disebarkan, dan digunakan. Pada lingkungan tradisional, laporan keuangan terutama dipandang sebagai dokumen yang dicetak atau disimpan dalam format statis. Dalam lingkungan digital, informasi keuangan dapat tersedia dalam berbagai bentuk:

- laporan elektronik;
- dashboard;

- database;
- structured financial data;
- XBRL;
- digital annual report;
- analytical platform;
- machine-readable reporting.

Perubahan tersebut membuat pelaporan keuangan semakin dekat dengan konsep **data-driven financial reporting**. Dalam konteks ini, pengguna tidak hanya membaca laporan secara linear, tetapi dapat:

- melakukan pencarian informasi;
- membandingkan data;
- melakukan analisis tren;
- menghubungkan informasi keuangan dan nonkeuangan;
- melakukan analisis data dalam skala besar.

IFRS Foundation juga mengembangkan **IFRS Accounting Taxonomy** untuk membantu merepresentasikan informasi yang berkaitan dengan IFRS Accounting Standards dalam format digital yang terstruktur. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan pelaporan keuangan tidak hanya berkaitan dengan isi laporan, tetapi juga dengan cara informasi direpresentasikan dan digunakan secara digital.

**Dari Financial Report menuju Financial Information Ecosystem**

Perubahan tersebut dapat digambarkan:

$$\boldsymbol{Traditional\ Reporting}$$
$$Dokumen \rightarrow Dibaca \rightarrow Dianalisis$$

menjadi:

$$\boldsymbol{Digital\ Reporting}$$
$$Data \rightarrow Structured\ Information \rightarrow Automated\ Processing \rightarrow Analysis \rightarrow Decision$$

Namun, digitalisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pertimbangan manusia. Teknologi dapat membantu:

- mengolah data;
- mengidentifikasi pola;
- melakukan perbandingan;
- menyajikan informasi;
- mendeteksi anomali.

Tetapi keputusan mengenai apa yang material, bagaimana informasi harus dijelaskan, dan bagaimana pengguna harus memahami suatu kondisi tetap membutuhkan pertimbangan profesional.

**Pelaporan Keuangan sebagai Jembatan antara Perusahaan dan Pasar**

Pada perusahaan terbuka, pelaporan keuangan mempunyai dimensi yang lebih luas karena informasi yang diterbitkan dapat memengaruhi lingkungan informasi pasar.

Hubungan sederhananya:

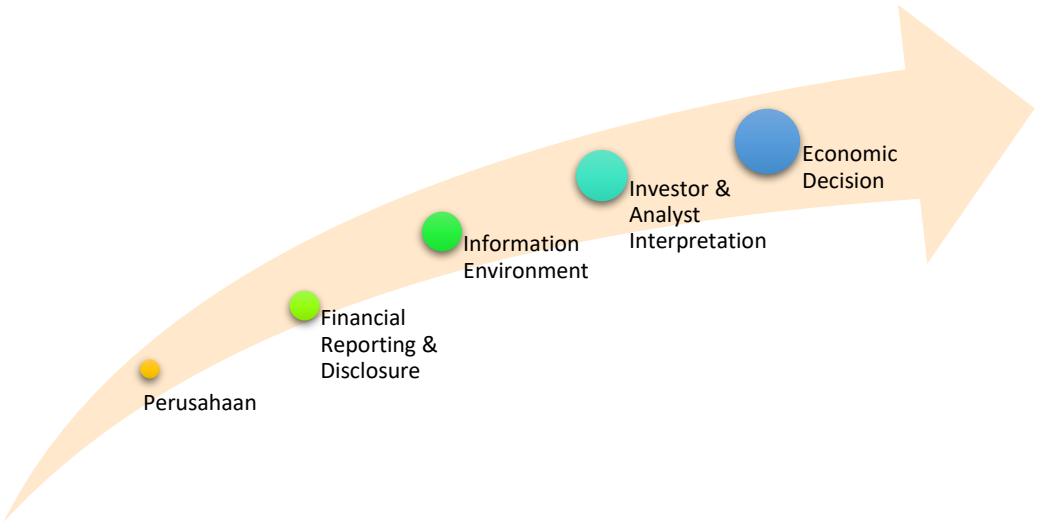


Literatur pelaporan keuangan menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peran dalam penilaian peluang investasi secara ex-ante serta pemantauan penggunaan modal secara ex-post.

Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif. Laporan keuangan merupakan bagian dari **infrastruktur informasi pasar**. Namun demikian, hubungan antara disclosure dan respons pasar tidak boleh dipahami secara sederhana bahwa semakin banyak informasi selalu menghasilkan respons pasar yang semakin baik. Kualitas, relevansi, kredibilitas, waktu penyampaian, serta cara informasi dikomunikasikan turut menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan.

**Integritas Komunikasi dalam Pelaporan Keuangan**

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar keputusan, integritas komunikasi menjadi prinsip penting. Integritas komunikasi berarti bahwa informasi yang disampaikan:

- tidak sengaja menyesatkan;
- tidak menyembunyikan informasi material melalui penyajian yang membingungkan;
- tidak menggunakan bahasa yang sengaja mengaburkan kondisi ekonomi;
- memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
- konsisten dengan informasi yang tersedia;
- disajikan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Dalam konteks ini, kualitas komunikasi tidak dapat dilepaskan dari etika profesi akuntansi. Seorang akuntan tidak cukup hanya bertanya:

*"Apakah angka ini sesuai dengan standar?"*

Tetapi juga perlu mempertimbangkan:

*"Apakah penyajian informasi ini memberikan gambaran yang dapat dipahami dan tidak menyesatkan pengguna?"*

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika laporan keuangan dilengkapi dengan narasi manajemen, grafik, indikator kinerja, dan berbagai bentuk informasi digital.

**Sintesis: Dari Reporting menuju Communication**

Pembahasan pada subbab ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah berkembang dari aktivitas yang berorientasi pada pencatatan dan penyajian angka menuju sistem komunikasi ekonomi yang lebih luas. Perubahan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

| Tahap | Fokus |
|---|---|
| Recording | Mencatat transaksi |
| Accounting Processing | Mengolah data transaksi |
| Reporting | Menyusun laporan |
| Disclosure | Menjelaskan informasi |
| Communication | Menyampaikan makna informasi |
| Interpretation | Memahami kondisi ekonomi |
| Decision Making | Menggunakan informasi untuk keputusan |

Dalam paradigma modern, laporan keuangan tidak seharusnya dipahami sebagai produk akhir yang pasif. Laporan keuangan merupakan **media komunikasi aktif** antara perusahaan dan pengguna informasi. Hal tersebut menjelaskan mengapa pembahasan mengenai penyajian laporan, catatan atas laporan keuangan, mandatory disclosure, voluntary disclosure, dan peristiwa setelah periode pelaporan menjadi bagian penting dari akuntansi keuangan modern.

## 5.2 ARSITEKTUR LAPORAN KEUANGAN DAN PERKEMBANGAN PENYAJIAN KONTEMPORER

Laporan keuangan merupakan bentuk utama penyajian informasi keuangan suatu entitas kepada pengguna. Setelah transaksi diproses melalui sistem akuntansi dan dikompilasi menjadi informasi keuangan, tahap berikutnya adalah menyajikan informasi tersebut dalam struktur yang memungkinkan pengguna memahami posisi, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas entitas.

Pada Bab 4 telah dibahas bagaimana transaksi diproses melalui siklus akuntansi hingga menghasilkan informasi yang siap digunakan untuk penyusunan laporan. Oleh karena itu, pembahasan pada subbab ini tidak lagi berfokus pada mekanisme pencatatan, jurnal, buku besar, neraca saldo, atau proses closing. Fokus pembahasan diarahkan pada arsitektur laporan keuangan, hubungan antar-komponen laporan, perkembangan penyajian, dan transformasi menuju pelaporan keuangan digital.

Dalam perspektif kontemporer, laporan keuangan tidak dapat dipandang sebagai kumpulan laporan yang berdiri sendiri. Setiap laporan memiliki fungsi tertentu dan saling melengkapi dalam membentuk gambaran ekonomi suatu entitas. Secara sederhana, arsitektur laporan keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

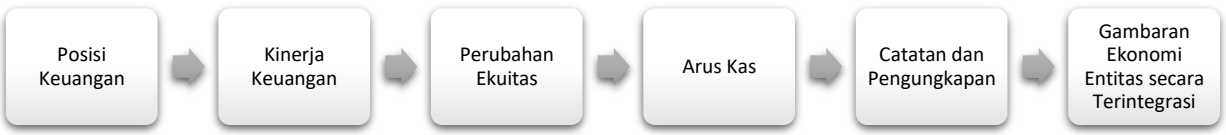

Kerangka Konseptual IFRS menjelaskan bahwa laporan keuangan bertujuan umum memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, serta arus kas dan perubahan lainnya yang membantu pengguna dalam menilai prospek arus kas masa depan dan pengelolaan sumber daya ekonomi entitas.

**Struktur Laporan Keuangan Lengkap**

Laporan keuangan lengkap terdiri atas beberapa komponen yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Secara umum, komponen tersebut meliputi:

1. laporan posisi keuangan;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas;
5. catatan atas laporan keuangan;
6. informasi komparatif yang dipersyaratkan.

Dalam konteks Indonesia, struktur tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penting bagi mahasiswa untuk memahami bahwa setiap laporan menjawab pertanyaan ekonomi yang berbeda.

| Komponen | Pertanyaan utama |
|---|---|
| Laporan posisi keuangan | Apa yang dimiliki dan menjadi kewajiban entitas pada tanggal tertentu? |
| Laporan laba rugi | Bagaimana kinerja keuangan selama periode? |
| Penghasilan komprehensif lain | Perubahan penghasilan/beban tertentu yang tidak seluruhnya masuk laba rugi |
| Perubahan ekuitas | Mengapa ekuitas berubah selama periode? |
| Arus kas | Dari mana kas diperoleh dan untuk apa digunakan? |
| Catatan | Bagaimana angka dan kebijakan dalam laporan harus dipahami? |

Dengan demikian, pengguna tidak seharusnya menilai 250sset250250aan hanya berdasarkan satu laporan.

**Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai posisi ekonomi entitas pada suatu tanggal tertentu.

Unsur utamanya 250sset250:

- 250sset;
- liabilitas;
- ekuitas.

Secara konseptual:

$$\boldsymbol{Aset} = \boldsymbol{Liabilitas} + \boldsymbol{Ekuitas}$$

Namun, fungsi laporan posisi keuangan tidak berhenti pada penyajian persamaan tersebut. Laporan ini memberikan gambaran mengenai struktur sumber daya dan klaim ekonomi suatu entitas.

**Aset.** Aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikendalikan entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Contohnya:

- kas;
- piutang;
- persediaan;
- aset tetap;
- aset takberwujud;
- aset investasi.

**Liabilitas.** Liabilitas menunjukkan kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi. Contohnya:

- utang usaha;
- pinjaman bank;
- liabilitas sewa;
- provisi;
- kewajiban lainnya.

**Ekuitas.** Ekuitas merupakan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dalam analisis, pengguna dapat menggunakan laporan posisi keuangan untuk memahami:

- struktur modal;
- likuiditas;
- leverage;
- komposisi aset;
- ketergantungan terhadap utang;
- kapasitas sumber daya perusahaan.

Dengan demikian, laporan posisi keuangan dapat dipandang sebagai snapshot ekonomi entitas pada tanggal pelaporan.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai kinerja keuangan selama periode tertentu. Komponen yang umumnya muncul antara lain:

- pendapatan;
- biaya atau beban;
- keuntungan;
- kerugian;
- laba atau rugi.

Namun, perkembangan standar terbaru menunjukkan perubahan penting dalam cara kinerja keuangan disajikan.

**Dari Laba Bersih menuju Pemahaman Kinerja yang Lebih Terstruktur**

Dalam praktik, pengguna sering menggunakan laba operasi, EBITDA, adjusted profit, dan berbagai ukuran kinerja lainnya. Permasalahan muncul ketika ukuran tersebut didefinisikan atau digunakan secara berbeda oleh perusahaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, IFRS Foundation menerbitkan **IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements** pada April 2024. IFRS 18 akan berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027 dan menggantikan IAS 1.

IFRS 18 memperkenalkan struktur baru dalam penyajian laporan laba rugi, termasuk kategori penghasilan dan beban serta subtotal tertentu untuk meningkatkan keterbandingan informasi kinerja. Salah satu perubahan penting adalah penyajian:

- laba atau rugi operasi;
- laba atau rugi sebelum pendanaan dan pajak penghasilan;
- laba atau rugi.

IFRS 18 juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan mengenai *management-defined performance measures* atau ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyajian laba tidak hanya berkaitan dengan berapa besar laba yang diperoleh, tetapi juga bagaimana kinerja tersebut diklasifikasikan dan dijelaskan kepada pengguna.

**Penghasilan Komprehensif Lain**

Selain laba rugi, terdapat penghasilan komprehensif lain atau *Other Comprehensive Income (OCI).* OCI mencakup penghasilan atau beban tertentu yang berdasarkan standar tidak diakui dalam laba rugi periode berjalan. Dengan demikian:

$$Total\ Comprehensive\ Income\ =\ Profit\ or\ Loss\ +\ Other\ Comprehensive\ Income$$

OCI dapat berkaitan dengan item-item tertentu seperti perubahan nilai instrumen tertentu, selisih kurs tertentu, atau komponen lainnya sesuai standar yang berlaku. Mahasiswa perlu memahami bahwa:

$$Tidak\ seluruh\ perubahan\ kekayaan\ ekonomi\ entitas\ langsung\ tercermin\ dalam\ laba\ rugi.$$

Konsep ini penting karena pengguna yang hanya melihat laba bersih dapat melewatkan perubahan tertentu yang memengaruhi ekuitas.

**Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan kepentingan residual pemilik selama suatu periode. Perubahan tersebut dapat berasal dari:

- laba atau rugi;
- penghasilan komprehensif lain;
- setoran modal;
- distribusi kepada pemilik;
- transaksi dengan pemilik lainnya.

Secara konseptual, laporan ini menjawab pertanyaan:

*"Mengapa jumlah ekuitas pada akhir periode berbeda dengan jumlah ekuitas pada awal periode?"*

Contoh sederhana:

| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Ekuitas awal | Rp. 300 miliar |
| Laba bersih | Rp. 50 miliar |
| Dividen | (Rp. 20 miliar) |
| Setoran modal | Rp. 30 miliar |
| Ekuitas akhir | Rp. 360 miliar |

Perubahan tersebut memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dari laporan posisi keuangan. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas memiliki fungsi sebagai jembatan antara posisi ekuitas awal dan posisi ekuitas akhir.

**Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode. Arus kas dikelompokkan ke dalam:

1. **Aktivitas Operasi.** Berkaitan dengan aktivitas utama penghasil pendapatan.
   *Contohnya:*
   - penerimaan kas dari pelanggan;
   - pembayaran kepada pemasok;
   - pembayaran gaji;
   - pembayaran beban operasi.
2. **Aktivitas Investasi.** Berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang atau investasi tertentu.
   *Contohnya:*
   - pembelian mesin;
   - penjualan aset tetap;
   - pembelian investasi;
   - pelepasan investasi.
3. **Aktivitas Pendanaan**
   Berkaitan dengan perubahan struktur pendanaan.
   *Contohnya:*
   - penerimaan pinjaman;
   - pelunasan pinjaman;
   - penerbitan saham;
   - pembayaran dividen sesuai ketentuan klasifikasi yang berlaku.

Laporan arus kas memiliki karakteristik berbeda dari laporan laba rugi. Perusahaan dapat mencatat laba tetapi menghadapi tekanan kas. Sebaliknya, arus kas tertentu dapat meningkat tanpa mencerminkan peningkatan laba operasi. Oleh karena itu, laporan arus kas membantu pengguna menjawab:

*"Apakah aktivitas perusahaan benar – benar menghasilkan atau menggunakan kas?"*

**Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Komponen Terintegrasi**

Catatan atas laporan keuangan sering dianggap sebagai bagian tambahan yang dibaca setelah laporan utama. Dalam perspektif yang lebih tepat, catatan merupakan bagian integral dari komunikasi laporan keuangan. Catatan membantu menjelaskan:

- dasar penyusunan laporan;
- kebijakan akuntansi;
- rincian akun;
- estimasi;
- judgement;
- risiko;
- komitmen;
- kontinjensi;
- transaksi pihak berelasi;
- informasi material lainnya.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan lengkap. Karena pembahasan mendalam mengenai catatan dan kebijakan akuntansi akan diberikan pada **Subbab 5.3**, pada bagian ini catatan cukup ditempatkan sebagai salah satu komponen arsitektur laporan.

**Hubungan Antar-Laporan Keuangan**

Kesalahan yang sering terjadi dalam mempelajari laporan keuangan adalah melihat setiap laporan secara terpisah. Padahal, laporan keuangan membentuk suatu sistem informasi yang saling berhubungan.

*Contohnya:*

| Laba bersih | Pembelian aset secara tunai | Penerimaan pinjaman |
|---|---|---|
| → memengaruhi **ekuitas** | → memengaruhi **aset**<br>→ memengaruhi **arus kas investasi** | → meningkatkan **kas**<br>→ meningkatkan **liabilitas**<br>→ muncul dalam **arus kas pendanaan** |

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai:




Sementara:



Sedangkan:




Dengan demikian, laporan keuangan sebaiknya dibaca sebagai **satu kesatuan informasi**.

**Informasi Komparatif**

Pelaporan keuangan modern tidak hanya memberikan informasi mengenai periode berjalan. Informasi komparatif memungkinkan pengguna melihat perubahan dari waktu ke waktu. *Misalnya:*

| Informasi | 2025 | 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | Rp. 400 M | Rp. 500 M | +25% |
| Laba bersih | Rp. 40 M | Rp. 50 M | +25% |
| Aset | Rp. 600 M | Rp. 750 M | +25% |
| Liabilitas | Rp. 300 M | Rp. 420 M | +40% |

Tanpa informasi komparatif, peningkatan laba 25% terlihat positif. Namun, setelah dibandingkan dengan liabilitas yang meningkat 40%, pengguna dapat melakukan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, informasi komparatif memungkinkan:

- analisis tren;
- evaluasi pertumbuhan;
- identifikasi perubahan struktur;
- evaluasi konsistensi;
- penilaian perkembangan risiko.

**Perkembangan IFRS 18: Menuju Penyajian Kinerja yang Lebih Informatif**

IFRS 18 merupakan salah satu perkembangan penting dalam pelaporan keuangan kontemporer. Standar ini dirancang untuk meningkatkan:

1. keterbandingan informasi kinerja;
2. transparansi ukuran kinerja yang digunakan manajemen;
3. struktur laporan laba rugi;
4. informasi agregasi dan disagregasi;
5. kegunaan laporan keuangan bagi investor.

IFRS Foundation menjelaskan bahwa IFRS 18 memperkenalkan subtotal yang ditentukan dalam laporan laba rugi dan persyaratan baru terkait management-defined performance measures. Perubahan tersebut penting karena praktik perusahaan sering menggunakan ukuran kinerja alternatif yang tidak selalu didefinisikan secara seragam. *Contohnya:*

- adjusted operating profit;
- adjusted EBITDA;
- adjusted earnings.

Dalam lingkungan sebelumnya, investor dapat mengalami kesulitan ketika perusahaan yang berbeda menggunakan istilah serupa dengan definisi yang berbeda. IFRS 18 berupaya meningkatkan transparansi mengenai ukuran tersebut melalui persyaratan pengungkapan.

**PSAK 118 dan Transformasi Penyajian di Indonesia**

Perkembangan IFRS 18 memiliki konsekuensi bagi lingkungan pelaporan keuangan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan **PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan** pada 28 Mei 2025. PSAK 118 dijadwalkan efektif pada **1 Januari 2027** dan menggantikan PSAK 201 dalam aspek yang diatur oleh standar baru tersebut. PSAK 118 membawa perubahan penting pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Di antaranya:

- pengelompokan penghasilan dan beban dalam kategori tertentu;
- subtotal baru pada laporan laba rugi;
- informasi mengenai ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen;
- prinsip agregasi dan disagregasi informasi;
- peningkatan kualitas pengungkapan.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi tidak bersifat statis. Standar terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan pengguna informasi.

**Agregasi dan Disagregasi Informasi**

Salah satu isu penting dalam penyajian laporan keuangan modern adalah menentukan tingkat agregasi informasi. Terlalu banyak agregasi dapat membuat informasi penting tersembunyi. Sebaliknya, terlalu banyak disagregasi dapat membuat laporan menjadi sulit dibaca. *Contohnya:*

**Agregasi**

*Beban operasi = Rp100 miliar.*

Informasi tersebut ringkas, tetapi kurang memberikan detail.

**Disagregasi**

Beban operasi:

- *gaji = Rp40 miliar;*
- *utilitas = Rp15 miliar;*
- *pemasaran = Rp20 miliar;*
- *depresiasi = Rp15 miliar;*
- *lainnya = Rp10 miliar.*

Pengguna memperoleh informasi yang lebih rinci. Persoalannya adalah menentukan tingkat rincian yang paling informatif. Perkembangan IFRS 18 memberikan perhatian lebih besar terhadap prinsip agregasi dan disagregasi, karena cara informasi dikelompokkan dapat memengaruhi kemampuan pengguna memahami kinerja dan posisi keuangan.

**Digital Financial Reporting**

Perkembangan teknologi membawa perubahan dari laporan keuangan berbasis dokumen menuju **laporan keuangan berbasis data**.

Model tradisional:

$$Accounting\ System \rightarrow Financial\ Statements \rightarrow PDF/Printed\ Report$$

Model digital:

$$Accounting\ System \rightarrow Structured\ Data \rightarrow Digital\ Reporting \rightarrow Analysis \rightarrow Decision$$

Perubahan ini membuat informasi keuangan semakin mudah:

- dicari;
- dibandingkan;
- diolah;
- dianalisis;
- diintegrasikan dengan sistem lain.

Salah satu perkembangan penting adalah **XBRL** *(eXtensible Business Reporting Language).* XBRL memungkinkan informasi bisnis dan keuangan direpresentasikan dalam format terstruktur sehingga dapat diproses oleh sistem komputer. IFRS Foundation menyediakan **IFRS Accounting Taxonomy** yang membantu merepresentasikan informasi berdasarkan IFRS Accounting Standards dalam bentuk digital terstruktur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masa depan pelaporan keuangan tidak hanya berbicara mengenai apa yang dilaporkan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat dibaca dan diproses oleh manusia maupun mesin.

**Dari Financial Statements menuju Machine-Readable Reporting**

Dalam lingkungan digital, laporan keuangan dapat memiliki dua kelompok pengguna:

**Human Users**

- investor;
- kreditor;
- analis;
- manajemen;
- regulator.

**Machine Users**

- sistem analitik;
- aplikasi investasi;
- artificial intelligence;
- financial data platform;
- regulatory technology.

Kondisi tersebut menghasilkan kebutuhan terhadap informasi yang tidak hanya:

$$human - readable$$

tetapi juga:

$$machine - readable.$$

Perubahan ini memiliki implikasi besar bagi akuntansi. Jika laporan hanya dirancang untuk dibaca manusia, struktur dan penyajiannya dapat berbeda dengan laporan yang juga dirancang untuk diproses mesin. Dengan structured financial data, informasi dapat digunakan untuk:

- automated comparison;
- trend analysis;
- financial screening;
- anomaly detection;

- investment analytics;
- regulatory monitoring.

Namun, kemampuan mesin untuk memproses data tidak berarti mesin dapat menggantikan interpretasi profesional. Data tetap membutuhkan konteks, kebijakan akuntansi, judgement, dan pemahaman terhadap lingkungan bisnis.

**Tantangan Penyajian Laporan Keuangan Modern**

Perubahan menuju penyajian kontemporer menghasilkan beberapa tantangan.

1. **Complexity.** Semakin banyak kebutuhan disclosure dapat meningkatkan kompleksitas laporan.
2. **Comparability.** Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi dapat dibandingkan antarperiode dan, sejauh relevan, antarentitas.
3. **Information Overload.** Terlalu banyak informasi dapat menyulitkan pengguna menemukan informasi yang penting.
4. **Digital Integrity.** Informasi digital harus tetap akurat dan konsisten ketika dipindahkan antarplatform.
5. **Machine Interpretability.** Informasi harus mempunyai struktur dan taxonomy yang tepat agar dapat diproses oleh sistem.
6. **Professional Judgement.** Tidak seluruh keputusan penyajian dapat diselesaikan melalui otomatisasi.

Dengan demikian, perkembangan digital tidak mengurangi kebutuhan terhadap akuntan, tetapi mengubah kompetensi yang diperlukan.

**Implikasi Perkembangan Penyajian bagi Profesi Akuntansi**

Perubahan standar dan digitalisasi mengubah kompetensi yang diperlukan oleh akuntan. Akuntan masa kini tidak cukup hanya mampu:

- menyusun laporan;
- menghitung saldo;
- mengikuti format.

Akuntan juga harus mampu:

- memahami tujuan penyajian;
- membaca hubungan antar-laporan;
- menjelaskan perubahan standar;
- memahami structured reporting;
- memahami taxonomy;
- menganalisis informasi digital;
- mengevaluasi ukuran kinerja alternatif;
- mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

Dengan demikian, perkembangan pelaporan keuangan menggeser kompetensi akuntan dari:

$$\text{“}preparer\ of\ financial\ statements\text{”}$$

menuju:

$$\text{“}financial\ reporting\ and\ information\ specialist.\text{”}$$

## 5.3 ANATOMI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

Laporan keuangan utama menyajikan informasi dalam bentuk angka yang relatif ringkas. Namun, angka-angka tersebut tidak selalu mampu menjelaskan secara lengkap bagaimana suatu nilai diperoleh, asumsi apa yang digunakan, kebijakan apa yang diterapkan, serta risiko dan ketidakpastian apa yang melekat pada informasi tersebut. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melaporkan aset tetap sebesar Rp500 miliar. Angka tersebut memberikan informasi mengenai nilai aset pada tanggal pelaporan, tetapi belum menjawab sejumlah pertanyaan penting:

- metode penyusutan apa yang digunakan?
- berapa umur manfaat aset?
- berapa akumulasi penyusutannya?
- apakah terdapat perubahan estimasi?
- apakah aset mengalami penurunan nilai?
- apakah terdapat aset yang dijaminkan?
- pertimbangan apa yang digunakan manajemen dalam menentukan nilai tersebut?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut umumnya ditemukan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian, CALK bukan sekadar bagian tambahan atau lampiran administratif. CALK merupakan instrumen penting untuk memberikan konteks, rincian, kebijakan, estimasi, judgement, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Jika Subbab 5.2 berfokus pada arsitektur laporan keuangan, maka Subbab 5.3 berfokus pada:

*"Apa yang berada di balik angka laporan keuangan?"*

Secara konseptual:

$$Angka\ dalam\ Laporan\ Keuangan$$
$$\downarrow$$
$$Kebijakan + Estimasi + Judgement + Rincian + Risiko$$
$$\downarrow$$
$$Pemahaman\ Pengguna$$
$$\downarrow$$
$$Transparansi$$

**Fungsi Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan memiliki beberapa fungsi utama.

1. **Memberikan Penjelasan.** Catatan menjelaskan informasi yang terlalu kompleks atau terlalu rinci untuk ditampilkan dalam laporan utama.
2. **Memberikan Rincian.** Satu angka agregat dalam laporan utama dapat dijabarkan menjadi beberapa komponen.

   Misalnya:

   *Utang = Rp. 200 miliar.*

   Dalam catatan dapat dijelaskan:

- utang usaha;
- pinjaman bank;
- liabilitas sewa;
- utang pajak;
- kewajiban lainnya.

3. **Menjelaskan Kebijakan Akuntansi.** Pengguna dapat mengetahui bagaimana transaksi dan saldo tertentu diperlakukan dalam penyusunan laporan keuangan.
4. **Menjelaskan Judgement dan Estimasi.** Beberapa angka akuntansi tidak dapat ditentukan hanya melalui observasi langsung. Manajemen perlu menggunakan estimasi dan pertimbangan.
5. **Memberikan Informasi Risiko.** Catatan dapat menjelaskan risiko keuangan maupun ketidakpastian yang relevan.
6. **Memberikan Informasi Tambahan.** Informasi material yang tidak dapat disajikan secara memadai dalam laporan utama dapat dijelaskan melalui catatan.

Oleh karena itu, hubungan antara laporan utama dan catatan dapat dipahami sebagai:

*Laporan utama menunjukkan "apa yang terjadi", sedangkan catatan membantu menjelaskan "bagaimana dan mengapa angka tersebut terbentuk".*

**Kebijakan Akuntansi sebagai Konteks Informasi**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang digunakan entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi penting karena suatu transaksi dapat menghasilkan informasi yang berbeda apabila dasar pengakuan atau pengukurannya berbeda. Sebagai contoh, perusahaan memiliki aset tetap. Pengguna perlu mengetahui:

- bagaimana aset tersebut diukur;
- bagaimana penyusutan dihitung;
- bagaimana biaya setelah perolehan diperlakukan;
- bagaimana penurunan nilai ditentukan.

Informasi tersebut memberikan konteks terhadap angka yang terdapat dalam laporan.

IAS 8/PSAK 208 mengatur pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan. Dalam perkembangan terbaru standar, perhatian juga diberikan pada pengungkapan **material accounting policy information**, bukan sekadar daftar panjang kebijakan yang kurang relevan bagi pengguna.

**Dari "Significant Accounting Policies" menuju "Material Accounting Policy Information"**

Salah satu perkembangan penting dalam disclosure adalah perubahan cara perusahaan memandang informasi kebijakan akuntansi. Pendekatan tradisional cenderung menghasilkan bagian laporan yang berisi daftar panjang kebijakan akuntansi. Persoalannya, tidak semua kebijakan mempunyai tingkat kepentingan yang sama bagi pengguna.

IASB melakukan perubahan untuk menekankan pengungkapan material accounting policy information. Tujuannya adalah agar perusahaan memberikan informasi kebijakan yang benar-benar membantu pengguna memahami informasi material dalam laporan keuangan.

Perubahan ini mencerminkan prinsip:

*Disclosure yang baik bukan disclosure yang paling panjang, tetapi disclosure yang paling berguna.*

*Contoh*

*Perusahaan memiliki transaksi derivatif yang kompleks.*

Jika kebijakan akuntansi mengenai derivatif memiliki pengaruh material terhadap angka laporan keuangan, kebijakan tersebut menjadi penting untuk dijelaskan secara memadai. Sebaliknya, kebijakan yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna tidak perlu memperoleh penjelasan yang berlebihan. Dengan demikian, materialitas menjadi dasar penting dalam menentukan **kedalaman disclosure**.

**Disclosure atas Judgement Manajemen**

Dalam banyak transaksi, akuntansi tidak dapat dilakukan hanya melalui aturan mekanis. Manajemen harus menggunakan *professional judgement. Contohnya:*

- menentukan apakah suatu aset mengalami impairment;
- menentukan klasifikasi transaksi tertentu;
- menilai apakah suatu kewajiban memenuhi kriteria pengakuan;
- menentukan apakah suatu transaksi memiliki substansi ekonomi tertentu;
- menentukan tingkat materialitas tertentu dalam penerapan kebijakan.

Judgement menjadi penting karena dua perusahaan dapat menghadapi transaksi yang serupa tetapi memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Catatan atas laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai judgement signifikan yang digunakan manajemen. Tujuannya bukan agar pengguna mengetahui seluruh proses berpikir manajemen, tetapi agar pengguna memahami bagian-bagian laporan yang paling dipengaruhi oleh pertimbangan profesional.

**Disclosure atas Estimasi dan Ketidakpastian**

Selain judgement, laporan keuangan juga mengandung estimasi akuntansi. Estimasi diperlukan ketika nilai suatu transaksi tidak dapat diketahui secara pasti pada tanggal pelaporan. Contohnya:

- umur manfaat aset;
- nilai residu;
- kerugian kredit ekspektasian;
- provisi;
- kewajiban imbalan kerja;
- nilai wajar;
- impairment;
- kewajiban kontinjensi tertentu.

Sebagai ilustrasi, perusahaan memiliki piutang Rp100 miliar. Tidak semua piutang tersebut dapat diasumsikan pasti tertagih. Manajemen perlu mengestimasi kemungkinan kerugian kredit.

Maka:

$$Piutang\ Rp100\ Miliar$$
$$\downarrow$$
$$Estimasi\ risiko\ kredit$$
$$\downarrow$$
$$Expected\ Credit\ Loss$$
$$\downarrow$$
$$Nilai\ tercatat\ bersih$$

Pengguna perlu memahami bahwa nilai tersebut bukan sekadar angka objektif, tetapi dapat mengandung estimasi dan asumsi. Karena itu, disclosure mengenai sumber ketidakpastian estimasi membantu pengguna memahami tingkat ketidakpastian yang melekat dalam laporan keuangan.

**Disclosure atas Risiko dan Ketidakpastian**

Laporan keuangan juga perlu memberikan informasi yang membantu pengguna memahami risiko tertentu. Risiko dapat berkaitan dengan:

- risiko kredit;
- risiko likuiditas;
- risiko pasar;
- risiko valuta asing;
- risiko suku bunga;
- risiko harga;
- ketidakpastian estimasi.

Misalnya perusahaan memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Laporan posisi keuangan mungkin hanya menunjukkan nilai kewajiban. Catatan kemudian dapat memberikan informasi mengenai:

- mata uang pinjaman;
- jatuh tempo;
- suku bunga;
- sensitivitas terhadap perubahan kurs;
- strategi manajemen risiko.

Informasi tersebut memberikan konteks yang lebih luas terhadap angka kewajiban. Dengan demikian, disclosure risiko membantu pengguna bergerak dari pertanyaan:

$$"Berapa\ jumlah\ kewajibannya?"$$

menuju:

$$"Seberapa\ besar\ risiko\ yang\ melekat\ pada\ kewajiban\ tersebut?"$$

**Struktur Anatomi Catatan atas Laporan Keuangan**

Secara konseptual, CALK dapat dipandang memiliki beberapa lapisan.

**Lapisan 1 — Identitas dan Dasar Penyusunan**

Berisi informasi seperti:

- identitas entitas;
- aktivitas utama;
- dasar penyusunan;
- mata uang pelaporan;
- dasar pengukuran.

**Lapisan 2 — Kebijakan Akuntansi**

Menjelaskan kebijakan material yang digunakan.

**Lapisan 3 — Rincian Pos**

Memberikan rincian akun-akun dalam laporan utama.

**Lapisan 4 — Judgement dan Estimasi**

Menjelaskan area yang memiliki ketidakpastian atau memerlukan pertimbangan signifikan.

**Lapisan 5 — Risiko dan Ketidakpastian**

Memberikan informasi mengenai risiko yang relevan terhadap posisi dan kinerja keuangan.

**Lapisan 6 — Informasi Tambahan**

Mencakup informasi material lain yang diperlukan pengguna.

Struktur tersebut dapat digambarkan:

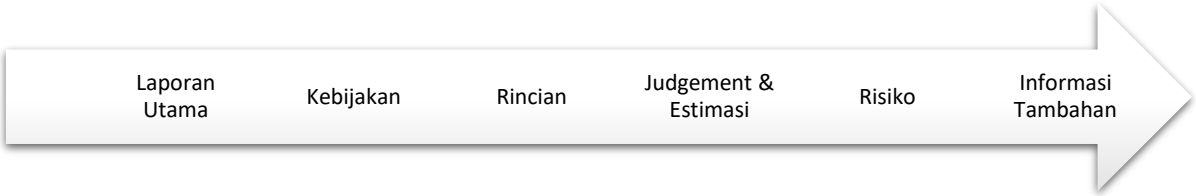


Inilah yang dapat disebut sebagai *anatomi transparansi akuntansi.*

**Readability dan Understandability dalam Disclosure**

Transparansi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi, tetapi juga oleh cara informasi ditulis. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang sangat banyak, tetapi jika bahasa yang digunakan terlalu kompleks, pengguna tetap mengalami kesulitan memahami informasi tersebut. Penelitian Souza et al. mengenai kompleksitas bahasa dalam narrative accounting disclosure menunjukkan bahwa karakteristik keterbacaan merupakan aspek penting dalam memahami kualitas pengungkapan. Penelitian tersebut menemukan hubungan antara kompleksitas narasi dan kondisi kinerja perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas disclosure memiliki dimensi:

$$Quantity \rightarrow Quality \rightarrow Understandability$$

Bukan hanya:

$$More\ disclosure = Better\ disclosure$$

***Contoh***

Pernyataan:

"Perusahaan melakukan pengakuan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi manajemen yang mempertimbangkan sejumlah asumsi makroekonomi."
masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Disclosure yang lebih informatif dapat menjelaskan:

- asumsi utama;
- periode proyeksi;
- tingkat pertumbuhan;
- tingkat diskonto;
- sensitivitas;
- faktor yang menyebabkan perubahan estimasi.

Dengan demikian, disclosure menjadi lebih mudah digunakan untuk analisis.

**Transparansi versus Information Overload**

Perusahaan menghadapi dilema dalam menentukan jumlah informasi yang akan diungkapkan.
Jika informasi terlalu sedikit:

$$Under - disclosure$$

Pengguna tidak memperoleh konteks yang cukup.
Jika informasi terlalu banyak:

$$Over - disclosure$$

Informasi penting dapat tenggelam di antara informasi yang kurang material.
Hubungannya dapat digambarkan:




Oleh karena itu, transparansi yang baik tidak berarti membuka seluruh informasi tanpa batas. Transparansi berarti menyediakan informasi yang material dan diperlukan untuk memahami kondisi ekonomi entitas.

**Disclosure dan Agregasi Informasi**

Perkembangan pelaporan modern menempatkan perhatian pada bagaimana informasi diagregasikan. Misalnya perusahaan mempunyai lima segmen bisnis.
Jika seluruh pendapatan digabung:

*Pendapatan = Rp1 triliun.*

Pengguna tidak mengetahui kontribusi setiap segmen.
Namun jika perusahaan memberikan rincian:

| Segmen | Pendapatan |
|---|---|
| Digital | Rp. 400 M |
| Retail | Rp. 250 M |
| Manufaktur | Rp. 200 M |

| | |
|---|---|
| Jasa | Rp. 100 M |
| Lainnya | Rp. 50 M |

pengguna dapat memahami struktur bisnis dengan lebih baik. Namun, disagregasi yang terlalu detail juga dapat menghasilkan informasi yang sulit dikelola.

Karena itu, penyajian modern berusaha menemukan keseimbangan antara:

$$\boldsymbol{aggregation}$$

dan

$$\boldsymbol{disaggregation}.$$

Pembahasan ini juga sejalan dengan perkembangan IFRS 18 yang memberikan perhatian lebih besar terhadap bagaimana informasi dikumpulkan dan dipisahkan dalam laporan keuangan.

**Catatan atas Laporan Keuangan dalam Lingkungan Digital**

Digitalisasi mengubah cara pengguna membaca catatan. Pada laporan konvensional, pengguna membaca catatan secara berurutan. Dalam lingkungan digital, pengguna dapat melakukan:

- pencarian kata kunci;
- hyperlink antarbagian;
- navigasi langsung ke akun;
- perbandingan antarperiode;
- ekstraksi data;
- analisis otomatis.

Hal tersebut membuka peluang untuk membangun *digital notes to financial statements.*

Misalnya pengguna mengklik:

$$Property, Plant\ and\ Equipment$$

dan sistem langsung menampilkan:

- nilai tercatat;
- rincian aset;
- kebijakan penyusutan;
- perubahan saldo;
- impairment;
- komitmen terkait.

Dengan demikian, catatan berubah dari **dokumen naratif** menjadi bagian dari *financial information ecosystem.*

**Machine-Readable Disclosure**

Perkembangan digital juga mendorong kebutuhan agar informasi tidak hanya dapat dibaca manusia, tetapi dapat diproses mesin. Konsep tersebut dikenal sebagai: *Machine-readable financial information.* Dalam model ini, data keuangan mempunyai struktur dan taxonomy tertentu sehingga dapat digunakan oleh sistem komputer. Manfaatnya antara lain:

- automated data extraction;
- comparative analysis;
- financial screening;

- regulatory monitoring;
- financial analytics;
- artificial intelligence.

IFRS Accounting Taxonomy merupakan salah satu contoh infrastruktur yang mendukung representasi informasi berdasarkan IFRS dalam format digital terstruktur. Dengan demikian, perkembangan disclosure dapat dilihat sebagai:

$$Paper\ Disclosure$$
$$\downarrow$$
$$Electronic\ Disclosure$$
$$\downarrow$$
$$Structured\ Disclosure$$
$$\downarrow$$
$$Machine - Readable\ Disclosure$$
$$\downarrow$$
$$Intelligent\ Financial\ Analysis$$

**Artificial Intelligence dan Analisis Disclosure**

Teknologi artificial intelligence membuka kemungkinan baru dalam membaca dan menganalisis catatan laporan keuangan. AI dapat digunakan untuk:

- mengidentifikasi istilah penting;
- membandingkan disclosure antarperiode;
- mendeteksi perubahan kebijakan;
- menemukan pola tertentu dalam narasi;
- mengklasifikasikan risiko;
- membantu analisis sentimen;
- menemukan perubahan bahasa yang signifikan.

Sebagai contoh, sistem dapat membandingkan catatan tahun 2025 dan 2026 kemudian menunjukkan bahwa perusahaan mengubah penjelasan mengenai:

$$\boldsymbol{impairment, revenue\ recognition, atau\ liquidity\ risk.}$$

Namun, AI tetap mempunyai keterbatasan.

AI dapat membantu:

$$\boldsymbol{mencari\ dan\ mengolah\ informasi}$$

tetapi tidak otomatis menentukan:

$$\boldsymbol{apa\ makna\ ekonomi\ dari\ informasi\ tersebut.}$$

Interpretasi tetap membutuhkan pemahaman standar akuntansi, konteks bisnis, dan

**Prinsip-Prinsip Transparansi Akuntansi**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menyusun disclosure.

**Prinsip 1 — Materiality First**

Prioritaskan informasi yang material.

**Prinsip 2 — Context Matters**

Berikan konteks terhadap angka.

**Prinsip 3 — Explain the Judgement**

Jelaskan area yang sangat bergantung pada pertimbangan manajemen.

**Prinsip 4 — Explain the Uncertainty**

Jelaskan sumber ketidakpastian yang signifikan.

**Prinsip 5 — Avoid Information Overload**

Jangan mengubur informasi penting di antara informasi yang tidak material.

**Prinsip 6 — Make It Understandable**

Gunakan struktur dan bahasa yang memungkinkan pengguna memahami informasi.

**Prinsip 7 — Digital Accessibility**

Dalam lingkungan digital, informasi harus semakin mudah dicari, diakses, dibandingkan, dan diproses.

## 5.4 MANDATORY DAN VOLUNTARY DISCLOSURE

Tidak seluruh informasi yang disampaikan perusahaan kepada publik memiliki status yang sama. Sebagian informasi harus disampaikan karena diwajibkan oleh standar akuntansi, peraturan pasar modal, atau ketentuan regulator. Sebagian lainnya diberikan berdasarkan keputusan manajemen karena dianggap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun pengguna informasi. Perbedaan tersebut melahirkan dua konsep utama dalam pelaporan perusahaan, yaitu:

1. mandatory disclosure, dan
2. voluntary disclosure.

Mandatory disclosure berkaitan dengan informasi yang secara normatif harus disampaikan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, voluntary disclosure merupakan informasi tambahan yang diberikan perusahaan di luar batas minimum yang diwajibkan.

Namun, perkembangan penelitian menunjukkan bahwa membedakan keduanya secara terlalu kaku dapat menyederhanakan kenyataan. Cooke, McMeeking, dan Zeff (2024) mengusulkan pendekatan **continuum of disclosure**, yaitu suatu spektrum yang bergerak dari pengungkapan yang benar-benar sukarela dan inovatif sampai pengungkapan yang sepenuhnya diwajibkan dan diawasi. Dengan demikian, fokus subbab ini bukan lagi pada **"apa isi disclosure"**, yang telah dibahas pada 5.3, tetapi pada:

***Mengapa perusahaan mengungkapkan informasi tertentu, bagaimana keputusan disclosure dibuat, dan apa konsekuensinya bagi pasar serta pemangku kepentingan?***

**Konsep Mandatory Disclosure**

Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan berdasarkan kerangka regulasi tertentu. Sumber kewajiban dapat berasal dari:

- standar akuntansi;
- peraturan regulator;
- ketentuan pasar modal;
- peraturan perusahaan terbuka;
- ketentuan perpajakan tertentu;
- ketentuan sektoral;
- peraturan pemerintah.

Tujuan utama mandatory disclosure adalah membangun **minimum information environment** yang harus tersedia bagi pengguna. Tanpa kewajiban tersebut, perusahaan dapat memiliki insentif untuk hanya memberikan informasi yang menguntungkan atau informasi yang mendukung kepentingannya sendiri. Dengan adanya kewajiban, perusahaan memiliki batas minimum informasi yang harus dipenuhi. *Secara sederhana:*

$$Regulasi$$
$$\downarrow$$
$$Kewajiban\ Pengungkapan$$
$$\downarrow$$
$$Minimum\ Information\ Set$$
$$\downarrow$$
$$Public\ Information\ Environment$$

Mandatory disclosure dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk membentuk tingkat minimum transparansi perusahaan.

**Tujuan Mandatory Disclosure**

Mandatory disclosure memiliki beberapa tujuan.

1. **Menetapkan Minimum Transparency.** Regulator menetapkan informasi minimum yang harus tersedia.
2. **Meningkatkan Comparability.** Informasi yang diwajibkan membantu pengguna membandingkan perusahaan.
3. **Melindungi Pengguna Informasi.** Investor dan kreditor memperoleh hak atas informasi minimum yang diperlukan.
4. **Mengurangi Information Advantage.** Perusahaan dan pihak internal tidak sepenuhnya menguasai informasi tanpa adanya kewajiban disclosure.
5. **Mendukung Efisiensi Pasar.** Ketersediaan informasi yang lebih konsisten dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Literatur mengenai kepatuhan terhadap mandatory disclosure IFRS menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan faktor yang memengaruhinya menjadi bidang penelitian penting. Tsalavoutas, Tsoligkas, dan Evans (2020), misalnya, melakukan structured literature review terhadap penelitian kepatuhan mandatory disclosure IFRS dan menunjukkan bahwa isu compliance, pengukuran tingkat kepatuhan, materialitas, serta konsekuensi pasar merupakan area penting dalam penelitian disclosure.

**Mandatory Disclosure dan Compliance**

Adanya kewajiban tidak secara otomatis berarti seluruh perusahaan mengungkapkan informasi secara sempurna. Terdapat perbedaan antara:

***Disclosure Requirement***

dan

***Disclosure Compliance***

Perusahaan dapat berada pada kondisi:

- memenuhi seluruh persyaratan;
- memenuhi sebagian persyaratan;
- melakukan kesalahan administratif;
- menghilangkan informasi tertentu;
- memberikan informasi tetapi dengan kualitas yang berbeda.

Karena itu, regulator dan auditor mempunyai peran penting dalam memastikan kepatuhan. Secara konseptual:




Tanpa monitoring dan enforcement, mandatory disclosure dapat kehilangan sebagian efektivitasnya.

**Konsep Voluntary Disclosure**

*Voluntary disclosure* merupakan informasi yang diberikan perusahaan atas inisiatif manajemen di luar batas minimum pengungkapan yang diwajibkan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan:

- strategi perusahaan;
- prospek bisnis;
- target pertumbuhan;
- kebijakan manajemen;
- perkembangan operasional;
- risiko strategis;
- informasi nonkeuangan;
- indikator kinerja tertentu;
- perkembangan teknologi;
- informasi keberlanjutan;

- informasi yang dianggap relevan bagi investor.

Namun, voluntary disclosure tidak berarti perusahaan bebas mengungkapkan informasi tanpa batas. Manajemen tetap harus mempertimbangkan:

- relevansi;
- materialitas;
- kerahasiaan;
- risiko hukum;
- risiko kompetitif;
- konsistensi;
- reputasi;
- kebutuhan investor.

**Mengapa Perusahaan Melakukan Voluntary Disclosure?**

Keputusan melakukan voluntary disclosure dapat dipengaruhi oleh berbagai motif.

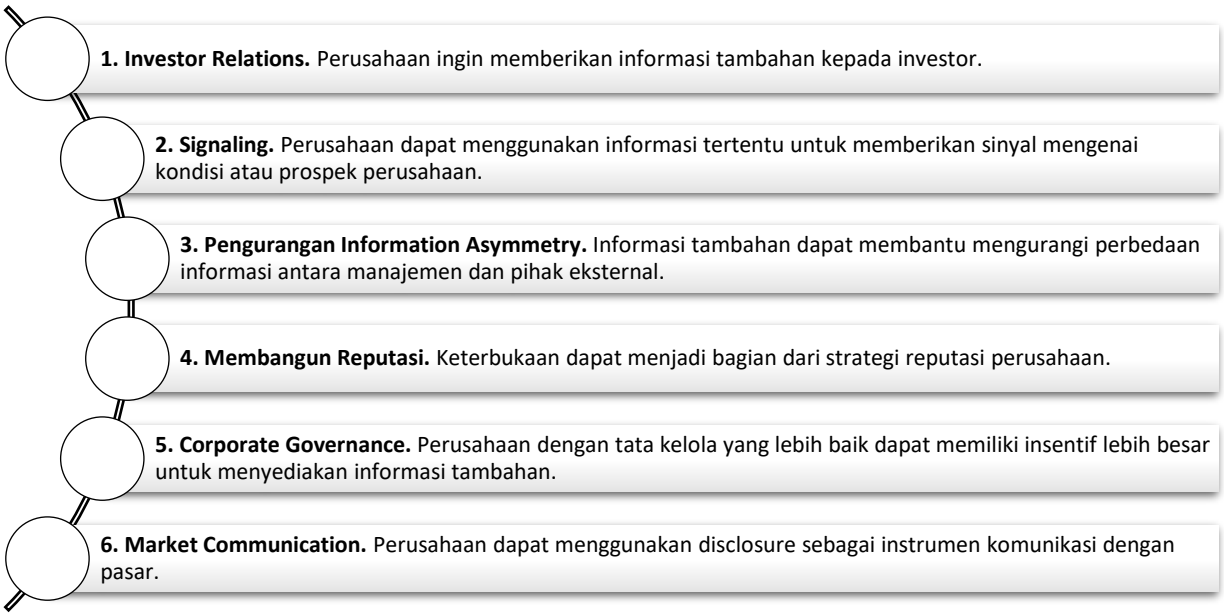


Penelitian mengenai corporate governance dan voluntary disclosure menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan dapat berkaitan dengan tingkat voluntary disclosure dalam laporan tahunan.

**Mandatory versus Voluntary Disclosure**

Perbedaan keduanya dapat diringkas sebagai berikut.

| Aspek | Mandatory Disclosure | Voluntary Disclosure |
|---|---|---|
| Dasar | Regulasi/standar | Inisiatif manajemen |
| Sifat | Wajib | Tidak selalu wajib |
| Tujuan utama | Minimum transparency | Informasi tambahan/strategis |
| Pengawasan | Relatif lebih formal | Lebih bergantung pada governance dan pasar |
| Risiko ketidakpatuhan | Sanksi/regulatory consequences | Risiko reputasi/pasar |
| Fleksibilitas | Relatif rendah | Relatif tinggi |

| Fokus | Compliance | Communication dan strategy |
|---|---|---|
| Contoh | Informasi yang diwajibkan standar | Informasi tambahan mengenai strategi |

Namun, tabel tersebut tidak boleh dipahami sebagai pemisahan absolut. Literatur terbaru justru menunjukkan bahwa mandatory dan voluntary disclosure lebih tepat dipahami sebagai **continuum**, bukan dua kategori yang selalu berdiri sendiri.

**Disclosure Continuum**

Konsep **disclosure continuum** menggambarkan disclosure sebagai spektrum.

Secara sederhana:

$$Purely\ Voluntary\ \&\ Innovative$$
$$\downarrow$$
$$Voluntary\ +\ Best\ Practice$$
$$\downarrow$$
$$Voluntary\ dengan\ Peer\ Pressure$$
$$\downarrow$$
$$Mandatory\ dengan\ Monitoring\ Terbatas$$
$$\downarrow$$
$$Mandatory\ dengan\ Enforcement$$
$$\downarrow$$
$$Fully\ Compliant\ Mandatory\ Disclosure$$

Pendekatan ini penting karena dalam praktik terdapat area abu-abu. Misalnya perusahaan mengungkapkan suatu informasi karena:

- tidak secara eksplisit diwajibkan;
- tetapi direkomendasikan regulator;
- menjadi praktik umum industri;
- diharapkan investor;
- atau dilakukan karena perusahaan ingin mengikuti perusahaan pesaing.

*Apakah informasi tersebut benar-benar sukarela?*

Jawabannya belum tentu.

Cooke et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan mandatory dan voluntary disclosure lebih kompleks daripada klasifikasi biner sederhana. Mereka menekankan pentingnya melihat hubungan antara disclosure, categorisation, labelling, dan enforcement.

**Agency Theory dan Disclosure**

Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk memahami disclosure adalah **agency theory**. Dalam hubungan keagenan terdapat:

$$\boldsymbol{Principal \rightarrow Shareholder/Investor}$$

dan

$$\boldsymbol{Agent \rightarrow Management}$$

Manajemen memiliki akses terhadap informasi internal yang lebih besar dibandingkan investor. Situasi tersebut dapat menciptakan:

$$\boldsymbol{Information\ Asymmetry}$$

Disclosure dapat digunakan untuk mengurangi sebagian kesenjangan tersebut.
Secara konseptual:

$$\boldsymbol{Information\ Asymmetry}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Disclosure}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{More\ Information\ Available}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Reduced\ Information\ Gap}$$

Namun, disclosure tidak selalu sepenuhnya menghilangkan asimetri informasi. Manajemen tetap memiliki informasi internal yang tidak tersedia bagi publik.

**Signaling Theory dalam Disclosure**

*Signaling theory* menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan informasi sebagai sinyal kepada pasar. Perusahaan dengan kondisi atau prospek yang baik dapat memiliki insentif untuk memberikan informasi yang mendukung persepsi positif terhadap perusahaan. Misalnya perusahaan mengungkapkan:

- pertumbuhan pelanggan;
- peningkatan kapasitas;
- ekspansi pasar;
- investasi teknologi;
- efisiensi biaya;
- pencapaian target tertentu.

Informasi tersebut dapat menjadi sinyal mengenai kondisi perusahaan. Namun, pengguna harus tetap kritis. Tidak semua informasi positif berarti 272erusahaan benar-benar mempunyai fundamental yang kuat.
Karena itu:

$$\boldsymbol{Disclosure\ merupakan\ sinyal, bukan\ jaminan.}$$

Investor tetap perlu menghubungkan informasi tersebut dengan laporan keuangan, risiko, kondisi industri, dan bukti lainnya.

**Disclosure dan Investor Decision**

Investor menggunakan disclosure untuk membentuk ekspektasi mengenai perusahaan. Secara konseptual:

$$\textit{Disclosure}$$
$$\downarrow$$
$$\textit{Investor Information Set}$$
$$\downarrow$$
$$\textit{Expectation Formation}$$
$$\downarrow$$
$$\textit{Risk Assessment}$$
$$\downarrow$$
$$\textit{Investment Decision}$$

Voluntary disclosure dapat memberikan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam angka laporan keuangan. Misalnya perusahaan menjelaskan bahwa:

*pendapatan meningkat 20%, tetapi sebagian besar peningkatan berasal dari satu pelanggan besar.*

Informasi tersebut mempunyai makna berbeda dibandingkan hanya menyatakan:

*"Pendapatan meningkat 20%."*

Dengan demikian, kualitas disclosure memengaruhi kemampuan pengguna dalam menilai konteks informasi.

**Disclosure dan Respons Pasar**

Disclosure dapat memengaruhi bagaimana pasar merespons informasi. Respons tersebut dapat tercermin melalui:

- perubahan harga saham;
- perubahan volume perdagangan;
- perubahan bid-ask spread;
- perubahan estimasi analis;
- perubahan persepsi risiko;
- perubahan cost of capital.

Namun, hubungan tersebut tidak selalu sederhana.

Pasar dapat merespons informasi secara berbeda bergantung pada:

- kualitas informasi;
- kredibilitas sumber;
- kondisi pasar;
- ekspektasi sebelumnya;
- karakteristik perusahaan;
- kondisi ekonomi.

Dengan demikian:

$$\textit{Disclosure} \rightarrow \textit{Market Response}$$

bukan hubungan mekanis yang selalu menghasilkan respons yang sama.

**Disclosure dan Cost of Capital**

Salah satu argumen yang sering digunakan dalam pembahasan voluntary disclosure adalah kemungkinan bahwa informasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian investor. Secara konseptual:

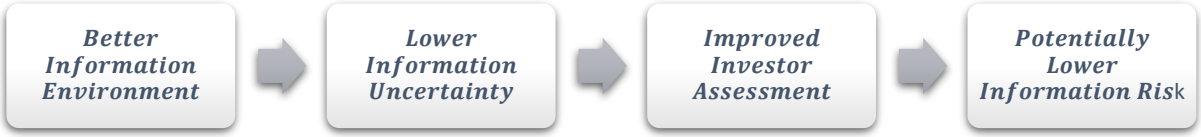


Namun, penting untuk menghindari 274esimpulan bahwa:
*"Semakin banyak disclosure pasti semakin rendah cost of capital."*

Hubungan tersebut bergantung pada banyak faktor lain. Karena itu, voluntary disclosure sebaiknya dipahami sebagai salah satu komponen dalam *information environment,* bukan satu-satunya penentu keputusan investor.

**Disclosure dan Corporate Governance**

Corporate governance mempunyai hubungan erat dengan kebijakan disclosure. Struktur governance yang baik dapat menciptakan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Pihak yang dapat berperan antara lain:

- dewan komisaris;
- komite audit;
- auditor internal;
- auditor eksternal;
- investor institusional;
- regulator.

Secara sederhana:




Penelitian empiris mengenai corporate governance dan voluntary disclosure menunjukkan adanya hubungan antara mekanisme governance dan praktik voluntary disclosure dalam laporan tahunan pada konteks pasar berkembang.

**Disclosure sebagai Strategi Komunikasi Korporasi**

Voluntary disclosure tidak hanya berkaitan dengan akuntansi. Dalam praktik modern, disclosure dapat menjadi bagian dari *corporate communication strategy.* Perusahaan dapat menggunakan berbagai media:

- annual report;
- investor presentation;
- earnings release;
- corporate website;
- press release;
- conference call;

- sustainability report;
- digital investor relations.

Hal ini menunjukkan bahwa batas antara:

***financial reporting***

dan

***corporate communication***

semakin dinamis.

Namun, semakin banyak saluran komunikasi yang digunakan, semakin penting pula konsistensi informasi.

**Risiko Voluntary Disclosure**

Voluntary disclosure memberikan manfaat, tetapi juga mempunyai risiko.

1. **Competitive Disadvantage.** Informasi strategis dapat dimanfaatkan pesaing.
2. **Legal Risk.** Pernyataan yang tidak akurat dapat menimbulkan risiko hukum.
3. **Disclosure Bias.** Manajemen dapat memilih informasi yang terlalu menguntungkan.
4. **Information Overload.** Informasi tambahan dapat membuat pengguna sulit menemukan informasi penting.
5. **Inconsistency.** Informasi yang diberikan melalui berbagai media dapat tidak konsisten.
6. **Misleading Communication.** Informasi dapat benar secara teknis tetapi menimbulkan persepsi yang keliru apabila disajikan tanpa konteks.

Oleh karena itu:

$$\boldsymbol{Voluntary\ does\ not\ mean\ risk-free.}$$

**Strategic Disclosure versus Impression Management**

Perusahaan perlu membedakan antara disclosure yang benar-benar meningkatkan kualitas informasi dan disclosure yang hanya membentuk persepsi.

**Strategic Disclosure.** Bertujuan:

- memberikan informasi relevan;
- menjelaskan perkembangan bisnis;
- membantu pengguna memahami perusahaan;
- meningkatkan kualitas information environment.

**Impression Management.** Lebih berorientasi pada:

- membangun citra positif;
- menonjolkan informasi menguntungkan;
- mengecilkan perhatian terhadap informasi negatif;
- mengarahkan persepsi pengguna.

Keduanya dapat menggunakan media yang sama.

Perbedaannya terletak pada:

$$tujuan, seleksi\ informasi, framing, dan\ keseimbangan\ informasi.$$

Karena itu, pengguna harus membaca disclosure secara kritis dan membandingkannya dengan data keuangan serta informasi lain.

**Disclosure, Governance, dan Investor: Model Terintegrasi**

Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut:

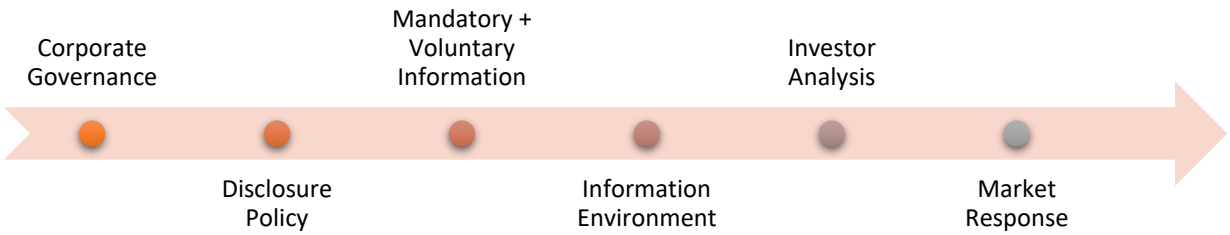


Model tersebut menunjukkan bahwa disclosure tidak berdiri sendiri. Kebijakan disclosure dipengaruhi oleh struktur governance dan pada akhirnya berhubungan dengan bagaimana investor memperoleh serta menggunakan informasi.

**Mandatory dan Voluntary Disclosure dalam Era Digital**

Digitalisasi mengubah mekanisme disclosure. Pada masa lalu, disclosure sangat bergantung pada:

$$annual\ report \rightarrow printed\ document \rightarrow investor$$

Saat ini, informasi dapat tersedia melalui:




Perubahan tersebut menghasilkan beberapa karakteristik baru:

1. Speed. Informasi dapat disebarkan dengan lebih cepat.
2. Accessibility. Informasi lebih mudah diakses oleh pengguna.
3. Comparability. Data terstruktur dapat lebih mudah dibandingkan.
4. Searchability. Pengguna dapat mencari informasi tertentu dengan cepat.
5. Automation. Data dapat diproses oleh software.

Namun, kecepatan juga meningkatkan risiko:

- informasi tidak konsisten;
- premature disclosure;
- penyebaran informasi yang belum diverifikasi;
- interpretasi yang salah;
- information overload.

**Voluntary Disclosure dan ESG**

Dalam perkembangan modern, voluntary disclosure juga dapat mencakup informasi mengenai:

- lingkungan;
- sosial;
- tata kelola;
- keberlanjutan;
- emisi;
- tenaga kerja;

- keberagaman;
- risiko iklim.

Namun, perkembangan regulasi menyebabkan sebagian informasi yang sebelumnya bersifat sukarela dapat berubah menjadi informasi yang diwajibkan. Fenomena tersebut memperkuat konsep *disclosure continuum.* Sebuah informasi dapat bergerak dari:

**Voluntary**

menjadi:

**Best Practice**

kemudian:

**Recommended**

dan pada akhirnya:

**Mandatory**

Dengan demikian, batas antara voluntary dan mandatory disclosure dapat berubah seiring perkembangan regulasi dan ekspektasi masyarakat.

## 5.5 PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disusun untuk menggambarkan kondisi dan kinerja entitas pada suatu periode tertentu. Namun, kegiatan bisnis tidak berhenti ketika tanggal pelaporan berakhir. Sebagai contoh, perusahaan menetapkan 31 Desember 2026 sebagai akhir periode pelaporan. Setelah tanggal tersebut, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan, dapat terjadi berbagai peristiwa seperti:

- keputusan pengadilan;
- kebangkrutan pelanggan;
- perubahan nilai aset;
- akuisisi perusahaan;
- kerusakan fasilitas;
- restrukturisasi;
- perubahan pendanaan;
- perubahan regulasi;
- deklarasi dividen.

Persoalan akuntansinya adalah:

*Apakah peristiwa tersebut harus mengubah angka dalam laporan keuangan tahun 2026, atau merupakan peristiwa baru yang hanya perlu diberitahukan kepada pengguna?*

Pertanyaan tersebut menjadi inti pembahasan peristiwa setelah periode pelaporan. IAS 10 mendefinisikan peristiwa setelah periode pelaporan sebagai peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Standar tersebut membedakan peristiwa menjadi *adjusting events* dan *non-adjusting events.*

Dengan demikian, fokus utama subbab ini adalah dimensi waktu dalam akuntansi, bukan mengulang pembahasan mengenai struktur laporan atau disclosure yang telah dibahas sebelumnya.

**Batas Waktu Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Periode yang perlu diperhatikan dapat digambarkan sebagai berikut:

**31 *Desember* 2026**

↓

*Akhir periode pelaporan*

↓

***Peristiwa setelah periode pelaporan***

↓

*Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan*

↓

***Financial Statements Authorised for Issue***

Misalnya:

- akhir periode pelaporan: 31 Desember 2026;
- laporan keuangan diotorisasi: 20 Maret 2027.

Maka peristiwa yang terjadi selama periode tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan peristiwa setelah periode pelaporan. IAI juga menjelaskan bahwa peristiwa setelah periode pelaporan berada di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Batas waktu tersebut penting karena laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk terus-menerus diperbarui akibat setiap peristiwa yang terjadi setelah tanggal otorisasi.

**Mengapa Dimensi Waktu Penting dalam Akuntansi?**

Akuntansi menggunakan periode pelaporan untuk memberikan gambaran kondisi ekonomi pada suatu titik atau selama suatu periode. Masalah muncul ketika informasi baru tersedia setelah periode berakhir.

Misalnya:

31 Desember 2026 → kondisi A

15 Februari 2027 → informasi baru muncul

Pertanyaannya:

*Apakah informasi pada 15 Februari memberikan bukti mengenai kondisi yang sebenarnya sudah ada pada 31 Desember?*

Jika **ya**, informasi tersebut berpotensi memengaruhi laporan keuangan 2026.

Jika **tidak**, informasi tersebut merupakan kondisi baru setelah periode pelaporan.

Inilah prinsip dasar yang membedakan:

***evidence about an existing condition***

dengan

***evidence of a new condition.***

**Adjusting Events**

Adjusting events adalah peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti mengenai kondisi yang telah ada pada akhir periode pelaporan. Jika peristiwa tersebut memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang memang sudah ada pada tanggal pelaporan, jumlah yang diakui dalam laporan keuangan perlu disesuaikan. IAS 10 secara eksplisit mengharuskan entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan adjusting events.

> ***Prinsip***
> Peristiwa terjadi setelah tanggal pelaporan, tetapi bukti yang diberikan berkaitan dengan kondisi yang sudah ada pada tanggal pelaporan.

**Contoh Adjusting Events**

Beberapa contoh dapat membantu memahami konsep tersebut.

A. **Penyelesaian Kasus Pengadilan.** Perusahaan menghadapi gugatan pada akhir tahun. Setelah tanggal pelaporan, pengadilan memberikan keputusan yang memberikan bukti mengenai kewajiban yang telah ada pada akhir periode. Maka jumlah yang diakui dapat perlu disesuaikan.
B. **Kebangkrutan Pelanggan.** Pelanggan mengalami kebangkrutan setelah akhir tahun dan kondisi tersebut memberikan bukti bahwa piutang sudah mengalami penurunan kualitas pada akhir periode.
C. **Penentuan Nilai Persediaan.** Penjualan persediaan setelah tanggal pelaporan dapat memberikan bukti mengenai nilai realisasi neto persediaan pada akhir periode.
D. **Penetapan Jumlah Kewajiban.** Informasi setelah periode pelaporan dapat memberikan bukti tambahan mengenai jumlah kewajiban yang telah ada pada tanggal pelaporan.

IAI memberikan contoh penyelesaian perkara pengadilan sebagai adjusting event ketika keputusan setelah periode pelaporan memberikan bukti mengenai kewajiban yang telah ada pada akhir periode.

**Non-Adjusting Events**

Non-adjusting events adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut muncul setelah periode pelaporan. Karena kondisi baru tersebut belum ada pada tanggal pelaporan, jumlah dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan hanya karena peristiwa tersebut terjadi. Namun, apabila peristiwa tersebut **material**, informasi mengenai sifat peristiwa dan estimasi dampak keuangannya perlu diungkapkan. IAS 10 menetapkan bahwa untuk material non-adjusting events, entitas mengungkapkan *nature of the event* dan *estimate of its financial effect,* atau menyatakan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

**Contoh Non-Adjusting Events**

Beberapa contoh non-adjusting events antara lain:

- kebakaran fasilitas setelah periode pelaporan;

- akuisisi bisnis setelah periode pelaporan;
- penjualan anak perusahaan setelah periode pelaporan;
- restrukturisasi besar yang baru diumumkan setelah periode pelaporan;
- perubahan besar harga aset setelah tanggal pelaporan;
- transaksi saham yang signifikan;
- perubahan regulasi yang terjadi setelah periode pelaporan.

IAS 10 memberikan beberapa contoh, termasuk kombinasi bisnis besar, pelepasan anak perusahaan, restrukturisasi besar, kerusakan fasilitas akibat kebakaran, transaksi saham besar, perubahan harga atau kurs yang abnormal, dan dimulainya litigasi besar.

**Perbedaan Adjusting dan Non-Adjusting Events**

Perbedaan utama dapat dirangkum sebagai berikut.

| Aspek | Adjusting Event | Non-Adjusting Event |
|---|---|---|
| Kondisi | Sudah ada pada akhir periode | Timbul setelah periode |
| Informasi setelah periode | Memberikan bukti kondisi lama | Menunjukkan kondisi baru |
| Dampak terhadap angka | Disesuaikan | Tidak disesuaikan |
| Disclosure | Sesuai kebutuhan standar | Wajib jika material |
| Fokus judgement | Apakah kondisi sudah ada? | Apakah kondisi benar-benar baru? |

Cara paling sederhana untuk mengingatnya adalah:

$$\boldsymbol{Adjusting = kondisi\ lama, bukti\ baru.}$$

$$\boldsymbol{Non-adjusting = kondisi\ baru, setelah\ periode.}$$

**Materialitas dalam Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Tidak semua peristiwa setelah periode pelaporan mempunyai arti yang sama. Perusahaan perlu mempertimbangkan *materialitas.* Pertanyaan utamanya adalah:

*Apakah tidak disampaikannya informasi tersebut secara wajar dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan?*

Jika peristiwa non-adjusting bersifat material, pengungkapan diperlukan. Dengan demikian, materialitas berfungsi sebagai *filter informasi.*

Contoh:

**Peristiwa A**

Kerusakan komputer kantor senilai Rp10 juta.

Dampaknya sangat kecil dibandingkan aset perusahaan sebesar Rp10 triliun.

**Peristiwa B**

Kebakaran pabrik utama dengan nilai aset Rp3 triliun.

Kedua peristiwa sama-sama terjadi setelah periode pelaporan, tetapi konsekuensi informasinya sangat berbeda.

**Tanggal Otorisasi Laporan Keuangan**

Salah satu aspek penting dalam peristiwa setelah periode pelaporan adalah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. IAS 10 mengharuskan entitas mengungkapkan:

- tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan; dan
- siapa yang memberikan otorisasi tersebut.

Jika pihak tertentu memiliki kewenangan untuk mengubah laporan setelah diterbitkan, fakta tersebut juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggal ini menjadi *cut-off point* dalam penerapan IAS 10. Secara sederhana:

$$Reporting\ Date$$
$$\downarrow$$
$$Post - Reporting\ Events$$
$$\downarrow$$
$$Authorisation\ Date$$
$$\downarrow$$
$$End\ of\ IAS\ 10\ Assessment\ Window$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa dimensi waktu merupakan bagian integral dari proses penyusunan laporan keuangan.

**Dividen Setelah Periode Pelaporan**

Dividen merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan pentingnya tanggal pelaporan. Jika dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi, dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena pada tanggal tersebut kewajiban belum ada. Informasi mengenai dividen tersebut diperlakukan sesuai persyaratan pengungkapan yang berlaku. IAS 10 secara khusus menjelaskan perlakuan atas dividen yang diumumkan setelah periode pelaporan.

*Contoh:*

31 Desember 2026: belum ada kewajiban dividen.

20 Februari 2027: dividen diumumkan.

Maka pengumuman pada Februari tidak otomatis menciptakan liabilitas pada 31 Desember 2026.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dan Going Concern**

Peristiwa setelah periode pelaporan juga dapat memberikan informasi penting mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Misalnya setelah periode pelaporan:

- perusahaan mengalami krisis likuiditas;
- sumber pendanaan utama gagal diperoleh;
- perusahaan kehilangan kemampuan membayar kewajiban;
- manajemen memutuskan untuk melikuidasi perusahaan.

IAS 10 menyatakan bahwa jika setelah periode pelaporan manajemen menentukan bahwa perusahaan bermaksud melikuidasi atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif realistis selain itu, laporan keuangan tidak disusun atas dasar going concern. Dengan demikian, peristiwa setelah periode pelaporan tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka, tetapi dapat memengaruhi *basis penyusunan laporan keuangan.*

**Proses Analisis Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Akuntan dapat menggunakan alur berikut untuk menganalisis suatu peristiwa:

**Langkah 1 — Identifikasi tanggal peristiwa**

Kapan peristiwa terjadi?

**Langkah 2 — Identifikasi tanggal pelaporan**

Kapan periode pelaporan berakhir?

**Langkah 3 — Identifikasi tanggal otorisasi**

Kapan laporan keuangan diotorisasi?

**Langkah 4 — Analisis kondisi**

Apakah kondisi yang berkaitan dengan peristiwa sudah ada pada tanggal pelaporan?

**Langkah 5 — Klasifikasi**

Jika ya:

**Adjusting Event**

Jika tidak:

**Non-Adjusting Event**

**Langkah 6 — Evaluasi materialitas**

Jika non-adjusting, apakah dampaknya material?

**Langkah 7 — Tentukan perlakuan**

- sesuaikan angka;
- ungkapkan;
- atau tidak memerlukan perlakuan khusus.

Alur tersebut dapat dirumuskan:

$$
\begin{gathered}
Event \\
\downarrow \\
Timing \\
\downarrow \\
Condition\ Existing\ at\ Reporting\ Date? \\
\downarrow \\
Yes \rightarrow Adjust \\
No \rightarrow Non-Adjust \\
\downarrow \\
Material? \\
\downarrow \\
Disclose\ if\ Required
\end{gathered}
$$

**Tantangan Judgement dalam Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Membedakan adjusting dan non-adjusting events tidak selalu mudah. Masalah utamanya bukan:

*"Kapan peristiwa terjadi?"*

tetapi:

*"Kapan kondisi ekonomi yang mendasari peristiwa tersebut sebenarnya muncul?"*

Perbedaan tersebut membutuhkan judgement.

Contohnya:

*Pelanggan bangkrut pada Januari.*

Pertanyaan akuntannya bukan sekadar:

*"Bangkrutnya Januari atau Desember?"*

Tetapi:

*"Apakah kebangkrutan tersebut memberikan bukti bahwa kondisi kredit pelanggan sudah memburuk pada Desember?"*

Inilah alasan mengapa peristiwa setelah periode pelaporan membutuhkan analisis ekonomi, bukan hanya analisis kalender.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dalam Lingkungan Digital**

Digitalisasi membuat informasi setelah periode pelaporan dapat diketahui lebih cepat. Perusahaan dapat memperoleh informasi melalui:

- sistem ERP;
- sistem perbankan;
- data pelanggan;
- sistem hukum;
- sistem persediaan;
- market data;
- dashboard risiko;
- sistem monitoring otomatis.

Kecepatan memperoleh informasi memberikan keuntungan bagi proses closing dan financial reporting. Namun, kecepatan juga menimbulkan kebutuhan baru:

*Bagaimana menentukan apakah informasi baru tersebut merupakan bukti kondisi lama atau kondisi baru?*

Dengan demikian, teknologi dapat mempercepat *information discovery*, tetapi tidak otomatis menyelesaikan *accounting judgement.*

**Peran Akuntan dalam Analisis Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Dalam proses ini, akuntan berperan sebagai penghubung antara:

*Peristiwa Bisnis*

dan

*Perlakuan Akuntansi*

Akuntan harus mampu:

1. mengidentifikasi peristiwa;
2. menentukan periode terjadinya;
3. memahami kondisi ekonomi yang mendasari;
4. menghubungkan informasi dengan standar;
5. mengevaluasi materialitas;
6. menentukan adjusting atau non-adjusting;
7. menentukan kebutuhan penyesuaian atau pengungkapan;

8. mendokumentasikan judgement.

Peran tersebut menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya merupakan proses pencatatan historis. Akuntansi juga merupakan proses:

$$interpreting\ economic\ events\ through\ time.$$

Bab 5 telah membahas pelaporan keuangan bukan hanya sebagai produk akhir dari proses akuntansi, tetapi sebagai suatu sistem komunikasi informasi ekonomi. Pembahasan dimulai dari hakikat pelaporan sebagai komunikasi, kemudian bergerak menuju struktur laporan keuangan, konteks yang menjelaskan angka, strategi disclosure, dan akhirnya dimensi waktu melalui peristiwa setelah periode pelaporan.

Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dapat dipahami hanya dengan membaca angka yang terdapat pada halaman utama.

Pengguna perlu memahami:

- bagaimana informasi disusun;
- bagaimana angka diberi konteks;
- mengapa informasi tertentu diungkapkan;
- bagaimana informasi tambahan memengaruhi interpretasi;
- dan apakah peristiwa setelah periode pelaporan memberikan bukti mengenai kondisi sebelumnya atau justru menunjukkan kondisi baru.

Pada akhirnya, tujuan pelaporan keuangan bukan sekadar menghasilkan laporan yang lengkap, tetapi menghasilkan informasi yang berguna, dapat dipahami, relevan, dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara wajar.

Dalam lingkungan digital, tujuan tersebut semakin menuntut integrasi antara standar akuntansi, teknologi informasi, data, dan professional judgement.

Dengan demikian, dapat dirumuskan sebuah prinsip penutup:

*Akuntansi tidak berhenti pada pencatatan transaksi; akuntansi mencapai nilainya ketika informasi yang dihasilkan mampu membantu manusia memahami realitas ekonomi dan mengambil keputusan yang lebih baik.*

# BAB 6
# KAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL

## 6.1 PERSPEKTIF EKONOMI ATAS LIKUIDITAS

Likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam perspektif akuntansi, likuiditas berkaitan dengan kemampuan entitas memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, dari perspektif ekonomi, likuiditas memiliki makna yang lebih luas, yaitu kemampuan perusahaan menyediakan sumber daya yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, menghadapi ketidakpastian, mempertahankan kegiatan operasional, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.

Kas menempati posisi yang sangat penting dalam struktur likuiditas karena merupakan aset dengan tingkat likuiditas paling tinggi. Perusahaan dapat menggunakan kas secara langsung untuk membayar pemasok, memenuhi kewajiban kepada karyawan, membayar pajak, memenuhi kewajiban kepada kreditur, maupun membiayai investasi tertentu.

Meskipun demikian, memiliki kas dalam jumlah besar tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang paling baik. Kas yang terlalu sedikit dapat meningkatkan risiko kesulitan keuangan, sedangkan kas yang terlalu besar dapat menimbulkan biaya peluang karena dana tersebut tidak digunakan untuk investasi produktif.

Dengan demikian, persoalan ekonomi yang penting bukan sekadar berapa banyak kas yang dimiliki perusahaan, tetapi berapa tingkat likuiditas yang optimal bagi perusahaan. Penelitian Khokhar, Qiu, dan Rahaman menunjukkan bahwa posisi kas pada akhir tahun dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai kondisi likuiditas perusahaan sepanjang tahun. Mereka menemukan bahwa perusahaan dalam sampel penelitian cenderung memiliki kas lebih tinggi pada kuartal keempat dan kemudian mengalami penurunan kembali pada periode berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi likuiditas perlu mempertimbangkan dinamika kas sepanjang periode, bukan hanya angka kas pada tanggal pelaporan.

**Likuiditas sebagai Nilai Ekonomi**

Secara ekonomi, likuiditas memiliki nilai karena memberikan **fleksibilitas keuangan** kepada perusahaan. Perusahaan yang mempunyai sumber daya likuid dapat merespons perubahan lingkungan bisnis dengan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang mengalami keterbatasan dana. Likuiditas memberikan setidaknya empat manfaat ekonomi utama:

1. Memenuhi kebutuhan transaksi
2. Menghadapi ketidakpastian
3. Mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal
4. Memanfaatkan peluang investasi

Keempat manfaat tersebut menjadikan kas bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai **sumber fleksibilitas ekonomi**.

Sebagai contoh, perusahaan manufaktur membutuhkan dana untuk membeli bahan baku secara rutin. Apabila perusahaan memiliki cadangan kas yang memadai, perusahaan dapat tetap menjalankan produksi ketika terjadi keterlambatan penerimaan piutang. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki kas yang sangat terbatas, keterlambatan penerimaan dari pelanggan dapat mengganggu pembayaran kepada pemasok dan pada akhirnya menghambat kegiatan produksi. Dengan demikian, secara ekonomi:

*Likuiditas menciptakan kemampuan perusahaan untuk bertindak ketika kebutuhan dana muncul.*

Nilai tersebut semakin penting ketika perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti.

**Kas sebagai Bentuk Likuiditas Tertinggi**

Tidak semua aset mempunyai tingkat likuiditas yang sama. Aset berupa tanah, bangunan, mesin, persediaan, dan piutang membutuhkan proses tertentu untuk dikonversi menjadi kas. Kas berbeda karena dapat digunakan secara langsung untuk melakukan transaksi. Secara sederhana, tingkat likuiditas dapat digambarkan sebagai berikut:

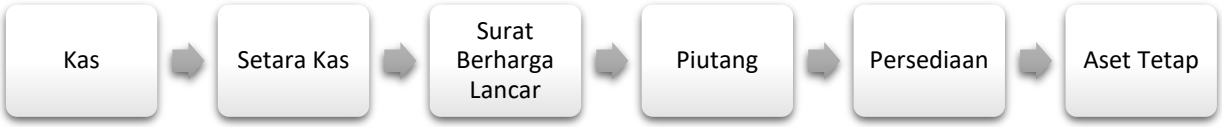


Semakin jauh suatu aset dari kas, semakin besar kemungkinan diperlukan waktu, biaya, atau proses tambahan untuk mengubahnya menjadi dana yang dapat digunakan. Dalam konteks ini, kas dapat disebut sebagai **likuiditas ekstrem**, karena kas tidak perlu melalui proses konversi sebelum digunakan untuk pembayaran. Namun, likuiditas ekstrem tersebut memiliki konsekuensi ekonomi. Kas memang aman dan fleksibel, tetapi kas yang tidak digunakan juga dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan apabila dana tersebut ditempatkan pada investasi yang produktif. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi persoalan klasik:

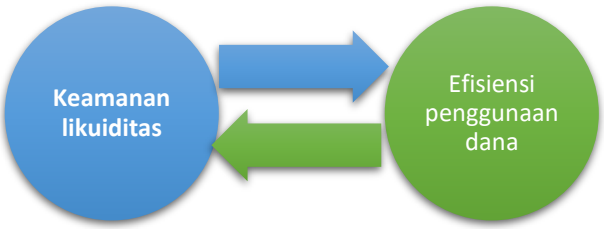


**Trade-Off antara Likuiditas dan Profitabilitas**

Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan likuiditas adalah hubungan antara likuiditas dan profitabilitas. Perusahaan membutuhkan kas untuk menjaga kelangsungan operasi. Akan tetapi, kas yang terlalu besar dapat menjadi dana menganggur (*idle cash*). Misalnya, suatu perusahaan mempunyai dana tunai sebesar Rp10 miliar. Perusahaan hanya membutuhkan Rp4 miliar untuk kebutuhan operasional dan cadangan likuiditas. Dengan demikian, terdapat Rp6 miliar yang berpotensi ditempatkan pada investasi atau digunakan

untuk ekspansi. Apabila Rp6 miliar tersebut hanya disimpan dalam bentuk kas tanpa tujuan ekonomi yang jelas, perusahaan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh tingkat pengembalian dari penggunaan dana tersebut.

Hal ini menghasilkan konsep **opportunity cost of liquidity**, yaitu manfaat ekonomi yang hilang karena perusahaan memilih mempertahankan dana dalam bentuk yang sangat likuid dibandingkan menggunakannya untuk alternatif yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang terlalu agresif menginvestasikan seluruh dana yang tersedia juga menghadapi risiko. Ketika terjadi kebutuhan kas secara mendadak, perusahaan mungkin harus:

- menjual investasi;
- mencari pinjaman;
- menerbitkan surat utang;
- meminta tambahan modal;
- atau menunda pembayaran.

Dengan demikian, pengelolaan kas tidak bertujuan memaksimalkan kas, tetapi mencapai tingkat likuiditas yang ekonomis.

**Konsep Optimal Cash Holdings**

Dalam perspektif ekonomi keuangan, perusahaan pada dasarnya berusaha menentukan **optimal cash holdings**, yaitu jumlah kas yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasional, risiko, peluang investasi, dan kondisi pembiayaan perusahaan.

Tingkat kas optimal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

| Faktor | Pengaruh terhadap kebutuhan kas |
|---|---|
| Ketidakpastian arus kas | Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar kebutuhan cadangan kas |
| Peluang investasi | Peluang investasi yang tinggi dapat meningkatkan kebutuhan dana |
| Akses pembiayaan eksternal | Akses pembiayaan yang sulit dapat mendorong perusahaan menyimpan lebih banyak kas |
| Ukuran perusahaan | Perusahaan yang lebih besar umumnya mempunyai akses pendanaan yang lebih luas |
| Modal kerja | Kebutuhan modal kerja memengaruhi kebutuhan kas |
| Volatilitas arus kas | Ketidakstabilan arus kas meningkatkan kebutuhan perlindungan likuiditas |
| Kondisi ekonomi | Ketidakpastian ekonomi dapat meningkatkan kebutuhan likuiditas |
| Kualitas informasi | Informasi yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpastian dan kebutuhan kas tertentu |

Penelitian Shari dan Badera terhadap perusahaan properti dan real estat di Indonesia menunjukkan bahwa volatilitas arus kas berpengaruh positif terhadap *cash holding*. Artinya, semakin tinggi ketidakpastian arus kas, semakin besar kecenderungan perusahaan mempertahankan kas sebagai perlindungan terhadap risiko likuiditas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kas dapat berfungsi sebagai **buffer ekonomi** terhadap ketidakpastian.

**Motif Ekonomi Perusahaan Memegang Kas**

Keputusan perusahaan untuk mempertahankan kas dapat dijelaskan melalui beberapa motif ekonomi.

A. **Motif Transaksi.** Kas diperlukan untuk membiayai transaksi rutin perusahaan.
   *Contohnya:*
   - pembayaran bahan baku;
   - pembayaran gaji;
   - pembayaran listrik dan utilitas;
   - pembayaran pajak;
   - pembayaran utang usaha.

   Semakin tinggi volume transaksi perusahaan, semakin besar kebutuhan terhadap sumber daya likuid.

B. **Motif Berjaga-jaga**
   Perusahaan menyimpan kas untuk menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksi.
   *Contohnya:*
   - penurunan penjualan;
   - keterlambatan pembayaran pelanggan;
   - kenaikan harga bahan baku;
   - kerusakan mesin;
   - gangguan operasional;
   - kondisi ekonomi yang memburuk.

   Motif ini menjadi semakin penting ketika arus kas perusahaan mempunyai tingkat volatilitas tinggi.

C. **Motif Investasi**
   Kas memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengambil peluang investasi ketika peluang tersebut muncul.
   Misalnya, perusahaan menemukan peluang untuk:
   - membeli mesin baru;
   - mengakuisisi perusahaan lain;
   - membuka cabang;
   - mengembangkan produk;
   - melakukan ekspansi pasar.

   Perusahaan yang memiliki kas dapat mengambil peluang tersebut tanpa harus menunggu proses pembiayaan eksternal.

D. **Motif Strategis**
   Kas juga dapat memberikan kekuatan strategis kepada perusahaan dalam menghadapi kompetisi.

Perusahaan dengan cadangan dana yang memadai dapat lebih cepat merespons perubahan pasar, melakukan inovasi, mempertahankan pemasok, atau menghadapi tekanan ekonomi.

**Likuiditas dan Ketidakpastian Arus Kas**

Arus kas perusahaan tidak selalu stabil. Perusahaan dapat mengalami periode surplus dan defisit kas. Misalnya:

Bulan Januari: + Rp. 500 juta
Bulan Februari: + Rp. 300 juta
Bulan Maret: − Rp. 200 juta
Bulan April: − Rp. 450 juta
Bulan Mei: + Rp. 600 juta

Secara keseluruhan, perusahaan mungkin masih menghasilkan arus kas positif. Namun, perusahaan tetap membutuhkan cadangan kas untuk menghadapi bulan ketika arus kas mengalami defisit. Hal ini menunjukkan perbedaan antara:

*profitabilitas → kemampuan menghasilkan laba*

dan

*likuiditas → kemampuan menyediakan dana ketika dibutuhkan.*

Perusahaan dapat mencatat laba tetapi mengalami kesulitan likuiditas apabila sebagian besar pendapatannya belum diterima dalam bentuk kas. Oleh karena itu, perspektif ekonomi atas likuiditas tidak hanya melihat besarnya laba, tetapi juga mempertimbangkan timing penerimaan dan pengeluaran kas.

**Likuiditas dan Risiko Keuangan**

Likuiditas mempunyai hubungan erat dengan risiko keuangan. Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang rendah, perusahaan dapat menghadapi risiko tidak mampu memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko tersebut dapat berkembang menjadi:

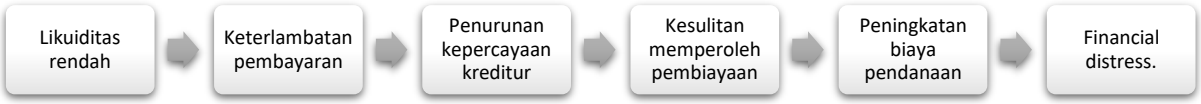


Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang memadai mempunyai *financial flexibility* yang lebih besar.

Penelitian Khokhar, Qiu, dan Rahaman menunjukkan bahwa kas merupakan indikator penting dalam penilaian likuiditas dan risiko kredit. Namun, penelitian tersebut juga memperingatkan bahwa kas pada akhir tahun belum tentu menggambarkan kondisi likuiditas sepanjang tahun. Implikasinya, analis, investor, kreditur, dan manajemen tidak seharusnya menilai kondisi likuiditas hanya berdasarkan satu titik waktu.

**Likuiditas dan Kualitas Informasi**

Keputusan mengenai jumlah kas juga berkaitan dengan kualitas informasi yang tersedia bagi perusahaan. Ketika manajemen mempunyai informasi yang lebih baik mengenai arus kas masa depan, kebutuhan modal kerja, risiko, dan peluang investasi, perusahaan dapat menentukan tingkat kas dengan lebih tepat. Sebaliknya, ketidakpastian informasi dapat mendorong perusahaan mempertahankan cadangan kas yang lebih besar.

Penelitian Clarkson, Gao, dan Herbohn menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan informasi berhubungan dengan penurunan *cash holdings*. Penelitian tersebut

menemukan bahwa setelah terjadi peningkatan informasi melalui perubahan regulasi dan adopsi IFRS, perusahaan cenderung mengurangi jumlah kas yang disimpan.

Secara ekonomi, temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa informasi yang lebih baik mengurangi ketidakpastian, sehingga perusahaan tidak selalu membutuhkan cadangan kas sebesar sebelumnya. Dengan kata lain:

*Semakin baik kemampuan perusahaan dalam memprediksi kebutuhan dan arus kas, semakin efisien perusahaan menentukan tingkat likuiditasnya.*

**Likuiditas Tidak Hanya Dilihat dari Saldo Kas**

Salah satu kesalahan dalam memahami likuiditas adalah menganggap bahwa perusahaan yang memiliki saldo kas besar pasti mempunyai likuiditas yang baik. Padahal, kondisi likuiditas harus dilihat secara lebih komprehensif.

Sebagai contoh:

**Perusahaan A**

- Kas: Rp10 miliar
- Kewajiban jangka pendek: Rp50 miliar

**Perusahaan B**

- Kas: Rp5 miliar
- Kewajiban jangka pendek: Rp8 miliar

Jika hanya melihat jumlah kas, Perusahaan A terlihat lebih likuid. Namun, apabila dibandingkan dengan kewajibannya, Perusahaan B dapat memiliki posisi likuiditas yang relatif lebih kuat.

Selain itu, perlu diperhatikan pula:

- arus kas operasi;
- jatuh tempo kewajiban;
- kemampuan memperoleh pendanaan;
- kualitas piutang;
- kebutuhan modal kerja;
- volatilitas arus kas;
- komitmen pembayaran;
- peluang investasi.

Dengan demikian, saldo kas merupakan salah satu indikator likuiditas, bukan satu-satunya indikator likuiditas.

**Dinamika Likuiditas Sepanjang Periode**

Perspektif ekonomi modern juga menekankan bahwa likuiditas bersifat dinamis. Kondisi kas perusahaan dapat berubah setiap hari karena adanya:

- penerimaan pelanggan;
- pembayaran pemasok;
- pembayaran gaji;
- pembayaran pajak;
- penerimaan pinjaman;

- pembayaran utang;
- investasi;
- dividen;
- transaksi lainnya.

Penelitian Khokhar, Qiu, dan Rahaman memberikan bukti penting mengenai dimensi waktu tersebut. Dengan menggunakan data perusahaan secara kuartalan, mereka menemukan bahwa rata-rata *cash holdings* pada kuartal keempat sekitar 2,5% lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga kuartal sebelumnya, kemudian mengalami pembalikan pada periode berikutnya. Temuan ini mempunyai implikasi penting bagi analisis laporan keuangan: *Angka kas pada tanggal pelaporan merupakan sebuah titik observasi, sedangkan likuiditas perusahaan merupakan kondisi yang bergerak sepanjang waktu.*

Oleh sebab itu, analisis likuiditas sebaiknya tidak hanya menggunakan *year-end cash balance*, tetapi juga mempertimbangkan pola arus kas dan kebutuhan dana sepanjang periode.

**Perspektif Ekonomi: Kas sebagai Buffer dan Opportunity Cost**

Dari perspektif ekonomi, kas mempunyai dua fungsi yang tampak berlawanan. Pertama, kas berfungsi sebagai *buffer* atau bantalan terhadap ketidakpastian. Kedua, kas mempunyai *opportunity cost* apabila tidak digunakan secara produktif. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Konsep tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan kas bukanlah memaksimalkan saldo kas, tetapi mengoptimalkan manfaat ekonomi dari likuiditas.

**Likuiditas dalam Perspektif Ekonomi Digital**

Transformasi digital mengubah cara perusahaan memantau dan mengelola likuiditas. Sistem informasi akuntansi, *enterprise resource planning* (ERP), *cash management system*, *dashboard*, *bank integration*, dan analitik data memungkinkan perusahaan memperoleh informasi mengenai posisi kas dengan lebih cepat. Perusahaan dapat memantau:

- saldo kas;
- penerimaan kas;
- pengeluaran kas;
- piutang jatuh tempo;
- utang jatuh tempo;
- proyeksi arus kas;

- kebutuhan modal kerja.

Perkembangan tersebut memungkinkan pengelolaan likuiditas bergerak dari pendekatan **reaktif** menuju **prediktif**.

**Pendekatan tradisional**

*Saldo kas → melihat kondisi sekarang → mengambil keputusan.*

**Pendekatan digital**

*Data transaksi → analisis pola → proyeksi arus kas → identifikasi risiko → keputusan likuiditas.*

Dengan demikian, teknologi tidak mengubah hakikat ekonomi likuiditas, tetapi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengukur, memprediksi, dan mengendalikan kebutuhan likuiditas.

**Implikasi bagi Pengambilan Keputusan Manajemen**

Perspektif ekonomi atas likuiditas memberikan beberapa implikasi bagi manajemen.

1. **Jangan mengejar kas maksimum.** Kas yang terlalu besar tidak selalu menunjukkan efisiensi. Manajemen perlu menentukan kebutuhan kas berdasarkan karakteristik bisnis.
2. **Pertimbangkan ketidakpastian.** Semakin tidak stabil arus kas perusahaan, semakin penting menyediakan cadangan likuiditas.
3. **Perhatikan opportunity cost.** Dana yang tidak diperlukan dalam jangka pendek dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada investasi produktif sesuai tingkat risiko dan kebutuhan perusahaan.
4. **Analisis likuiditas secara periodic.** Likuiditas tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan saldo kas pada akhir tahun.
5. **Integrasikan informasi.** Keputusan kas perlu mempertimbangkan hubungan antara kas, piutang, utang, persediaan, investasi, pembiayaan, dan arus kas.
6. **Gunakan data secara prediktif.** Sistem digital dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan kas dan mengidentifikasi kemungkinan defisit sebelum terjadi.

**Perspektif Akuntansi dan Perspektif Ekonomi**

Perspektif akuntansi dan ekonomi terhadap kas memiliki titik perhatian yang berbeda.

| Perspektif | Fokus utama |
|---|---|
| Akuntansi | Pengakuan, pengukuran, klasifikasi, dan penyajian kas |
| Ekonomi | Nilai manfaat likuiditas dan biaya mempertahankan kas |
| Manajemen Keuangan | Optimalisasi saldo kas dan fleksibilitas keuangan |
| Investor | Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dan menciptakan nilai |
| Kreditur | Kemampuan pembayaran utang |
| Manajemen | Keseimbangan antara keamanan dan produktivitas dana |

Dalam buku ini, perspektif ekonomi penting untuk memberikan pemahaman bahwa **kas bukan sekadar angka yang tercantum dalam laporan posisi keuangan**. Kas merupakan sumber daya ekonomi yang mempunyai manfaat, risiko, dan biaya peluang.

## 6.2 SINKRONISASI DUALITAS CATATAN DALAM REKONSILIASI BANK

Dalam lingkungan bisnis modern, informasi mengenai kas perusahaan berasal dari sedikitnya dua sumber pencatatan yang berbeda. Pertama, perusahaan memiliki catatan internal yang mencerminkan transaksi kas berdasarkan sistem dan dokumen yang dimiliki perusahaan. Kedua, bank memiliki catatan independen yang mencerminkan transaksi yang diproses melalui rekening perusahaan.

Kedua catatan tersebut pada dasarnya menggambarkan objek ekonomi yang sama, yaitu aktivitas rekening bank perusahaan, tetapi tidak selalu menunjukkan saldo yang identik pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan kesalahan. Sebagian muncul karena adanya perbedaan waktu antara saat transaksi dicatat perusahaan dan saat transaksi diproses atau tercermin dalam catatan bank. Sebagian lainnya dapat berasal dari biaya administrasi bank, bunga, transaksi yang langsung masuk ke rekening, kesalahan pencatatan, maupun transaksi yang belum diketahui oleh salah satu pihak. Di sinilah rekonsiliasi bank memiliki peran penting.

Rekonsiliasi bank bukan sekadar kegiatan mencocokkan dua angka saldo. Rekonsiliasi merupakan proses analitis untuk menjelaskan mengapa dua catatan atas aktivitas kas menunjukkan perbedaan dan menentukan apakah perbedaan tersebut bersifat wajar, memerlukan pencatatan, atau mengindikasikan kesalahan. Dengan demikian, inti rekonsiliasi bank dapat dirumuskan sebagai:

> *Dua catatan yang berbeda sumbernya harus dapat dijelaskan hingga menghasilkan satu gambaran yang dapat dipercaya mengenai posisi kas.*

### Dualitas Catatan sebagai Dasar Rekonsiliasi

Rekonsiliasi bank muncul karena terdapat dua perspektif pencatatan.

| Catatan perusahaan | Catatan bank |
|---|---|
| Dibuat berdasarkan sistem perusahaan | Dibuat berdasarkan sistem bank |
| Mengikuti waktu perusahaan mengakui transaksi | Mengikuti waktu bank memproses transaksi |
| Memuat transaksi yang diketahui perusahaan | Memuat transaksi yang diproses bank |
| Dapat mengandung kesalahan internal | Dapat mengandung kesalahan pemrosesan |
| Menjadi bagian dari sistem akuntansi perusahaan | Menjadi catatan eksternal atas rekening |

Perbedaan sumber tersebut menciptakan apa yang dapat disebut sebagai **duality of records**. Misalnya, perusahaan menerbitkan cek sebesar Rp20 juta pada tanggal 30 September. Perusahaan mungkin langsung mengurangi saldo kas dalam catatan internal. Namun, penerima baru mencairkan cek tersebut pada tanggal 3 Oktober. *Akibatnya:*

- catatan perusahaan sudah menunjukkan pengurangan kas;
- catatan bank belum menunjukkan pengurangan kas.

Pada tanggal 30 September kedua catatan berbeda, tetapi tidak berarti salah satu catatan salah. Perbedaan tersebut terjadi karena ***timing.*** Konsep ini merupakan dasar penting dalam memahami rekonsiliasi bank.

**Rekonsiliasi Bank sebagai Proses Sinkronisasi**

Sinkronisasi tidak berarti memaksa saldo perusahaan dan saldo bank menjadi sama secara langsung. Yang dilakukan adalah:

$$\begin{gathered} Saldo\ menurut\ perusahaan \\ \downarrow \\ Identifikasi\ perbedaan \\ \downarrow \\ Klasifikasi\ penyebab\ perbedaan \\ \downarrow \\ Penentuan\ perbedaan\ waktu\ dan\ kesalahan \\ \downarrow \\ Penyesuaian\ yang\ diperlukan \\ \downarrow \\ Saldo\ kas\ yang\ telah\ direkonsiliasi \end{gathered}$$

Dengan pendekatan tersebut, rekonsiliasi mempunyai dua tujuan utama.

**Tujuan pertama: menjelaskan perbedaan**

Setiap selisih harus mempunyai alasan yang dapat dibuktikan.

**Tujuan kedua: menentukan tindakan**

Tidak semua selisih diperlakukan sama. Perusahaan harus menentukan apakah selisih:

- hanya merupakan perbedaan waktu;
- membutuhkan pencatatan dalam sistem perusahaan;
- membutuhkan koreksi;
- atau memerlukan investigasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, rekonsiliasi bank merupakan proses **explanation and resolution**, bukan sekadar *matching*.

**Sumber Perbedaan antara Catatan Perusahaan dan Bank**

Perbedaan antara kedua catatan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

**A. Perbedaan waktu pencatatan**

Perbedaan waktu terjadi ketika perusahaan telah mencatat transaksi, tetapi bank belum memprosesnya, atau sebaliknya.

*Contoh:*

- cek beredar (*outstanding checks*);
- setoran dalam perjalanan (*deposit in transit*).

**B. Transaksi yang belum dicatat perusahaan**

Bank dapat melakukan transaksi yang belum diketahui atau belum dicatat oleh perusahaan.

Contohnya:

- biaya administrasi bank;
- bunga bank;
- transfer masuk langsung;

- pembayaran otomatis;
- penerimaan tertentu melalui rekening.

**C. Kesalahan pencatatan**

Kesalahan dapat terjadi pada catatan perusahaan maupun catatan bank.

Contohnya:

Perusahaan seharusnya mencatat pembayaran Rp8.500.000, tetapi dicatat Rp5.800.000.

Selisih Rp2.700.000 bukan merupakan perbedaan waktu. Selisih tersebut merupakan **error** yang harus dikoreksi.

**D. Transaksi tidak biasa atau tidak teridentifikasi**

Dalam lingkungan transaksi digital, perusahaan dapat menemukan transaksi yang belum dapat segera dikaitkan dengan dokumen internal.

Transaksi tersebut perlu ditelusuri sebelum dianggap sebagai transaksi yang sah.

**Outstanding Check**

*Outstanding check* merupakan cek yang telah diterbitkan dan dicatat perusahaan, tetapi belum dicairkan atau diproses oleh bank sampai tanggal rekonsiliasi.

Contoh:

Pada 28 September perusahaan menerbitkan cek sebesar Rp15.000.000.

Perusahaan telah mencatat:

Pengurangan kas = Rp15.000.000

Namun, sampai 30 September penerima belum mencairkan cek tersebut.

Akibatnya:

**Catatan perusahaan:** kas telah berkurang

**Catatan bank:** kas belum berkurang

Perbedaan tersebut merupakan perbedaan waktu.

Hal yang penting adalah bahwa perusahaan **tidak perlu mencatat ulang transaksi tersebut** hanya karena transaksi belum muncul pada rekening koran. Perbedaan tersebut cukup dijelaskan dalam rekonsiliasi.

**Deposit in Transit**

*Deposit in transit* merupakan setoran yang telah dicatat perusahaan tetapi belum tercermin dalam catatan bank pada tanggal rekonsiliasi.

Contoh:

Pada 30 September perusahaan menerima uang dan menyetorkannya ke bank sebesar Rp25.000.000.

Perusahaan telah mencatat penerimaan tersebut, tetapi bank baru memproses setoran pada 1 Oktober.

Maka:

**Catatan perusahaan:** +Rp25.000.000

**Catatan bank:** belum bertambah

Sekali lagi, perbedaan tersebut bukan kesalahan.

Perbedaannya terjadi karena: *waktu pengakuan internal ≠ waktu pemrosesan eksternal.*

**Transaksi Bank yang Belum Dicatat Perusahaan**

Bank dapat melakukan transaksi atas rekening perusahaan yang belum masuk ke sistem akuntansi perusahaan. Contohnya adalah biaya administrasi bank.

*Misalnya:*

Saldo menurut catatan perusahaan = Rp. 100.000.000

Biaya administrasi bank = Rp. 250.000

Apabila biaya tersebut belum dicatat perusahaan, maka saldo menurut catatan perusahaan belum mencerminkan pengurangan Rp. 250.000 tersebut.

Dalam kondisi ini, rekonsiliasi menghasilkan informasi baru bagi perusahaan yang kemudian harus diproses melalui sistem akuntansi sesuai kebijakan yang berlaku. Hal yang sama dapat terjadi pada:

- pendapatan bunga;
- transfer otomatis;
- pembayaran kewajiban;
- penerimaan langsung;
- transaksi elektronik tertentu.

**Kesalahan dalam Rekonsiliasi Bank**

Tidak semua perbedaan merupakan *timing difference*. Sebagian dapat merupakan kesalahan. Misalnya perusahaan mencatat pembayaran pemasok sebesar Rp. 7.200.000, sedangkan jumlah sebenarnya adalah Rp. 7.800.000.

*Perbedaan:*

Rp. 7.800.000 – Rp. 7.200.000 = **Rp600.000**

Selisih Rp. 600.000 harus ditelusuri dan diperbaiki.

Kesalahan dapat terjadi karena:

- salah memasukkan nominal;
- salah memasukkan tanggal;
- transaksi dicatat dua kali;
- transaksi tidak dicatat;
- salah memilih rekening;
- kesalahan identifikasi penerima;
- kesalahan input dalam sistem.

Dengan demikian, rekonsiliasi bank berfungsi sebagai **mekanisme deteksi kesalahan**, bukan sekadar prosedur administratif.

**Rekonsiliasi Bank sebagai Mekanisme Deteksi Anomali**

Salah satu nilai penting rekonsiliasi adalah kemampuannya menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, perusahaan mempunyai pola transaksi:

- pembayaran pemasok;
- pembayaran gaji;
- pembayaran utilitas;
- penerimaan pelanggan.

Namun, rekening bank menunjukkan transaksi sebesar Rp. 75 juta kepada penerima yang tidak dikenal. Perbedaan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai *timing difference*. Transaksi tersebut perlu ditelusuri. Kemungkinan penyebabnya antara lain:

1. transaksi sah tetapi belum tercatat;
2. transaksi dilakukan oleh unit lain;
3. kesalahan pencatatan;
4. pembayaran otomatis;
5. transaksi yang tidak sah;
6. indikasi fraud.

Dengan demikian, rekonsiliasi bank dapat menjadi salah satu titik awal *exception detection.*

**Rekonsiliasi Bukan Audit**

Rekonsiliasi bank perlu dibedakan dari audit.

| Rekonsiliasi bank | Audit |
|---|---|
| Fokus pada perbedaan catatan kas | Memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas |
| Dilakukan secara periodik/berkelanjutan | Dilakukan berdasarkan tujuan dan lingkup audit |
| Menjelaskan selisih saldo | Menilai kewajaran/asersi berdasarkan prosedur audit |
| Mengidentifikasi transaksi yang perlu ditelusuri | Menghasilkan kesimpulan/opini sesuai jenis audit |
| Merupakan bagian dari pengendalian operasional | Merupakan aktivitas assurance/pemeriksaan |

Dengan demikian, rekonsiliasi bank tidak dapat dianggap sebagai pengganti audit. Namun, hasil rekonsiliasi dapat menjadi bukti penting dalam proses pengendalian dan pemeriksaan.

**Rekonsiliasi Bank dan Kualitas Informasi Kas**

Rekonsiliasi berkontribusi terhadap kualitas informasi kas karena membantu menjawab pertanyaan penting:

*Berapa sebenarnya saldo kas yang tersedia dan apakah seluruh perbedaan telah dapat dijelaskan?*

Tanpa rekonsiliasi, perusahaan dapat menghadapi kondisi ketika:

- saldo sistem tidak sesuai dengan saldo bank;
- transaksi belum tercatat;
- kesalahan input tidak terdeteksi;
- transaksi tidak dikenal dibiarkan;
- laporan internal menggunakan angka yang tidak tepat.

Oleh karena itu, rekonsiliasi membantu meningkatkan **reliability** informasi mengenai kas. Namun, perlu ditekankan bahwa rekonsiliasi tidak menjamin seluruh transaksi bebas dari kesalahan atau fraud. Rekonsiliasi merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas proses, kompetensi personel, dokumentasi, pemisahan tugas, dan tindak lanjut atas pengecualian.

**Rekonsiliasi Bank dalam Sistem Informasi Akuntansi**

Pada sistem akuntansi tradisional, rekonsiliasi sering dilakukan dengan membandingkan rekening koran dan catatan perusahaan secara manual.
Pada lingkungan digital, proses tersebut dapat dilakukan dengan bantuan:

- *bank statement import*;
- integrasi perbankan;
- *automatic matching*;
- aturan pencocokan transaksi;
- *exception report*;
- *cash dashboard*;
- *workflow approval*;
- analitik transaksi.

Konsepnya dapat digambarkan:

$$\boldsymbol{Bank\ Statement}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Data\ Import}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Transaction\ Matching}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Matched\ Transactions} \rightarrow selesai$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Unmatched\ Transactions}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Investigation}$$
$$\downarrow$$
$$\boldsymbol{Correction\ /\ Adjustment\ /\ Explanation}$$

Perubahan tersebut membuat rekonsiliasi bergerak dari aktivitas *manual matching* menuju *exception-based reconciliation.* Artinya, sistem menangani transaksi yang dapat dicocokkan secara otomatis, sedangkan manusia berfokus pada transaksi yang tidak sesuai.

**Prinsip Exception-Based Reconciliation**

Dalam lingkungan digital, tujuan otomatisasi bukan membuat seluruh proses tanpa manusia. Prinsip yang lebih tepat adalah:

*Otomatisasi transaksi normal, arahkan transaksi abnormal kepada manusia.*

Misalnya terdapat 10.000 transaksi bank dalam satu bulan. Jika 9.800 transaksi dapat dicocokkan secara otomatis dengan tingkat keyakinan yang memadai, maka perhatian staf akuntansi dapat difokuskan pada 200 transaksi yang belum cocok. Keuntungan pendekatan ini adalah:

- mengurangi pekerjaan rutin;
- mempercepat rekonsiliasi;
- meningkatkan fokus pada transaksi berisiko;

- meningkatkan kemampuan investigasi;
- menghasilkan jejak pemeriksaan yang lebih baik.

Namun, sistem otomatis harus tetap mempunyai mekanisme untuk menangani transaksi yang salah dicocokkan.

**Risiko False Matching**

Otomatisasi rekonsiliasi membawa risiko baru, yaitu *false matching.* False matching terjadi ketika sistem menganggap dua transaksi cocok padahal sebenarnya berbeda.

Contoh:

Bank mempunyai dua transaksi:

- PT Maju Jaya — Rp50.000.000
- PT Maju Bersama — Rp50.000.000

Jika sistem hanya menggunakan nominal sebagai dasar pencocokan, sistem dapat salah menghubungkan transaksi.

Oleh karena itu, pencocokan sebaiknya dapat mempertimbangkan kombinasi:

- nominal;
- tanggal;
- nomor referensi;
- rekening;
- nama pihak;
- deskripsi;
- pola transaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa otomatisasi rekonsiliasi tetap membutuhkan desain kontrol yang baik.

**Rekonsiliasi Bank dan Audit Trail**

Setiap perubahan yang dilakukan selama proses rekonsiliasi idealnya dapat ditelusuri.

Audit trail dapat menunjukkan:

- transaksi yang belum cocok;
- siapa yang melakukan pencocokan;
- kapan transaksi disesuaikan;
- alasan penyesuaian;
- dokumen pendukung;
- siapa yang menyetujui;
- perubahan yang dilakukan terhadap catatan.

Audit trail penting karena rekonsiliasi bukan hanya menghasilkan saldo akhir, tetapi juga menghasilkan jejak penjelasan mengenai bagaimana saldo tersebut diperoleh.

Dengan demikian:

*Saldo yang dapat dijelaskan lebih bernilai daripada saldo yang sekadar terlihat benar.*

**Rekonsiliasi Bank sebagai Titik Pengendalian**

Rekonsiliasi dapat ditempatkan sebagai titik pengendalian yang menghubungkan sistem internal perusahaan dengan informasi eksternal dari bank. Secara konseptual:

***Catatan Internal***

↕

***Rekonsiliasi Bank***

↕

***Catatan Eksternal Bank***

Rekonsiliasi menjadi titik pertemuan antara dua sumber informasi. Apabila terdapat perbedaan, perusahaan tidak langsung mengubah salah satu saldo. Perusahaan terlebih dahulu mencari **penyebab ekonomi dari perbedaan tersebut**. Pendekatan tersebut penting karena perubahan angka tanpa memahami penyebab dapat justru menghasilkan kesalahan baru.

**Hubungan Rekonsiliasi dengan Pengendalian Kas**

Penelitian mengenai sistem informasi penerimaan kas menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi dan prosedur pengendalian berhubungan dengan kemampuan organisasi menjaga keandalan informasi kas.

Rahariyanto dan Rahayu, misalnya, meneliti penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dalam kaitannya dengan peningkatan pengendalian internal. Sementara itu, penelitian mengenai pengeluaran kas menunjukkan pentingnya prosedur dan komponen pengendalian dalam menjaga aset kas.

Temuan tersebut dapat ditempatkan sebagai landasan bahwa rekonsiliasi tidak berdiri sendiri. Rekonsiliasi merupakan salah satu bagian dari ekosistem pengendalian kas. Namun, berbeda dengan pembahasan pengendalian internal secara umum, fokus subbab ini tetap pada pertanyaan:

*Bagaimana perusahaan memastikan bahwa perbedaan antara dua catatan kas dapat dijelaskan dan diselesaikan?*

Dengan demikian, pembahasan tidak perlu mengulang seluruh komponen sistem pengendalian internal yang akan dibahas secara khusus pada **Subbab 6.3**.

**Frekuensi Rekonsiliasi**

Frekuensi rekonsiliasi harus disesuaikan dengan karakteristik transaksi perusahaan. Perusahaan dengan:

- transaksi sangat banyak;
- nilai transaksi besar;
- risiko fraud tinggi;
- banyak rekening bank;
- transaksi digital yang intensif;

dapat membutuhkan rekonsiliasi yang lebih sering. Sebaliknya, perusahaan dengan transaksi relatif sedikit mungkin menggunakan frekuensi yang lebih rendah sesuai kebijakan dan kebutuhan pengendalian.

Dalam lingkungan digital, rekonsiliasi bahkan dapat dilakukan secara lebih mendekati waktu nyata. Perubahan paradigma tersebut dapat dirumuskan:

$$\boldsymbol{Periodic\ Reconciliation}$$
$$Rekonsiliasi \rightarrow akhir\ periode$$

menjadi:

$$\boldsymbol{Continuous/near-real-time\ Reconciliation}$$
$$Transaksi \rightarrow pencocokan \rightarrow exception \rightarrow investigasi$$

Meskipun demikian, kemampuan teknologi tidak berarti bahwa semua rekonsiliasi harus dilakukan secara real-time. Frekuensi tetap harus mempertimbangkan risiko, materialitas, biaya, dan kebutuhan informasi.

**Rekonsiliasi Bank sebagai Proses Investigasi**

Rekonsiliasi yang berkualitas tidak berhenti ketika selisih ditemukan. Siklus yang lebih tepat adalah:

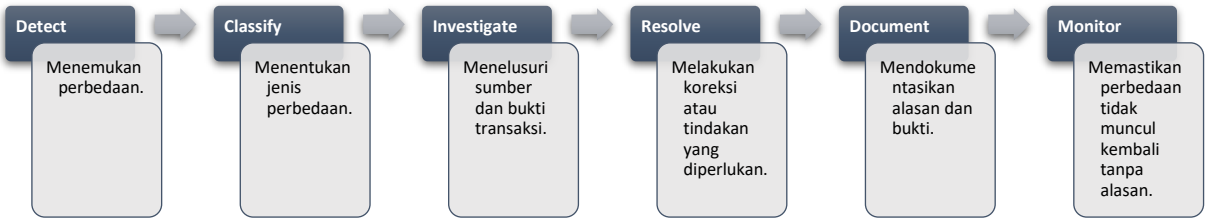


Siklus tersebut menjadikan rekonsiliasi sebagai aktivitas analitis, bukan pekerjaan administratif semata.

**Rekonsiliasi Bank dalam Perspektif Akuntansi Digital**

Perkembangan teknologi mengubah bentuk rekonsiliasi, tetapi tidak menghilangkan prinsip dasarnya.

| Rekonsiliasi Tradisional | Rekonsiliasi Digital |
|---|---|
| Manual | Sebagian/seluruhnya otomatis |
| Rekening koran fisik | Data bank elektronik |
| Pencocokan satu per satu | *Automated matching* |
| Fokus pada semua transaksi | Fokus pada pengecualian |
| Koreksi manual | Workflow dan sistem |
| Dokumentasi terpisah | Audit trail digital |
| Periodik | Dapat lebih sering/berkelanjutan |
| Ketergantungan tinggi pada pekerjaan administratif | Lebih banyak analisis dan investigasi |

Dengan demikian, perkembangan digital mengubah **cara rekonsiliasi dilakukan**, tetapi tujuan dasarnya tetap sama:

*memastikan bahwa perbedaan antara catatan internal dan eksternal dapat dijelaskan, ditindaklanjuti, dan menghasilkan informasi kas yang dapat dipercaya.*

**Implikasi bagi Profesi Akuntansi**

Perubahan teknologi menyebabkan peran akuntan dalam rekonsiliasi mengalami pergeseran. Pada pendekatan tradisional, akuntan menghabiskan banyak waktu untuk:

- mencocokkan transaksi;
- mencari selisih;
- memeriksa rekening koran;
- melakukan input koreksi.

Dalam lingkungan digital, sebagian pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh sistem. Akuntan kemudian lebih banyak berperan dalam:

- menetapkan aturan pencocokan;
- mengevaluasi transaksi pengecualian;
- melakukan investigasi;
- menilai risiko;
- memastikan bukti pendukung;
- mengevaluasi kualitas kontrol;
- mengambil keputusan atas transaksi yang tidak biasa.

Dengan demikian, otomatisasi tidak menghilangkan peran akuntan. Otomatisasi menggeser fokus pekerjaan dari **matching** menuju **judgement dan investigation**.

## 6.3 IMPLEMENTASI KERANGKA COSO KONTEMPORER

Pengelolaan kas tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan yang benar atau rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala. Perusahaan juga membutuhkan sistem yang memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah, aset terlindungi, risiko diidentifikasi, tanggung jawab ditetapkan, informasi mengalir kepada pihak yang tepat, dan kelemahan pengendalian segera diketahui.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis digital. Transaksi dapat terjadi dalam jumlah besar, melalui berbagai kanal elektronik, dengan kecepatan tinggi dan melibatkan banyak sistem yang saling terhubung. Dalam kondisi tersebut, pengendalian internal tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pemeriksaan manual setelah transaksi terjadi. Pengendalian harus dirancang sejak awal proses, terintegrasi dengan teknologi, mampu mencegah kesalahan, mendeteksi penyimpangan, serta memberikan respons terhadap risiko secara tepat waktu.

Salah satu kerangka yang paling banyak digunakan untuk memahami pengendalian internal adalah **COSO Internal Control—Integrated Framework**. Kerangka COSO 2013 mengorganisasikan pengendalian internal ke dalam lima komponen utama:

1. lingkungan pengendalian (*control environment*);
2. penilaian risiko (*risk assessment*);
3. aktivitas pengendalian (*control activities*);
4. informasi dan komunikasi (*information and communication*);
5. aktivitas pemantauan (*monitoring activities*).

Kelima komponen tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai lima prosedur yang berdiri sendiri. Kelimanya membentuk suatu sistem yang saling berhubungan.

**Pengendalian Internal sebagai Sistem, Bukan Sekadar Prosedur**

Pengendalian internal sering kali dipersepsikan sebagai kumpulan aturan atau prosedur administratif. Perspektif tersebut terlalu sempit. Pengendalian internal merupakan **sistem yang dirancang dan dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi**, terutama berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dengan demikian, pengendalian internal mempunyai dimensi:




Dalam perusahaan digital, keenam unsur tersebut saling berinteraksi. Contohnya, sistem pembayaran elektronik mungkin memiliki fitur persetujuan otomatis. Namun, fitur tersebut tidak akan efektif apabila:

- batas kewenangan tidak ditetapkan;
- data pemasok tidak valid;
- pengguna berbagi kredensial;
- tidak ada pemantauan;
- atau manajemen mengabaikan pengecualian.

Artinya:

*Teknologi dapat menjalankan kontrol, tetapi efektivitas kontrol tetap bergantung pada desain sistem dan perilaku manusia.*

**Kerangka COSO 2013**

COSO Internal Control—Integrated Framework yang diperbarui pada 2013 memberikan struktur yang lebih terperinci mengenai pengendalian internal. Kerangka tersebut terdiri atas lima komponen dan 17 prinsip.

| Komponen COSO | Fokus |
|---|---|
| Control Environment | Fondasi budaya dan tata kelola pengendalian |
| Risk Assessment | Identifikasi dan analisis risiko |
| Control Activities | Tindakan pengendalian untuk merespons risiko |
| Information and Communication | Penyediaan dan penyampaian informasi |
| Monitoring Activities | Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kontrol |

Kelima komponen tersebut kemudian dijabarkan ke dalam **17 prinsip**. Struktur tersebut penting karena memberikan pendekatan yang lebih sistematis dibandingkan sekadar menggunakan daftar prosedur pengendalian. Janvrin et al. menjelaskan bahwa pembaruan COSO memberikan peluang penelitian dan implementasi yang lebih luas, termasuk keterkaitan pengendalian internal dengan teknologi informasi. Lawson, Muriel, dan Sanders juga menemukan bahwa praktisi secara umum memandang kerangka 2013 sebagai perkembangan yang memperjelas struktur pengendalian internal.

**Komponen Pertama: Control Environment**

**Makna Control Environment**

*Control environment* merupakan fondasi bagi seluruh sistem pengendalian internal. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana organisasi membangun:

- integritas;
- nilai etika;
- struktur organisasi;
- tanggung jawab;
- kewenangan;
- kompetensi;
- akuntabilitas.

Dalam pengelolaan kas, lingkungan pengendalian menentukan apakah organisasi benar-benar mempunyai budaya yang menghargai keamanan aset dan akurasi informasi.

Misalnya, perusahaan mempunyai sistem pembayaran digital yang canggih. Namun, apabila manajemen membiarkan pegawai menggunakan akun orang lain atau mengabaikan transaksi tanpa bukti, maka sistem tersebut memiliki kelemahan pada tingkat lingkungan pengendalian.

**Integritas dan Nilai Etika**

Pengendalian internal tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis sistem. Individu yang memiliki akses terhadap kas dapat menjadi sumber risiko apabila terdapat:

- konflik kepentingan;
- penyalahgunaan wewenang;
- manipulasi transaksi;
- kolusi;
- pengabaian prosedur.

Oleh karena itu, organisasi perlu membangun standar perilaku yang jelas.

Contohnya:

- kode etik;
- kebijakan konflik kepentingan;
- kebijakan penerimaan hadiah;
- mekanisme pelaporan pelanggaran;
- sanksi terhadap pelanggaran.

**Board Oversight**

Pengendalian internal juga membutuhkan pengawasan dari pihak yang memiliki tanggung jawab tata kelola. Dewan komisaris, komite audit, dan manajemen senior perlu memahami risiko utama organisasi dan memastikan bahwa pengendalian internal tidak hanya menjadi tanggung jawab staf operasional. Dengan demikian, pengendalian internal bersifat *top-down sekaligus operational.*

**Komponen Kedua: Risk Assessment**

**Risiko sebagai Dasar Pengendalian**

Tidak mungkin organisasi mengendalikan seluruh risiko dengan tingkat intensitas yang sama. Oleh sebab itu, pengendalian harus dimulai dengan pertanyaan:

*Apa yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi?*

Risiko kemudian dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Dalam konteks kas, risiko dapat berupa:

- pembayaran tidak sah;
- kesalahan transaksi;
- penyalahgunaan akses;
- fraud;
- kesalahan sistem;
- kegagalan integrasi;
- transaksi duplikat;
- gangguan layanan bank;
- kesalahan data pemasok.

**Fraud Risk**

Risiko fraud perlu memperoleh perhatian khusus. Donelson, Ege, dan McInnis menunjukkan bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal berkaitan erat dengan kemungkinan terungkapnya fraud pada periode berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian bukan hanya persoalan administratif, tetapi dapat mempunyai konsekuensi ekonomi dan pelaporan yang serius.

Risiko fraud dapat muncul melalui:

$$\boldsymbol{Opportunity + Pressure/Incentive + Rationalization}$$

Meskipun kerangka COSO tidak hanya ditujukan untuk fraud prevention, desain pengendalian yang baik dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan.

**Penilaian Risiko Berkelanjutan**

Risiko tidak bersifat tetap.

Perubahan:

- teknologi;
- model bisnis;
- pemasok;
- kanal pembayaran;
- struktur organisasi;
- regulasi;
- volume transaksi;

dapat menciptakan risiko baru.

Karena itu, penilaian risiko harus diperbarui ketika terjadi perubahan signifikan.

## Komponen Ketiga: Control Activities

### Hakikat Aktivitas Pengendalian

*Control activities* merupakan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima.

Aktivitas pengendalian dapat berbentuk:

- otorisasi;
- verifikasi;
- pembatasan akses;
- pemisahan fungsi;
- pemeriksaan;
- validasi;
- rekonsiliasi;
- kontrol otomatis.

Namun, karena rekonsiliasi telah dibahas secara khusus pada 6.2, pembahasan di bagian ini difokuskan pada *arsitektur aktivitas pengendalian,* bukan prosedur rekonsiliasi.

### Segregation of Duties

Salah satu prinsip penting adalah *pemisahan tugas.* Idealnya, fungsi berikut tidak sepenuhnya berada pada satu individu:

1. menginisiasi transaksi;
2. menyetujui transaksi;
3. mencatat transaksi;
4. menguasai aset;
5. melakukan pemeriksaan.

Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan seseorang dapat melakukan dan menyembunyikan penyimpangan secara sendirian. Dalam sistem digital, prinsip ini dapat diwujudkan melalui *role-based access control.*

Contoh:

| Peran | Hak akses |
|---|---|
| Staf pembelian | Membuat permintaan |
| Supervisor | Menyetujui |
| Staf keuangan | Memproses pembayaran |
| Akuntan | Mencatat/memantau |
| Auditor internal | Membaca dan mengevaluasi |

### Authorization Control

Transaksi tertentu harus memperoleh persetujuan sesuai batas kewenangan.

Contoh:

- transaksi sampai Rp10 juta → supervisor;
- Rp10–100 juta → manajer;
- di atas Rp100 juta → pejabat berwenang lebih tinggi.

Dalam sistem digital, hierarki tersebut dapat diimplementasikan dalam *workflow*.

Dengan demikian, sistem dapat menolak atau menahan transaksi yang tidak memenuhi otorisasi.

**Automated Control**

Perkembangan sistem informasi menyebabkan sebagian aktivitas pengendalian dapat dijalankan secara otomatis. *Contoh:*

1. **Duplicate Payment Detection.** Sistem mendeteksi pembayaran yang memiliki karakteristik sama.
2. **Limit Control.** Sistem menolak transaksi yang melebihi batas kewenangan.
3. **Access Control.** Sistem membatasi akses berdasarkan jabatan.
4. **Validation Control.** Sistem memeriksa kelengkapan dan validitas data.
5. **Exception Alert.** Sistem memberikan peringatan apabila transaksi menyimpang dari pola normal.

Keunggulan automated control adalah kemampuan bekerja secara konsisten pada volume transaksi yang besar. Namun, kontrol otomatis juga memiliki risiko. Apabila aturan pengendalian salah, kesalahan dapat diterapkan secara otomatis pada banyak transaksi. Oleh karena itu:

*Automated control tetap membutuhkan desain, pengujian, pemeliharaan, dan evaluasi manusia.*

**Komponen Keempat: Information and Communication**

**Informasi sebagai Infrastruktur Pengendalian**

Pengendalian internal membutuhkan informasi yang relevan dan tepat waktu.

Informasi yang diperlukan bukan hanya saldo atau laporan akhir, tetapi juga informasi mengenai:

- transaksi;
- pengguna;
- otorisasi;
- pengecualian;
- perubahan data;
- aktivitas sistem;
- risiko.

Informasi tersebut memungkinkan manajemen mengetahui apakah kontrol berjalan sebagaimana mestinya.

**Internal Communication**

Informasi pengendalian harus disampaikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab. Misalnya, apabila sistem mendeteksi transaksi tidak biasa, informasi tersebut harus dapat diteruskan kepada:

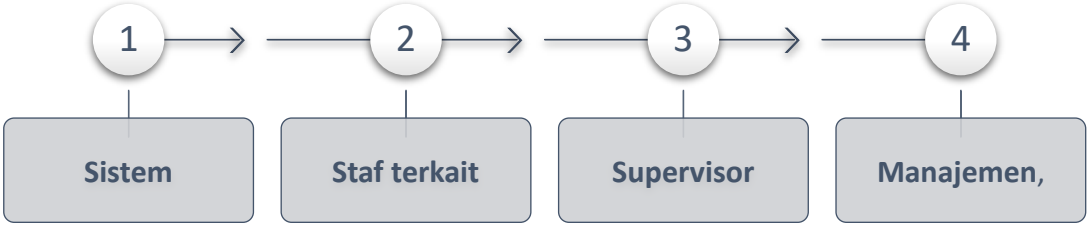


Informasi yang berhenti pada sistem tanpa ditindaklanjuti tidak menghasilkan pengendalian yang efektif.

**External Communication**

Dalam kondisi tertentu, organisasi juga membutuhkan komunikasi dengan pihak eksternal seperti:

- auditor;
- regulator;
- bank;
- penyedia teknologi;
- pihak terkait lainnya.

Komunikasi tersebut diperlukan apabila informasi eksternal dapat memengaruhi pengendalian organisasi.

**Komponen Kelima: Monitoring Activities**

**Mengapa Monitoring Diperlukan?**

Pengendalian yang efektif pada tahun sebelumnya belum tentu tetap efektif pada tahun berikutnya. Perubahan sistem, pegawai, teknologi, proses, dan risiko dapat membuat kontrol menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan. Monitoring dapat dilakukan melalui:

- evaluasi berkelanjutan;
- evaluasi periodik;
- audit internal;
- analisis pengecualian;
- indikator risiko;
- pemeriksaan kelemahan kontrol.

**Continuous Monitoring**

Dalam lingkungan digital, monitoring dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Misalnya sistem dapat memantau:

- transaksi di luar jam normal;
- pembayaran dengan nominal tidak biasa;
- perubahan rekening pemasok;
- transaksi berulang;
- transaksi yang melewati batas tertentu;
- penggunaan hak akses yang tidak normal.

Konsep tersebut memungkinkan organisasi bergerak dari:

***Detect after event***

menuju:

$$\boldsymbol{Detect\ during/near\ event}$$

dan dalam sistem yang lebih maju:

$$\boldsymbol{Predict\ potential\ exception}$$

**COSO dalam Lingkungan Digital**

Transformasi digital mengubah cara pengendalian dirancang. Pada lingkungan tradisional:

$$Manusia \rightarrow Prosedur \rightarrow Dokumen \rightarrow Pemeriksaan$$

Dalam lingkungan digital:

$$Manusia \rightarrow Sistem \rightarrow Data \rightarrow Automated\ Control \rightarrow Analytics \rightarrow Monitoring$$

Namun, perubahan tersebut bukan berarti manusia tidak lagi diperlukan.

Model yang lebih tepat adalah:

**Human + Technology**

Teknologi menangani:

- volume;
- kecepatan;
- konsistensi;
- pencocokan;
- validasi.

Manusia menangani:

- judgement;
- interpretasi;
- investigasi;
- keputusan;
- pertimbangan etis.

**IT General Controls dan Application Controls**

Dalam sistem digital, pengendalian dapat dibedakan secara konseptual menjadi dua kelompok.

**A. IT General Controls**

Mengendalikan lingkungan teknologi secara umum.

Contohnya:

- manajemen akses;
- perubahan sistem;
- backup;
- keamanan infrastruktur;
- pengelolaan pengguna;
- pemulihan sistem.

**B. Application Controls**

Pengendalian yang terdapat dalam aplikasi tertentu.

Contohnya:

- validasi transaksi;
- batas nominal;
- otorisasi;
- pengecekan kelengkapan;
- *duplicate detection*;
- *exception alert*.

Perbedaan tersebut penting karena aplikasi dapat mempunyai kontrol yang baik, tetapi lingkungan TI yang mendasarinya lemah.

**Access Control sebagai Pengendalian Kontemporer**

Dalam sistem berbasis teknologi, akses terhadap informasi dan transaksi menjadi bagian penting dari pengendalian. Pengelolaan akses perlu memperhatikan:

- siapa yang dapat masuk;
- sistem apa yang dapat digunakan;
- data apa yang dapat dilihat;
- transaksi apa yang dapat dibuat;
- transaksi apa yang dapat disetujui;
- kapan akses digunakan.

Prinsip pentingnya adalah:

$$Access\ should\ follow\ responsibility.$$

Artinya, hak akses harus sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan.

Akses yang terlalu luas dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.

**Privileged Access**

Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengguna yang memiliki hak akses tinggi.

*Contohnya:*

- administrator sistem;
- administrator database;
- superuser;
- pejabat dengan kewenangan transaksi besar.

Pengguna dengan akses istimewa dapat memengaruhi sistem secara luas. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan:

- pembatasan hak istimewa;
- monitoring;
- logging;
- review berkala;
- persetujuan khusus;
- evaluasi aktivitas pengguna.

**COSO dan Data Analytics**

Data analytics dapat memperkuat monitoring pengendalian. Daripada hanya mengambil sampel kecil transaksi, sistem dapat menganalisis populasi transaksi yang besar. Misalnya analisis dapat mencari:

- transaksi dengan nominal ekstrem;
- transaksi di luar jam kerja;
- transaksi berulang;
- perubahan data master;
- transaksi dengan pola tidak biasa;
- transaksi mendekati batas otorisasi.

Pendekatan tersebut memungkinkan organisasi mengembangkan continuous control monitoring. Namun, hasil analitik tetap membutuhkan interpretasi. Transaksi yang dianggap anomali belum tentu fraud. Anomali adalah:

$$sinyal\ untuk\ investigasi, bukan\ bukti\ otomatis\ terjadinya\ penyimpangan.$$

**COSO dan Pencegahan Fraud**

Pengendalian internal mempunyai hubungan erat dengan pencegahan dan deteksi fraud. Penelitian Donelson, Ege, dan McInnis menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal memiliki hubungan dengan pengungkapan fraud pada periode berikutnya.

Penelitian Yahya dan Venusita mengenai pengendalian internal berbasis COSO juga menunjukkan bahwa beberapa komponen pengendalian mempunyai hubungan dengan upaya pencegahan fraud, meskipun pengaruh masing-masing komponen tidak selalu sama pada setiap konteks organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu kontrol tunggal yang dapat menghilangkan risiko fraud. Pencegahan membutuhkan kombinasi:

$$Budaya + Risiko + Aktivitas\ Kontrol + Informasi + Monitoring$$

**COSO dan Human Error**

Pengendalian internal tidak hanya ditujukan untuk mencegah tindakan yang disengaja. Kesalahan manusia juga dapat menghasilkan:

- transaksi salah;
- salah input;
- salah otorisasi;
- duplikasi;
- salah klasifikasi;
- kesalahan konfigurasi.

Oleh karena itu, desain kontrol sebaiknya mengikuti prinsip error prevention dan error detection. *Contoh:*

Daripada membiarkan pengguna memasukkan nominal secara bebas, sistem dapat memberikan:

- validasi;
- batas nominal;

- daftar pilihan;
- notifikasi;
- konfirmasi.

Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan kesalahan sejak awal.

**Three Lines Model dan COSO**

Dalam praktik tata kelola modern, pengendalian internal tidak hanya dilakukan oleh fungsi keuangan. Secara sederhana, organisasi dapat membagi tanggung jawab menjadi:

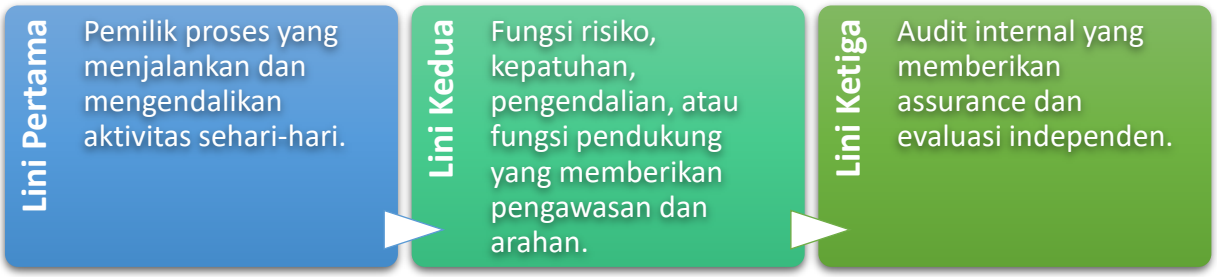


Pembagian ini membantu mencegah anggapan bahwa pengendalian internal hanya merupakan tanggung jawab bagian akuntansi.

**Efektivitas Pengendalian Internal**

Pengendalian yang banyak belum tentu efektif.

Efektivitas perlu dilihat dari pertanyaan:

1. Apakah kontrol relevan terhadap risiko?
2. Apakah kontrol dirancang dengan tepat?
3. Apakah kontrol benar-benar dijalankan?
4. Apakah kelemahan ditindaklanjuti?
5. Apakah kontrol masih sesuai dengan kondisi terbaru?

Penelitian Felix mengenai efektivitas COSO 2013 menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi kerangka tersebut secara tepat waktu menunjukkan lebih sedikit kelemahan material yang dilaporkan auditor dibandingkan perusahaan yang terlambat mengadopsinya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kerangka pengendalian dapat mempunyai konsekuensi terhadap kualitas pengendalian yang dapat diamati.

**Kelemahan Pengendalian Internal**

Kelemahan pengendalian dapat terjadi pada berbagai tingkat.

**Tingkat operasional**

Misalnya:

- otorisasi tidak lengkap;
- akses terlalu luas;
- dokumentasi tidak memadai.

**Tingkat sistem**

Misalnya:

- konfigurasi salah;
- validasi tidak berfungsi;
- integrasi gagal.

**Tingkat organisasi**

Misalnya:

- budaya pengendalian lemah;
- tanggung jawab tidak jelas;
- manajemen mengabaikan risiko.

Kelemahan pada tingkat organisasi dapat lebih serius karena dapat memengaruhi banyak proses sekaligus.

**Maturity Model Pengendalian Internal Digital**

Kematangan pengendalian internal dapat dipahami melalui tahapan berikut:

| Tahap | Karakteristik |
|---|---|
| 1. Manual | Kontrol dominan dilakukan manusia |
| 2. Digitized | Dokumen dan prosedur mulai terdigitalisasi |
| 3. Integrated | Sistem dan kontrol mulai terintegrasi |
| 4. Automated | Banyak kontrol dijalankan sistem |
| 5. Continuous | Monitoring dilakukan secara berkelanjutan |
| 6. Intelligent | Analitik digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi risiko |

Model tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan dokumen elektronik. Transformasi yang lebih matang terjadi ketika organisasi mampu menggunakan data untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko secara lebih cepat.

**Peran Manajemen dalam COSO Kontemporer**

Manajemen memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pengendalian berjalan.

Manajemen perlu:

1. menetapkan budaya pengendalian;
2. mengidentifikasi risiko;
3. memastikan kontrol dirancang;
4. menyediakan sumber daya;
5. menetapkan pemilik kontrol;
6. mengevaluasi kelemahan;
7. memastikan tindak lanjut;
8. menyesuaikan kontrol terhadap perubahan lingkungan.

Dengan demikian, COSO bukan sekadar kerangka untuk auditor.

COSO merupakan kerangka manajemen untuk mengelola pengendalian organisasi.

**Peran Akuntan dalam Pengendalian Internal Digital**

Transformasi digital juga mengubah peran akuntan. Akuntan tidak lagi hanya bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan, tetapi semakin terlibat dalam:

- desain kontrol;
- evaluasi risiko;
- pengujian kontrol;
- analisis pengecualian;
- pengawasan akses;

- evaluasi kualitas data;
- monitoring;
- investigasi anomali;
- komunikasi risiko kepada manajemen.

Kemampuan yang dibutuhkan mencakup:

$$Akuntansi + Pengendalian + Teknologi + Analitik + Judgement$$

Hal ini memperluas peran akuntan dari record keeper menjadi control and risk professional.

**Integrasi Lima Komponen COSO**

Kelima komponen COSO dapat digambarkan sebagai suatu siklus:

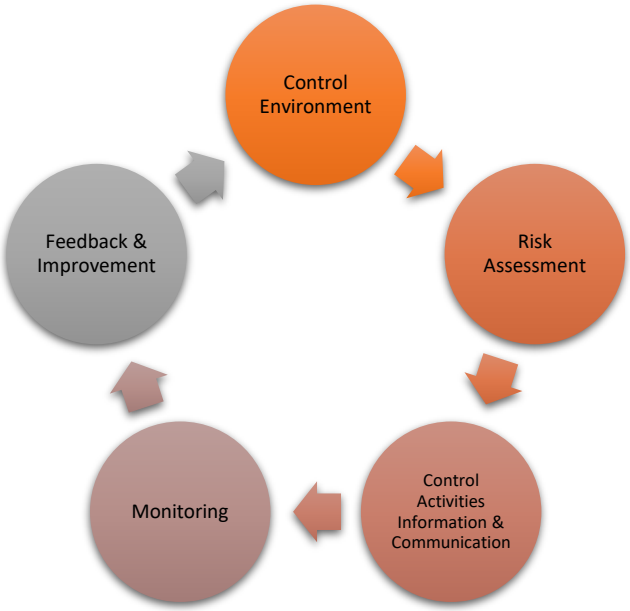


Tidak ada satu komponen yang dapat bekerja secara optimal apabila komponen lainnya lemah. Misalnya, organisasi memiliki aktivitas pengendalian yang sangat baik, tetapi *control environment* buruk. Karyawan mungkin mengabaikan kontrol. Sebaliknya, organisasi memiliki budaya pengendalian yang baik tetapi tidak melakukan *monitoring*. Kelemahan kontrol mungkin tidak diketahui. Karena itu:

> *Efektivitas pengendalian internal merupakan hasil interaksi antar-komponen, bukan hasil dari satu prosedur tunggal.*

# DAFTAR PUSTAKA


Amrih, G. G., & Maryani, L. (2025/2026). The Role of Accounting Information Systems in the Development of ERP in Indonesia. MSJ: Majority Science Journal, 3(4). DOI: 10.61942/msj.v3i4.475

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (2023). AI Monitor: The Impact of AI on Accountancy. ACCA. Gunakan publikasi ACCA mengenai AI dan masa depan profesi sebagai bahan pendukung; periksa judul serta metadata publikasi yang akan dicantumkan pada daftar pustaka final melalui situs resmi ACCA.

Barth, M. E. (2014). Measurement in financial reporting: The need for concepts. Accounting Horizons, 28(2), 331–352. https://doi.org/10.2308/acch-50689

Barth, M. E. (2014). Measurement in financial reporting: The need for concepts. Accounting Horizons, 28(2), 331–352. https://doi.org/10.2308/acch-50689

Castanheira, P., & Loureiro, N. (2026). Digital technologies in accounting: A narrative review of the contemporary transformation of the profession. Portuguese Journal of Finance, Management and Accounting, 12(23), 63–91. https://doi.org/10.54663/2183-3826.2026.v12.n23.63-91

Clarkson, P., Gao, R., & Herbohn, K. (2020). The relationship between a firm's information environment and its cash holding decision. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(2), Article 100201. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100201

Donelson, D. C., Ege, M. S., & McInnis, J. M. (2017). Internal control weaknesses and financial reporting fraud. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(3), 45–69. https://doi.org/10.2308/ajpt-51608

Ebaid, I. E.-S. (2021). Does IFRS implementation improve qualitative characteristics of accounting information: Evidence from Saudi commercial banks. Journal of Advanced Research in Economics and Administrative Sciences, 2(1), 17–27. https://doi.org/10.47631/jareas.v2i1.193

Felix, R. (2020). Observed effectiveness of the COSO 2013 framework. Journal of Accounting & Organizational Change, 16(1), 31–45. https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2018-0064

Freiman, J. W., Kim, Y., & Vasarhelyi, M. A. (2022). Full Population Testing: Applying Multidimensional Audit Data Sampling (MADS) to General Ledger Data Auditing. International Journal of Accounting Information Systems, 46, 100573. DOI: 10.1016/j.accinf.2022.100573

Grabski, S. V., Leech, S. A., & Schmidt, P. J. (2011). A Review of ERP Research: A Future Agenda for Accounting Information Systems. Journal of Information Systems, 25(1), 37–78. DOI: 10.2308/jis.2011.25.1.37

Granlund, M. (2011). Extending AIS Research to Management Accounting and Control Issues: A Research Note. International Journal of Accounting Information Systems, 12(1), 3–19. DOI: 10.1016/j.accinf.2010.11.001

Hastharita, R., Salma, D. K., & Yus'an, N. H. (2026). Digital transformation in accounting information systems: A systematic literature review on cloud, big data, and artificial intelligence integration. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(2), 2915–2925. https://doi.org/10.46306/rev.v6i2.1250

Hastharita, R., Salma, D. K., & Yus'an, N. H. (2026). Digital transformation in accounting information systems: A systematic literature review on cloud, big data, and artificial intelligence integration. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(2), 2915–2925. https://doi.org/10.46306/rev.v6i2.1250

IFRS Foundation. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. London: IFRS Foundation. Situs resmi IFRS Foundation.

IFRS Foundation. *IFRS 17 Insurance Contracts*.

IFRS Foundation. *IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements*.

IFRS Foundation. *IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures*.

IFRS Foundation. *IFRS Standards—Jurisdiction Profile: Indonesia*. IFRS Foundation.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia*. DSAK IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Laporan Pengembangan SAK 2025*. DSAK IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pengesahan Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pengesahan Amendemen PSAK 221 dan Amendemen Contoh Ilustratif*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pengesahan Amendemen PSAK 228*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pengesahan PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pengesahan PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *SAK Entitas Privat Efektif Per 1 Januari 2025*. DSAK IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif Per 1 Januari 2025*. DSAK IAI.

International Accounting Standards Board (IASB). (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation. Halaman resmi IFRS.

International Accounting Standards Board (IASB). (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation.

International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation. Laman resmi IFRS Foundation.

International Accounting Standards Board. (2018). Conceptual Framework for Financial Reporting. IFRS Foundation. Laman resmi kerangka konseptual IFRS

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). (2024). 2024 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards). International Federation of Accountants (IFAC).

International Federation of Accountants (IFAC). (2022). The Future of the Accountancy Profession. IFAC.

International Federation of Accountants (IFAC). (n.d.). Technology. IFAC.

Iskandar, M., & Fettry, S. (2008). Manfaat kerangka kerja konseptual akuntansi keuangan bagi akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Bina Ekonomi, 12(2). https://doi.org/10.26593/be.v12i2.695

Janvrin, D. J., Payne, E. A., Byrnes, P., Schneider, G., & Curtis, M. B. (2012). The updated COSO Internal Control—Integrated Framework: Recommendations and opportunities for future research. Journal of Information Systems, 26(2), 189–213. https://doi.org/10.2308/isys-50255

Karpuz, A., Kim, K., & Ozkan, N. (2020). Does financial reporting regulation influence the value of cash holdings? Journal of Empirical Finance, 59, 52–67. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.09.004

Khokhar, A.-R., Qiu, J., & Rahaman, M. M. (2024). Are firms as liquid as they appear in annual reports? Contemporary Accounting Research, 41(2), 944–975. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12929

Lajoie, P.-L., & Gendron, Y. (2026). The epistemic rise of accounting research in financial economics: A historical study on the conception of the usefulness of accounting. Contemporary Accounting Research. https://doi.org/10.1111/1911-3846.70065

Länsiluoto, A., Jokipii, A., & Eklund, T. (2016). Internal control effectiveness—a clustering approach. Managerial Auditing Journal, 31(1), 5–34. https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2013-0910

Lawson, B. P., Muriel, L., & Sanders, P. R. (2017). A survey on firms' implementation of COSO's 2013 Internal Control–Integrated Framework. Research in Accounting Regulation, 29(1), 30–43. https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.004

Maradona, A. F., & Chand, P. (2018). The pathway of transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in developing countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30*, 57–68. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2017.12.005.

Morris, J. J. (2011). The Impact of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems on the Effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting. Journal of Information Systems, 25(1), 129–157. DOI: 10.2308/jis.2011.25.1.129

Nobes, C. W., & Stadler, C. (2015). The qualitative characteristics of financial information, and managers' accounting decisions: Evidence from IFRS policy changes. Accounting and Business Research, 45(5), 572–601. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1044495

Nurrahma, E. D., Fadilah, N., & Aji, G. (2026). Digital transformation in accounting: A systematic review of new trends. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 5(2). https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3587

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). Managing Digital Security and Privacy Risk. OECD Digital Economy Papers, No. 254. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5jlwt49ccklt-en

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future. OECD Publishing. Dokumen resmi OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e3d783b0-en

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (n.d.). Digital Transformation. Situs resmi OECD

Pacioli, L. (1494). Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità. Venesia. Karya historis yang memuat uraian mengenai metode pembukuan yang digunakan pedagang pada masa itu.

Parera, S. E., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2019). Sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Indonesia Accounting Journal. https://doi.org/10.32400/iaj.26814

Permatasari, T., & Masyhuri. (2026). Peran Sistem Digital dalam Meningkatkan Kejelasan dan Kecepatan Penyusunan Laporan Keuangan pada Entitas Bisnis. Journal of Economic Studies. DOI: 10.66618/0mms0551

Pullareddy, J. R. (2026). Autonomous Financial Close: An AI-Driven Continuous Accounting Framework for Enterprise Systems.

Rahariyanto, B. S., & Rahayu, D. (2022). Analysis of application of cash receipts accounting information system in improving internal control. Indonesian Journal of Innovation Studies, 20. https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.745

Roup, A. (2026). Beyond Dashboards: Verifying ERP-Integrated Decision Support for Digital Accounting. Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 6(2), 135–144. DOI: 10.37641/jabkes.v6i2.3108

Salmon, J. (2020). Introducing the Universal Journal in SAP S/4HANA. SAP PRESS.

Sembiring, S. (2015). Peran kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 15(1), 58–69. https://doi.org/10.54367/jmb.v15i1.99

Shari, P. N., & Badera, I. N. D. (2023). Capital expenditure, kesempatan bertumbuh, volatilitas arus kas dan cash holding. E-Jurnal Akuntansi, 33(6), 1513–1524. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p07

Siauwijaya, R., & Putri, A. (2024). Analysis of influence of financial factors on cash holdings of non-financial companies. Journal of Applied Finance and Accounting, 11(1). https://doi.org/10.21512/jafa.v11i1.9935

Wagner, E. L., Moll, J., & Newell, S. (2011). Accounting Logics, Reconfiguration of ERP Systems and the Emergence of New Accounting Practices: A Sociomaterial Perspective. Management Accounting Research, 22(3), 181–197. DOI: 10.1016/j.mar.2011.03.001

Wangi, E. A., dkk. (2026). Transformasi digital dan perubahan peran akuntan di era modern: A systematic literature review dengan pendekatan PRISMA. Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains, 7(2). https://doi.org/10.36085/jems.v7i2.10992

Yahya, M., & Venusita, L. (2022). The Effect of Internal Control on Fraud Prevention Based on the Cause Factors. Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology, 3(2), 133–148. DOI: 10.37715/jaef.v3i2.2662

# Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital:

## Konsep, Standar, Teknologi, dan Keberlanjutan

**Kasih Purwantini, S.Kom , M.Si**

## BIO DATA PENULIS



Kasih Purwantini S.Kom , M.Si merupakan dosen pada program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Universitas STEKOM Semarang. Menyelesaikan pendiidikan S1 di Universitas STEKOM dan Pendidikan S2 di STIE Dharma Putra Semarang. Memiliki bidang keahlian yang meliputi Akuntansi, Perpajakan, laboratoruim Akuntansi serta Sistem Informasi Akuntansi. Selain kegiatan pengajaran, ahli dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah khususnya pada bidang perpajakan. Beberapa karya ilmiah yang telah di publikasikan antara lain “Systematic Literature Review: Inkonsistensi Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Konsistensi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, :Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderator”.

Dalam pengabdian kepada Masyarakat aktif melaksanakan pelatihandan pendampingan bagi UMKM, khususnya pada bidang akuntansi dan perpajakan.

Saat ini juga aktif dalam pengembangan bahan ajar dan penulisan buku yang mengintregasikan akuntansi, teknologi digital. Salah satu buku berjudul “Akuntansi Keuangan Modern di Era Digital: Konsep, Standar, Teknologi, dan Keberlanjutan”

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

**PENERBIT :**
**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**
**Jl. Majapahit No. 605 Semarang**
**Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144**
**Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id**

ISBN 978-634-7695-67-3 (PDF)
9 786347 695673